

Pengalaman Gerakan Pro Demokrasi di Sulawesi Tengah Tahun 2008

Simpul Sulawesi Tengah FBB Prakarsa Rakyat¹

Latar Belakang dan Konteks

Mimpi tentang reformasi adalah mimpi tentang perubahan. Mimpi tentang “rakyat yang berdaulat secara politik dan berkeadilan secara ekonomi. Tetapi setelah satu dekade berlalu, mimpi itu tetaplah mimpi. Di media massa, para pengamat, baik yang ahli maupun amatiran, lebih sering kedapatan geleng kepala sembari mengerutkan dahi, ketika ditanyakan tentang kontribusi reformasi bagi rakyat. “Tidak banyak yang berubah dalam reformasi, selain demokratisasi prosedural dan wilayah kontrol publik yang mulai terbuka lebar”, nilai mereka.

1 Paper Untuk Lokakarya Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat, Bali, 9-12 Februari 2009. Tim Penulis : Edmond Leonardo, Moh. Masykur, Ferry Anwar, Rudi Asiko, Nasution Camang.

Memang tidak bisa ditampik, reformasi telah berjaya melakukan perubahan politik radikal bernama: demokratisasi dan desentralisasi. Namun perubahan itu ternyata tidak berkorelasi langsung dengan perubahan kesejahteraan rakyat. Pergantian rezim yang dilakukan melalui mekanisme Pemilu demokratis tidak melahirkan pemimpin – baik di pusat maupun daerah – yang memiliki karakter kerakyatan, visioner dan peduli terhadap penderitaan rakyatnya. Wajah parlemen pun demikian, dipenuhi oleh para politisi yang hanya sibuk memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya, sehingga mengabaikan agenda pokok reformasi. Akibatnya, rakyat pun merasakan buah pahit reformasi: “kesengsaraan”.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, demokrasi dan desentralisasi sebagai produk reformasi, telah melahirkan rezim pengobral sumber daya alam, peternak gurita korupsi dan pelestari ironi-ironi sosial.² Ketiga karakter rezim tersebut bertali temali menjadi faktor yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat.

Obral Sumber Daya Alam

Lima tahun terakhir, boleh dibilang sebagai tahun-tahun dimana kuasa modal cukup leluasa melenggang kangkung melakukan ekspansi ke Sulawesi Tengah. Bisnis yang dibidik kebanyakan menukik ke ekstraksi sumber daya alam. Ini terjadi, karena SDA Sulawesi Tengah memang cukup potensial, terutama sektor kehutanan dan migas. Kondisi inilah yang membuat para penguasa setempat (legislatif dan eksekutif) terbuai menggadaikan SDA tersebut ke kuasa modal.

2 Ini adalah tiga isu pokok yang digeluti NGO (elemen pro demokrasi) sepanjang 2007-2008 (diperbaiki lagi redaksinya)

Alasan-alasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di daerah, dikedepankan sebagai amunisi pembenar. Dan Undang-undang No 22/ 1999 tentang Otonomi Daerah, yang berganti menjadi Undang-Undang No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dijadikan alat legitimasi. Karena atas nama desentralisasi, Undang-undang ini memang mendelegasikan sejumlah kewenangan pengelolaan SDA kepada pemerintah daerah.

Hasilnya, lebih dari tiga jutaan hektar atau diatas lima puluh persen wilayah Sulawesi Tengah telah tergadai ke segelintir kuasa modal.³ Tentu saja tak jadi soal jika proses gadai itu benar-benar menjadi berkah bagi kesejahteraan rakyat. Tapi sejauh ini, yang dituai justeru sebaliknya: Ancaman ekologis. Ambil contoh, gejala deorestasi. Hingga saat ini, laju deforestasi hutan Sulawesi Tengah telah mencapai di atas 62.012 hektar pertahun atau 7,2

3 *Pertama*, Kuasa Perkebunan sebanyak kurang lebih 20 perusahaan dengan luar areal konsesi sekitar 93,135 hektar yang tersebar di lima (5) kabupaten. Areal konsesi tersebut diperoleh berdasarkan izin Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Perkebunan berdasarkan SK. Gubernur dan Izin Lokasi melalui SK Bupati, berdasarkan rekomendasi dari instansi perkebunan terkait. *Kedua*, Kuasa Pembalakan sebanyak 14 Perusahaan dengan luas areal konsesi sedikitnya 951,705 hektar, yang diperoleh berdasarkan izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari Pemerintah Pusat. Diluar itu, Pemerintah Daerah – provinsi maupun kabupaten – masih mengeluarkan ratusan izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dengan luasan areal konsesi masing-masing maksimal 10.000 hektar. *Ketiga*, Kuasa Pertambangan. Dalam hal ini, sekitar 6 perusahaan mengantongi izin Kontrak Karya (KK) dari Pemerintah Pusat. Lebih dari 100 perusahaan mengantongi 151 izin Kuasa Pertambangan (KP) dari Pemerintah Daerah, dan 68 perusahaan mengantongi Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Total luasan konsesi mencapai 2.405.162 Ha. Dalam perhitungan sementara Walhi Sulteng, separuh atau lebih dari 1 juta hektar areal KP tersebut, mengambil kawasan hutan. Sumber data Walhi Sulteng, Potret Kehutanan Sulawesi dengan contoh kasus di Kabupaten Morowali laju kerusakan hutan di Morowali antara tahun 2001-2007 mencapai 253.587 hektare atau 42.265 hektare per tahun. Kerusakan itu terutama disebabkan aktivitas penebangan kayu yang sangat atraktif melalui izin HPH, IPK untuk kepentingan pembukaan perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan tambang ditambah pembalakan liar yang di-back up oknum-oknum aparat di wilayah itu

hektar perjam atau 9 kali lapangan sepak bola per jam.⁴ Kondisi ini diperparah pula oleh potensi lahan kritis yang sudah memerlukan penanganan serius, yakni sekitar 413.220 hektar.

Berbarengan dengan itu, banjir dan longsor pun kian menggejala. Sepanjang 2007-2008, lebih dari 100 kasus banjir dan longsor melanda di hampir semua kabupaten/kota dalam wilayah Sulawesi Tengah. Selain *climate change*, laju deforestasi yang banyak disumbang oleh kuasa modal, kata para ahli, menjadi faktor penyebab utama. Akibatnya, ratusan korban jiwa melayang; Ribuan hektar lahan pertanian rusak; Ratusan ternak ditambah ribuan tanaman pertanian tak layak panen. Semua itu kebanyakan milik masyarakat kecil. Kerugian ini belum termasuk jembatan dan jalan poros yang rusak total sehingga memutus jalur transportasi antar wilayah kabupaten/kota.⁵

Selain bencana ekologis, sejumlah akibat-akibat sosial yang mengingkari nilai-nilai Demokrasi, Hak Azasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial, acapkali dirasakan rakyat kecil. Paling tidak, terdapat tiga akibat-akibat sosial yang pada tahun 2003 mencuat secara implisit maupun eksplisit,⁶ dan kecenderungan itu masih sangat niscaya hingga saat ini.

Pertama, kian timpangnya distribusi penguasaan lahan, contoh kepemilikan lahan di Kabupaten Morowali, dimana 109 Kuasa Pertambangan (KP) dimiliki kurang lebih 30 Perusahaan,

4 Hasil analisis YMP dan Walhi Sulteng berdasarkan data citra satelit Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah tahun s/d tahun

5 Lihat: Lita, "Menanti Sejahtera tanpa Bencana harus datang Setiap hari, Catatan Akhir Tahun Kondisi Lingkungan Sulawesi Tengah" dalam Harian Umum Media Alkhairaat, edisi 31 Desember 2008.

6 Kecenderungan akibat-akibat sosial ekspansi modal, didasarkan pada hasil studi Yayasan Merah Putih (YMP) terhadap ekspansi modal di wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batui. Lihat misalnya: "Akibat-akibat sosial KAPET Batui", Laporan Hasil Studi Yayasan Merah Putih, 2003.

inilah contoh timpangnya kepemilikan lahan di Sulawesi Tengah. Sebagai sebuah negeri agraris yang mengandalkan basis produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagai lokomotif ekonomi daerah, kecenderungan ini pada akhirnya menggeser posisi petani (termasuk masyarakat adat) sebagai aktor ekonomi pedesaan yang utama. Hampir sebahagian besar proyek pengembangan pembangunan pertanian dan perkebunan tidak lagi berbasis rumah tangga petani, melainkan kuasa modal.

Kedua, ekspansi kuasa modal juga kian memicu banyaknya konversi hutan dan lahan pertanian rakyat – baik berdasarkan mekanisme pasar maupun tekanan kebijakan – menjadi areal perkebunan besar milik kuasa modal. Konsekuensinya, banyak rumah tangga tani kemudian kehilangan sawah, sehingga proletarisasi pun terniscayakan, dimana sebahagian petani telah menjadi buruh tani atau buruh perkebunan. Sebahagian lagi mengintegrasikan diri ke dalam manajemen produksi perkebunan besar milik kuasa modal dengan posisi sebagai plasma, setengah buruh perkebunan dan setengah petani produsen. Ini menunjukkan, kekuatan ekonomi politik kaum tani dan masyarakat adat kian terpinggirkan.

Ketiga, mencuatnya sengketa-sengketa agraria.⁷ Ini terjadi karena ternyata sebahagian dari lahan yang dibagi kuasakan oleh pemerintah kepada kuasa modal adalah lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat, baik dalam bentuk hak milik maupun klaim hak ulayat. Konflik terutama muncul dalam bentuk reaksi perlawanan atau gugatan petani dan masyarakat adat atas proses pengambil

7 Sekedar gambaran, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pernah mendata, terdapat 71 kasus sengketa agraria yang mengemuka di Sulawesi Tengah dengan luas lahan sengketa sekitar 961.792, 41 hektar. Lawan sengketa terdiri atas 14 pihak pemerintah, 5 militer, 5 Perusahaan Negara dan 47 Perusahaan Swasta. Korban dominan Petani dan Masyarakat Adat. Lihat Laporan Hasil Investigasi Tambang, Hutan dan Perkebunan Di Kabupaten Morowali (WALHI Sulteng, YTM, PBHR), Juli 2008.

alihan lahan yang menggunakan pola-pola atau cara-cara yang tidak demokratis dan tidak manusiawi.⁸

Repotnya, meskipun dampak ekologis dan sosial tersebut sudah terlihat kasat mata, toh para penguasa lokal (eksekutif dan legislatif), masih terus terbuai menggandaikan hutan dan lahan Sulawesi Tengah,⁹ karena perkembangan iklim investasi tersebut, menurut mereka, masih sangat rendah. Protes dan suara-suara kritis yang acapkali dikumandangkan oleh akademisi, masyarakat dan NGO,¹⁰ hampir tak dihirau. Logika bahwa kepentingan daerah dan kesejahteraan rakyat butuh investasi, lagi-lagi “jadi jualan”.

Disebut “jadi jualan”, karena perkembangan investasi tersebut justeru tidak berjalan paralel dengan kesejahteraan rakyat. Yang nampak samar-samar justeru “agenda-agenda tersembunyi” dari elit kekuasaan. Entah sebuah kebetulan atau tidak, yang

8 Beberapa pola-pola yang tidak demokratis dan tidak manusiawi itu antara lain: (1) melegitimasi sejumlah orang warga masyarakat yang telah mendukung proyek sebagai tokoh masyarakat yang mewakili suara seluruh masyarakat desa; (2) memanipulasi tandatangan masyarakat oleh kuasa modal; (3) klaim kepemilikan tanah adat melalui pembuatan sertifikat secara diam-diam, serta penerbitan sertifikat ganda bagi lahan petani yang sudah bersertifikat, seperti pada kasus penyediaan lahan perkebunan sawit PT. KLS di Toili; (4) pembebasan lahan tanpa ganti rugi atau nilai ganti rugi yang tidak memadai; (5) okupasi atau pendudukan diam-diam hutan ulayat (hutan adat) masyarakat adat; (6) penguasaan lahan secara paksa dengan menggunakan bantuan preman, oknum militer, maupun pemerintah setempat.

9 Gubernur Sulawesi Tengah HB. Paliduju, akan memberikan kemudahan bagi para investor yangberminat menanamkan investasinya di Sulawesi Tengah, khususnya untuk investasi batubara, nikel, emas, migas, galena, granit dan Tembaga (The Jakarta Post edisi 30 Juli 2006). Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS), Paliudju men-*stressing* pembangunan infrastruktur, pariwisata dan pengelolaan SDA sebagai tiga program utamanya, sebagaimana dipaparkan dalam pertemuan BKPRS di Makassar, Juni 2008 (Lihat: www.makassarkota.go.id/content/view/1679/138).

10 WALHI Sulawesi Tengah, Serikat Nelayan Banawa, JATAM Sulawesi Tengah memprotes Eksplorasi EXXON di Blok Surumana Kabupaten Donggala, PT INCO, Rio Tinto di Kabupaten Morowali.

pasti sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah, sangat produktif mengeluarkan izin konsesi, khususnya Kuasa Pertambangan dan Izin Pemanfaatan Kayu menjelang akhir jabatan atau mendekati suksesi Pilkada maupun Pemilu.¹¹

Gurita Korupsi

Ketika Tim Kerja (Timja) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pada awal Juni 2006, merilis temuannya tentang sepuluh besar data dugaan korupsi di daerah, ternyata Provinsi Sulawesi Tengah tercatat menempati urutan keempat.¹² Temuan ini bukanlah isapan jempol semata, karena secara faktual praktek korupsi di Sulawesi Tengah, boleh dibilang, memang semakin menggurita.

Jika pada tahun 2006, Timja DPD baru menemukan data dugaan korupsi sebanyak 22 kasus, maka sepanjang tahun 2008, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah sudah menangani kasus jauh di atas itu, kurang lebih 97 kasus. Tidak kurang Rp 141,5 milyar total kerugian negara yang diakibatkannya, dan pihak Kejati hanya mampu menyelamatkan sekitar Rp 5,2 milyar sebagai pemasukan negara bukan pajak. Sisanya, sekitar 97 persen menguap tak tentu rimba. Memang, terdapat 7 kasus yang sudah divonis bersalah, dengan total uang pengganti sebesar Rp 42 milyar, tapi yang tereksekusi baru Rp 13,4 juta. Sungguh memprihatinkan!

11 Hasil Investigasi WALHI Sulteng, PBHR, JATAM Bulan Juli 2008, dari 109 Kuasa Pertambangan (KP) dimiliki kurang lebih 30 Perusahaan yang dikeluarkan ijinnya oleh Mantan Bupati Kabupaten Morowali, Drs Datlin Tamalagi yang kalah pada Pilkada Kabupaten Morowali pada awal tahun 2008. Bupati Kabupaten Morowali yang baru, Drs Anwar Hafid juga mengeluarkan kurang lebih 9 ijin KP pada awal masa jabatannya.

12 Dalam temuan Timja DPD RI yang dirilis 1 Juni 2006, termasuk sepuluh besar data dugaan korupsi di daerah, masing-masing selain Jatim (45 kasus), Jateng (38 kasus), Kaltim (26), Sulteng (22), Sumbar (20), Riau (18), Bengkulu (18), Kalbar, Kalsel, dan Papua masing-masing 14 kasus. "Sulsel dan Bali di urutan berikut dengan 13 kasus," tambahnya.

Dari keseluruhan kasus korupsi yang ada, beberapa kasus yang terbilang besar, menjadi sorotan tajam masyarakat, diantaranya: (1). Kebocoran dana kas Wakil Gubernur Sulawesi Tengah lebih kurang Rp 2,5 miliar; (2). Dugaan penyelewengan dana recovery Poso sekitar Rp 8,5 milyar;¹³ (3). Penggerogotan dana APBD Donggala senilai Rp 84 milyar, yang dilakukan secara berjamaah oleh eksekutif, legislatif, elit birokrasi dan pengusaha.¹⁴ Di luar kasus ini, terdapat banyak kasus lain dengan berbagai macam modus operandi, seperti proyek fiktif, perjalanan dinas fiktif, mark-up anggaran, serta mendepositokan DAU dan DAK.

Disamping komitmen serius Presiden Soesilo Bambang Yudoyono untuk memberantas korupsi, tekanan publik dan aksi-aksi protes elemen gerakan pro Demokrasi dan Organisasi Rakyat yang cukup intensif sepanjang tahun 2007-2008,¹⁵ relatif mempengaruhi responsibilitas aparat penegak hukum terutama Kejaksaan: Proaktif memeriksa para pelaku hingga melimpahkannya sebagian berkas ke pengadilan. Sayangnya, itu hanya berlaku untuk kasus-kasus kecil yang melibatkan pelaku dari oknum pejabatan dan pengusaha kelas rendahan. Untuk kasus-kasus besar yang melibatkan sejumlah pejabat, seperti Bupati, Kepala Dinas, maupun pengusaha berpengaruh dan

13 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menggelontorkan dana sebesar Rp 58 Miliar untuk memulihkan ekonomi warga Poso, namun dalam proses penyalurannya, sebahagian salah sasaran yang diduga sebagai penyelewengan. Penyaluran dana bantuan dikucurkan ke koperasi-koperasi dan biaya pelatihan Pertahanan Sipil (Hansip) hingga mencapai senilai Rp. 8,5 Miliar.

14 Pinjam-meminjam dana Kas Daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Donggala yang dilakukan oleh Eksekutif, Legislatif dan Pengusaha, mengakibatkan Dana Kas Daerah menjadi kosong.

15 Beberapa koalisi yang terbangun dari elemen gerakan Prodemokrasi dibentuk untuk menangani advokasi korupsi, antara lain: Koalisi Rakyat Menggugat (KRM) dan Poso Center. Kerja-kerja advokasi yang dilakukan seperti: membantu aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti yang diperlukan, dialog dan hearing, serta aksi massa.

memiliki hubungan dekat dengan pejabat, proses penanganannya menjadi lamban.

Pola terbang pilih ini, sangat jelas menunjukkan bahwa kompromi politik dan ekonomi masih kental mempengaruhi penanganan kasus-kasus korupsi di Sulawesi Tengah. Menjadi wajar manakala sejumlah oknum pejabat dan pengusaha kelas kakap yang menjadi tersangka kemudian berbahagia karena kasusnya diSP3-kan atau divonis bebas pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding atau kasasi.¹⁶

Ironi-ironi Sosial

Razali Ritonga Kepala Subdirektorat Analisis Konsistensi Statistik, BPS Sulteng, menyatakan besarnya perhatian pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, dapat dilihat dari besarnya dana yang digelontorkan.

Celaknya, meski bantuan untuk penduduk miskin itu datang bertubi-tubi, hasil yang diperoleh belum memuaskan. Selama Maret 2006-Maret 2007, angka kemiskinan hanya turun 0,17 persen, yaitu dari 17,75 persen pada Maret 2006 menjadi 16,58 persen pada Maret 2007. Atau, secara absolut penduduk miskin turun sebanyak 2,13 juta orang, yaitu dari 39,30 juta pada Maret 2006 menjadi 37,17 juta pada Maret 2007.¹⁷

16 Untuk sekedar menyebut contoh kasus, antara lain: penghentian penyelidikan kasus korupsi Bupati Tolitoli dengan alasan tidak cukup bukti, vonis bebas kasus korupsi dana Bank BRI cabang Poso senilai Rp 3,2 milyar yang membuat marah Jaksa Penuntut Umum pada Majelis Hakim hingga *adu jotos*, Dugaan korupsi pengadaan 114 unit Mesin Katinting di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Morowali yang diputus bebas, Dugaan korupsi dan retribusi iuran sampah Kota Palu yang juga diputus bebas.

17 http://sulteng-dev.bps.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=9

Data tahun 2007 mencatat, terdapat lebih kurang 557.400 jiwa penduduk miskin di Sulteng, atau sekitar 22,29 persen dari sekitar 2,5 juta jiwa total penduduk Sulteng. Berbarengan dengan itu, tingkat pengangguran sudah mencapai 65.282 jiwa. Jika hendak dibandingkan dengan mimpi reformasi, kondisi faktual ini adalah sebuah ironi.

Terlepas dari faktor kenaikan BBM, kesulitan menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Sulteng, bisa ditengarai sedikit banyak sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah Sulawesi Tengah yang suka mengobrol SDA. Sejumlah studi menunjukkan, seiring dengan masuknya industri pertambangan dan perkebunan (termasuk pembalakan), banyak lahan-lahan pertanian yang menjadi basis produksi masyarakat, beralih ke tangan kuasa modal. Akibatnya, fenomena petani menjadi buruh tani, pengangguran dan migrasi ke kota untuk bekerja serabutan, menjadi marak.¹⁸

Selain itu, tidak adanya strategi yang jelas dari pemerintah Sulawesi Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan,¹⁹ juga menjadi faktor signifikan kekalnya kondisi kemiskinan. Asumsi ini menjadi logis, jika menyimak pengalaman daerah lain yang menunjukkan keberhasilan mereka menekan angka kemiskinan dikarenakan adanya program dan strategi yang sistematis dan jelas. Kalau pun sejumlah proyek-proyek untuk mengentaskan kemiskinan kemudian digulirkan, sering salah sasaran dan hasilnya tidak signifikan karena perilaku korup rezim.²⁰

18 Lihat misalnya laporan hasil studi Yayasan Merah Putih (YMP), *"Akibat-akibat Sosial Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batui"*, 2003.

19 Lihat misalnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2006 yang dinilai tidak dapat memberikan informasi serta data yang akurat tentang target pengentasan kemiskinan yang telah dicapai.

20 Sebagai contoh, dugaan korupsi proyek pemulihan ekonomi warga proso sebesar dana sebesar Rp 58 Miliar.

Perilaku korupsi juga menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya pelayanan publik khususnya pelayanan sosial dasar yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tengah.²¹ Persoalan kesenjangan sosial, terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan jaminan keselamatan kerja adalah potret ironi-ironi sosial lain yang amat bersahabat dalam keseharian rakyat akibat.²² Dan semua itu menjadi cermin buruknya pelayanan sosial dasar pemerintah.

Transformasi Gerakan

3Walhasil, setelah satu dekade reformasi, pertumbuhan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang “bak jamur di musim hujan,” ternyata hampir tak punya dampak *signifikan* terhadap penyelesaian problem dasar rakyat serta tak punya daya tekan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan bersih, taat HAM dan bebas KKN. Pepatah “anjing menggonggong kafilah berlalu,” ternyata berlaku. Aksi-aksi protes, oleh para pejabat dan elit politik, seolah-olah tak lagi dilihat sebagai *pressure* politik, melainkan “objek wisata”.

Situasi demikian, pada akhirnya mulai menggelitik kesadaran elemen gerakan prodemokrasi di Indonesia untuk meredesain strategi taktik gerakan, dari perjuangan jalanan menuju kompetisi perebutan kekuasaan. Elemen gerakan prodemokrasi di Sulawesi Tengah juga masuk dalam pusaran kesadaran tersebut.

21 Kasus Korupsi dana APBD Donggala senilai Rp 84 milyar serta dana DAK Kota Palu senilai Rp 3,5 milyar, dana *blockgrant* pendidikan Sulteng, sekitar Rp 12 Milyar, hanyalah sebagian kecil contoh betapa anggaran untuk pelayanan publik khususnya pelayanan sosial dasar, acapkali jadi sasaran korupsi. Untuk lebih detail, lihat dokumen Koalisi Rakyat Menggugat, 2007.

22 Protes-protes warga mengenai pelayanan publik seperti Kesehatan juga masih terjadi pada tahun 2008, demikian juga dengan pelayanan air bersih dan pendidikan

Dan kesadaran itu kian menguat setelah proyek demokratisasi telah menciptakan kebijakan-kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung membuka ruang itu.

Pertama, sistem multi partai. Meskipun settingnya diarahkan menuju penyerdehanaan jumlah partai melalui mekanisme electoral threshold (ET), namun sistem multi partai yang masih dianut oleh paket UU Politik kita,²³ dinilai masih dapat dijadikan ruang bagi elemen gerakan pro demokrasi untuk merebut kekuasaan. Paling tidak, elemen gerakan prodemokrasi memiliki kesempatan membuat partai politik sesuai cita-cita dan ideologinya, sebagai kendaraan politik untuk berkompetisi di ruang kekuasaan. Banyaknya jumlah partai baru yang terdaftar sebagai konsekuensi dari diberlakukannya paket UU Politik tersebut, juga dapat menjadi satu peluang. Sebab dengan begitu, bursa calon legislatif akan terbuka luas, terhadap mana elemen gerakan prodemokrasi dapat memanfaatkannya.

Kedua, calon perseorangan. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, kian memamperteguh semangat elemen gerakan prodemokrasi dalam proses transformasi gerakan dari ekstra parlementer menuju gerakan politik kekuasaan. Bagaimana tidak, Undang-Undang tersebut telah membuka pintu bagi masuknya calon perseorangan pada Pilkada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, terbuka kesempatan bagi aktivis prodemokrasi ikut berkompetisi dalam Pilkada.

Ketiga, suara terbanyak. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu dan memberikan peluang bagi calon anggota legislatif (caleg) terpilih harus meraih suara terbanyak,

23 Lihat misalnya, UU Partai Politik No. 2/2008 dan UU Pemilu No.10/2008.

adalah peluang lain yang muncul belakangan. Setidaknya, aktivis prodemokrasi yang hendak menjadi caleg pada partai lain, punya kesempatan yang sama dengan caleg yang berasal dari pengurus partai tersebut dalam hal peluang terpilih atau tidak terpilih. Sebab sistem nomor urut yang selalu menempatkan pengurus partai sebagai nomor urut jadi, tak lagi dipakai.

Bergerak ke Ranah Kekuasaan

Dalam perspektif sosiologi politik, kekuasaan adalah alat ampuh bagi perubahan sosial. Corak dan karakter perubahan sosial amat ditentukan oleh sang pemegang kekuasaan. Keyakinan terhadap asumsi ini kian mengkristal dikalangan aktivis gerakan Prodemokrasi setelah menyimak produk sosial reformasi yang diciptakan oleh elit-elit kekuasaan. Dalam peta gerakan prodemokrasi di Sulawesi Tengah, kelompok aktivis yang berkeyakinan demikian cukup dominan. Kondisi ini pada akhirnya mewarnai corak gerakan prodemokrasi di Sulawesi Tengah dalam dua tahun terakhir.

Sepanjang 2007 – 2008, setting gerakan prodemokrasi, boleh dibilang mulai diperlebar ke ranah politik kekuasaan, tanpa menafikan model gerakan sebelumnya. Tekadnya, ruang politik yang terbuka, tidak bisa tidak, sudah mesti diintervensi dalam bentuk kongkritisasi peran dan posisi politik secara lebih nyata. Singkatnya, transformasi gerakan ekstra parlementer ke dalam kancah pertarungan politik kekuasaan adalah sebuah keniscayaan. Sebab realitas gerakan di luar pusaran kekuasaan yang dilakukan selama ini, dianggap tidak cukup kuat untuk mendekonstruksi bangunan politik dan perilaku elit politik agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Paling tidak, terdapat empat bentuk kerja-kerja politik konkrit yang bisa dijadikan penanda transformasi gerakan ke ranah kekuasaan, yakni: membangun front politik, membangun partai politik alternatif, kompetisi pilkada dan diaspora politik.

Membangun Front Politik

Pembangunan front politik bersama, boleh dibilang selalu menandai langkah awal elemen gerakan prodemokrasi di Sulawesi Tengah dalam memulai gerakannya ke ranah kekuasaan. Pembangunan front politik bersama diyakini menjadi salah satu prasyarat utama yang harus dipenuhi, terhadap mana seluruh kekuatan organisasi dan individu diakomodir.

Persatuan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah.

Jika merunut ke belakang, kecenderungan transformasi gerakan elemen prodemokrasi di Sulawesi Tengah ke ranah politik kekuasaan, sesungguhnya tak bisa dilepaskan dari sejarah kehadiran dan dinamika internal Persatuan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (PRMST). Kehadiran PRMST adalah buah dari perenungan dan otokritik atas situasi internal yang melanda elemen gerakan prodemokrasi pada awal tahun 2000-an.

Liberalisasi politik dinilai telah mengkungung elemen prodemokrasi dalam gerakan yang fragmentaris, sehingga cenderung kehilangan daya tekan dan lambat laun menemukan dirinya terpinggirkan sebagai aktor signifikan dalam mempengaruhi dinamika politik lokal. Tegasnya, liberalisasi politik tidak berkorelasi langsung pada penguatan konsolidasi di tingkat gerakan. Padahal, semestinya liberalisasi politik itu berdampak positif pada dinamika internal kaum pergerakan. Tapi faktanya, elemen gerakan prodemokrasi justeru mengalami kegamangan menghadapi perubahan politik yang terbuka, sehingga gagap dalam menentukan sikap. Akibatnya, gerakan menjadi mandeg dan terfragmentasi satu sama lain. Boleh dikata konsolidasi jalan di tempat, jika naif disebut gagal.

Kondisi ini membuat sejumlah aktivis prodemokrasi bersepakat untuk mengkonsolidasi diri dalam sebuah organ

bersama, bernama Front Persatuan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (FPRMST).²⁴ Kehadiran organ ini, sebagai front aksi bersama, relatif mampu memperkuat kembali daya tekan elemen gerakan prodemokrasi. Karena efektifitas daya tekan FPRMST itulah, lebih lanjut melahirkan kebutuhan untuk mempermanenkannya menjadi sebuah organisasi massa secara lebih sistemik dengan struktur dan program kerja yang konkrit.

Walhasil FPRMST dari hanya sekedar front aksi kemudian berubah menjadi Persatuan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (PRMST) sebagai organisasi permanen yang ditandai oleh keanggotaan,²⁵ struktur dan program kerja yang jelas sebagai alat perjuangan politik bersama.²⁶ Sejak kehadirannya tahun 2002, PRMST telah melakukan tiga kali kongers,²⁷ dan dalam perjalanannya, secara internal mengalami pasang surut yang cukup hebat dalam hal konsolidasi prodemokrasi dan sturktur. Hampir setiap kongres mengalami perubahan stuktur keanggotaan. Pada kongres terakhir, struktur keanggotaan berubah menjadi keanggotaan individu. Dalam bentuknya yang terakhir, PRMST kemudian menemukan dirinya jalan ditempat.

24 Organisasi ini dibentuk pada 2002 sebagai respon perlawanan atas kebijakan Neolib rezim Mega-Hamzah dan beranggotakan sebanyak 30 organisasi yang terdiri dari Partai Politik, NGO dan organisasi masyarakat Adat, Ormas sektoral, yakni Buruh, Tani, Nelayan, dan Mahasiswa.

25 Pada kongres pertama PRMST tahun 2002; tercatat 32 organisasi, NGO dan puluhan tokoh individu pro demokrasi yang gabung. Diantaranya; Walhi Sulteng beserta jaringannya, NGO perempuan, organisasi masyarakat adat, organisasi petani dongi-dongi, serikat petani, Front Organisasi Buruh, serikat nelayan teluk palu, Kelompok Miskin Kota, organisasi mahasiswa.

26 Dalam kongres I PRMST, 2002, dihasilkan dokumen yang berisi tuntutan program mendesak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sulteng; berisikan 2 bagian; program tuntutan politik dan program tuntutan ekonomis.

27 Kongres III PRMST, dilaksanakan 27 Juli 2007 di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

Kendati demikian, sebelum menemukan dirinya jalan ditempat, kehadiran PRMST paling tidak telah mampu mendinamisir kembali gerakan perlawanan bersama elemen prodemokrasi sehingga berdaya tekan kuat. Secara nasional, PRMST tercatat sebagai satu-satunya organisasi front lokal pertama yang ada di Indonesia yang melakukan kampanye dan gerakan perlawanan menuntut pembubaran pemerintahan megawati dan membentuk pemerintahan rakyat miskin.²⁸ Selain itu, aksi-aksi gugatan terhadap persoalan lokal juga dilakukan.²⁹ Keseluruhan aksi tersebut, meskipun menitik pada satu sektor tertentu namun melibatkan semua sektor rakyat, terutama organisasi buruh, nelayan, tani, kaum miskin kota, mahasiswa dan organisasi rakyat lainnya.

Keberadaan PRMST betul-betul menjadi oposisi terhadap pemerintahan terutama pemerintahan daerah. Bahkan dalam beberapa pemberitaan media ataupun diskusi politik, pertarungan politik kekuasaan yang terjadi di sulteng seolah-olah dilakukan

28 Gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Megawati dilakukan dengan aksi mobilisasi massa hingga ribuan orang. Ketika Pemerintahan Megawati mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM, tahun 2002, aksi massa turun ke jalan dilakukan hampir setiap bulan, diikuti pembakaran foto Megawati dan Hamza Haz. Kedatangan Presiden Megawati tahun 2002 untuk menghadiri hari Kesetiakawanan Sosial di Kab. Poso (Sulteng) menjadi puncaknya. PRMST melakukan aksi massa dengan mebolisasi ribuan massa berniat mendatangi bandara mutiara palu untuk memboikot kedatangan Megawati dan menuntut pembubaran pemerintahan Megawati dan mengganti dengan Pemerintahan Rakyat Miskin. Aksi tersebut berlanjut hingga terjadi bentrok dengan Satuan Tugas (Satgas) dan anggota PDIP Sulteng di depan Kantor DPD PDIP Sulteng, ketika massa aksi sedang berjalan menuju titik finis aksi. Bentrok tersebut mengakibatkan hancur leburnya kantor DPD PDIP Sulteng, terjadi bentrokan fisik antara massa PRMST dan Aparat Kepolisian hingga 13 anggota PRMST ditahan/dipenjara selama 8 bulan dengan tuduhan melakukan pengrusakan kantor DPD PDIP Sulteng.

29 Beberapa diantaranya, aksi mendukung reclaiming oleh petani di Taman Nasional Lore Lindu, aksi terhadap penolakan bagang besar di teluk Palu, aksi penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), aksi terhadap masalah Transmigrasi Sibado.

oleh 2 kubu. Kubu yang menguasai pemerintah daerah (Partai Golkar) dan kelompok oposisi (PRMST).

Patut dicatat, kendati telah mentransformasi diri sebagai organisasi massa yang menjadi wadah perjuangan politik rakyat, namun pilihan taktik perjuangan PRMST masih berkuat dipusaran gerakan ekstra parlementer. Keniscayaan untuk bergerak ke ranah politik kekuasaan barulah menjadi wacana kuat memasuki awal tahun 2007,³⁰ kemudian diperkuat sebagai keputusan politik bersama dalam Kongres III PRMST. Ada tiga alasan pokok yang melatarinya:

Pertama, tidak tuntasnya agenda reformasi yang dijalankan oleh elit politik. Keberhasilan gerakan rakyat menumbangkan kekuasaan rezim Orba tidak serta merta menghancurkan warisan struktur kekuasaan politik yang ditinggalkannya. Golkar sebagai salah satu mesin politik Orba tidak turut mengikut induk semangnya. Malah, mesin politik ini berhasil merestorasi diri³¹.

Kedua, tidak adanya alat politik yang menjadi sandaran bagi kelompok pro demokrasi sehingga kelompok ini tetap menjadi kekuatan penggonggong yang berada di jalan. Kelompok

30 Di antaranya, hasil diskusi akhir tahun Desember 2007, yang dilaksanakan di YMP Palu dan diskusi yang diselenggarakan oleh ED Walhi Sulteng, Maret 2008 di Baruga Dedeng Alwi. Wacana tersebut kerap menjadi kesimpulan dalam evaluasi gerakan NGO di Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Kesimpulannya, saatnya, NGO bertransformasikan dari gerakan social menjadi gerakan politik. Sebab, dengan tetap bersikeras mengambil peran posisi di luar sistem tetap saja produk kebijakan politik tidak merubah situasi yang ada. Malah yang terjadi sebaliknya, perselingkuhan politik antara modal, birokrat, politisi bermula dari institusi resmi negara. Dampaknya, tetap saja aneka persoalan social, ekonomi, politik, ekologis, dll tidak terselesaikan.

31 Dalam konteks politik lokal, Partai Golkar merupakan kekuatan politik dominan di Sulawesi Tengah. Baik di DPRD Propinsi maupun di 9 Kota/Kabupaten perolehan kursinya terbanyak. Pengecualian di Kab. Poso, Partai Golkar berada di bawah Partai Damai Sejahtera (PDS). Sementara munculnya beberapa partai-partai baru tidak merubah peta politik local secara signifikan.

ini memiliki kekuatan yang tetap diperhitungkan oleh elit politik. Tetapi dikarenakan posisinya di luar, tetap saja tidak mampu merubah karakter politik dan kebijakan lokal yang anti rakyat.

Ketiga, di luar itu, secara normatif terjadi perubahan aturan perundang-undangan, diantaranya, revisi UU 22/1999 tentang Otonomi Daerah menjadi UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah yang salah satunya mensyaratkan dilakukannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Di kalangan kelompok pro demokrasi perubahan tersebut dianggap sebagai ruang politik yang sedapat mungkin juga bisa diintervensi.

Namun, sebagai organisasi massa rakyat miskin—bukan partai-- tentunya PRMST, tidak memiliki syarat untuk ikut berkompetisi sebagai mana disyaratkan dalam UU 32/2006. Sebagai langkah kongkritisasi terhadap program tersebut, dilakukan dalam bentuk *blocking* politik. Bagaimana bentuknya, tertutup atau tidak, tergantung dialektika selanjutnya. Yang jelas, Kongres mengamanatkan kepada pengurus eksekutif,³² untuk melakukan penggalangan dukungan dan loby politik. Ketika itu, dalam mengimplementasikan langkah-langkah politik dibangunlah diel politik dengan beberapa elit lokal. Di antaranya yang disasar adalah Maulidin Labalo³³.

32 Kongres III PRMST memilih Aristas dan Fery Anwar sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal periode 2007-2010

33 Diel politik yang dibangun dengan Maulidin Labalo ini PRMST menyodorkan Moh. Ridha Shaleh sebagai satu paket wakil. Namun, langkah ini tidak ditindak lanjuti keburu Moh. Ridha Shaleh terpilih sebagai komisioner Komnas HAM. Menjelang Pilkada, Eksekutif PRMST kembali coba merajut hubungan yang sebelumnya terputus tetapi tidak berjalan efektif karena yang bersangkutan telah membangun paket dengan calon lain.

Front Politik Elektoral

Meski PRMST kemudian telah menemukan dirinya jalan di tempat, kehadirannya telah berkontribusi besar sebagai katalisator dalam mendorong transformasi gerakan dari ekstra parlementer ke gerakan politik merebut kekuasaan. *Stagnasi* yang melanda PRMST, diakui dikarenakan *segregasi* sikap politik anggota sebagai akibat dari segregasi sikap politik elemen gerakan prodemokrasi pada level nasional dalam menyikapi Pemilu 2009.³⁴ Untungnya *stagnasi* ini tidak sampai mematikan roh gerakan politik kekuasaan.

Sebagian besar aktivis prodemokrasi masih cukup bersemangat untuk bertarung dalam politik elektoral, baik Pilkada maupun Pemilu Legislatif (DRPD, DPR RI dan DPD). Bahkan efektifitas PRMST sebagai front politik bersama, kemudian menjadi inspirasi bagi terbangunnya front-front politik elektoral, sebagai mesin politik yang bersifat temporer. Pasca stagnasi PRMST, tercatat sejumlah front politik yang dibangun dalam rangka merespon politik elektoral, diantaranya: Front Perjuangan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah, sebagai mesin politik calon perseorangan dari aktivis pro demokrasi, Aristan-Mutmainah (AMANAHA) dalam berkompetisi di Pilkada Donggala; Front politik demokratik.

Secara garis besar tujuan front politik tersebut ada dua (2): *Pertama*, menyatukan kekuatan dengan menggalang kerjasama dari seluruh unsur gerakan rakyat yang demokratik dan anti imperialisme sebagai kekuatan politik baru di daerah. Di dalamnya termasuk memperkuat organisasi, program dan basis pengorganisasian dan pendidikan politik untuk massa;

Kedua, menciptakan alat perjuangan bersama yang dapat menjawab kebutuhan untuk merebut semaksimal-maksimalnya

34 Sikap politik yang terbelah ini adalah sikap yang sebagian mendukung respon Pemilu 2009 serta ada juga yang bersikap untuk tidak merespon Pemilu 2009.

ruang demokrasi borjuis, termasuk memenangkan tokoh sektor rakyat, aktivis prodemokrasi masuk ke parlemen yang dimanfaatkan untuk tujuan perjuangan yang lebih besar yaitu, merebut seluruh kekuasaan untuk kepentingan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tahapan pembangunannya dimulai dengan mendiskusikan tentang fenomena aktivis pro demokrasi yang menjadi kandidat dan tanggapan organisasi sektor rakyat. Dari diskusi ini disimpulkan bahwa penting memenangkan kandidat aktivis. Bukan hanya sekedar agar rakyat mempunyai wakil yang bisa lebih baik.

Selanjutnya dibentuk tim kerja persiapan pembangunan front yang bertugas menyiapkan materi-materi pertemuan besar serta menggalang organisasi rakyat serta organisasi prodemokrasi di sulteng agar kelompok yang tergabung dalam front lebih besar.

Dari pertemuan besar tersebut disepakati; prinsip front politik adalah front terbuka yang mampu mengakomodir kekuatan organisasi-organisasi ataupun individu yang sepakat dengan program-program perjuangan, bersedia untuk berjuang bersama, dan berkomitmen menjalankan aktivitas-aktivitas dari front persatuan. Olehnya, secara prinsipil sistem dan mekanisme demokratis dalam merumuskan dan menetapkan segala keputusan dalam aktifitas perjuangannya.

Untuk menjalankan Front, secara organisasional dibangun struktur yang terdiri dari komite pelaksana harian untuk menjalankan program kampanye, mengkoordinir kerja anggota front serta memberi dukungan untuk kerja-kerja anggota front. Sedangkan anggota front yang terdiri dari organisasi dan individu akan melancarkan kerja penguatan pengorganisasian dan organisasi massa serta melakukan pendidikan bagi massa.

Pengambilan keputusan dilaksanakan dalam satu rapat yang melibatkan seluruh perwakilan anggota front. Keputusan

dalam rapat bersama itu kemudian diterjemahkan oleh komite pelaksana harian dalam rapat Komite Pelaksana Harian.

Membangun Partai Alternatif

Membangun partai alternatif sebagai mesin politik sendiri adalah salah satu bentuk eksperimen awal yang dilakukan oleh elemen gerakan prodemokrasi dalam mengkonkritnya kerja-kerja gerakan menuju ranah kekuasaan, khususnya dalam merespon Pemilu 2009. Pada awalnya eksperimentasi politik ini bermula dari wacana yang menguat di lingkungan Walhi (level nasional) yang hendak membentuk sayap politik berupa “partai hijau”. Dalam kaitan itu, elemen prodemokrasi di Sulawesi Tengah segera meresponnya dengan menjadikan PRMST sebagai sayap politik walhi pada tingkat lokal.

Sayangnya, konsolidasi politik elemen gerakan prodemokrasi yang carut-marut ditambah keragu-raguan yang *over* dari Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional Walhi dalam menentukan sikap,³⁵ menjadikan PRMST mengundurkan diri sebagai sayap politik Walhi. Bersamaan dengan itu, konsolidasi politik elemen gerakan prodemokrasi yang gagal pada akhirnya mengakibatkan penyempalan gerakan politik kekuasaan ke dalam 2 partai politik alternatif: Partai Perserikatan Rakyat (PPR) dan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas).

Situasi demikian membuat anggota PRMST menjadi gamang. Wacana menjadikan PRMST sebagai partai lokal sempat

35 Beberapa keraguan itu dikarenakan masih terjadinya pro kontra di jajaran anggota Walhi secara Nasional. Walhi pada akhirnya hanya membentuk Badan Pelaksana Persiapan Pembentukan Organisasi Kerakyatan (BP3OPK). Aristan, selaku ketua PRMST masuk sebagai salah Kordinator Region Sulawesi-Maluku, yang belakangan mengundurkan diri karena menilai kerja-kerja BP3OPK lamban dan hanya didukung setengah hati oleh Eknas Walhi.

menguat, tapi terkendala oleh Undang-Undang Partai Politik. Pada akhirnya diputuskan untuk menjadi bagian dari Partai Nasional yang tengah digagas oleh elemen gerakan prodemokrasi di Jakarta. Dan anggota PRMST pun kemudian menyempal membangun PPR dan Papernas di Sulawesi Tengah.³⁶ Menariknya, jika PPR dan Papernas relatif sulit bergerak bersama pada tingkat pengurus nasional, di Sulawesi Tengah malah mampu bergandengan tangan dalam pembangunan partai

Mandat untuk membangun partai sendiri sebagai partai alternatif, didasari oleh penilaian tidak adanya partai politik yang benar-benar mampu memperjuangkan hak-hak rakyat, baik program dan tindakannya. Partai yang ada hanya dianggap sebagai alat untuk mendapatkan jabatan politik oleh elit, bukan menjadi perebutan kekuasaan politik bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu dengan membangun partai sendiri maka bukan hanya pengambilan keputusan, tapi arah/tujuan, program, tindakan partai pasti lebih berpihak kepada rakyat. Bahkan PPR khusus dibangun untuk menjadi perahu-perahu politik rakyat, karenanya setiap pengurus PPR tidak akan maju menjadi calon legislatif (Caleg). Caleg yang akan diusung adalah tokoh-tokoh pejuang di sektor-sektor rakyat.

Sebagai partai alternatif, proses pembangunan PPR dan Papernas mempunyai model atau tahapan yang sama dan tentu saja berbeda dengan pembangunan partai baru lainnya. Selain itu, PPR dan Papernas memiliki program dan basis-basis pengorganisasian

36 Salah satu penyebab terbelahnya kelompok Prodemokrasi disebabkan pengaruh secara nasional terhadap pembangunan partai; dimana PPR yang sebelumnya masih berbentuk forum diskusi politik “bandung” berubah menjadi partai; ditengah papernas juga belum menapaki tahap pembangunan struktur partai, masih dalam penawaran gagasan; beberapa kelompok prodemokrasi yang sebelumnya mengikuti forum diskusi politik terlibat selanjutnya kedalam PPR, dan kelompok prodemokrasi yang lain bergabung dalam pembentukan papernas (lihat organisasi diatas yang tergabung ke PPR maupun Papernas).

dalam pembangunan partai yang relatif sama. Secara singkat, tahapannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, tahap pendirian partai. Tahap ini dimulai dengan menawarkan gagasan pembangunan partai kepada kelompok-kelompok organisasi rakyat. Pelibatan seluruh kelompok masyarakat sejak awal pendirian partai dirasa penting, sehingga semua pihak merasa berperan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan partai secara keseluruhan. Setelah seluruh kelompok organisasi rakyat bersepakat,³⁷ maka dibentuklah kelompok kerja persiapan pembangunan partai yang dibagi dalam dua kelompok besar: (1) kelompok pembangunan partai secara formal agar dapat lolos menjadi peserta pemilu 2009; (2) kelompok pembangunan dan penguatan basis-basis organisasi rakyat. Ini dikarenakan tujuan pembangunan partai bukan sekedar mengikuti Pemilu tapi juga dijadikan memontum memperkuat kesadaran perjuangan politik ditingkat rakyat.³⁸ Karenanya struktur partai pun dibuat agar bisa menjalankan dua (2) agenda diatas, yakni penyiapan syarat *administratif* dan pembangunan basis-basis organisasi rakyat.³⁹

37 Organisasi/Kelompok yang bergabung membuat Papernas diantaranya: Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (LMND), Serikat Tani Nasional (STN), Serikat Rakyat Kaum Miskin Kota (SRMK), Front Nasional Perjuangan Buruh (FNPBI) Sulteng, Aliansi Masyarakat Adat Sulteng (Amasuta); Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR); Persatuan Rakyat Miskin (PRM) Sulteng; Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulteng; Kab. Donggala (Kelompok petani Sibado; Pemuda Pombewe); Kab. Buol (Aliansi Masyarakat Untuk Demokrasi; Forum Pemuda tani; Forum Mahasiswa Buol); Kab. Morowali (Forbes); serta beberapa individu Ngo yang berada di Kota/Kab di sulteng juga terlibat. Sedangkan Organisasi/Kelompok yang bergabung membuat PPR diantaranya; Kota Palu (Sapukopa; Organisasi Becak; Pedagang Kaki Lima; Serikat Perempuan Lembah Palu; Kab. Donggala (Yayasan Bunebula); Kab. ToliToli (Serikat Tani-Nelayan ToliToli); serta beberapa individu Ngo yang berada di Kota/Kab di sulteng juga terlibat.

38 Untuk Papernas, mulai berlangsung Bulan Januari 2008.

39 Baik Papernas maupun PPR dibanyak struktur tingkatan formal partai, terutama struktur kota/kab dan kecamatan, pengurusnya terdiri dari Ketua – Sekretaris – Bendahara. Hal ini untuk mengantisipasi secara verivikasi administratif untuk

Kedua, tahap pembangunan struktur partai. Berbeda dengan partai lain yang dimulai secara *top down*, pembangunan struktur PPR dan Papernas dilakukan secara *bottom up*, dimulai dari struktur pemerintahan terendah (desa dan kecamatan) oleh panitia persiapan atau pengurus sementara yang berbasis di provinsi.⁴⁰ Dalam proses pembangunan struktur, juga dilakukan sosialisasi tujuan pembangunan partai dan mengumpulkan bahan-bahan untuk program tingkat daerah partai, sehingga semua kepentingan sektor rakyat dapat diperjuangkan bersama.

Ketiga, tahap pembangunan kesadaran perjuangan politik rakyat. Hal ini dilakukan melalui rangkaian diskusi, pertemuan, pendidikan yang bertujuan mendidik politik rakyat.⁴¹ Rakyat diajak untuk melihat perjuangan politik menjadi hal penting dalam merubah nasibnya. Merespon pemilu sebagai perebutan kekuasaan secara legal adalah salah satu taktik yang harus dikerjakan dan dimenangkan oleh rakyat. Selain itu dalam pembangunan partai, beberapa organisasi di tingkat lokal dibangun untuk menjadi wadah bagi rakyat.⁴² Bahan-bahan bacaan, seperti

menjadi peserta pemilu 2009. salah satu alasan teknis struktur dibuat seperti ini karena rata-rata pengurus ataupun orang-orang yang bekerja membuat partai tidak mempunyai Kartu tanda penduduk (KTP) ditengah waktu menjelang batas verifikasi untuk menjadi peserta pemilu semakin dekat.

- 40 Jika struktur di tingkat desa atau kecamatan telah terbentuk, baru dilakukan kongres (musyarah) pengurus kecamatan untuk membentuk Pengurus pada tingkat kabupaten. Selanjutnya melakukan kongres (musyawarah) pengurus kabupaten untuk membentuk pengurus tingkat provinsi.
- 41 Papernas selama 6 bulan tercatat melakukan sebanyak 7 kali pendidikan politik yang dilaksanakan di Kota Palu; Donggala; Morowali dan Buol, PPR juga menggelar diskusi-diskusi di Serikat Pemulung Kota Palu (Sapukopa) tiap minggu.
- 42 Diantaranya PPR membangun Serikat Tani Tanah Poso (Setatap); Serikat Nelayan Tanah Poso (Senatap); Serikat Perempuan Tanah Poso (Sepenatap); Di kota Palu (Sapukopa) organisasi pemulung di kota palu. Papernas membangun; Serikat Petani Morowali; Organisasi Pemuda Buol. Setelah PPR dan Papernas gagal menjadi peserta pemilu 2009; masih ada beberapa

leaflet-selebaran-buletin juga didistribusikan ke basis-basis pengorganisasian, sekalipun masih terbatas dalam jumlah dan kontinuitas.⁴³ Melakukan diskusi-diskusi dan pendidikan politik.

Dalam proses pembangunan partai tersebut, tidak berarti meninggalkan respon terhadap masalah-masalah ekonomis di tingkat lokal yang dihadapi oleh masyarakat. Aksi-aksi menuntut tetap dilakukan,⁴⁴ meski mengalami penurunan frekuensi. Bersamaan dengan itu, bloking politik juga mulai dilakukan dalam merespon Pilkada. Bloking politik dilakukan kepada calon bupati dan wakil bupati yang dianggap memenuhi kriteria bersih dan demokratis dengan program yang jelas-jelas untuk kesejahteraan rakyat.⁴⁵ Aksi-aksi protes dan bloking politik ini juga dijadikan sebagai panggung kampanye lebih terbuka dan meluas dalam rangka mensosialisasikan program-program partai. Cara ini diharapkan dapat mendukung pengembangan struktur dan anggota partai.

Tapi tentu saja pembangunan partai tidak semudah yang diidealkan. Sejumlah tantangan menyertai pengalaman membangun PPR dan Papernas. Disamping faktor logistik dan geografis, faktor sikap dan budaya politik masyarakat ikut menyulitkan. Misalnya,

organisasi diatas yang tetap bertahan dan terus beraktifitas diantaranya organisasi Sapukopa.

- 43 Papernas selama 6 bulan pengerjaan pembangunan partai menerbitkan 7 edisi Koran yang diberi nama Berdikari; mencetak 5000 selebaran; mendistribusikan 20 bundel tiap kota/kab materi-materi pendidikan politik. PPR mendistribusikan buku tentang sejarah – tujuan – program dan cita-cita pembangunan partai PPR.
- 44 Diantaranya aksi yang dilakukan oleh struktur Papernas Kabupaten Buol; beraliansi dengan rakyat; sebanyak 150-an massa melakukan aksi ke Kantor Bupati dan DPRD Buol meminta penyediaan air bersih untuk masyarakat Kelurahan Kali, Kabupaten Buol
- 45 Papernas melakukan bloking politik di dua (2) Pilkada yang dilaksanakan di Sul-teng; Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol (mendukung pasangan Samsudin Koloi-Patta Badalu) dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Morowali (mendukung pasangan Anwar Hafid)

pemahaman politik rakyat yang masih kurang. PPR dan Papernas, secara apriori diidentikkan seperti partai-partai yang ada, yang hanya muncul saat pemilu, merayu rakyat untuk memberikan suaranya dan meninggalkan rakyat setelah mendapatkan jabatan politik. Selain itu, tidak adanya figur yang memiliki ketokohan nasional, turut memperlemah daya magnet PPR dan Papernas.

Kendati dibelit dengan berbagai keterbatasan dan tantangan, *toh* akhirnya pembangunan partai alternatif sukses dilakukan. Pada level propinsi, PPR telah dinyatakan memenuhi syarat administratif. Sayangnya, secara nasional keduanya, PPR dan Papernas dinyatakan tidak lolos oleh Departemen Hukum dan HAM RI.

Pertarungan Pilkada Donggala

Keluarnya UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, membuat elemen gerakan prodemokrasi menemukan akses politik baru untuk bergerak ke ranah kekuasaan lokal. UU tersebut membuka pintu masuknya calon perseorangan pada Pilkada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Keinginan untuk menyertakan wakil dari garis aktivis prodemokrasi berkompetisi dalam Pilkada Donggala, segera menguat.

Konsolidasi awal digagas⁴⁶ untuk melihat pembacaan geo politik wilayah Kab. Donggala dan peluang-peluang yang bisa dikalkulasi sesuai dengan kemampuan sumberdaya internal yang dimiliki. Dalam pertemuan tersebut, secara prinsip diputuskan bahwa kelompok prodem saatnya maju bertarung dengan menggunakan jalur calon perseorangan. Mencalonkan diri sebagai

46 Konferensi ini diinisiasi oleh ED Walhi Sulteng bertempat di Baruga Dedeng Alwi, 4 Mei 2008

calon perseorangan harus butuh alat bersama dan pilihannya Front Perjuangan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah.⁴⁷

Langkah selanjutnya, menghitung paket yang akan diusung, Bupati dan Wakil Bupati. Apakah maju bersama dengan menggandengkan tokoh lain, atau maju dengan paket sendiri. Pilihan tersebut menuai perdebatan, sebagian menginginkan perlunya menggandeng tokoh lokal dengan berdasarkan pada beberapa kriteria, seperti popularitas, memiliki integritas yang tidak diragukan, latar belakang yang bersih (dll) untuk diusung sebagai calon Bupati. Sementara sebagian lainnya tetap bertahan dengan pilihan tidak harus menggandeng calon lain tapi mengusung calon dari paket sendiri. Konferensi memutuskan bahwa siapa pun boleh bekerja menggalang dukungan dan mencari tokoh yang bersedia diusung berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Namun, sampai batas waktu yang ditetapkan, kelompok yang menginginkan pilihan yang pertama tidak berhasil. Sehingga pada akhirnya, pilihan jatuh pada keputusan untuk tetap maju bertarung dengan mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati dari kalangan sendiri. Hal yang dijadikan pertimbangan dengan mengusung calon sendiri adalah mampu mengkonsolidasikan kembali kelompok-kelompok pro demokrasi yang selama ini terfragmentasi sekaligus menguji kekuatan dan kemampuan atas investasi gerakan yang dibangun selama ini.⁴⁸ Maka konferensi memutuskan Aristan dan Mutmainah Korona sebagai calon

47 Organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah, yakni, Papernas, PPR, PRMST, ED Walhi Sulteng, Kontras, YTM, YMPP, PBHR Sulteng, SRMK, LMND, YPR, Jatam Sulawesi, KPPA, Yammi, SP Palu, KPKPST, Serikat Tani Silota, Amasuta, Amak Kamalisi, SNTP,

48 Pertimbangan yang kedua tersebut dinilai spekulatif dan seolah mengabaikan kekuatan politik lama yang secara obyektif memiliki infratraktur politik masih kokoh dan didukung dengan kekuatan dana.

Bupati dan Wakil Bupati lewat jalur perseorangan dari kalangan pro demokrasi.⁴⁹

Langkah selanjutnya, mempersiapkan pembentukan struktur organisasi sebagai mesin pemenangan. Kemudian untuk mengkampanyekan calon yang diusung dipilihlah nama dengan akronimi “AMANAHA CS” yang berarti Adil, Makmur, Aman, Hijau, Cerdas dan Sehat. Disertai penjabaran program strategis berdasarkan akronim tersebut;

Pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis, kerakyatan dengan menjunjung tinggi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), serta mengakui keberadaan masyarakat adat dan memajukan kesetaraan perempuan;

Kedua, mewujudkan pemerataan kesejahteraan umum bagi masyarakat dengan membangun industri-industri rakyat di semua sektor yang mandiri, kokoh dan berkeadilan atas lingkungan hidup, sehingga tersedia lapangan kerja dan terjaminnya lingkungan hidup yang lestari. Ketiga, mewujudkan pemerataan kecerdasan dan kesehatan umum masyarakat dengan membangun dan mengembangkan sekolah-sekolah dan pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Donggala⁵⁰.

Dengan demikian, *gong* pertarungan AMANAHA pun mulai di tabuh. Walaupun pada satu sisi, pilihan ini memang terasa sulit diambil apalagi berhadapan dengan kekuatan *oligarki* dalam medan pertarung politik riil. Namun, disisi yang lain, pilihan itu tidak bisa tolak sebagai konsekuensi atas tugas sejarah yang

49 Dalam waktu yang hamper bersamaan, hal yang sama juga coba dilakukan menjelang Pilkada di Kab. Parigi Moutong. Dedy Askary dan Hasairin (Anggota DPRD Parimo dari PAN) dengan akronim DESA. Namun karena kekurangan satu kursi dari 6 kursi yang dibutuhkan sehingga paket ini gagal.

50 Lihat program politik AMANAHA CS.

harus dipikul dan diuji oleh kelompok pro demokrasi. Agar rakyat memiliki pilihan alternatif di antara kaum borjuasi yang haus kekuasaan dan rakus kekayaan. Walau bisa dipastikan, langkah ini sangat berat. “Sejatinya kemenangan perjuangan hanya bisa dinikmati jika kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Di mana, hakikat kehidupan akan mendapatkan keterpastian dalam makna yang sesungguhnya, sejahtera dan adil.”⁵¹

Merujuk kepada UU 12/2008, untuk bisa maju sebagai calon perseorangan, secara administratif, harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari jumlah penduduk Kab. Donggala yang berjumlah 400.000 ribu jiwa. Berarti dibutuhkan 23.226 jiwa jumlah dukungan, dan dukungan itu mesti dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Domisili yang tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan. Dengan jumlah sebesar itu dan sebaran keterwakilan kecamatan, maka diputuskan target sebaran dukungan yang mesti digalang berada di sebanyak 159 desa dari 317 desa dan 29 kecamatan dari 33 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Donggala.

Praktis, dengan durasi waktu yang tidak panjang maka penggalangan dukungan dilaksanakan hampir selama dua bulan kerja, terhitung sejak bulan Mei 2008 hingga bulan Juni 2008. Metode yang digunakan dalam pengumpulan dukungan tersebut melalui diskusi di basis-basis yang selama ini didampingi dan penggalangan tokoh-tokoh di masyarakat. Hasilnya, tim berhasil mengumpulkan dukungan sesuai syarat minimal sebanyak 30.000 lebih pendukung AMANAH. Satu hal yang menggembirakan, walaupun AMANAH tidak ditopang dengan dukungan logistik yang memadai,⁵² jika sungkan disebut minim, antusiasme rakyat

51 Lihat laporan kerja politik Front Perjuangan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah.

52 Lihat laporan penggunaan dana AMANAH. Dana yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 80-an juta untuk kebutuhan operasional seperti sewa, foto copy dan konsumsi. Dana ini yang terkumpul bersumber dari swadaya dan sumbangan indi-

dalam memberikan dukungannya cukup tinggi, meski mereka secara sukarela menggandakan (foto copy) sendiri KTP atau keterangan domisilinya.

Faktor pembeda lainnya, bila dibanding dengan calon independen lain yang didukung dengan dana besar, adalah keberhasilan AMANAH dalam menjalankan proganda program-program alternatif melalui diskusi dan distribusi alat-alat kampanye seperti, leaflet dan poster. Dari cara ini, banyak di antara rakyat yang bersolidaritas untuk menjadi tim penggalangan dukungan. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan pembangunan struktur sebagai mesin penggalang dengan pendekatan konsepsi;

Pertama, pendekatan teritorial. Melihat corak geografis Kabupaten Donggala, maka wilayah penggalangan ini dibagi ke dalam 3 teritori; Banawa, Sigi Biromaru dan Pantai Barat. Di mana, masing-masing wilayah tersebut dipecah lagi ke dalam wilayah paling prioritas untuk lebih dahulu dikerjakan. Konsep kewilayahan ini sangat penting dan banyak digunakan orang dalam meraih dukungan rakyat pada pemilu 2004 dan Pilkada Gubernur 2006.

Kedua, pendekatan sektoral. Penetapan terhadap sektor difokuskan pada sektor-sektor yang selama ini rentan konflik dan secara ekonomis rakyat miskin, khususnya sektor tani dan buruh, di tambah kelompok pemuda di desa-desa. Secara obyektif, dukungan rakyat terhadap AMANAH CS merupakan investasi politik yang sangat berharga.

Sejak awal kehadiran AMANAH ternyata cukup menggerakkan rezim yang tengah berkuasa dan *incumbent*. Rezim⁵³

vidu. Di banding dengan dengan calon independen lainnya dana yang dikumpulkan AMANAH sangat kecil. Berdasarkan informasi dari salah seorang Tim pemenangan Buhanudin Yado-Abd. Rasyid Thalib disebutkan bahwa untuk mengumpulkan dukungan sebanyak 40.000 KTP, mereka mengeluarkan dana sekitar Rp. 200-250 juta.

53 Partai Golkar direpresentasikan sebagai oligarki politik di Kab. Donggala.

ini belum rela kekuatan yang merepresentasikan kekuatan rakyat turut serta ambil bagian dalam panggung kompetisi perebutan kekuasaan. Upaya-upaya penggalangan dukungan dari rakyat dalam bentuk KTP atau keterangan domisili yang dilakukan oleh Tim AMANAH pun dipersulit.

Tidak berhasil menjagal tim AMANAH dalam proses penggalangan dukungan pada tahap-tahap awal, maka indikasi penjagalan pun dilakukan secara sistematis menjelang detik-detik akhir masa pengumpulan dukungan dan pada tahap verifikasi. Modusnya dengan menggerakkan aparat pemerintah Desa hingga intervensi terhadap KPU Donggala. Modus lain yang digunakan, ketika masa tahapan akhir pengumpulan dukungan dilakukan, Pemda Donggala memboyong beberapa Kepala Desa ke Jakarta, alasannya untuk kepentingan pemekaran wilayah.⁵⁴ Bahkan KPU pun mereka pakai sebagai senjata terakhir untuk tidak meloloskan calon independen, AMANAH.

Akibatnya, ribuan dukungan yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dibatalkan oleh KPU. Modus lainnya adalah Kepala Desa meminta pembayaran pembuatan Surat Keterangan Domisili (SKD)⁵⁵. Walaupun pada akhirnya AMANAH tidak diloloskan namun langkah-langkah yang diambil telah berhasil mengajarkan kepada rakyat bahwa pilihan-pilihan untuk maju bertarung tepat adanya sekalipun secara politik formal kita dianggap gagal.

54 Kepala Desa yang diboyong ke Jakarta adalah Puluhan Kepala Desa di Kec. Biro-maru untuk kepentingan pemekaran Kab. Sig. Padahal pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait dengan pemekaran wilayah tersebut yakni UU No. 27/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi tertanggal 21 Juli 2008. Sehingga disinyalir mereka diberangkatkan hanya karena ada kepentingan Pilkada.

55 Tarifnya beragam dari Rp. 10.000-25.000 per lembar. Sementara di banyak desa tidak memberlakukan hal seperti itu. Jika pun ada sesuai dengan Perdes besarnya Rp. 5.000.

Diaspora Politik

Setelah pembangunan partai politik alternatif bersama rakyat tidak berhasil menjadi peserta pemilu 2009, maka elemen gerakan prodemokrasi di Sulawesi Tengah mulai memikirkan pilihan taktik diaspora dalam merespon Pemilu 2009. Pilihan model taktik ini ditempuh dengan cara menempatkan aktor pro demokrasi yang ingin mengambil pilihan sebagai Calon Legislatif (Caleg) bergabung dengan partai-partai peserta Pemilu.

Pilihan taktik diaspora dianggap sebagai upaya yang lebih realistis, dan peluangnya sangat terbuka, karena dengan banyaknya partai baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, berarti kebutuhan rekrutmen caleg pun semakin besar. Kecuali itu, baik partai lama maupun partai baru, memang cenderung memprioritaskan para aktivis prodemokrasi sebagai target rekrutmen. Namun dari aspek moral gerakan, taktik diaspora merupakan sebuah keharusan untuk memberikan alternatif kepada rakyat dalam menentukan pilihan politiknya, ditengah menjamurnya Caleg musiman yang muncul belakangan hanya karena ada momentum Pemilu.

Namun pilihan taktik diaspora dianggap efektif jika ditopang oleh “alat bersama” yang bisa berfungsi sebagai “mesin politik bayangan” sekaligus “alat kontrol” bagi setiap Caleg.⁵⁶ Tanpa alat bersama untuk melakukan kontrol tersebut, diaspora bisa kontraproduktif. Sebab, tidak ada jaminan bagi yang bersangkutan untuk dapat bersikap konsisten kelak jika terpilih sebagai anggota parlemen.

Atas dasar itulah, pada September 2008, digagas pembangunan front politik demokratik. Tujuannya menyatukan

56 Lihat tim penulis Demos, Satu Dekade Reformasi; Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia. Semangat untuk melembagakan pilihan-pilihan politik selain melalui pembangunan block politik yang kini mulai digagas pembangunannya, juga salah satunya dengan menggunakan taktik diaspora. Palu,...2008

gerakan rakyat merebut kekuasaan melalui politik elektoral (nasional maupun lokal). Kerja awalnya memenangkan aktivis ataupun individu yang dianggap konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat dalam pemilu legislatif 2009.⁵⁷ Hasil dari tahap awal ini akan diarahkan dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan politik di daerah dengan mengikuti pilkada-pilkada.

Hanya saja dalam perkembangannya kemudian, front politik demokratik tidak dapat berfungsi efektif. Salah satu penyebabnya adalah proaktifnya (gerak cepat) parpol peserta pemilu melakukan rekrutmen Caleg aktivis, di tengah kondisi front yang masih dalam tahap konsolidasi dan belum tersosialisasi maksimal. Akibatnya proses plotting caleg aktivis prodemokrasi menjadi tidak sempat berjalan, cair dan liberal.

Tercatat sebanyak 21 aktor gerakan pro demokrasi yang kini maju bertarung sebagai Caleg di Sulawesi Tengah. Mereka tersebar di setiap daerah pemilihan dengan menggunakan kendaraan politik beragam, dinataranya: PKB, PDIP, PBR, Partai Buruh, PAN, Partai Kedaulatan, Partai Pelopor.

Pada tingkat nasional, 2 orang maju sebagai Calon DPD dan 3 orang Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah mewakili PBR. Sementara untuk DPRD Sulawesi Tengah sebaran Caleg sebagai berikut: 1 Caleg PKB mewakili Dapil Sulteng 1 (Kota Palu), 1 Caleg Partai Buruh dari Dapil Sulteng 2 (Kab. Donggala), 2 Caleg dari Dapil Sulteng 4 (Kab. Poso, Morowali dan Tojo Unauna) dari PDIP dan PAN, 1 Caleg PKB dari Dapil Sulteng 5 (Kab. Banggai dan Banggai Kepulauan), dan 1 Caleg Partai Kedaulatan dari Dapil Sulteng 6 (Kab. Tolitoli dan Buol).⁵⁸

57 Organisasi yang tergabung diantaranya PRMST, Amasuta, LMND, FNPBI, beberapa LSM yang ada di Sulteng, dan tokoh-tokoh masyarakat.

58 Selain itu, beberapa kawan juga menjadi Caleg di partai-partai yang diidentifikasi sebagai “Partai Tentara” seperti PPRN dan Hanura. Front memutuskan tidak mengintegrasikan Caleg tersebut ke dalam koordinasi berdasarkan beberapa kriteria dan pertimbangan yang bersifat prinsipil.

Selanjutnya pada tingkat DPRD Kota dan Kabupaten masing-masing; sebanyak 1 Caleg di Dapil Palu 1 (Kec. Palu Barat), 2 Caleg di Dapil Palu 2 (Kec. Palu Timur dan Utara) dan 2 orang Caleg di Dapil Palu 3 (Kec. Palu Selatan). Untuk DPRD Kota Palu ini, para Caleg yang berasal dari kelompok pro demokrasi maju dengan menggunakan kendaraan PKB. Di wilayah Kab. Donggala, pada pemilihan di tingkat DPRD Kab Donggala, masing-masing 1 Caleg di Dapil Donggala 1 dari PKB, 1 orang di Dapil Donggala 3 dari PBR, 4 orang di Dapil Donggala 4 (2 dari PBR, 1 PDIP dan 1 Partai PKNU). Dan di wilayah pemilihan DPRD Kab. Parigi Moutong 1 Caleg dari PBR, 1 Caleg Partai Buruh di Dapil Kab. Morowali, 2 Caleg di Dapil Kab. Banggai dari PDIP dan PKB, 4 orang di Dapil Kab. Boul masing-masing 2 dari Partai Demokrat dan 1 dari Hanura.

Dengan konfigurasi sebaran Caleg diatas, secara objektif menyulitkan untuk dapat dikoordinasikan satu sama lain karena mereka berangkat dari kendaraan politik yang berbeda-beda dan sebagian lainnya berada dalam Dapil yang sama. Hal tersebut tidak realistis. Dalam kalkulasi kekuatan mengakibatkan sumberdaya yang ada menjadi tercerai dan sulit dikonsolidasi. Hasilnya pun sulit diprediksi dan tidak menghasilkan apa-apa kecuali menuai kegagalan.

Oleh karena itu, front kemudian memutuskan pilihan sulit: memprioritas caleg yang akan dimenangkan dengan berdasarkan pertimbangan yang realitas, seperti posisi nomor urut dan popularitas masing-masing kawan-kawan. Pertimbangan nomor urut ini kemudian mentah pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai prinsip suara terbanyak.

Peluang Dan Tantangan Ke Depan

Pergeseran gerakan sosial menuju panggung perebutan kekuasaan yang dilakoni oleh kelompok pro demokrasi di

Sulawesi Tengah sejak 2007 hingga menemukan pembuncahannya pada 2008, boleh dibilang sedikit menepis anggapan umum yang menilai gerakan prodemokrasi berada dalam “vakum sosial”. Kecenderungan transformasi itu relatif menunjukkan perjalanan gerakan prodemokrasi justeru tetap berdialektika dengan dinamika sosial dan politik sekitaran. Faktor “kekecewaan kolektif” atas ironi sosial dan ekonomi produk reformasi sebagai akibat ketidak becusan aktor kekuasaan, nampak menjadi picu utama pergeseran pola gerakan tersebut. Tetapi “kesadaran politik” bagian terbesar aktor gerakan yang melihat signifikansi kekuasaan dalam mendesain perubahan yang diinginkan, juga ikut berpengaruh.

Memang banyak yang menilai kedua alas argumen tersebut, meskipun cukup logis, tapi terkesan dangkal dan simplistis. Memandang persoalan politik personal sebagai biang kerok, sehingga perlu diganti dengan aktor-aktor prodemokrasi yang memiliki kapabilitas dan merakyat, beresiko menyedatkan. Karena tak ada jaminan kuat bahwa pergantian itu bakal memperbaiki situasi. Apalagi akar masalah dari inflasi demokrasi, menurut mereka, sesungguhnya bukan hanya terletak pada lemahnya kapasitas personal politisi, tetapi justru disebabkan krisis representasi politik yang kronis.⁵⁹

Namun tanpa menafikan penilaian di atas, eksperimen-eksperimen politik yang dilakukan oleh elemen gerakan prodemokrasi di Sulawesi Tengah, sebagai kristalisasi dari pergeseran pola gerakan tersebut, setidaknya menjadi sebuah pengalaman berarti. Kendati secara umum masih menuai kegagalan, tapi dari kegagalan itu terdapat banyak pelajaran yang dapat dipetik sebagai masukan berharga dalam perbaikan strategi dan taktik ke depan, apalagi momentum politik masih tersedia dan terbuka.

59 Lihat misalnya, Bengat Silitonga, *Menakar Go Politics Para Activis*, Buletin Elektronik SADAR, www.prakarsa-rakyat.org

Memetik Pelajaran

Dalam kadar yang minimal, masuknya aktor-aktor gerakan ke dalam ranah politik praktis, boleh dibilang memiliki nilai positif -- langsung atau tidak langsung -- dalam proses pembobotan demokrasi elektoral. Paling tidak, memberikan atau menyediakan alternatif pilihan yang lebih beragam bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya, baik dalam pilkada maupun pemilu. Khusus untuk respon pemilu, diaspora para aktivis prodemokrasi ke dalam berbagai partai, berkontribusi memperkaya kader atau sumber daya partai dengan orang-orang yang relatif bersih dan punya pengalaman bersentuhan langsung dengan masyarakat, sekaligus mengurangi peluang rekrutmen caleg-caleg pragmatis yang lebih besar.

Selain itu, dari pengalaman pembangunan partai alternatif dan kompetisi Pilkada Donggala, rakyat relatif mendapatkan pendidikan politik dalam maknanya yang lebih substantif. Dalam artian pelibatan masyarakat pedesaan sebagai subjek politik yang berperan aktif sejak awal dalam pembangunan mesin politik, pengembangan gagasan-gagasan program politik, hingga mobilisasi dukungan.

Salah satu dampak yang dirasakan dengan memposisikan rakyat sebagai subjek politik, jika berkaca pada pengalaman Pilkada Donggala, dukungan terhadap paket AMANAH (Aristan-Mutmainah) – kandidat yang diusung oleh gerakan pro demokrasi – kebanyakan didasarkan pada kesadaran politik. Meskipun AMANAH tidak didukung dengan kekuatan logistik tetapi tidak membuat nyali mereka menjadi ciut. Sebaliknya, kondisi seperti itu, membuat mereka semakin termotifasi agar dapat bersama-sama menggalang dukungan. Secara sukarela mereka berswadaya menggandakan KTP dan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai pengganti KTP. Selain dukungan dalam bentuk seperti itu, mereka

bahkan memberi sumbangan dalam berbagai bentuk, seperti beras, pisang, ubi, ikan asin, untuk kebutuhan di sekretariat kandidat.

Karena itulah kemunculan paket AMANAH dalam bursa pencalonan Pilkada Donggala, juga membawa efek langsung pada perubahan atmosfir politik yang cukup menggerakkan kekuatan-kekuatan politik mainstream. Kekuatan politik yang berkuasa yang juga *incumbent* sangat merasa “terganggu” di saat AMANAH dimajukan sebagai bakal calon. Berbagai upaya dilakukan agar paket AMANAH tidak diloloskan. Sebab, dalam kalkulasinya, AMANAH diperhitungkan bukan karena dukungan logistik dan modal besar. AMANAH dinilai sebagai paket yang berpotensi kuat meraih dukungan dari rakyat, tidak saja karena telah memiliki basis sosial, tetapi tawaran-tawaran programnya yang konkrit dan beberapa diantaranya sulit dijiplak kandidat lain. Misalnya program pemberantasan korupsi, karena kandidat lain terutama *incumbent*, eksplisit atau implisit, menjadi bagian dari gurita korupsi tersebut.

Selanjutnya secara internal, pengalaman-pengalaman menceburkan diri dalam kompetisi politik elektoral, bermanfaat langsung sebagai cermin untuk melihat sejumlah kelebihan dan kelemahan yang perlu diperbaiki dalam melanjutkan gerakan ke ranah kekuasaan, dimana momentum politik elektoral masih tersedia. Dalam hal ini terdapat beberapa catatan kritis:

Pertama, respon politik elektoral, baik Pilkada Donggala maupun Pemilu 2009 telah memberi nafas baru bagi proses konsolidasi kekuatan prodemokrasi yang hampir kehilangan nafas, pasca mandegnya Persatuan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (PRMST). Namun proses konsolidasi kembali yang mengambil bentuk front tersebut, masih dalam makna taktis sehingga terbilang cair. Konsolidasi yang lebih strategis ke dalam agenda politik persatuan masih belum terjadi. Kesibukan anggota front,

khususnya NGO dalam agenda-agenda programatiknya masing-masing, ditambah persoalan-persoalan psikologis cenderung menjadi faktor penyebab mencairnya arah konsolidasi.

Kedua, meskipun gerakan politik ke ranah kekuasaan menjadi kesadaran bagi sebagian besar elemen gerakan pro demokrasi, namun pilihan berkompetisi dalam bursa pencalonan Pilkada Donggala, masih merupakan langkah spekulatif, dalam arti belum terskenario secara matang. Keputusan untuk maju bertarung baru diambil dalam waktu yang mepet, sehingga mobilisasi dukungan – massa, logistik dan dana – tidak berjalan maksimal,⁶⁰ apalagi kerja-kerja dalam ranah politik praktis yang merupakan dunia abu-abu adalah pengalaman baru.

Ketiga, dalam konteks diaspora ke partai politik, meskipun alasan pilihannya berlandaskan sikap dan argumentasi ideologis, tapi karena dilalukan secara individual bisa terjebak dalam pragmatisme politik, karena harus menghadapi kebijakan internal partai tempat mendaftar menjadi caleg. Apalagi partai mempunyai hak recall anggotanya yang duduk dalam DPRD.

Membaca Tantangan

Pasca konflik kekerasan etno relegius yang melulutkan martabat kemanusiaan di Poso, Sulawesi Tengah mendapat perhatian luas dari pemerintah pusat⁶¹. Kebijakan ini mengarah

60 Meskipun dalam hal dukungan basis massa, cukup kompetitif dengan Calon Perseorangan lainnya.

61 Rencana mengeluarkan Inpres ini disampaikan SBY sewaktu melakukan lawatan ke Sulteng pada 30 April-2 Mei 2007. Dimana, Kota Palu, Kab Parimo dan Poso sebagai daerah yang disasar. Atas dasar bahwa “untuk memulihkan situasi keamanan Poso dan Sulteng maka dibutuhkan sebuah langkah-langkah percepatan pembangunan guna memacu ketinggalan Sulteng”. Sementara, Pemda Sulteng diharapkan secepatnya membuat program tersebut, begitu himbauan yang disampaikan SBY. Cari Inpresssss.....

pada program percepatan pembangunan di Sulawesi Tengah dan menjadi landasan bagi pemerintah pusat dalam mengucurkan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerah ini. Yakni, program jangka pendek dan jangka panjang. Untuk program jangka pendek adalah program yang akan rampung pada 2008. Sedangkan jangka panjang merupakan program multiyears dan berlangsung hingga 2011 mendatang.

Program jangka pendek yang direncanakan akan digulir meliputi; pembukaan ruas jalan Toboli-Tawaeli, penyediaan alat sekolah di desa terpencil dan upaya penghentian virus flu burung. Sedangkan pada program jangka panjang meliputi; pembukaan jalan Poboya-Parigi, penambahan ruas jalan di semua kabupaten/kota, peningkatan aksesibilitas dan pendidikan serta kesehatan. Sementara prioritas pembangunan daerah Sulteng hingga Tahun 2011 menurut Gubernur Paliudju, adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, pengembangan infrastruktur, pemberantasan KKN dan pemantapan kamtibmas serta penyelesaian konflik khusus di Kabupaten Poso⁶².

Seperti diketahui, jika tidak terjadi gejala kerusuhan massa di Poso sejak 1998, mungkin, perhatian pemerintah terhadap daerah Sulteng tidak semanis seperti saat ini. Namun, setelah sewindu lebih pasca kerusuhan massal yang melululantakkan martabat kemanusiaan di Poso, kini, daerah ini, dilirik oleh pemerintah.

Di tahun 2007, Pemda Sulteng mencanangkan sebagai tahun masuknya investasi.⁶³ Sebagai penyempurnaan atas kebijakan investasi sebelumnya dari hulu sampai hilir (dalam bentuk HPH, IPK, Kuasa Pertambangan, kontrak karya, SIUP dan

62 Sumber: Sulteng.go.id

63 Statmen kepala kesbang sulteng dalam diskusi memperingati seperempat abad berdirinya jaringan walhi Sulteng

sebagainya). Anehnya kebijakan yang dikeluarkan tersebut telah melebihi wilayah Sulteng⁶⁴. Setelah investasi di sektor perkebunan besar, Inco, PT Expan Tomori Sulawesi, pembangunan PLTA Sulewana di Poso,⁶⁵ PLTU Mpanau⁶⁶ di Palu serta industri serupa lainnya.

Selanjutnya pada 2006-2008, Exxon Mobile mendapat izin eksplorasi Block Surumana. Izin tersebut diberikan untuk memastikan besaran kandungan gas alam dan minyak bumi di dalamnya. Diwilayah pesisir Barat Kabupaten Donggala Block Balaesang dan Block Dampelas juga juga akan disusul dengan eksplorasi yang serupa⁶⁷. Padahal perusahaan tersebut mendapat perlawanan dari rakyat di Block Cepu.

Dengan demikian wilayah ini dilirik karena kekayaan sumber daya alam. Kolaborasi antar elit lokal, pemodal dan aparat keamanan yang berkepentingan atas penguasaan sumberdaya alam menjadi sebab timbulnya konflik sosial di masyarakat. Dikarenakan, sudah menjadi hal biasa bahwa masuknya investasi berakibat pada upaya peminggiran hak-hak rakyat, upaya teror dan kriminalisasi terhadap petani. Saat ini fenomena tersebut cenderung dijadikan tren dalam penguasaan sumberdaya alam .

Realitas tersebut menunjukkan bahwa arus liberalisasi merebak masuk ke daerah-daerah. Peran pemerintah hanya sebatas mencari investor untuk selanjutnya menyerahkan penguasaannya pada modal tanpa ada filter dan proteksi terhadap kepentingan rakyat. Di Palu misalnya, ditandai dengan penanda tanganan 5

64 Sumber database YTM Palu

65 Dikelola oleh PT Poso Energi sebagai Anak perusahaan PT Bukaka milik Yusuf Kalla

66 Dikelola oleh PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) dimana Suardin Soebo, SE sebagai wakil wali kota palu juga duduk sebagai komisaris utamanya

67 Nuansa Pos, 21 Februari 2007

memorandum of understanding (MoU) antara pemerintah Kota Palu dengan pihak pemodal⁶⁸; PT Ina Palu Infrastruktur untuk kerjasama pembangunan pelabuhan barang, container dan kawasan industri Palu Utara, PT Diaksa Pramana Wisesa untuk kerjasama perencanaan system penyediaan air bersih terpadu Kota Palu dan sekitarnya, PT Gema Nusa Mericom kerjasama pengadaan material dan pembangunan instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) beserta perlengkapannya, PT Konesia Utama untuk kerjasama pengadaan pipa bagi system penyediaan air bersih terpadu kota palu dan sekitarnya.

Bercermin dari hal tersebut, masuknya investasi yang berskala besar tidak berbanding lurus terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Faktanya tidak hanya rakyat yang berada sekitar wilayah konsesi yang merasakan dampak⁶⁹ tapi juga bagi pembangunan daerah tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Bila pun ada hanya lebih pada pembangunan infrastruktur yang hanya dikhususkan sebagai sarana penunjang kelangsungan produksi. PT Inco misalnya,⁷⁰ sumbangan terhadap perekonomian daerah terbilang kecil. Malah, masyarakat yang berada disekitar areal pertambangan menjadi termarjinalkan

Disamping itu, kebijakan anti pedesaan seperti impor beras, penurunan harga pembelian gaba dan bea impor, pencabutan subsidi serta harga barang melambung tinggi hanya semakin memperdalam jurang kemiskinan. Ditambah dengan program karitatif seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin dan bantuan bersyarat lainnya. Sampai saat ini data kemiskinan gafiknya tidak menunjukkan tingkat penurunan signifikan. Berita resmi statistic (September 2006), 63,41 persen penduduk miskin

68 Radar Sulteng, 16 Februari 2007

69 Buruk Inco Rakyat Digusur, Arianto Sangaji, 2002

70 ibid

ada di daerah pedesaan. Sementara total jumlah orang miskin Indonesia sekitar 108,78 juta jiwa (Kompas, 29/5/07).

Sementara di Sulteng tercatat tingkat kemiskinan masih cenderung mengalami peningkatan. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) Gubernur menyebutkan, sekitar 30 persen atau 400-an ribu rakyat masih dililit kemiskinan. Tidak mengherankan bila sejak krisis persoalan kemiskinan kian sulit untuk diatasi. Kucuran dana melalui program pembangunan tidak menyentuh kebutuhan pokok masyarakat. Sementara, usulan pembangunan melalui Musrebangdes banyak dibajak--ketika sampai ketingkat atas.

Langkah ke depan

Paling tidak dengan adanya pilihan-pilihan politik memasuki ranah kompetisi Pilkada di Kab. Donggala dan Pemilu 2009 mengindikasikan terjadinya perubahan dinamika di tingkat internal kelompok pro demokrasi sebagai sebuah penegasan sikap untuk mengisi ruang yang selama ini ditinggal. Dalam situasi perubahan politik seperti yang berlangsung saat ini maka hal terpenting dilakukan adalah:

Pembangunan konsolidasi di tingkat kelompok pro demokrasi menjadi sesuatu yang urgen dilakukan jika ingin menoreh kemenangan-kemenangan di setiap momen Pilkada dan Pemilu. Konsolidasi yang dimaksud bukan hanya sekedar bagaimana setiap aktor- pro demokrasi masuk ke dalam parpol tetapi lebih dari itu, bertanggungjawab dalam menghantarkan para agen-agen politiknya di parlemen. Disaat yang sama mengikatkan diri dalam satu kesatuan kombinasi gerakan melalui mekanisme kontrol secara demokratis.

Dalam merespon perubahan situasi politik baik dengan cara turut serta sebagai Caleg dan Calon pada pemilihan kepala daerah/wakil kepada daerah dibutuhkan alat yang mampu memobilisasi dukungan sumberdaya yang dibutuhkan.

Di tengah lunturnya kepercayaan rakyat terhadap sepak terjang elit politik dan kegagalan negara dalam menuntaskan problem kemiskinan maka hal seperti ini menjadi ruang bagi kelompok pro demokrasi dalam menawarkan program-program elternatif sebagai solusi bagi pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Kongsi Dagang dan Persekongkolan Politik di Sulawesi Selatan

Simpul Sulawesi Selatan FBB Prakarsa Rakyat¹

Ada hal yang perlu dilihat ketika kita bicara soal Sulawesi Selatan selain sebuah provinsi yang disebut-sebut sebagai lumbung beras. Situasi politik di sana juga perlu dikaji lebih dalam—terutama karena di provinsi itu dominasi Partai Golkar (Golongan Karya) sebagai salah satu pewaris Orde Baru masih kuat. Pada pemilihan umum 1999 dan 2004, partai itu memang merosot, tapi itu bukan satu-satunya indikator melemahnya Golkar. Ini perlu kita kaji untuk melihat kemungkinan pada pemilihan umum 2009 yang akan berpengaruh besar pada kehidupan sosial-politik di Sulawesi Selatan.

Sejak Orde Baru, Sulawesi Selatan merupakan basis massa terbesar Golkar. Tapi pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2004, perolehan suaranya hanya 43%. Di beberapa kabupaten dan kota perolehan suara Golkar menurun 30%. Disinyalir, para

1 Paper Untuk Lokakarya Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat, Bali, 9-12 Februari 2009. Penulis : Zohra Andi Baso

pemimpin tradisional dalam tubuh Golkar tengah memindahkan loyalitas mereka ke partai lain. Kenyataan ini juga menggoyahkan argumentasi utama Golkar, bahwa mereka memiliki infrastruktur politik yang lebih baik daripada partai lainnya.

Dinamika pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan hingga Desember 2006 menggambarkan, dari 10 kabupaten hanya 5 kabupaten yang dimenangkan para kandidat yang diusung Golkar sendiri atau koalisi partai yang mereka bangun. Pada pemilihan kepala daerah antara 2007 hingga 2008, Golkar kalah di beberapa kabupaten, seperti di Wajo, Bantaeng, Luwu, Pinrang. Meski di beberapa kabupaten kader Golkar unggul seperti di Bone, Takalar dan Jeneponto.

Pertarungan pemilihan walikota di Makassar dimenangkan oleh pasangan Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur yang diusung Golkar dan beberapa partai lainnya. Tapi puncaknya pada pemilihan gubernur akhir 2007, koalisi beberapa partai di luar Golkar memenangkan pemilihan dengan mengusung pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang. Koalisi itu terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS)

Syahrul Yasin Limpo mantan sekretaris Golkar Sulawesi Selatan yang berkarir sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan Agus Arifin Nu'mang sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sulawesi Selatan yang digeser menjadi ketua Bidang Kerohanian di Golkar sejak menjadi wakilnya Syahrul Yasin Limpo.

Hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Selatan, kemenangan pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang berselisih tipis sekitar 0,7% atau 27.000 suara dengan pasangan Amin Syam dan Mansyur Ramly, ipar Jusuf Kalla, yang diusung oleh Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Amin Syam, yang saat itu juga menjabat gubernur Sulawesi Selatan menuduh KPUD melakukan kecurangan dengan meggelembungkan suara. Dia melaporkan itu ke Mahkamah Agung (MA). Secara mengejutkan MA memenangkan tuntutan subsider pasangan Amin Syam dan Mansyur Ramli dengan melakukan pemilihan ulang di 4 kabupaten (Gowa, Bantaeng, Bone, dan Tana Toraja). Namun demikian keputusan KPUD tidak batal. Persoalannya terletak pada preferensi MA, yang sampai saat ini tertutup bagi publik dalam menetapkan tindakan dan pilihan terhadap keputusan tersebut.

Boleh jadi peristiwa ini membenarkan asumsi, bahwa Golkar merupakan partai yang menggelembung akibat konstruksi permanen kekuasaan rezim Orde Baru, tapi tak dapat mematahkan dinamika internal yang berlangsung secara tajam dan meluas.

Agaknya, Sulawesi Selatan cenderung diseret ke dalam pusaran pertarungan yang terjadi dalam tubuh Golkar, apalagi menjelang pemilu 2009. Keputusan MA juga bersamaan dengan sebuah diskursus kekuasaan yang sebenarnya mengancam atmosfer demokrasi. Gejala lainnya; kompromi politik para elit. Ketegangan yang terjadi tampaknya mulai berada pada titik ekstrim bekerjanya mesin kekuasaan. Kesimpangsiuran lainnya secara filosofis adalah, penancangan secara bersama proyek demokrasi, tetapi dapat segera dibatalkan dengan ketidaksamaan, sekaligus meremukkan watak sosial hidup-bersama. Pada akhirnya, rakyat kembali lagi menjadi penonton di bawah panggung kekuasaan.

Akibat keputusan Mahkamah Agung itu, Di awal tahun 2007 hingga 2008, suhu politik di Sulawesi Selatan memanas. Pihak KPU yang dikalahkan oleh pihak Amin Syam dan Mansur Ramli kembali melakukan upaya Peninjauan Kembali atas putusan itu. Keputusan Mahkamah Agung dianggap telah mengkhianati demokrasi. Para pendukung pasangan Syahrul Yasin

Limpo dan Agus Arifin Nu'mang berunjuk rasa besar-besaran. Mereka menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Kelompok perempuan melakukan demo khusus dengan mendatangi rumah dinas gubernur sambil tutup mulut menggunakan masker dan perekat. Puncaknya, para pengunjuk rasa menduduki rumah dinas gubernur, meski terhadang kawat berduri.

Ahirnya, Mahkamah Agung memenangkan KPU dalam Peninjauan Kembali. Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Bagaimana perkembangan ekonomi di Sulawesi Selatan?

Salah satu kultur yang mengakar kuat di masyarakat Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis-Makassar, adalah kultur *entrepreneurship* (kewirausahaan). Ilustrasi historis menunjukkan, pola perekonomian nusantara abad XV sampai XVII merupakan pola perdagangan saudagar Bugis, selain menggambarkan dua kota pelabuhan utama di Asia Tenggara, Malaka dan Somba Opu, Sulawesi Selatan. Sejumlah catatan sejarah menggambarkan arus perdagangan di Somba Opu berkaitan dengan barang mineral seperti baja dan nikel dari Sulawesi Selatan, remah-rempah dari Maluku, hasil laut seperti teripang dari pesisir utara Australia, dan porselin dan sutera dari Cina.

Kolonialisme Barat kemudian meredupkan pasang naik saudagar Bugis, ketika kolonial membangun perkebunan besar kopi dan tebu di Sumatera dan Jawa. Cina yang saat itu menjadi suatu kerajaan yang sakit menjadi sumber buruh murah untuk perkebunan tebu di Jawa dan tambang timah di Bangka dan Malaya. Titik perpindahan orientasi perdagangan dari Asia ke Barat, terutama pilihan komoditas, dan infrastruktur kapitalistik

yang dibangun kolonialisme di kemudian hari diwariskan kepada rezim yang berkuasa di Jakarta, sekaligus menyisakan disparitas, bahkan ahistoris bagi masyarakat di timur Indonesia. Kejatuhan Sukarno dan berkuasanya Suharto membuka pintu lebar-lebar bagi korporasi Barat yang serakah untuk berjaya mengambil hasil tambang, kayu dan perikanan di timur Indonesia.

Motif kultur wirausaha dapat juga menjelaskan, diaspora Bugis-Makassar di berbagai tempat. Kultur ini mengental ketika berada pada wilayah sosiologis—keluarga menjadi modal sosial dalam relasi strategi bertahan hidup yang diwariskan. Hal ini memungkinkan untuk tumbuhnya kelompok bisnis keluarga, di Sulawesi Selatan, seperti, keluarga Baramuli dengan kelompok bisnis Poleko, dan keluarga Jusuf Kalla dengan kerajaan bisnisnya: Hadji Kalla, Bukaka, Bumi Karsa, PT Kalla Lines. Bisnis keluarga Kalla ini dibangun oleh ayahnya, Kalla—aktivis Nahdlatul Ulama yang mengawalinya dengan bisnis penyewaan mobil antar kabupaten. Ibunya, Atirah yang aktivis Aisiyah juga bisnis penjualan sarung sutra dan baju bodo. Jadi, bisnis keluarga Kalla ini sudah memasuki generasi ketiga; selain anak, adik-adik juga cucu-cucu. Usaha Bisnis lainnya, perusahaan bernama Bosowa yang digerakkan oleh ipar Jusuf Kalla, Aksa Mahmud, yang juga wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebelumnya hanya bergerak di bidang usaha agen mobil *Mitsubishi*, kini sudah menjelajahi berbagai bidang seperti usaha konstruksi jalan tol, hotel. Anaknya, Erwin Aksa juga andil menangani bisnis itu.

Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad ikut andil dalam membesarkan kelompok Bukaka. Fadel pernah menjabat bendahara Golkar dan ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Jauh hari sebelum menjadi gubernur dia telah meninggalkan Bukaka dan mendirikan kelompok bisnis sendiri, Gema, yang bergerak dari usaha kimia-industri sampai pengeboran minyak.

Kemudian muncul nama Alwi Hamu. Dia bergerak di dunia penerbitan surat kabar dan berkomplot dengan Dahlan Iskan merajai bisnis surat kabar di Indonesia. Alwi juga mengembangkan sayapnya dengan memasuki berbagai bidang seperti persuteraan dan media televisi. Kemudian dalam perkembangannya muncul pebisnis lainnya dari kalangan muda, seperti Endong Patompo dan Idris Manggaberani pebisnis proverti, ada juga Halim Razak pebisnis cokelat (kakau), Bahder Johan di bidang konstruksi, dan banyak pengusaha muda lainnya yang tak termasuk grup Kalla, Aksa dan Alwi.

Para pengusaha muda banyak terlibat dalam berbagai kegiatan untuk memperkuat para pengusaha Bugis-Makassar. Misalnya, tradisi pertemuan tahunan saudagar Bugis Makassar—di satu sisi hendak menggiatkan kultur bisnis dan kewirausahaan, tetapi kelihatannya lebih kuat bergerak di wilayah ekonomi-politik. Dominasi masih di tangan Golkar, akan tetapi sudah mulai ada pengusaha yang berkiprah di partai lain, seperti Partai Demokrat, PDIP, dan lain-lain. Kongsi-kongsi bisnis keluarga di Sulawesi Selatan dengan kelompok bisnis keluarga lain mulai dilakukan, seperti kelompok Kalla dengan kelompok Para, yang digerakkan Chairul Tanjung—penguasa Bank Mega, salah satu bank papan atas yang membawahi *Trans TV* dan *Trans 7*, selain dengan kelompok pemilik industri rokok terbesar di Indonesia, Putera Sampoerna.

Boleh jadi, Golkar mungkin tengah mengalami kemerosotan popularitas di basis massa, tetapi tidak dalam konsentrasi modal. Ringkasnya, Golkar nampak sedang menyusun strategi baru untuk membangkitkan dirinya dengan akumulasi kapital, konfigurasi yang agak berbeda dengan rezim terdahulu, di mana kelompok bisnis keluarga Suharto yang cenderung besar dengan mesin kekuasaan, tanpa kultur kewirausahaan.

Dalam realitas politik, kelompok bisnis keluarga yang “baru” ini kurang menggambarkan program politik secara meyakinkan, tetapi mereka menjanjikan akses sumberdaya bagi partainya. Bagaimana pun juga mereka pandai memainkan dan mengalihkan isu, dengan dukungan media massa, seperti kelompok *Jawa Pos* dan *Kompas*, maupun kelompok MNC (*RCTI*, *TPI* dan *Global*) yang digerakkan oleh Hary Tanoesoedibyo dan membidik peluang bisnis dalam isu tersebut. Di sektor energi, mereka dapat mengalihkan isu krisis listrik, sehingga sejalan dengan skema privatisasi “barang-publik” atau infrastruktur dengan menginvestasikan pembangkit listrik, seperti yang dilakukan kelompok Bukaka dan Bosowa yang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Poso sebesar 145 Megawatt dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jeneponto sebesar 200 Megawatt.

Di sisi lain, ada juga beberapa orang nama yang cukup dikenal dalam dunia usaha yang kini juga sudah menurun ke kerabat, seperti keluarga Toinny Gozal, Anton Obyedan Bang Hasan. Mereka bergerak di bisnis perhotelan, mall, dan kontraktor usaha dagang lainnya.

Situasi Sosial-Politik-Ekonomi di Sulawesi Selatan

Merujuk data Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2002, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan memiliki kecenderungan yang relatif sama dengan angka kemiskinan secara nasional. Persentase penduduk miskin di provinsi ini pada 1996, 16,71% kemudian bergerak naik pada 1999 menjadi 18,32%, dan turun pada 2002 menjadi 15,88%. Namun, kenaikan dan penurunan persentase penduduk miskin tidak sama antar kabupaten dan kota dan tidak sejalan dengan pola kecenderungan di tingkat provinsi. Seperti di kota Pare-pare, kenaikan persentase penduduk miskin dari 2,81% (1996), 3,23% (1999); dan menjadi 9,33% (2002).

Hal yang sama terjadi di kabupaten Pangkajene Kepulauan dari 20,08% (1996), 21,95%(1999), kemudian meningkat menjadi 25,75%(2002). Berbeda dengan kabupaten Soppeng, dari 13,54%(1996), 17,72 (1999), menurun drastis menjadi 4,91%(2002). Demikian pula dengan kabupaten Pinrang dari 15,49%(1996), 15,46%(1999), menurun menjadi 10,56%(2002). Akan tetapi data pusat statistik Sulawesi Selatan pada Juli 2008 menunjukkan :

- Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2008 sebesar 1,03 juta (13,34%). Dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 1,08 juta (14,11%), berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 51.700 orang.
- Selama periode Maret 2007 hingga Maret 2008, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 49.700 orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 2.000 orang.
- Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2008, sebagian besar (85,38%) penduduk miskin berada di daerah pedesaan.
- Peranan komoditi makanan terhadap tingkat kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2008, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan secara umum sebesar 76,12%.
- Pada periode Maret 2007 hingga Maret 2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Akan tetapi yang menjadi soal adalah proses pemiskinan itu sendiri. Proses ini akan terus berlanjut dan meluas, tergantung dari program penanganan dan akibat-akibat kebijakan yang tidak sejalan. Kesalahan mendasar dari program penanganan kemiskinan adalah karena tidak berhubungan dengan penyebab dan proses kemiskinan itu sendiri.

Proyek neoliberalisme, bukan semata-mata urusan ekonomi belaka, akan tetapi corak transaksi ekonomi-pasar yang mengendap dalam relasi politik, sosial, sampai tingkat keluarga. Secara singkat, proyek ini meradikalisasi gagasan dan kesadaran bahwa semua relasi masyarakat dan individu ditentukan dengan kinerja pasar, termasuk cara berpikir sampai dengan idiom yang digunakan. Bagi neoliberalisme, kemiskinan bukan masalah sosial, tetapi kegagalan mengubah asset diri menjadi laba.

Bias neoliberalisme juga terasa pada program dana-bergulir program penanganan kemiskinan seperti Program Pengembangan Kecamatan, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat serta program penanganan kemiskinan yang tidak dijelaskan sumber keuangannya apakah itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau utang. Secara ringkas, program-program ini beranggapan, “semua orang miskin adalah pedagang”.

Neoliberalisme mematok identitas, bahwa manusia sejati adalah pengusaha, karenanya pengusaha memiliki hak istimewa dalam proyek ini. Dengan demikian, jaminan sosial atau *social welfare* dianggap sampah dalam proyek neoliberalisme, karena proyek ini mempercayai kemampuan solusi perlindungan individual (*individual self care*) untuk menanggalkan kemiskinan.

Fenomena meledaknya buku-buku praktis manajemen-diri sampai pelatihan manajemen individual dalam ranah spiritual, boleh jadi berkaitan dengan proyek neoliberalisme. Termasuk

juga bias neoliberalisme, asumsi program yang meletakkan pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang akan memudahkan akses ke sumber produktif.

Refleksi di Makassar menunjukkan, di sejumlah tempat program-program itu berlangsung, tanpa menjamin masyarakat untuk tidak sebagai penerima manfaat untuk tidak digusur misalnya, perluasan pembangunan pelabuhan peti kemas dan jalan tol. Kemasan “pemberdayaan” program-program penanganan justru gagal mengorganisasi masyarakat dan tidak memecahkan tingginya tingkat kompetisi di sektor informal yang akan melumpuhkan watak kebersamaan dan malah menenggelamkan orang miskin semakin dalam ke pusaran kemiskinan. Padahal dalam kenyataannya, sektor informal menjadi tumpuan utama orang miskin, setelah dilibas oleh sektor formal proyek neoliberalisme, yang melahirkan “negara sebagai perusahaan”.

Kontradiksi-kontradiksi itu berlangsung, seperti terlihat pada pelayanan gratis di Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) tetapi politik anggaran tidak bekerja untuk meningkatkan biaya obatan-obatan per kapita, di sisi lain tidak ada regulasi yang kuat untuk membatasi klinik praktik dokter bersama, selain menguatnya sektor konsumsi, dengan pembangunan berbagai pasar swalayan (baca: retail modern), jika digeledah lebih jauh menjadi tempat nyaman bagi korporasi oligarkis, yang berkuasa di sektor pertanian, pengolahan, sampai retail, dan jasa keuangan dengan kartu kredit.

Pasar swalayan berkembang pesat di negara-negara berkembang pada 1990-an, dibanding pada dasawarsa sebelumnya, karena didorong liberalisasi investasi langsung dari luar negeri. Motif kredit atau utang di sektor konsumsi yang digerakkan oleh lembaga-lembaga keuangan non-bank juga kuat. Kalimat sederhananya, “kita susah sekali membeli sepeda motor atau rumah dengan uang kontan, kecuali dengan cara kredit”.

Potret Ekonomi Politik

Keterlibatan Donor

Usaha-usaha pasar penyewaan lahan di Sulawesi Selatan yang didorong oleh Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan agensi donor pemerintah lainnya memang masih samar bagi gerakan sosial demikian juga implikasinya. Hal ini agaknya perlu diterobos dengan mencari relasi antara agenda donor dan skema proyek neoliberalisme.

Jika dicari relasinya satu per satu, kita bisa melihat keterlibatan donor di sektor pertanian dan perikanan di Sulawesi Selatan. Katakan saja, International Finance Corporate (IFC), salah satu kelompok Bank Dunia, tengah melakukan program PENSA, program kemitraan usaha kecil menengah di Indonesia bagian timur. Di Sulawesi Selatan program ini menonjol dengan budidaya rumput laut di sejumlah kabupaten. Rumput laut menjadi komoditi andalan bagi Sulawesi Selatan dan termasuk daerah terpenting penghasil rumput laut dunia yang menjadi pesaing terdekat Filipina. Jika ditelisik dengan perjanjian NAMA (Non-Agriculture Market Access) dalam putaran perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, apa yang dilakukan IFC diduga bukan peristiwa biasa, terutama dengan skema arus ekspor perikanan negara-negara miskin yang lebih besar ke negara-negara maju dibandingkan sebaliknya dengan arus impor.

Hambatan akses pasar perikanan menjadi penting bagi negara-negara kuartet (Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Jepang), tetapi menghancurkan nasib nelayan dan buruh industri tepung ikan di negara-negara miskin. Skenario hambatan non-tarif dan budidaya rumput laut di negara-negara miskin dapat memperlambat irama permainan skema tadi. Selain, investasi

rumpun laut lebih signifikan dan murah dibandingkan industri perikanan, dan IFC menjadi penghubung bagi investor. Lantas ada program Amarta oleh United State Agency for International Development (USAID) di Sulawesi Selatan, mereka banyak melatih petani dan mendistribusikan cokelat ke Bloomberg, korporat kakao asal Amerika Serikat. Cokelat atau di Sulawesi Selatan, merupakan komoditi utama kedua setelah nikel. Di dunia, provinsi ini sangat diperhitungkan dalam produksi cokelat setelah Ghana. Sementara Bank Dunia tengah berada pada fase persiapan, termasuk di Sulawesi Selatan, untuk proyek FETI (Farmers Empowerment Technology and Infomation).

Kita perlu mencermati relasi yang berada dalam agenda donor dari pengorganisasian produsen pedesaan sampai akses jasa keuangan, termasuk agenda donor yang bergerak pada tataran kebijakan (governance) dari infrastruktur pedesaan, politik anggaran sampai dengan sertifikasi untuk pasar penyewaan lahan. Selanjutnya tentu saja berhubungan dengan retail modern yang digerakkan korporat global. Termasuk juga *think-tank* kantor-kembar yang difasilitasi Bank Dunia dan multi-donor di Makassar, yaitu SOFEI (Support Office of Eastern Indonesia) dan Bakti. Kantor-kembar ini membangun fórum Kawasan Timur Indonesia, termasuk mensponsori kegiatan inovasi untuk menggali, menginvestigasi, dan mengorganisasikan informasi kawasan timur Indonesia, selain memfasilitasi pengembangan masyarakat, yang merupakan program British Council dengan dukungan utang (loan) Bank Dunia.

Artikel ini juga ingin menggambarkan sektor produksi pertanian, terutama perkebunan di Sulawesi Selatan tidak dialihkan menjadi industri manufaktur, akan tetapi menjadi dua titik ekstrim; produksi dan konsumsi. Dalam bahasa sederhana, "Keuntungan yang didapat petani segera diputar habis di pasar kembali ke kantong pemodal", situasi menjadi semakin absurd ketika pasar

penyewaan lahan mulai marak menggilas petani dengan imperatif kebudayaan pertanian. Bukan hanya itu, beberapa lembaga donor juga melakukan kegiatan lain. Seperti Local Governance Support Program-USAID dengan program pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam proses demokrasi. Pertanyaannya, apakah mereka mampu mengawal proses demokrasi atau justru memunculkan elit-feodal baru?

Investasi Swasta

Investasi swasta juga mulai bermain di lahan pertanian padi di Sulawesi Selatan. Selain kelompok Medco, milik Arifin Panigoro, yang banyak bermain di sektor tambang, yang juga merambah pertanian padi, kelompok Artha Graha, milik Tomi Winata, melalui PT Sumber Alam Sutra (SAS) juga mengembangkan padi hibrida. PT SAS menjalin kerjasama perakitan varietas padi hibrida dengan Guo Hou Seed Industri dari Cina pada 2004, setahun kemudian ditandatangani MoU (Memorandum of Understanding) di Beijing, yang disaksikan oleh Jusuf Kalla.

Hubungan investasi dengan Cina makin giat dilakukan akhir-akhir ini termasuk kerjasama pembangunan subway antara perusahaan Bosowa dengan Cina, April 2006. Tahun 2006, menteri pertanian melepas dua varietas padi hibrida PT SAS yaitu, *Bernas Super* dan *Bernas Prima*, sebagai varietas unggul nasional. PT SAS juga mulai bergerak lebih jauh dengan membangun dan menyokong Hybrid Research Center di Indonesia.

Agak berbeda dengan kelompok Medco yang melibatkan petani dalam program *System of Rice Intensification* (SRI) dari Merauke, sampai Sulawesi, yang menurut Arifin Panigoro, sedang dirancang dengan luas lahan 6 ribu Hektare di Sulawesi. Metode SRI memakai konsep tradisional dalam membersihkan gulma dan pemakaian pupuk organik, dan menggunakan varietas Sintanur,

varietas padi yang dilepas oleh Balitjas Maros Sulawesi Selatan, dengan menggunakan nama isteri Abdulrahman Wahid, mantan presiden Indonesia. Baik Medco maupun Artha Graha berkisar pada paradigma intensifikasi untuk memperbaiki nasib petani.

Pada tahun 2008 ternyata investasi swasta meningkat. Menurut Irman Yasin Limpo dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan, sepanjang sejarah, Sulawesi Selatan belum pernah menempati posisi seperti itu. Sepanjang tahun 2008 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri mencapai Rp 1,1 triliun (4 Proyek). Sementara realisasi Penanaman Modal Asing mencapai US\$ 26,7 juta (11 Proyek). Sektor-sektor yang menjadi investasi penanaman modal meliputi Industri gula, kayu lapis dan lain-lain; industri jasa seperti, pergudangan, restoran, hotel dan lain-lain serta sektor perdagangan

Penanaman Modal Dalam Negeri di Sulawesi Selatan menduduki peringkat ke 6 dari 33 provinsi. Sedangkan tahun 2007 menduduki peringkat ke 22 dari 31 provinsi dengan nilai investasi Rp 1,1 milyar dengan satu proyek. Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi investasi di Sulsel adalah; Stabilitas keamanan, kepastian hukum, potensi sumber daya alam, kualitas manusia, fasilitas, promosi investasi dan komitmen pemerintah.

Namun, apa benar akar masalah dan proses pemiskinan di lahan pertanian pedesaan berkaitan dengan solusi intensifikasi?

Menurut pernyataan resmi pemerintah daerah, Sulawesi Selatan mengalami surplus beras, tetapi data resmi pemerintah lainnya menunjukkan, tingkat kemiskinan terbesar di provinsi ini berada di pedesaan sampai pada angka 70%. Indikasi kemiskinan ini dapat juga ditunjukkan pada kecenderungan tingkat malnutrisi. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa produksi yang tinggi bukan jaminan ketersediaan pangan di tingkat masyarakat, sebab faktor-faktor distribusi dan pemasaran juga menentukan.

Sementara ketersediaan pangan di tingkat masyarakat bukan pula jaminan ketersediaan di tingkat keluarga, karena ditentukan oleh daya beli dan faktor-faktor lainnya seperti ketersediaan dan pemerataan dalam distribusi.

Keterlibatan korporasi di sektor pertanian justru mematahkan kemandirian pengambilan keputusan para petani. Risiko lainnya yang harus ditanggung petani adalah kultur kapitalistik, misalnya hilangnya tradisi seleksi dan koleksi benih dan menguatnya sistem paten.

Tahun lalu ada 38 partai di Sulawesi Selatan yang akan berkompetisi untuk pemilihan umum 2009. Nama-nama yang muncul sebagai calon legislatif dari berbagai kalangan seperti akademisi, pebisnis, kalangan anak muda dan perempuan. Dari sekian banyak itu, Partai Hanura dan Gerindra tampak paling agresif. Di kedua partai itu banyak mantan kader Golkar dan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dari poses pencalonan anggota legislatif, unsur nepotisme masih kental. Misalnya, di sebuah kabupaten, seorang ketua partai memasukkan mertua, adik dan istrinya sebagai calon anggota legislatif dengan mengabaikan kapasitas dan kualitas calon itu. Di beberapa kabupaten lain, banyak istri pejabat yang mencalonkan diri lewat Hanura, PDK, PKS. Di sisi lain, kalangan muda dari Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, pengusaha dan aktivis perempuan diusung oleh PAN, PDK dan PKS.

Respon Gerakan Sosial

Respon berbagai kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap situasi politik sangat beragam. Harus dilihat juga, setelah reformasi komponen gerakan di Sulawesi Selatan berjalan sendiri-sendiri.

Apalagi masih muncul perbedaan pandangan di kalangan aktivis NGO (Non Government Organization) dalam merespon pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum 2009. Ada juga kelompok yang mengkritisi proses demokrasi di Sulawesi Selatan.

Ada satu peristiwa yang cukup mencengangkan. Upi Asmaradana, seorang Jurnalis di Makassar ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Upi dijerat pasal 317 KUHP—memfitnah dengan tulisan setelah melakukan aksi demonstrasi dan kampanye anti kriminalisasi pers di Makassar, 1 Agustus 2008.

Upi Asmaradana adalah koordinator Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar. Koalisi itu dalam kampanyenya mengkritik Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Irjen Pol. Sisno Adiwino yang mengatakan; publik bisa langsung melaporkan wartawan kepada polisi jika dirugikan oleh pemberitaan media massa tanpa harus menempuh mekanisme hak jawab atau menulis surat pembaca dan wartawan akan dikenai tindak pidana.

Upi Asmaradana menilai isi ucapan kapolda bertolak belakang dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 yang mengatur hak jawab dalam sengketa pemberitaan pers. Dalam unjuk rasa, Upi dan kawan-kawan mengajak setiap insan pers berhati-hati terhadap ancaman kebebasan pers yang akan memberangus hak warga untuk mendapatkan informasi. Upi lantas diperiksa sebagai saksi dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Sisno Adiwino, Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat.

Kini, kasus itu sudah ditangani kejaksaan, kalangan NGO juga turut memperkuat gerakan jurnalis dengan memberikan dukungan kepada mereka. Ternyata ada tantangan dalam ruang demokrasi di Indonesia, dan persoalan ini bukan hanya persoalan pribadi Upi tapi bagian dari perjuangan dalam demokrasi.

Jika dikaji lebih jauh refleksi gerakan sosial di Sulawesi Selatan tahun 2007 hingga 2008 paling tidak, ada tiga respon gerakan yang menonjol; soal kemiskinan, perempuan, dan anti korupsi. Walaupun di beberapa tempat terdapat respon mengenai pelanggaran hak asasi manusia atau soal buruh, namun artikel ini ingin menggali gerakan yang direspon secara luas. Ketiga respon gerakan itu tampak kuat berkaitan dengan politik identitas.

Pertama, isu kemiskinan yang banyak disuarakan oleh organisasi miskin kota. Gerakan ini banyak bersentuhan dengan reaksi atas penggusuran dan pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan akte kelahiran, termasuk alokasi anggaran untuk orang miskin. Namun, gerakan ini tampak kurang merespon secara jauh soal tata ruang kota dan program penanganan kemiskinan yang berhubungan dengan proyek neoliberalisme. Bisa jadi, gerakan ini masih pada tahapan pengorganisasian identitas, di mana orang miskin yang terlibat dalam organisasi dapat memainkan atau menggunakan identitas ini sebagai daya tawar ketika misalnya berhadapan dengan penyedia layanan publik.

Akan tetapi, perlu dicatat ada kelompok miskin kota di bawah koordinasi Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) dan didampingi Uplink (Urban Poor Linkage)—koalisi antara organisasi non-pemerintah dan rakyat basis yang fokus terhadap isu-isu kemiskinan. Mereka juga berjaringan dengan Urban Poor Consortium (UPC) yang fokus terhadap isu-isu kaum miskin kota. Ketiga organisasi itu mendukung pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus arifin Nu'mang setelah berdialog dengan Syahrul Yasin Limpo yang menjajikan program kesehatan dan pendidikan gratis, meski tidak ada kontrak politik.

Dalam pemilihan walikota, KPRM berdialog dengan para kandidat walikota. KPRM mengajukan kontrak politik dengan para calon walikota. Di antara para calon itu yang menandatangani

kontrak politik adalah Ilham Arif Sirajuddin dan Supomo Guntur. Kontrak politik itu antara lain tentang pelayanan publik yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah kota Makassar, tidak melakukan penggusuran terhadap masyarakat miskin, dan memperhatikan situasi masyarakat miskin.

Kedua, isu perempuan. Gerakan ini banyak bersentuhan dengan wilayah partisipasi dan politik, seperti berkaitan dengan afirmasi dan *mainstreaming* gender dalam partisipasi politik anggaran. Secara kongrit, dalam kaitan afirmatif, organisasi perempuan sedang menggunakan kekuatannya untuk mendistribusikan kader perempuan mereka dengan memilih partai politik kecil yang dianggap memungkinkan menerima kader mereka. Mereka masuk dalam kancah pemilihan kepala daerah dan melakukan kontrak politik dengan kandidat.

Ada yang menarik dari gerakan perempuan ini. Mereka melakukan konter atau tandingan idiom yang digunakan proyek neoliberalisme, seperti istilah *sisterhood*. Sekaligus mendorong idiom ini sebagai kesadaran yang lain dalam realitas politik. Di samping itu kelompok perempuan ini mengkritisi peraturan daerah yang diskriminatif seperti yang terjadi di kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pare-Pare

Ketiga, isu anti-korupsi. Gerakan ini memang tidak bergerak secara luas, bahkan beberapa di antaranya cenderung elitis, seperti kedua gerakan sebelumnya. Kasus korupsi yang diungkap gerakan ini kebanyakan berkaitan dengan APBD. Meskipun pandangan soal korupsi dan penegakan hukum, belum pada tahap mematahkan persekongkolan penguasa-penguasa sebagai akar korupsi, dan meningkatkan perhatian masyarakat mengenai pentingnya politik anggaran. Gerakan anti-korupsi juga terlampau terfokus pada pendekatan teknokratis (*governance*) yang boleh jadi merupakan agenda donor saat ini yang sangat disukai.

Keempat, isu tentang anggaran dan pelayanan publik. Gerakan ini tidak juga bergerak secara luas, akan tetapi sudah banyak organisasi yang membicarakan hal ini. Seperti Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop), Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, Kupas, Konsorsium LSM Lokal Sulawesi Selatan (KL2SS) dan organisasi lainnya.

Bagaimana gerakan perempuan di Sulawesi Selatan?

Munculnya wajah-wajah baru di dunia bisnis sebagai sebuah komponen gerakan masyarakat sipil juga terjadi walaupun berjalan lambat. Yang paling menonjol adalah meningkatnya jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ada ratusan LSM yang terdaftar di Kesatuan Bangsa Sulawesi Selatan. Demikian juga munculnya organisasi perempuan yang menggarap program pemberdayaan perempuan muncul tidak hanya di tingkat provinsi bahkan juga di tingkat kabupaten.

Tentu saja masih banyak upaya lainnya yang dilakukan para komponen masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan lainnya seperti Aisiyah, Fatayat dan Muslimat NU. Namun, pembahasan ini akan mengupas gerakan perempuan yang tergabung dalam Koalisi Aktivistis Perempuan Sulawesi Selatan yang di dalamnya tergabung organisasi FPMP (Forum Pemerhati Masalah Perempuan) Sulawesi Selatan, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Solidaritas Perempuan Angin Mamiri, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dan Simpul Aspirasi Perempuan (SAP)—gabungan aktivis perempuan dan aktivis partai perempuan.

Organisasi itu melakukan advokasi, pendidikan kritis terkait dengan penegakan hak asasi manusia dan hak perempuan,

pengarus utamaan gender, menginisiasi lahirnya peraturan daerah yang berpihak terhadap perempuan, seperti peraturan daerah anti perdagangan manusia, kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, mendukung pencapaian kuota 30%, pendidikan kader, kampanye melalui media, mendorong perempuan memasuki jabatan-jabatan strategis baik di Birokra maupun di tempat-tempat lainnya seperti di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang memberikan dukungan untuk meraih keadilan dan kesetaraan gender .

Organisasi-organisasi perempuan banyak melakukan kegiatan yang memerlukan tindakan cepat, seperti bencana alam, dan penanganan korban perdagangan dan korban kekerasan. Mereka juga memperingati hari penting nasional dan internasional seperti hari perempuan internasional, hari Kartini , hari lingkungan dan lainnya. Mereka telah mengambil peran khusus dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi dan melakukan kegiatan secara sistematis.

Seperti yang dilakukan oleh Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan, LBH APIK, Solidaritas Perempuan Komunitas Angin Mamiri, dan Koalisi Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Sulawesi Selatan mengembangkan anggotanya di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Sekarang sudah ada beberapa cabang yaitu; cabang Makassar, cabang Pangkep, cabang Sidrap, cabang Takalar, cabang Bulukumba dan menyusul kabupaten lainnya seperti Maros dan Gowa. Sebagai organisasi massa yang bertekad meningkatkan kualitas kader, mereka melakukan pendidikan kader berjenjang.

Harapannya, pendidikan kader berjenjang ini akan menghasilkan anggota KPI yang mampu menghadapi tantangan

zaman, melakukan perubahan sesuai cita-cita pendirian organisasi untuk meraih kehidupan yang demokratis dan adil bagi perempuan.

Sedangkan LBH APIK lebih banyak melakukan kegiatan pendampingan korban kekerasan, pendidikan kritis di tingkat akar rumput, pelatihan paralegal di kalangan perempuan. Solidaritas Perempuan Komunitas Angin Mamiri melakukan kegiatan terkait pengelolaan sumber daya alam dengan meningkatkan pengetahuan perempuan soal sumber daya alam, penelitian tentang peraturan daerah yang diskriminatif di kabupaten Bulukumba dan melakukan training feminisme.

Khusus untuk Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan yang memiliki 13 anggota jaringan, selain melakukan advokasi dan pendidikan, mereka berdialog dengan para pihak terkait. Mereka juga melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan yang bias gender. Sejak tahun 1999 mereka aktif melakukan pendidikan kritis. Hingga tahun 2005 ada tiga poin penting:

Di tingkat akar rumput sebanyak 5.040 orang telah mengikuti pendidikan politik dan diskusi di kampung-kampung. Sudah terbangun jaringan di antara mereka. Dalam perkembangan diskusi dan hasil evaluasi menunjukkan, peserta pendidikan telah memperoleh pengetahuan terkait dengan persoalan gender, politik, pemilu 2004 dan perangkat undang-undang. Harapannya, pengetahuan yang mereka peroleh dapat diimplementasikan di tingkat lokal, seperti; mengawasi seluruh proses pembangunan di pedesaan, kecamatan hingga ke tingkat kabupaten .

Di tingkat aktivis perempuan dan aktivis partai telah terbangun sebuah jaringan atas nama 'perempuan'. Meski beragam partai tetapi para aktivis perempuan mampu bekerja sama.

Di pihak-pihak terkait lainnya, sudah ada sekitar 1.200 orang dari berbagai kalangan, seperti tokoh masyarakat, mahasiswa,

tokoh adat, tokoh perempuan yang telah mengikuti dialog tentang keadilan gender dan quota 30% bagi perempuan di parlemen.

Hasil dialog dengan perempuan di akar rumput dan para aktivis partai, ternyata pendidikan politik yang telah dilakukan perlu diperkaya dengan pengetahuan-pengetahuan lain agar partisipasi perempuan dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi makin meningkat, termasuk di dalamnya upaya memberantas korupsi.

Hal-hal yang telah dilakukan itu tentu saja belum cukup untuk dianggap sebagai suatu gerakan sosial, akan tetapi dengan meningkatnya kesadaran perempuan dalam menghadapi situasi politik di sekitarnya akan menjadi modal utama untuk membangun gerakan sosial yang lebih tangguh bersama komponen lainnya, seperti kelompok petani, kelompok miskin kota, dan kelompok pro demokrasi lainnya.

Ada beberapa alasan mengapa kelompok aktivis perempuan itu secara individu terbuka mengambil sikap mendukung pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang sebagai gubernur. Alasan itu antara lain;

Calon lain lebih dekat dengan kelompok yang melakukan politisasi agama, seperti penegakan syariat Islam. Padahal bagi aktivis perempuan yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Perempuan Sulawesi Selatan, persoalan ketaatan terhadap agama tidak perlu diatur oleh negara.

Setelah dialog dengan calon gubernur, pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang, pasangan itu dinilai lebih memahami persoalan hak-hak perempuan dibandingkan calon lainnya.

Sikap itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan aktivis LSM. Tapi para aktivis perempuan yang telah sepakat

dengan sikap tersebut telah mengambil pilihan secara terbuka dan mengharapkan pemimpin Sulawesi Selatan bisa melihat persoalan perempuan, keadilan dan kesetaraan gender, memberi ruang bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis, menerapkan anggaran yang responsif gender dan tidak melahirkan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak.

Demikian pula saat pemilihan walikota Makassar tahun 2008, kelompok aktivis perempuan itu mendukung calon walikota Ilham Arief Sirajuddin meski tidak lagi menyodorkan kontrak politik. Mereka menilai, selama Ilham menjadi walikota, dia telah melakukan beberapa terobosan yang dianggap berpihak pada keadilan dan kesetaraan gender dan anti kekerasan, seperti; pengobatan gratis, mengeluarkan surat keputusan pendidikan gender di Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan menerbitkan modul gender untuk SMP.

Bagaimana menjelang pemilu 2009?

Para aktivis perempuan melakukan konsolidasi politik untuk mendukung calon anggota legislatif perempuan. Dengan semboyan “Pilih Perempuan Potensial”. Mereka juga mengajak kaum laki-laki untuk memilih perempuan. Konsolidasi dilakukan hingga ke kabupaten walaupun hingga tulisan ini dibuat Januari 2009, tidak ada donor yang mendanai. Mereka menjuluki kegiatannya itu: Wisata Kuliner untuk mengkampanyekan para kandidat perempuan yang dianggap potensial. Supaya perempuan dapat menjadi legislator yang anti korupsi, anti kekerasan dan mengusung kesetaraan gender.

Gerakan rakyat melawan ketidakadilan di Sulawesi Selatan perlu diperkuat dengan mensinergikan kembali kerja jaringan yang pernah dibangun sebelum tahun 2004. Tampaknya hal ini yang justru tidak terkonsolidasi dengan baik di antara kelompok

sipil. Kecenderungan yang muncul adalah aktivitas parsial dan eksklusif.

Strategi konsolidasi untuk merebut ruang pengambilan keputusan bisa dilakukan antara lain dengan cara:

Pertama, mengembangkan strategi politik yang bersifat pragmatis dengan memperkuat dukungan kepada salah satu kandidat yang diharapkan bisa mendorong perubahan. Itu sebagai upaya langkah taktis untuk mencapai sebuah perjuangan dalam proses demokrasi dengan mengedepankan dialog kritis dan sikap independen.

Mengembangkan strategi ideologis dengan melihat faktor-faktor eksternal yang dapat memperlemah kekuatan rakyat seperti tekanan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil dan pers.

Pemetaan kecenderungan elit politik lokal di Sulawesi Selatan menggambarkan sebagian elit politik memiliki histori keluarga militer yang pernah berjaya. Sebagian lagi kelompok saudagar, keluarga birokrat dan ningrat. Potret ini penting untuk melihat kembali, apakah hal ini akan menjadi kontradiksi bagi gerakan rakyat.

Kedua, pertarungan pemilu legislatif memungkinkan adanya keterlibatan keluarga elit politik yang bisa memunculkan oligarki.

Maka dari itu, inisiatif tidak hanya pada sisi pragmatis—keterlibatan dalam politik elektoral tetapi juga perlu melihat sisi yang lebih strategis.

Pada sisi lain, ternyata angka kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Selatan makin tinggi, dapat kita lihat dari pengaduan yang masuk ke Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan maupun yang masuk ke LBH APIK Makassar.

Untuk itu, aktivis perempuan anggota partai dan perempuan secara umum perlu melakukan kegiatan berupa:

Pendidikan hak-hak politik dan hak perempuan, pendidikan tentang korupsi dan meningkatkan kapasitas anggota legislatif dan perempuan secara umum.

Sosialisasi dan penyadaran gender untuk pengambilan keputusan dan masyarakat luas

Penguatan jaringan untuk membentuk simpul diskusi perempuan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.

Ketika Air Diperebutkan: Kasus Taman Wisata Alam Tamblingan

*Simpul Bali FBB Prakarsa Rakyat*¹

*Orang bodoh akan menganggap pecahan batu sebagai ratna permata, tetapi orang bijak menyatakan ada tiga ratna permata di bumi, yaitu air, tumbuh-tumbuhan, dan kata-kata bijak
(Canakya Nitisastra XIII.21)*

Perebutan atas sumberdaya air sudah sering kali terjadi di Bali. Bukan hanya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar. Bukan hanya dikomersialkan dalam bentuk pelayanan ke industri pariwisata atau air kemasan, melainkan juga komersialisasi untuk melakukan berbagai aktivitas di atasnya. Pemanfaatan air tanpa merusak keberadaannya sering dijadikan alasan untuk meraup keuntungan yang besar. Terlebih lagi ketika rencana pemanfaatan tersebut dihubungkan dengan kata ‘pariwisata’.

1 Paper Untuk Lokakarya Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat, Bali, 9-12 Februari 2009. Penulis : Ambarwati Kurnianingsih

Keindahan Danau Buyan-Tamblingan yang berada di tengah Pulau Bali tidak bisa hanya dinikmati dari kejauhan. Pasar ingin memanfaatkan wilayah danau untuk kepentingan pariwisata. Berdasarkan izin prinsip Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 283/Menhut-II/2007 yang telah dikantongi, PT Nusa Bali Abadi berencana mengelola kegiatan-kegiatan pariwisata alam yang berkaitan dengan usaha jasa wisata, akomodasi, penyewaan peralatan tirta, cinderamata, konsumsi, dan penyewaan peralatan olah raga air. Salah satu bentuk pembangunan yang direncanakan adalah pengadaan 25 unit villa.

Izin dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa pada Taman Wisata Alam Danau Buyan-Tamblingan di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali dapat diperuntukkan bagi kegiatan pengusahaan pariwisata alam dengan memperhatikan azas konservasi, kelestarian, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistemnya. Maka lahan di dalam hutan Dasong yang selama ini melindungi dan mempertahankan air danau Buyan-Tamblingan seluas 20,30 hektar pun dibebaskan untuk jangka waktu 30 tahun sejak tanggal 16 Agustus 2007. Secara adat, wilayah tersebut berada di dalam wilayah Desa Adat Tamblingan yang meliputi Catur Desa (Munduk, Gobleg, Gesing, dan Umajero) sebagai *pengempon*, pemeliharanya. Keempat desa tersebut dikenal dengan nama Catur Desa Adat Dalem Tamblingan.

PT Anantara, calon investor lain pun ikut melirik. Dalam proposalnya, kawasan seluas 900 hektar ‘diminta’ untuk dikembangkan sebagai ‘*Buyan Eco-Cultural Heaven*’. Pentas budaya kolosal akan disajikan di dalam kawasan tersebut, juga wisata pembelajaran dalam nuansa kehidupan masyarakat lokal dengan pertanian dan kesenian yang kuat dalam sebuah pengembangan kawasan terpadu dengan Taman Wisata Alam yang memiliki standar internasional. *Village cooperate organic farming, eco lodge bungalow, artisan food home industry*, bengkel

kriya, *artisan passage (shop and dine)*, dan pasar tradisional akan dibangun dalam lahan penguasaan Departemen Kehutanan dan sebagian lahan milik masyarakat.

Desa Tua di Kaldera Bali

Konon, wilayah Timur sisi Danau Tamblingan dihuni oleh sekelompok masyarakat Bali Purba yang disebut *kraman I Tamblingan* (warga Tamblingan). Keberadaan tersebut diketahui dari beberapa prasasti yang ditemukan di pinggiran danau serta beberapa tempat suci yang tersebar di sekitar danau, "... *kesawa, adapnah anak banua di Tamblingan*" yang artinya "... kesawa adalah tempat penduduk di desa Tamblingan". Istilah 'banua di Tamblingan' tersebut terdapat pada prasasti Gobleg Pura Batur A tanpa tahun yang diduga dikeluarkan ketika pemerintahan Raja Ugrasena (915-936 M). Artinya bahwa pada abad X telah ada permukiman yang bernama Tamblingan.

Ketut Artina, Ketua BPD Desa Gobleg mengatakan bahwa *kraman I Tamblingan* yang saat ini terpecah dalam wilayah Catur Desa dan wilayah lain di Indonesia adalah keturunan Ida Dalem Tamblingan, seorang raja penguasa *kraman I Tamblingan*. Dulu kerajaan Ida Dalem Tamblingan berpusat di Alas Merta Jati di sekitar Danau Buyan-Tamblingan, sampai ke Gunung Raun di sebelah barat danau dan turun sampai di bagian bawahnya.

Ada informasi yang mengatakan bahwa sebenarnya Ida Dalem Tamblingan adalah Rsi Markandya yang ketika itu melakukan semadi di sekitar danau. Namun *kraman I Tamblingan* yang saat ini tinggal di desa Gobleg tidak pernah mendengar cerita tersebut. Satu hal yang pasti, Ida Dalem Tamblingan adalah penganut aliran Waisnawa, bahwa segala sesuatu diawali oleh dan diakhir dengan air, seperti halnya Rsi Markandya mempercayai

hal tersebut. Mereka percaya bahwa sumber air adalah satu hal yang harus disucikan, dan air merupakan sarana pembersih.

Pada masa Bali Purba, kehidupan di Bali tersusun secara harmonis saling berdampingan antara aliran Bhairawa di Timur dan Waisnawa di Barat. Unsur utama di wilayah Timur Bali lebih banyak dipengaruhi pancadatu atau logam (emas, perak, tembaga, besi, permata mirah), sementara di sebelah Barat dominan dipengaruhi pancamahabutha (air, tanah, api, angin, akasa). Menurut informasi dari Putu Suarsawan yang banyak mendalami kebudayaan Bali Kuno dikatakan bahwa dua kebudayaan alam tersebut hidup berdampingan dengan sangat baik, yang kemudian menjadikan Bali memiliki peradaban dan budayanya sendiri sampai saat ini.

Ketika itu masyarakat Bali belum mengenal Brahma, Wisnu, dan Siwa, melainkan Ratu Ngurah Tangkep Langit, Ratu Wayan Kebeng, Ratu Made Jelaung, Ratu Nyoman Sakti Pengadangan, dan Ratu Ketut Petung. Kelimanya berperan berdasarkan fungsinya, seperti Ratu Nyoman Sakti Pengadangan yang ditempatkan di perempatan jalan atau tempat-tempat *tenget*, sakral sebagai ‘penjaga’ tempat tersebut. Ketika itu pula sungai dan danau banyak dijadikan sebagai pusat kerajaan, di mana masyarakatnya sangat taat menjaga keberadaan air.

Ketaatan tersebut menciptakan satu konsep keruangan yang utuh khususnya bagi *kraman* I Tamblingan untuk melindungi sumber air, terutama Danau Buyan-Tamblingan. Konsep keruangan tersebut dibagi dalam tiga wilayah kesucian, yaitu *luhuring capah* di hulu, *madyaning capah*, dan *soring capah* di hilir. Salah satu cara untuk menjaga kesucian *luhuring capah*, *kraman* I Tamblingan tidak mengenal pembakaran mayat dalam upacara ngaben karena dikhawatirkan abu yang dihasilkan akan mengotori *ulu suci*, gunung dan *ulu merta*, air danau. Selain itu, jasad dianggap sudah

bersih ketika diperciki *tirta pengentas*, air suci yang ditujukan bagi arwah untuk menunjukkan arah perjalanan roh ke alam *sunia*.

Bukan hanya dari abu pembakaran, bahkan ketika melakukan upacara *manusa yadnya*, seperti melahirkan mereka harus melakukannya di luar *luhuring capah*. Hal tersebutlah yang pada akhirnya menyebabkan mereka memutuskan untuk pindah dari permukiman di sekitar danau ke wilayah yang lebih jauh dari danau, yaitu ke desa Gobleg. Selanjutnya beberapa keturunan Ida Dalem Tamblingan menyebar ke tiga desa lainnya, yaitu Munduk, Gesing, dan Umajero, hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang dari wilayah Bali lainnya. Sampai akhirnya ada juga yang menyebar dan tinggal di luar empat desa, bahkan ke luar pulau Bali.

Kawasan Tamblingan sudah ditetapkan sebagai kawasan suci sejak tahun 922 M dalam Prasasti Tamblingan ketika Sri Ugrasena menjadi raja di Bali. Hal tersebut kemudian dipertegas oleh Raja Jayapangus di tahun 1099 M dan Sri Bhatara Parameswara tahun 1320 M dalam prasasti-prasasti yang berisi kutukan bagi pelanggar kesuciannya. Berdasarkan catatan sejarah, kutukan atas pelanggaran terbukti dengan hancurnya kerajaan Kalianget yang dipimpin Raja I Dewa Kaleran pada awal abad ke-16 karena menodai kawasan suci Tamblingan. Bukti kedua terjadi tahun 1652 M ketika kerajaan Buleleng di bawah pimpinan Kyai Anglurah Panji Sakti merusak Pura Batukaru dalam ekspedisi penyerangannya ke Denpasar dan Tabanan. Dan bukti ketiga terjadi tahun 1815 M berupa banjir lumpur yang menimbun Buleleng bagian selatan karena kelestarian gunung dan danau tidak dijaga.

SK Menteri Kehutanan: Perbedaan Budaya dan Cara Pandang

Hutan Dasong sebagai penyangga danau Buyan-Tamblingan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam (TWA) berdasarkan Keputusan menteri Kehutanan No. 144/Kpts-II/1996 tanggal 4 April 1996. Kemudian direvisi pada tanggal 22 Januari 2007 melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Propinsi Bali No. 140/Kwl-5/1997, di mana luasan menjadi 1.703 hektar yang meliputi kawasan hutan dan perairan Danau Buyan-Tamblingan yang ditetapkan sebagai ‘tanah negara’.

Hutan di sekitar Danau Buyan-Tamblingan bertipe hutan hujan tropis pegunungan yang dicirikan dengan curah hujan tinggi, kondisi kawasan selalu basah, dan keragaman jenis tumbuhan relatif tinggi. Selain itu terdapat tipe ekosistem lahan basah berupa danau dataran tinggi. Kawasan danau tersebut merupakan kawasan resapan serta persediaan dan pelindung tata air (hidro-orologis).

Dikatakan juga bahwa penetapan kawasan tersebut menjadi TWA mempunyai empat tujuan. Tujuan pertama adalah melindungi ekosistem penting yang menunjang sistem kehidupan berupa hutan hujan tropis dataran tinggi dan ekosistem lahan basah dengan fungsi hidro-orologis bagi daerah di bawahnya. Kedua adalah melindungi dan mengawetkan keanekaragaman sumberdaya alam hayati penting dan langka. Ketiga adalah melestarikan budaya berupa 24 pura penting dan situs purbakala prasejarah. Keempat adalah memanfaatkan secara berkelanjutan potensi wisata alam berupa panorama keindahan alam danau alami, hawa sejuk, dan udara bersih segar alami melalui pengembangan wisata alam (eko turisme).

Dikatakan juga bahwa di kawasan TWA terdapat dua buah danau yang cukup luas yang dikelilingi oleh hutan yang

masih utuh dan alami serta tebing-tebing danau yang curam, menjadikan kawasan tersebut mempunyai panorama alam yang indah. Keindahan tersebut juga ditunjang dengan perairan danau yang tenang dengan udara pegunungan yang sejuk dan nyaman. Kondisi demikian yang kemudian dilihat bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan wisata alam di perairan danau, selain beristirahat pada lokasi tinggi tertentu untuk menikmati pemandangan danau.

Kementerian kehutanan melalui KSDA juga melihat bahwa beberapa pura yang dibangun di antara pepohonan besar dan lebat di pinggir danau merupakan panorama yang tidak hanya unik, melainkan juga khas. Ada banyak kegiatan rekreasi yang bisa dilakukan, seperti memancing, bersampan, berkemah, lintas alam, penjelajahan, *outbound*, dan wisata ilmiah. Termasuk di dalamnya para pengunjung bisa melakukan kegiatan wisata spiritual.

Saat ini di dalam kawasan hutan Dasong sudah dibangun dua unit Bumi Perkemahan dengan fasilitas MCK dan pos jaga resort KSDA Buyan-Tamblingan. Fasilitas tersebut dijaga oleh petugas kerjasama antara KSDA dan masyarakat sekitar. Mereka juga sudah membentuk kelompok masyarakat yang berperan sebagai pemandu wisata alam. Menurut seorang petugas pintu masuk yang tinggal di Desa Pancasari, tidak lama setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam, KSDA mencoba melibatkan masyarakat sekitar sebagai petugas jaga dan pemandu.

Berdasarkan peraturan pemerintah RI no. 18 tahun 1994 tentang pengusahaan pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dikatakan bahwa jenis-jenis sarana pariwisata alam yang dapat diselenggarakan adalah akomodasi (pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja), makanan dan minuman, sarana wisata

tirta, cinderamata, dan sarana wisata budaya. Usaha pariwisata tersebut diselenggarakan dengan persyaratan luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan adalah maksimal 10% dari luas zona pemanfaatan, bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat, dan tidak mengubah bentang alam yang ada.

Terkait dengan perijinan, dalam pasal 5 ayat 3 dikatakan bahwa ijin pengusahaan pariwisata alam diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Sementara menurut ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa pengusahaan pariwisata alam diselenggarakan oleh koperasi, BUMN, perusahaan swasta dan perorangan, di mana pengusahaannya diselenggarakan setelah mendapat ijin pengusahaan.

Maka, berdasarkan peraturan tersebut PT Nusa Bali Abadi (NBA) mengajukan rekomendasi pengusahaan pariwisata alam di Taman Wisata Alam Danau Buyan-Tamblingan kepada Kepala BKSDA Bali pada tanggal 7 Februari 2004. Surat yang sama juga dikirimkan kepada Bupati Buleleng, Bali. Kemudian pada 23 Maret 2004 Bupati Buleleng menerbitkan rekomendasi pengusahaan pariwisata alam di TWA Danau Buyan-Tamblingan kepada PT NBA. Disusul terbitnya rekomendasi dari Kepala BKSDA Bali tertanggal 27 Maret 2004.

PT NBA juga mengajukan permohonan rekomendasi ijin pengusahaan pariwisata alam kepada Gubernur Bali dan Menteri Kehutanan. Pengajuan kepada Menteri Kehutanan hanya dilampiri rekomendasi Bupati Buleleng dan Kepala BKSDA. Sementara Gubernur Bali dalam rapatnya bersama Bappeda Bali pada 13 April 2004 keberatan atas permohonan tersebut dengan pertimbangan luas kawasan Bali relatif kecil dan areal yang dimohon merupakan kawasan dan tempat suci yang perlu dijaga

kesakralannya. Bahkan pada 21 Mei 2004 berdasarkan masukan Desa Pekraman Pancasari, Bappeda akan menyiapkan surat dari Gubernur Bali kepada Menteri Kehutanan agar tidak menerbitkan ijin prinsip karena pada 15 April 2004 Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam meminta Gubernur Bali untuk memberikan pertimbangan atas usulan PT NBA.

Namun akhirnya pada 23 Nopember 2004 Menteri Kehutanan menetapkan Ijin Prinsip Pengusahaan Wisata Alam Danau Buyan-Tamblingan, Kabupaten Buleleng. Menanggapi ijin prinsip tersebut, Bappeda Bali mengeluarkan surat tertanggal 18 Januari 2005 meminta Menteri Kehutanan untuk mencabut kembali ijin prinsip yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan berdasar pertimbangan Perda Tata Ruang Bali, luas kawasan hutan di Bali, dan nilai lokal masyarakat Bali yang meyakini hutan-danau-gunung sebagai kawasan suci.

‘Perseteruan’ pro dan kontra atas proyek pengusahaan pariwisata alam pada kawasan Danau Buyan-Tamblingan terus berlanjut hingga tahun 2008. Menteri Kehutanan dan Dirjen PHKA mendapat dukungan dari Bupati Buleleng, bahkan pada 27 Juni 2008 peresmian oleh Bupati Buleleng dilakukan atas pengusahaan pariwisata alam di TWA Hutan Dasong Danau Buyan-Tamblingan. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita, pelepasan burung dan penanaman pohon. Ketika itu PT NBA mengucapkan janjinya untuk tidak menebang satu pohon pun dalam kawasan TWA yang akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata alam. Sementara Gubernur Bali melalui Sekretaris Daerah saling dukung dengan masyarakat Desa Pancasari dan masyarakat Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Bahkan masyarakat Catur Desa Adat Dalem Tamblingan sudah bersurat secara langsung kepada Bupati Buleleng sebelum peresmian dilakukan untuk menyatakan penolakan mereka.

Antara Kultur Tradisional dan Pengetahuan Modern

Masyarakat Catur Desa yang terdiri dari Desa Gobleg, Munduk, Gesing, dan Umajero merupakan *pengempon*, pemelihara 16 pura yang terdapat di dalam kawasan TWA Hutan Dasong yang dikategorikan sebagai *luhuring capah*, kawasan suci. Penolakan masyarakat yang kemudian dilakukan kedua kalinya pada 27 Januari 2009 didasarkan atas alasan sosial budaya, ekologis, yuridis, dan alasan lainnya. Penolakan dilakukan kembali bukan hanya karena alasan Bupati Buleleng tetap melakukan peresmian atas proyek yang sudah ditolak masyarakat, melainkan juga calon investor yang lain – PT Anantara sudah memasukkan proposal pada Juni 2008.

Secara sosial budaya, dikatakan bahwa leluhur masyarakat Catur Desa Adat Dalem Tamblingan sepakat untuk meninggalkan kawasan *luhuring capah* pindah ke empat desa untuk menjaga kesucian kawasan tersebut. Selain itu dikhawatirkan, ketika ijin pengusahaan pariwisata alam diberikan nantinya mereka harus meminta ijin bahkan membayar pada investor untuk melakukan upacara keagamaan. Secara ekologis, kawasan tersebut bermanfaat sebagai sumber air dan merupakan daerah resapan air. Saat ini, jika dibandingkan dengan kondisi 10 tahun yang lalu, lahan sawah banyak yang berubah menjadi kebun karena volume air yang semakin berkurang akibat penebangan liar. Secara yuridis, dianggap bahwa rencana pengusahaan pariwisata alam bertentangan dengan Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bali yang menetapkan hutan Dasong sebagai kawasan suci. Alasan lain yang dijadikan dasar penolakan dikaitkan dengan konsep pariwisata budaya, isu pemanasan global, dan perubahan lingkungan yang terjadi di Bali.

Selain itu, menurut Ketut Artika sebagai Ketua Lembaga Perwakilan Desa (LPD) Gobleg, dalam proses perijinan seharusnya

semua pihak yang terkait dengan wilayah rencana perusahaan pariwisata alam di TWA seharusnya diajak berdiskusi. Namun ketika proses 'sosialisasi' dilakukan, hanya ada dua orang masyarakat adat yang diundang dan dianggap sudah mewakili masyarakat. Kepala Desa dan Ketua LPD Desa Gobleg yang datang waktu itu mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sosialisasi, namun pihak KSDA sudah mengkategorikannya sebagai sosialisasi karena mengundang perwakilan masyarakat. Sampai akhirnya keduanya memutuskan untuk keluar dan tidak mengikuti kegiatan tersebut.

Pada dasarnya sosialisasi yang sebenarnya memang tidak pernah dilakukan baik oleh calon investor maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng. Menurut Pemerintah Kabupaten Buleleng, sosialisasi tidak perlu dilakukan kepada masyarakat karena status hutan yang akan dijadikan perusahaan pariwisata alam adalah hutan negara, bukan hutan rakyat. Maka, bersamaan dengan pernyataan tersebut yang diucapkan pada 9 Agustus 2008 di wantilan Danau Buyan, Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menyatakan bahwa proyek akan tetap berjalan.

Menurut Bupati Buleleng, perusahaan TWA akan bermanfaat untuk menjaga pelestarian kawasan alam sekaligus menjadikannya semakin menarik bagi wisatawan, sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitarnya. Selain untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bali Utara yang ditargetkan 300.000 orang pada 2008, perusahaan TWA diharapkan juga menjadi salah satu alat bagi investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Buleleng.

Pandangan Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap hutan dan pemanfaatannya berbeda dengan masyarakat Catur Desa Adat Tamblingan, juga masyarakat Desa Pekraman Pancasari. Ketika

investor yang ditegaskan oleh Bupati Buleleng mengatakan bahwa tidak akan ada pohon, bahkan satu ranting pun yang ditebang, pernyataan tersebut sangat bertolak belakang dengan rencana pengusahaan pariwisata alam yang akan membangun 25 unit villa untuk akomodasi. Belum lagi penyediaan makan minum yang artinya membuat usaha rumah makan untuk keperluan pengunjung.

Seperti halnya masyarakat Catur Desa Adat Dalem Tamblingan, masyarakat Desa Pekraman Pancasari juga memosisikan hutan Dasong sebagai kawasan suci yang disimbolkan merupakan bagian dari *tri uluning jagat Bali*, tiga kesucian di Bali. Gunung merupakan *ulu suci*, diyakini sebagai tempat pemujaan para dewa dan leluhur. Danau Batur, Beratan, Buyan dan Tamblingan sebagai *ulu mertha*, simbol alam yang adalah sumber kesejahteraan masyarakat Bali. Pura Besakih sebagai *ulu kasta*, simbol tatanan kehidupan orang Bali. Atas dasar hal tersebut, “pemanfaatan hutan dengan tetap menjaga kelestariannya” menjadi pegangan utama.

Terkait juga dengan catatan sejarah tentang terjadinya bencana akibat kutukan tidak dijaganya kelestarian wilayah Tamblingan, hal yang hampir sama pernah terjadi di tahun 1941. Ketika itu Jepang membuat gudang senjata di dalam wilayah hutan Dasong dengan menebang beberapa pohon yang ada di dalamnya. Pada saat itu juga wilayah Catur Desa mengalami kekeringan, bahkan jagung tidak bisa tumbuh. Namun setelah gudang tersebut dibongkar, tanah dan hasil pertanian kembali subur.

Ada ketakutan dari sebagian masyarakat jika perubahan atas kondisi hutan dilakukan, kembali mereka akan merasakan kekeringan atas lahan pertanian mereka yang selama ini sangat subur. Menurut mereka, Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak perlu bekerja keras untuk membuat masyarakatnya sejahtera melalui peningkatan perekonomian masyarakat, termasuk dengan

cara menjanjikan lapangan kerja di bidang pariwisata. Hal yang perlu dilakukan hanyalah terus membiarkan kondisi Hutan Dasong seperti apa adanya saat ini.

Pemerintah Daerah Bali: Coba Memahami Kulturinya

Usaha untuk menolak ijin pengusahaan pariwisata alam terus dilakukan, baik oleh masyarakat Catur Desa Adat Tamblingan maupun Desa Pekraman Pancasari. Demikian juga Gubernur Bali ketika itu, I Dewa Made Berata terus melakukan penolakan sampai masa jabatannya berakhir. Satu kata yang kemudian sempat diucapkan Direktorat Jenderal PHKA adalah, “sebaiknya kita menunggu sikap gubernur yang baru”.

Walhi Bali, sebagai lembaga lokal yang sejak tahun 2007 bekerja bersama masyarakat Catur Desa Adat Tamblingan kemudian menyampaikan surat terbuka tertanggal 23 Agustus 2008 kepada Gubernur Bali yang baru berdasarkan kajian kasus yang dilakukan. Kasus pengusahaan pariwisata alam di TWA Hutan Dasong Danau Buyan-Tamblingan hanya sebagai bagian dari beberapa kasus besar yang akan berdampak pada degradasi lingkungan di Bali.

Melalui suratnya Walhi Bali meminta kepada Mangku Pastika selaku Gubernur Bali yang baru untuk berkomitmen menjaga kawasan ekologi hutan Dasong yang genting bagi Bali dengan tidak mengeluarkan rekomendasi pengusahaan pariwisata alam kepada investor di TWA Hutan Dasong Danau Buyan-Tamblingan, Buleleng. Walhi juga menekankan bahwa ada banyak proyek investasi yang berpotensi merusak lingkungan dan tatanan sosial masyarakat Bali. Hal tersebut mencerminkan arogansi modal kerja dan kolaborasi penguasa lokal sehingga semakin meminggirkan ruang hidup masyarakat Bali.

Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2009, aksi demonstrasi dilakukan sekitar 100 aktivis Forum Peduli Bhisama dan Kawasan Suci dan Pemangku Sejagat Bali (FPBKPSB) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. “Hentikan jerit tangis anak negeri. Jangan jadikan Bali sebagai pulau penderitaan rakyat” dilanjutkan dengan orasi Ibu Pertiwi Menangis. “Saya katakan 100 persen saya setuju dengan yang disampaikan tadi. Setengah persen pun tidak kurang. Jadi, jangan khawatir karena sampai saat ini tidak ada kata ya atas permohonan itu,” demikian tanggapan Gubernur Bali.

Dikatakan, beliau juga ikut menangis setiap kali pulang ke kampung halamannya di Buleleng. Lebih dari 60 hektar luas Danau Buyan berkurang menjadi daratan. Tidak hanya itu. Saat ini 260 dari 400 aliran sungai di Bali sudah kering, dan sisanya menuju kering. Hutan di hulu ditebang, sementara di bagian tengah sungai dicemari. Sepuluh tahun ke depan Bali bisa menjadi padang pasir jika tidak diselamatkan. Mangku Pastika juga mengatakan bahwa pengembangan pariwisata boleh dikembangkan setelah dikaji secara fisiologis, agama, adat, budaya dan ekonomis, dengan penekanan ‘ekonomi’ sebagai pertimbangan nomor lima.

Sementara menurut para sulinggih di Bali, ruang hidup dan kehidupan itu sendiri dapat dilihat sebagai satu hal yang bersifat makro dan mikro, di mana *lingga-yoni* merupakan simbol dari kesuburan. Jika ditinjau dari konsep makrokosmos, *lingga* adalah gunung sementara *yoni* adalah danau dan lautan. Orang Bali percaya bahwa jika gunung dan danau terjaga, maka kesuburan dan kerahayuan akan tercapai. Tetapi jika salah satunya dirusak, kita harus bersiap-siap untuk menderita. Dipercaya juga bahwa kesucian kawasan merupakan nafas dan urat nadi dari konsep tata ruang dan tata perilaku tersebut.

Para sulinggih yang tergabung dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) juga sudah mengeluarkan

bhisama, yang diartikan sebagai perkataan yang mempunyai nilai sakral. Bhisama yang dikeluarkan tersebut didasarkan atas ajaran dalam Kitab Suci Veda yang menjelaskan bahwa tempat-tempat suci atau kawasan suci meliputi gunung, danau, *campuhan* (pertemuan sungai), pantai, dan laut. Tempat-tempat tersebut diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Hal itu yang menyebabkan pura atau tempat-tempat suci umumnya didirikan di tempat suci. Orang Bali percaya bahwa di tempat tersebut orang-orang suci dan umat Hindu mendapatkan pikiran-pikiran suci. Oleh karena itu kawasan suci tidak boleh dieksploitasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Jika ajaran tersebut dilanggar bisa berakibat fatal bagi kehidupan manusia, di mana kerusakan makrokosmos akan berpengaruh langsung terhadap mikrokosmos.

Ekowisata Sebagai Satu Alternatif Solusi

Cerita tentang pariwisata datang dari I Gede Ardika, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang saat ini lebih sering disebut sebagai pengamat pariwisata. Cerita terjadi pada tahun 1991 ketika beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil X Deparpostel Bali dan sedang melakukan kajian ulang atas Rencana Induk Kepariwisata Bali yang disusun SCETO dan sudah berumur 20 tahun lebih.

Ketika itu masyarakat Bali yang sebagian besar adalah petani dan tinggal di pedesaan mengalami disparitas penghasilan yang demikian besar dibandingkan mereka yang bekerja di luar pertanian. Mereka hanya bisa mengejar sapi dan kerbau yang minum air kali, namun tidak mampu mengejar “kijang” bahkan “bebek” yang minum bensin. Masyarakat Bali mempertanyakan hasil kepariwisataan Bali yang kelihatan gemerlap, “apakah Bali untuk pariwisata atautkah pariwisata untuk Bali”? Menurut I

Gede Ardika ternyata teori dari negeri jiran tidak cocok dengan kenyataan yang ada pada masyarakat. Kemungkinan justru teori diciptakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Masyarakat justru terpinggirkan dan hanya menjadi penonton, hanya mengharap ‘limpahan tetesan’ hasil pariwisata yang tak kunjung datang, padahal merekalah pencipta semua keunikan di Bali.

Pariwisata jenis tersebut yang kemudian dikenal dengan pariwisata masal tidak bisa terus dipertahankan. Kegiatan kepariwisataan harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakatnya yang berwawasan budaya dan lingkungan serta terus berlanjut. Jenis usaha berskala besar seharusnya hanya dibatasi pada kawasan pariwisata, sementara di luar wilayah tersebut harus tetap menjadi wilayah usaha masyarakat. Wisatawan yang harus menyesuaikan diri dengan cara hidup masyarakat desa, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antara wisatawan dan masyarakat desa.

Konsep pengembangan pariwisata yang diimpikan I Gede Ardika dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mempengaruhi masa depannya. Hal tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan empat hal, yaitu kapasitas, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Keempat hal itu juga yang kemudian dijadikan dasar untuk mengembangkan wisata pedesaan berbasis ekologi.

Hal yang sama juga diimpikan oleh Yayasan Wisnu dan empat desa di Bali. Melalui Jaringan Ekowisata Desa, konsep pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan bisa direalisasikan. Potensi wisata yang dimiliki bisa dikelola sendiri oleh masyarakat sesuai dengan budaya dan lingkungannya. Berdasarkan pengalaman berjaringan dalam melakukan kegiatan ekowisata selama tujuh tahun, dapat dikatakan bahwa konflik atas

sumberdaya belum pernah terjadi. Pengelolaan atas sumberdaya komunitas tidak dikelola hanya berdasarkan rencana sepihak, namun justru masyarakat itu sendiri sebagai pembuat rencana kelola wilayahnya.

Kesepakatan untuk melakukan ekowisata diawali dengan berbagai kegiatan pengenalan atas potensi yang dimiliki masing-masing desa. Pengenalan dilakukan melalui kegiatan pemetaan wilayah, termasuk di dalamnya pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sosial ekonomi budayanya. Hal lain yang juga dilakukan sebagai satu upaya penyiapan ekowisata adalah peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan, seperti pengorganisasian masyarakat serta pengumpulan data dan informasi. Identifikasi atas permasalahanpun dilakukan melalui kegiatan tersebut sebagai satu upaya memetakan kondisi sosial masyarakat. Beberapa pelatihan teknis kemudian juga dilakukan, seperti pemahaman ekowisata dan pemandu lokal. Ekowisata atau *eco-tourism* yang dikembangkan kemudian selalu berpegang pada prinsip *ecology*, *economy*, dan *evaluation and community opinion*.

Maka ketika pariwisata dijadikan satu kebijakan di Bali, ekowisata merupakan satu alternatif pariwisata yang bisa dikembangkan. Bukan pariwisata massal yang seperti selama ini berkembang di Bali, yang membutuhkan modal besar dari luar dan yang tidak berpihak pada masyarakat bahkan masyarakat hanya sebagai obyek dan penonton. Melainkan pariwisata yang hanya merupakan bonus dari proses pengayaan atas nilai kehidupan masyarakat Bali, yaitu pertanian.

Terkait dengan kasus perusahaan pariwisata alam di Hutan Dasong Danau Buyan-Tamblingan, ekowisata bisa dijadikan alternatif untuk menjembatani pro kontra antara Menteri Kehutanan-Bupati Buleleng dengan masyarakat adat yang

didukung Gubernur Bali. Masyarakat berdasarkan kesepakatan di antara mereka bisa membuat rencana pengembangan wilayah. Tidak sebatas pada pengembangan ekowisata karena pada akhirnya ekowisata merupakan bagian dari pengelolaan sumberdaya komunitas secara keseluruhan. Nilai dan budaya lokal menjadi dasar pertimbangan utama dalam pengelolannya.

Jika kelestarian kawasan Hutan Dasong Danau Buyan-Tamblingan tetap bisa dibiarkan apa adanya seperti saat ini dengan pemanfaatan secukupnya bagi masyarakat Catur Desa Adat Dalem Tamblingan dan Pekraman Pancasari, maka makna dari kata ‘Tamblingan’ juga bisa tetap terjaga. Tamblingan dalam prasasti Bali Kuno dimaknai sebagai “bisikan suara obat kesadaran diri”. Tamblingan kemudian juga dikenal dengan nama Air Ayu Ling oleh para tetua desa setempat, yang berarti “air obat penyembuh yang membangkitkan bisikan suara kesadaran”. Akankah para penguasa wilayah, terutama mereka yang duduk dalam pemerintahan atas nama negara akan tetap bersikap seperti para Raja Bali Kuno memperlakukan kawasan suci Danau Buyan-Tamblingan? Jika ya, maka suara kesadaran diri diharapkan akan tetap ada sebagai penyembuh, pemberi keselamatan, dan kerahayuan. Namun jika tidak, keselamatan dan kerahayuan mungkin akan hilang bersamaan dengan hilangnya air obat penyembuhnya.

Kajian Kasus Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam

Walhi Bali

Aspek Hukum

1. Kesalahan prosedur dalam pengeluaran ijin bahwa ijin pengusahaan pariwisata alam akan diberikan oleh Menteri Kehutanan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Menteri Kepariwisata dan Gubernur Kepada Daerah

Tingkat I yang bersangkutan, namun ijin sudah dikeluarkan tanpa rekomendasi Gubernur Bali

2. Kesalahan penyusunan AMDAL yang tidak transparan dan akuntabel bahwa AMDAL yang dibuat harus melibatkan partisipasi masyarakat yang terkena dampak atau yang berkepentingan, namun
3. Pelanggaran terhadap Tata Ruang Bali bahwa TWA hutan Dasong merupakan kawasan lindung yang keberadaannya harus dijaga karena menjaga kawasan di bawahnya

Dampak terhadap Lingkungan Hidup

1. Mengurangi fungsi kawasan hutan Bali yang saat ini hanya 23% dari luas daratan, padahal idealnya 30%
2. Meningkatkan polusi udara dan kebisingan akibat mobilitas kendaraan keluar masuk hutan untuk pembangunan proyek
3. Mengganggu ekosistem danau dan hutan akibat pembangunan infrastruktur jalan beraspal dan infrastruktur lainnya
4. Menurunkan keanekaragaman hayati akibat aktivitas wisata, termasuk mengurangi akses binatang hutan ke air danau
5. Meningkatkan potensi erosi dan sedimentasi kawasan danau akibat penebangan pohon yang juga akan merubah bentang alam dan struktur tanah
6. Menurunkan kualitas dan kuantitas pasokan air untuk memenuhi kebutuhan air villa, sementara pencemaran akan terjadi pada air danau karena wisata air yang menggunakan peralatan berbahan bakar fosil

Aspek Sosial Budaya

1. Mengurangi akses pemanfaatan masyarakat yang selama ini melakukan kegiatan pencarian kayu bakar, memancing, dan mencari rumput untuk pakan ternak
2. Mengingkari nilai dan sistem kepercayaan masyarakat lokal bahwa “masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara

dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air, dan pesisir pantai serta sumberdaya lainnya yang digunakan atau dikuasai secara tradisional serta untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap enerasi-generasi mendatang. Di samping itu Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat telah mengeluarkan keputusan no. 11/Kep/I/PHDIP/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura bahwa kawasan suci meliputi gunung, danau, campuhan (pertemuan sungai), pantai, dan laut.

Papua di Tengah Badai

Simpul Papua FBB Prakarsa Rakyat¹

Bumi Papua tidak hanya dikenal dengan kekayaan alamnya yang berlimpah ruah. Mulai dari emas, tembaga hingga kekayaan minyak bumi yang bernilai milyaran dolar. Papua juga dikenal karena keindahan alam dan kekhasan budayanya yang memukau. Kekayaan Papua itu membuat dunia internasional melirik sumber alam dan berupaya menanamkan modal untuk meraup keuntungan yang berlipat.

Dalam gelimang kekayaan itu, ternyata tersimpan pula ribuan masalah yang menggerogotinya. Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, Papua hingga akhir 2008 hampir terus menerus dilanda polemik. Mulai dari persoalan pelanggaran hak asasi manusia, pembangunan ekonomi yang tak kunjung membaik, meningkatnya penyebaran HIV/AIDS, pengerukan sumber alam oleh PT. Freeport, pelaksanaan otonomi khusus yang tak kunjung usai hingga persoalan tuntutan merdeka dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

1 Paper ini ditulis oleh Jerry Omona, Aktivist FOKER PAPUA dan seorang wartawan

Kondisi ini telah terjadi semenjak Papua (sebelumnya bernama Irian Jaya) masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1969. Sejak itu, Papua seakan tak pernah berhenti menangis menyaksikan anak-anaknya mati tertembak atau dibunuh secara sadis. Raungan tangis itu kini terus berlanjut pada saat melihat putera-puterinya harus terpinggirkan dan tak berdaya atas hidupnya karena arus kapitalisme global yang merangsek ke dalam dirinya.

Sampai di sini, Papua dulu dan sekarang sepertinya sama dan barangkali akan serupa juga pada masa mendatang. Indikatornya dapat dilihat misalnya dari persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang tak kunjung reda. Hasil monitoring Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAM) selama 3 tahun (dari 2004 hingga 2006) memperlihatkan betapa penduduk asli Papua telah kehilangan rasa aman untuk hidup di tanah leluhurnya. Masyarakat kerap menerima teror, intimidasi dan kekerasan fisik dari aparat keamanan. Kekerasan oleh militer belum berakhir.

Contoh kasus terjadi April 2005 lalu di distrik Bupul Kabupaten Merauke. Dua orang bernama Rafael Kapura dan Barthol Yolmen ditangkap dan disiksa oleh anggota Kostrad Yonif 643/WNS di pos Bupul XII. Tentara menuding mereka berdua sebagai anggota OPM. Rahang Barthol patah dan sekujur tubuh Rafel penuh luka sulutan rokok.

Dalam kasus lain, November 2005, Hendrikus Napet Gebze juga dipukul oleh Omba, anggota Kostrad Yonif 643/WNS di Kambapi, Merauke, hingga rahangnya retak. Pada awal Desember 2005, terjadi juga penembakan terhadap seorang warga sipil, Liborius Oka di Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel oleh Praka Zulkarnaen Lubis, anggota Kostrad Yonif 643/WNS.

Dari 250 suku asli yang ada di Papua, sebagian besar suku atau sekitar 1,5 juta jiwa rakyat asli Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tinggal tanpa ada harapan. Rumah-rumah dibangun hanya dengan bilah-bilah kayu beratapkan daun rumbia. Padahal kucuran dana otonomi khusus tak kepalang besar hingga trilyunan rupiah.

Tahun anggaran 2006 saja misalnya, dana otonomi khusus yang dikucurkan untuk Papua sedikitnya Rp 3,5 trilyun. Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Achmad Hatari mengatakan, dari total dana otonomi khusus itu sekitar Rp 425.100.000 dialokasikan untuk pembangunan kampung atau program *block grand*. Selebihnya sekitar Rp 3,1 trilyun dialokasikan untuk belanja publik dan aparatur di provinsi, kabupaten dan kota.

Dana otonomi khusus untuk Merauke sendiri lebih dari Rp 61 milyar. Sejak tahun 2002, dana itu terus merangkak hingga tahun 2008 besarnya empat kali lipat mencapai Rp 8,3 trilyun. Dana itu untuk pemberdayaan kampung dan belanja publik serta aparatur.

Sumber biaya dari dana perimbangan yang lain pun tak kalah melimpahnya. Namun ironisnya, pemilik tanah (warga asli Papua) justru tidak menikmati semua itu. Suku besar Malind Anim di Merauke yang menempati sebuah kampung di Saror, distrik Kurik hanya menerangi rumah-rumah mereka dengan lentera atau petromaks. Warga lalu mengelilingi perapian yang dibuat sendiri untuk menerangi gelapnya malam. Untuk kebutuhan sehari-harinya, mereka harus berjalan dengan jarak cukup jauh hanya untuk mengambil sayuran yang ada di kebun kecil miliknya. Sebagai pelengkap menu makanan, mereka juga harus mencari hewan buruan seperti rusa yang telah berpindah jauh ke negara tetangga Papua New Guinea karena selalu diburu oleh pemburu liar dengan senjata api.

Kondisi ini tidak hanya terjadi untuk suku Malind Anim yang berasal dari Sosom, Imo, Mayo dan Ezam (adat setempat yang menempatkan sukunya ke dalam empat penjuru mata angin), tapi juga terjadi untuk beberapa suku yang lain seperti Muyu dan Mandobo di Mindiptana, Boven Digoel atau Awyu di Mappi. Di bagian utara dan tengah Papua, sejumlah suku di sana hidup dalam kondisi miskin. Di Timika, sekitar tujuh suku di wilayah itu hanya bisa menadahkan tangannya kepada pemilik PT Freeport dan memohon bantuan mereka. Padahal merekalah pemilik tanah di mana Freeport mengambil emas dan tembaga selama lebih dari 40 tahun. Di sanalah tersimpan cadangan bijih emas terbesar di dunia.

Ibarat sebuah penjajahan di abad moderen, perusahaan asal Amerika Serikat itu menguasai cadangan emas dan tembaga kedua terbesar di dunia. Bayangkan saja, sejak April tahun 1967 Freeport telah memulai kegiatan eksplorasinya di Papua - sebanyak 2,5 milyar ton melalui Kontrak Karya I yang penuh dengan intrik dan tipudaya. Kegiatan eksplorasinya pun tak tanggung-tanggung. Sepanjang tahun 1998, misalnya, PT Freeport Indonesia berhasil menghasilkan agregat penjualan sebesar 1,71 miliar pon tembaga dan 2,77 juta ons emas. Tahun 1992 hingga 2002 Freeport bahkan memproduksi 5,5 juta ton tembaga, 828 ton perak dan 533 ton emas. Dengan penghasilan itu Freeport mengantongi keuntungan triliunan rupiah sepanjang tahun.

Wajar jika hanya dalam kurun waktu dua tahun berproduksi sejak 1973, Freeport yang dulunya perusahaan tambang kecil berhasil mengantongi perolehan bersih US\$ 60 juta dari tembaga yang ditambangnya itu. Itu belum termasuk hasil tambang ikutannya seperti emas, perak, dan yang lainnya. Belum juga ditambah penemuan lokasi tambang baru pada tahun 1988 di Pegunungan Grasberg yang mempunyai timbunan emas, perak, dan tembaga senilai US\$ 60 juta milyar.

Namun dari semuanya itu, tetap saja tak ada perubahan berarti di Papua setelah kehadiran Freeport, malah sebaliknya. Kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan meningkat pesat dan menjadi potret dominan di sekitar pertambangan PT Freeport. Pencemaran lingkungan selanjutnya menjadi persoalan serius. Penambangan oleh Freeport telah menghasilkan galian berupa *potential acid drainase* (air asam tambang) dan limbah tailing (butiran pasir alami yang halus hasil pengolahan konsentrat). Sehari-hari Freeport memproduksi tidak kurang dari 250 ribu metrik ton bahan tambang. Material bahan yang diambil hanya 3%-nya. Inilah yang diolah menjadi konsentrat yang kemudian diangkut ke luar negeri melalui pipa yang dipasang ke kapal pengangkut di Laut Arafuru. Sisanya, sebanyak 97% berbentuk tailing. Akibatnya, sungai-sungai di sana tidak lagi disebut sungai karena berwarna coklat lumpur tempat pembuangan limbah tailing. Limbah Freeport juga telah menghancurkan hutan daratan rendah seperti yang terjadi di Dusun Sagu, masyarakat Kamoro di Koprakoka, dan beberapa dataran rendah di wilayah Timika. Danau Wanagon pernah jebol dan menelan korban jiwa karena kelebihan kapasitas pembuangan dan terjadinya perubahan iklim mikro akibat penambangan terbuka.

Sebuah lembaga audit lingkungan independen *Dames & Moore* melaporkan pada tahun 1996—dan disetujui oleh pihak Freeport—bahwa ada sekitar 3,2 milyar ton limbah yang bakal dihasilkan tambang tersebut selama beroperasinya. Faktanya, telah terjadi pencemaran lingkungan baik hutan, danau dan sungai maupun kawasan tropis seluas 11 Mil persegi.

Tambang PT Freeport Indonesia adalah bukti kekuatan ekonomi global yang menekan Papua dan Indonesia secara keseluruhan tapi sekaligus juga bukti salah urus sektor pertambangan di Indonesia dan bukti tunduknya hukum dan

wewenang negara terhadap korporasi. Pemerintah menganggap emas hanya sebatas komoditas devisa yang kebetulan berada di tanah Papua. Sekian lama pemerintah menutup mata terhadap daya rusak industri pertambangan yang begitu dalam di Papua. Selama 40 tahun lebih beroperasi, PT Freeport telah merusak tak hanya pegunungan Grasberg dan Erstberg, tetapi juga sudah mengubah bentang alam seluas 166 Kilometer persegi di daerah aliran sungai Ajkwa, mencemari perairan di muara sungai dan mengkontaminasi sejumlah besar jenis makhluk hidup, serta mengancam perairan dengan air asam tambang berkonsentrasi tinggi.

Penduduk Papua semakin miskin. Gaji salah seorang *Chief Executive Officer* (CEO) Freeport bisa mencapai Rp 432 milyar pertahun, sementara rakyat Timika harus puas dengan penghasilan kurang lebih Rp 2 juta pertahun. Freeport memasok emas terbesar kedua ke negaranya. Sementara rakyat Papua hanya bergumul dengan jutaan ton limbah tailing yang jika diekspor ke Jawa, bisa menenggelamkan Jakarta, Depok, dan Bekasi sekaligus, masing-masing dengan kedalaman 5 Meter. Freeport mendapat pengamanan ketat tentara dan polisi yang dibayar jutaan dolar pertahun. Sementara suku-suku yang hidup disekitar pertambangan Freeport hidup tanpa rasa aman, terus diintimidasi, mengalami ketegangan serta pelanggaran hak asasi manusia. Sebagian dari mereka harus mengais emas di limbah tailing perusahaan dengan resiko dikejar dan ditembaki tentara.

Bisnis militer dipertambangan Freeport memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Perang suku yang terus berkecamuk di Timika, semakin menambah kekayaan militer di sana. Bayangkan saja, “permainan” yang dilakukan Freeport, pemerintah Timika, pengusaha di Timika dan militer dalam perang dua suku Amugme dan Dhani pada tahun 2007 silam. Freeport dengan kekuasaannya berupaya agar suku-suku tersebut saling berperang. Dia tak

menginginkan kedamaian antara keduanya. Sebab, jika kedua suku itu damai mereka akan bersatu menuntut hak atas tanahnya yang dirampas oleh Freeport. Kedua suku itu, oleh Freeport ditempatkan di sebuah lokasi yang diberi kemewahan dengan kucuran dana sebesar 1 % dari keuntungan Freeport.

Di balik itu Freeport telah mengetahui budaya mereka yang sangat keras dan akan terus berperang jika mereka berdampingan. Perang antara Amugme dengan Dhani sudah berlangsung semenjak dulu. Siasat adu domba Freeport merupakan siasat licik dalam mempertahankan kekuatan dan kekuasaan ekonominya.

Sementara itu pemerintah Timika dengan segala kepentingannya juga ikut bermain di belakang perang. Pemerintah berdalih akan menyelesaikannya, lalu meminta uang kepada pemerintah pusat untuk membangun sarana dan prasana yang rusak akibat perang yang sebagian dari uang itu tentunya masuk ke kantong pribadi.

Tentara punya urusan lain lagi. Keuntungan mereka di balik perang itu dengan memanfaatkan proses damai yang dilakukan kedua suku. Dalam adat mereka, ketika selesai berperang, akan ada ganti rugi antara keduanya. Pada perang 2007, kedua suku saling membayar sebesar Rp 2 milyar. Untuk mendapatkan uang sebesar itu, mereka harus mengais sisa emas di areal pertambangan Freeport. Tentara lantas memfasilitasi mereka dengan menyediakan truk militer untuk mengangkut mereka ke areal pertambangan sejauh puluhan kilometer. Tentu saja angkutan itu tidak gratis. Per orang dikenai tarif hingga jutaan rupiah. Bayangkan saja jika dalam sebuah truk itu ada sekitar 30 orang. Sementara mereka yang akan mengambil sisa emas itu jumlahnya ribuan orang

Tentu tentara meraup keuntungan milyaran rupiah dari bisnis angkutan itu. Di kota Timika, pengusaha emas pun mendapatkan jatahnya. Hasil dari pencarian emas kedua suku

biasanya dijual kembali kepada Freeport dengan harga rendah atau kepada pengusaha emas di Timika juga dengan harga rendah. Sungguh sangat memprihatinkan. Akibat perang suku tersebut, warga pemilik tanah tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya kekuatan-kekuatan ekonomi dan pemerintahlah yang semakin banyak mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar penduduk asli memang masih berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa di limbah PT Freeport. Timika bahkan menjadi tempat berkembangnya penyakit mematikan seperti HIV/AIDS.

Hingga akhir 2008, HIV AIDS di Timika telah mencapai 1800-an kasus. Angka tersebut dengan sendirinya menempatkan Timika berada di urutan pertama di Papua, urutan kedua Merauke dengan jumlah 1008 kasus. Dampak sosial dari keberadaan Freeport tidak bisa dipandang remeh. Berlimpahnya dana yang beredar di sana justru melahirkan bisnis prostitusi. Ironisnya, dari tahun ke tahun, bisnis itu cenderung meningkat. Dalam konteks nasional, sekiranya lebih parah lagi. Indonesia hanya mendapatkan tetesan royalti dan pajak yang tak seberapa. Sementara Freeport mampu membeli perusahaan tambang raksasa Phelps Dodge seharga US\$ 26 milyar.

Tambang di bumi Papua adalah potensi sumber daya alam yang luar biasa besar. Jika saja itu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh negeri ini, niscaya ia akan bisa menyelesaikan berbagai problem ekonomi yang sedang melilit negeri ini. Bayangkan saja, akibat pemblokiran Freeport oleh penduduk setempat, pemerintah Indonesia bisa rugi hingga 2,7 triliun setiap hari. Padahal kita tahu bahwa nilai tersebut baru dari 9% royalti dan sedikit pajak. Bagaimana jika kita tidak hanya mendapatkan royalti dan pajaknya saja, tetapi juga keuntungan secara penuh.

Jelas, pemerintah Indonesia akan mendapatkan dana segar minimal Rp 73,71 triliun perbulannya atau setara dengan Rp 884,52 triliun per tahun. Sungguh, angka ini cukup untuk memberikan subsidi kepada rakyat sehingga bahan bakar minyak tidak perlu naik. Jika bahan bakar minyak tidak naik, tarif dasar listrik pun tidak akan naik. Uang itu juga bisa digunakan untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), juga bisa digunakan untuk membayar utang negara kurang lebih Rp 159.7 triliun. Sisanya bisa digunakan untuk membiaya pendidikan gratis, biaya kesehatan murah, dan perumahan bagi rakyat.

Tak cukup sampai di situ, selain kekuasaan Freeport, persoalan berikut yang sangat krusial dan semakin parah adalah tidak dilaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara baik. Otonomi khusus hanya diperuntukkan untuk kalangan elit. Sebuah anekdot bahkan menceritakan undang-undang itu hanya untuk menjaga kekuasaan Freeport agar semakin kuat di Papua. Elit politik bermain dengan halusnya tanpa mau memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Mereka menduduki jabatan-jabatan penting dan menghalau rakyat Papua yang ingin mengkritiknya.

Akibat tidak dilaksanakannya undang-undang itu, timbul inisiatif-inisiatif elit politik untuk memekarkan wilayah di Papua. Sebut saja, sejumlah pemekaran kabupaten di wilayah pegunungan (Papua Tengah) dan rencana pembentukan provinsi di sejumlah wilayah termasuk di wilayah selatan Papua. Di sana, Johannes Gluba Gebze, bupati Merauke, dengan ambisinya berupaya memekarkan wilayah itu. Semua daftar pergulatan untuk menuju pembentukan Provinsi Papua Selatan digunakannya. Tidak hanya dengan cara yang damai, tapi juga dengan intrik politik yang kotor. Upaya pembentukan provinsi itu melibatkan ratusan tokoh dari suku besar Malind Anim yang diambil dari pinggiran jalan seperti diungkapkan Albert Mouyend, wakil ketua satu Lembaga

Masyarakat Adat di Merauke. Mereka diiming-imingi sejumlah kebutuhan dan “dipaksa” dengan cara yang halus untuk mau menandatangani proposal pengajuan pembentukan Provinsi Papua Selatan ke Jakarta.

Dominansi kebijakan Gebze diiringi dengan kepentingan Partai Golongan Karya pimpinan Gebze ternyata tak dapat membuat pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke yang diketuai Daniel Walinaulik untuk menentanginya. DPRD malah dengan senang hati turut mendukung kebijakan tersebut walau di balik itu terdapat ribuan anak Papua yang masih dijerat jaring-jaring kemiskinan.

Pemerintah Merauke mengatasi kemiskinan dengan cara peningkatan swasembada pangan. Program yang disebut MIRE (Merauke Integrated Rice Estate), cikal bakal dari program alternatif untuk solusi krisis pangan dan energi bangsa yang kini lebih dikenal dengan sebutan MIFFE (Merauke Integrated Food And Energy Estate).

Konsep ini memang terbilang berani dalam kondisi yang serba sulit. Selain karena masyarakat pribumi tidak terbiasa dengan menanam padi, jumlah petani di Merauke terbilang sangat sedikit ketimbang lahan garapan yang sangat luas. Bagi petani, luas lahan 5 hektar bukan masalah jika dibekali alat pertanian seperti traktor. Tapi bagi mereka yang hanya mengandalkan cangkul dan kerbau atau sapi, tentu ini menjadi sebuah hambatan yang sangat berat.

Di atas kertas konsep MIFFE memang terbilang gemilang. Di dalamnya termuat konsep tentang penataan manajemen lahan, *mixed* dan *integrated farming*. Manajemennya juga sangat modern dengan pola mekanisasi dan orientasi pasar yang baik. Minimal luas satu hamparan tanam dalam MIFFE adalah 1.000 Hektare. Konsep ini juga menarik seluruh pihak terkait dalam agrobisnis

dan swasta besar, termasuk konsep lainnya menyangkut *link and match* dan *zero waste*.

Untuk manajemen penggunaan lahan per 1000 Hektare itu, bahkan telah dibagi menjadi, 70 % untuk tanaman pangan, 9% untuk ternak, 8% untuk perikanan darat, 8% untuk perkebunan dan 5% untuk lahan lain.

“MIFFE merupakan program unggulan yang sementara ini sedang dilakukan. Ada target di mana kedepan akan terjadi perubahan hidup dari masyarakat Merauke oleh MIFFE,” ujar Omah Laduani Ladamay, kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura di Merauke.

Potensi lahan MIFFE memang sangat luas. Lahan budidayanya saja mencapai 2.491.821.99 Hektare. Lahan basah mencapai 1.937.291,26 Hektare. Dan luas lahan kering mencapai 554.530,73 Hektare. Potensi lahan MIFFE ini dapat ditemukan misalnya di distrik Kurik, Merauke seluas 500 Hektare, yang menurut rencana akan ditanami jagung. Luas lahan MIFFE dalam sebaran kawasan sentra produksi juga dibagi dalam tiga zona. Yakni, zona 1 terdiri dari distrik Merauke, Semangga, Tanah Miring, Kurik, Jagebob, Sota, Eligobel, Muting dan Ulilin. Zona 2, Distrik Semangga. Sedangkan zona 3, Distrik Kimaam.

Dalam perencanaannya, lahan potensial MIFFE selanjutnya akan dibuat lahan hutan produksi konversi (HPK) seluas 1.428.000 Hektare. Lahan alokasi penggunaan lainnya seluas 202.869 Hektare. Total potensi ini mencapai 1.630.869 Hektare. Seterusnya terdapat juga rencana untuk pengembangan lahan tersebut. Yakni untuk lahan tanaman pangan 1 juta Hektare, peternakan 100.000 Hektare, perikanan 100.000 Hektare, perkebunan 100.000 Hektare dan untuk penggunaan lain 330.869 Hektare.

“Mekanisasinya adalah dengan teknologi mekanisasi, heavy mekanisasi dan dilanjutkan dengan olah tanah sampai dengan panen,” papar Ladamay.

Namun ironisnya, ternyata luas lahan dan tujuan dari MIFFE yang tergambar di atas kertas, tak sebanding dengan kesulitan yang terjadi di tengah-tengah petani. Rencana menjadikan kota rusa sebagai lumbung pangan dunia yang diproklamirkan dalam sebuah acara panen raya padi di Tanah Miring, Merauke, tak sejalan juga dengan kondisi petani dan “permainan” yang terjadi. Sebut saja peristiwa kelangkaan pupuk bersubsidi desember 2008 kemarin di Merauke. Pupuk bersubsidi yang dijual dengan harga Rp 120.000 hingga Rp 160.000 per 100 Kilogram itu diduga telah digelapkan oleh oknum tertentu. Kelangkaan pupuk tunggal bersubsidi seperti urea dialami oleh ratusan petani di beberapa wilayah, seperti Waninggap Kai, Distrik Semangga, beberapa kampung di Distrik Kurik dan Tanah Miring.

Pupuk yang biasanya dijual dengan harga sekitar Rp 300 ribu itu, kini lenyap. Warga petani pun kecewa dengan kejadian tersebut. “Kita masih susah, tapi kalau mau tunda tanam, pasti kita yang rugi. Jadi mau bagaimana lagi ?” kata Marni, seorang petani berusia 36 tahun. Menurut wanita berperawakan sedang itu, akibat kelangkaan tersebut, dirinya terpaksa membeli pupuk yang dijual di pasaran dengan harga tinggi. Hal itu dilakukannya agar proses masa tanam tidak terganggu. “Rugi juga kalau dihitung-hitung. Tapi itu sudah resiko,” ujarnya.

Selain kelangkaan pupuk bersubsidi, terjadi juga kadaluarsa benih yang menimpa sejumlah petani di beberapa wilayah di Merauke. Benih padi jenis ternama yang dibagikan ke petani di Distrik Kurik, Kimaan, Bupul serta sejumlah distrik lainnya itu merugikan petani hingga puluhan juta rupiah. Benih yang dibagikan dari dinas terkait tidak memperhitungkan masa tanam. Awalnya benih yang seharusnya telah “digudangkan” dianggap

masih layak untuk digunakan. Namun naas bagi petani yang memperolehnya. Ribuan benih padi itu akhirnya dicabuti kembali oleh petani. “Benih tersebut sebenarnya sudah kadaluarsa sejak pertengahan tahun kemarin. Tapi dipaksakan saja untuk dibagi,” kata seorang staf dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tidak ingin menyebutkan namanya.

Dalam peristiwa lain sekitar November 2008, terjadi juga “permainan” pembagian bantuan alat dan mesin pertanian kepada sejumlah petani di Kurik, Merauke. Untuk mendapatkan alat tersebut petani diharuskan membarternya dengan hewan ternak mereka. Bantuan yang berasal dari pemerintah daerah setempat itu diperuntukkan kepada petani yang belum memiliki alat dan mesin pertanian. Dalam bagian lain, ada pula alat-alat pertanian yang diduga dijual dengan harga miring. Jika sebuah alat bisa berharga hingga puluhan juta rupiah, pada saat diberikan kepada petani, harga awal bisa berubah menjadi Rp 5 atau 6 juta saja. Mesin yang dibagikan berupa traktor tangan dan sejumlah alat pertanian lain.

Dari keterangan seorang warga Distrik Kurik, Puji Susanto, pembagian mesin pertanian yang dibarter itu ternyata sudah berlangsung lama. Namun tidak pernah ada sanksi yang diberikan terhadap oknum petugas itu. Akibat kejadian ini sejumlah warga kecewa. Meskipun demikian mereka tetap memakai alat dan mesin pertanian yang telah diperolehnya.

“Itu sudah, alat pertanian itu biasa dikasih tapi dengan cara tukar dengan sapi atau pake bayar tapi dengan harga murah,” kata dia.

Menurut dia, mesin-mesin yang dijual itu jumlahnya puluhan unit dalam kondisi baru. Petani pun hanya pasrah dan tak bisa berbuat banyak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat daerah.

“Yang penting ada dari pada tidak dapat sama sekali,” ujar Puji.

Kemiskinan, intrik politik yang kotor dan korupsi di Papua semakin menambah daftar panjang kesengsaraan rakyat Papua. Hingga pada tataran itu, sekali lagi otonomi khusus lewat UU 21 Tahun 2001 tetap saja tak mampu menangani persoalan yang terjadi di bumi Papua. Padahal secara filosofis undang-undang otonomi khusus itu dibuat sebagai langkah untuk mensejajarkan Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia dan perlindungan bagi hak-hak dasar orang asli Papua yang sejak berintegrasi dengan Indonesia terabaikan dan termarginalkan. Singkatnya, kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi orang asli Papua.

Namun, otonomi khusus tersebut hingga kini masih berjalan di tempat. Distribusi kewenangan dan aliran dana yang tidak jelas, inkonsistensi pemerintah pusat dan daerah, hingga konflik kepentingan dan kekuasaan inter-elit lokal di Papua. Akibatnya, masyarakat Papua sudah tidak lagi memiliki kepercayaan—yang sedari awal telah digembor-gemborkan oleh berbagai pihak sebagai “senjata pamungkas” menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi di Papua.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi khusus, antara lain; perbedaan persepsi dalam mewujudkan substansi dari undang-undang otonomi khusus untuk Papua, belum terbitnya beberapa peraturan pendukung seperti peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi yang mendukung. Tidak ada optimalisasi pemanfaatan dana otonomi khusus untuk pemenuhan hak-hak dasar penduduk asli Papua yang mencakup; hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan usaha, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan rasa aman.

Apakah otonomi khusus dibuat untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua? Atau hanya untuk kepentingan segelintir elit politik Papua dan Jakarta ?

“Ini yang harus diperhatikan. Jika otonomi khusus diperuntukkan hanya untuk kepentingan elit politik lokal dan Jakarta, sebaiknya otonomi khusus itu dihilangkan saja karena tidak menjawab kebutuhan ekonomi rakyat, tidak menjawab perpolitikan yang cerdas di Papua dan tidak menjawab keinginan rakyat Papua untuk bisa hidup damai,” kata Ignatius Ndiken, ketua Lembaga Masyarakat Adat Di Merauke.

Menurutnya, pemberian otonomi khusus kepada Papua hingga kini belum mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara penuh. Warga asli Papua masih tetap hidup dalam kungkungan kemiskinan tanpa pendidikan yang layak. Warga Papua masih terbelakang soal kesehatan dan penerangan yang baik. Hidup sangat memprihatinkan ketimbang warga di daerah lain yang sudah sangat berkecukupan soal sandang, pangan dan papan. Dalam dunia pendidikan misalnya, kekurangan sarana belajar yang layak seperti gedung sekolah dan buku pelajaran. Bantuan yang diberikan melalui dana *blockgrand* sebesar Rp 100 juta per kampung juga ternyata tidak mampu menjawab kebutuhan pendidikan di sejumlah wilayah di Papua.

Frans A. Wospakrik, mantan rektor Universitas Cenderawasih pernah mengatakan, otonomi khusus di Papua dirancang untuk menimbulkan partisipasi masyarakat secara luas. Dengan demikian, secara politik, undang-undang otonomi khusus Papua merupakan titik kompromi atau titik keseimbangan baru antara tuntutan Papua dengan kepentingan pemerintahan Indonesia. Sebagai titik kompromi, undang-undang itu diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang mendera Papua selama beberapa dekade. Sebaliknya, otonomi khusus juga harus

menjadi solusi atau dasar bagi perbaikan kondisi sosial politik, ekonomi serta budaya di Papua. Bukan untuk kepentingan para elit dan golongan tertentu.

Kecaman Rakyat Papua

Pergerakan yang dilakukan warga Papua di dalam menentang berbagai kebijakan yang anti rakyat dan berbagai kekuatan politik serta ekonomi yang dominan dapat dilihat dari sejumlah kasus demonstrasi yang terjadi sepanjang 10 tahun terakhir. Kasus 16 Maret 2006 yang merenggut sejumlah nyawa polisi di depan Universitas Cenderawasih. Kasus ini merupakan wujud dari protes rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia dan keberadaan PT. Freeport, yang telah menghancurkan dan merampas hak-hak dasar warga Papua. Akibat konflik tersebut, sejumlah asrama dan bangunan milik mahasiswa Papua dirusak oleh aparat kepolisian setelah terjadinya bentrok.

Aksi protes rakyat Papua tahun 2000 juga contoh lain. Saat itu terjadi konflik berdarah, sejumlah bangunan rusak, warga pendatang harus lari ke daerah asalnya, seperti Jawa. Rakyat Papua saat itu mencoba mengkritisi hak-haknya yang tak pernah diberikan oleh pemerintah. Banyak warga mati ditembak tentara, puluhan orang ditangkap atas tuduhan saporatis.

Otonomi khusus di bagian lain kerap disebut sebagai kebijakan “pedang bermata dua” karena di satu sisi tidak diimplementasikan secara baik dan pada sisi yang lain hanya untuk memperkuat posisi pemerintah dan elit politik untuk kepentingannya.

Akibat dari tidak adanya jawaban yang dapat memuaskan kehendak rakyat Papua, rakyat Papua pun akhirnya beramai-ramai memperkuat dirinya sendiri dengan gerakan-gerakan politik.

Gerakan politik rakyat di Papua memang sering dibelokkan ke arah disintegrasi. Meskipun ada juga beberapa gerakan rakyat seperti yang terjadi di Merauke di bawah koordinasi sejumlah aktivis hak asasi manusia, yang tetap berpegang teguh pada visinya untuk kemakmuran rakyat Papua.

Sejumlah gerakan rakyat tidak memberi nama bagi kelompoknya. Mereka berkelompok dan melakukan pertemuan-pertemuan terbatas. Beberapa kelompok tertutup di Merauke ini kerap didukung oleh DAP (Dewan Adat Papua) yang diketuai Stanislaus Gebze. Ada juga Pangrasia Yem, seorang aktivis perempuan. Dia sering melakukan dialog terbuka di Merauke yang dipublikasikan melalui media massa. Pada 2007 silam, Yem dalam sebuah dialog yang digelar di Kelapa Lima, Merauke, mengkritisi sejumlah kebijakan yang ditelurkan pemerintah Merauke dan Papua. Dia juga mengkritik militer yang masih melakukan teror terhadap masyarakat. Bagi Pangrasia dan Stanislaus Gebze, teror, intimidasi dan penganiyaan yang dilakukan tentara dan didalangi oleh pemerintah, sangat tidak manusiawi. Militer bagi mereka harus angkat kaki dari bumi Papua.

Karena ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah, sejumlah gerakan rakyat di wilayah selatan Papua cenderung ingin merdeka. Mereka lebih memilih melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdiri sebagai negara yang bebas tanpa ada campur tangan pihak lain. Bagi mereka, seperti yang diungkapkan oleh Albert Mouyend, tokoh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malind Anim, kecenderungan ini sangat wajar akibat dari perlakuan pemerintah pusat yang tidak memperhatikan kebutuhan dan hidup warga Papua. Kecenderungan ini memang pada akhirnya mengakibatkan munculnya sejumlah gejolak massa. Namun bagi Mouyend, hal itu harus dimaklumi. Lembaga Masyarakat Adat juga sangat mendukung kemerdekaan dalam konteks bebas dari kemiskinan, keterbelakangan ekonomi,

pendidikan dan kesehatan serta bebas dari belenggu tindakan militer yang seringkali brutal terhadap warga Papua.

Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim dan banyak lagi Lembaga Masyarakat Adat di sejumlah wilayah di Papua, memang bagian dari inisiatif gerakan yang dimunculkan akibat ketidakpuasaan tapi sekaligus juga sebagai perwujudan rakyat Papua untuk menjaga harkat, martabat, nilai sakral, budaya dan perlindungan bagi warga Papua secara menyeluruh. Lembaga itu juga sering disebut sebagai sebuah kekuatan politik yang dapat bangun sewaktu-waktu jika api dalam sekam semakin panas. Mereka (LMA) bisa menjadi kekuatan penghancur di Papua, tapi bisa juga sebagai kekuatan ekonomi yang dapat diandalkan. Hanya saja, sebagai kekuatan ekonomi, hal itu belum terlalu nampak karena gerakan ekonominya masih bergantung pada alam.

Bagi lembaga-lembaga adat dan sejumlah kekuatan gerakan alternatif di Papua, upaya menghentikan kekuatan politik anti rakyat yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan cara masuk dan “mengikat” mereka (pemerintah). Di bagian lain, kedudukan dan pemegang kekuasaan harus berpindah kepada mereka yang pro rakyat. Dengan inisiatif tersebut, sejumlah tokoh dari Dewan Adat Papua dan Lembaga Masyarakat Adat juga mengambil langkah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Beberapa tokoh yang lain berkompetisi merebut jabatan bupati.

Inisiatif ini berkembang pesat di wilayah selatan Papua. Ratusan tokoh pro rakyat kemudian mengajukan dirinya sebagai pemimpin. Mereka bergabung dengan ratusan calon anggota legislatif yang lain untuk bertarung memperebutkan 25 kursi yang ada di Merauke, 20 kursi yang ada di Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

Meskipun banyak asumsi bahwa tokoh-tokoh itu bisa saja akan berubah pandangan ketika sudah duduk di kursi dewan dan

melupakan tujuan utamanya sebagai bagian dari gerakan rakyat. Tapi sebagai bagian dari gerakan terselubung, sejumlah pihak tetap optimis. Sebab, beberapa di antara mereka telah menjalani sumpah adat—yang jika dilanggar dipercaya akan berdampak buruk bagi kehidupannya kelak.

Dalam bagian lain, sebuah gerakan anti pemerintah, Forum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Papua lebih dikenal dengan sebutan FNMPP lebih mengedepankan gerak langkahnya untuk tampil di media. Forum itu dibentuk pada tahun 2000. Bagi FNMPP rakyat adalah arena pertarungan para aktor politik dominan seperti negara dan pemodal. Pemodal dan negara merupakan sebuah kesatuan komunitas dan kesatuan kepentingan yang saling bekerjasama. Negara merepresentasikan militer, departemen-departemen, birokrat dan lembaga-lembaga pemerintahan sedangkan komunitas pemodal merepresentasikan investor, perusahaan-perusahaan transnasional atau multinasional, tuan tanah dan tengkulak tingkat kampung.

Gabungan dua kekuatan itu pada akhirnya mendorong negara lupa atas tanggungjawab serta kewajiban untuk melayani warganya. Semuanya ini menimbulkan kesenjangan sosial yang parah antara rakyat dan kedua aktor, terjadi proses pembodohan serta pemiskinan secara struktural. Bagi FNMPP, menentang kebijakan pemerintah yang anti rakyat harus selalu digencarkan dengan cara membuat *webblog*, mendirikan jaringan-jaringan komunikasi hingga pada tingkat keluarga dan membangun relasi dengan media yang diharapkan dapat membantu meneruskan perjuangan rakyat. Perjuangan rakyat Papua di dalam mengambil kembali hak-haknya dilakukan dengan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Jika diamati secara seksama dari munculnya era reformasi medio Mei 1998 hingga Kongres Rakyat Papua pada Juni 2000 lalu, belum nampak titik terang dari "komplikasi politik" di tanah Papua. Contohnya, semangat

”Papuanisasi” membuat orang Papua memperoleh peluang dan kesempatan yang besar di masa awal kepemimpinan gubernur Freddy Numberi untuk menduduki posisi elite eksekutif mulai dari kepala distrik (camat), bupati, wali kota, hingga gubernur. Posisi legislatif pun terbuka lebar bagi orang Papua. Hanya saja ’Papuanisasi’ elite-elite pemerintahan dan birokrasi itu belum dapat menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat Papua.

Kondisi objektif politik seperti yang diterangkan di atas sebenarnya berakar dari partisipasi politik rakyat Papua di tingkat basis. Sejak maraknya aspirasi dan tuntutan merdeka, rakyat Papua lupa dengan hal-hal nyata dalam kehidupan politik dan ekonomi yang sedang dihadapi. Rakyat terbuai oleh situasi dan janji-janji politik bahwa kemerdekaan sudah di ambang pintu.

Secara rasional-objektif rakyat Papua sendiri harus bertanya kepada dirinya sendiri mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa termakan oleh histeria kemerdekaan yang konon telah di depan mata tapi mengakibatkan lemahnya kekuatan kolektif rakyat untuk mempertahankan hak-haknya. Rakyat berjuang sendiri-sendiri, tidak bersatu.

Rakyat Papua belum mengintegrasikan dirinya ke dalam pertarungan politik modern. Jika masyarakat Papua telah memiliki kekuatan untuk itu maka tindakan semena-mena terhadap dirinya pasti tidak dengan mudah terjadi. Suatu rezim yang paling otoriter sekalipun akan berpikir seribu kali untuk menindas rakyat yang sudah sadar politik dan bersatu.

Pokok kunci masa depan Papua adalah bagaimana rakyat Papua bersama-sama berdaya upaya melindungi dan memperjuangkan kepentingannya. Bertahan menghadapi kelompok yang lebih kuat secara ekonomi, politik, dan ideologi, termasuk upaya mempertahankan pandangan hidup berupa ekspresi budaya dan nilai-nilainya. Solidaritas Papua perlu

dibangun dalam tataran dan kerangka baru lewat transformasi struktur sosial-tradisional ke dalam paradigma baru yang melampaui batas sempit kekerabatan dan kesukuan menuju identitas dan kepentingan bersama. Kepentingan bersama Papua menumbuhkan kekuatan kolektif masyarakat adat—infrastruktur kebangkitan Papua masa depan.

Solusi Masa Depan

“Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini”, inilah pepatah kuno yang menggambarkan bagaimana rakyat Papua harus bisa lebih baik dari sekarang. Caranya dengan membentuk barisan-barisan perempuan, pemuda, blok penentang dan pembentukan sebanyak-banyaknya organisasi-organisasi di tingkat basis.

Mengapa demikian?

Rakyat Papua tidak dapat berbuat banyak apabila tidak ada jaring pemersatu seperti organisasi gerakan pada tingkat basis. Di sejumlah daerah, organisasi ini memang telah didirikan. Misalnya, Lembaga Masyarakat Adat Ammungme (Lemasa), Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko), Yayasan Hak Asasi Manusia dan Anti Kekerasan (YaHamak) di Timika. Ini menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengikutinya. Alasannya, *pertama*, agar terjadi konsolidasi bersama di antara elemen-elemen masyarakat Papua. *Kedua*, terbangunnya *platform* bersama yang mengakumulasi dan mengakomodasikan kepentingan, aspirasi, eksistensi, dan otonomi masyarakat adat. Dengan *platform* yang sama akan mudah bagi rakyat Papua untuk melakukan tawar-menawar dengan kepentingan ekonomi dan politik yang datang dan berasal dari luar Papua. *Ketiga*, dibutuhkan jaringan solidaritas

sesama masyarakat adat. Komunikasi dan pertemuan maupun tukar-menukar informasi tentang masalah dan pengalaman bersama yang dibutuhkan, paling tidak di Papua. Inilah yang kurang dilakukan sepanjang tahun lalu.

Sepanjang 2008, Papua dibuai dengan maraknya kasus korupsi, pembentukan daerah baru dan pertarungan para elit partai. Kita tidak menemukan sebuah ruang baru di mana ada kebebasan bagi masyarakat untuk bergerak. Rakyat Papua hanya mengikuti arus politik yang membawanya tak tentu arah. Dalam konteks gerakan rakyat, Papua lebih banyak diam. Terkecuali jelang Desember 2008 yang dianggap hari terpanas bersamaan dengan peringatan atas Papua Merdeka. Di berbagai sudut jalan terlihat polisi dan tentara berjaga. Pada malam harinya, terlihat pula patroli-patroli pengawas yang berjaga-jaga jika terjadi gerakan rakyat untuk Papua Merdeka.

Di tingkat global, krisis keuangan global nampaknya tak begitu dirasakan penduduk Papua secara umum. Namun hal tersebut memicu timbulnya banyak diskusi-diskusi terbatas yang mencoba mempresentasikan kecenderungan Papua di tahun 2009. Prakiraan yang muncul adalah perlawanan rakyat akan semakin sengit di Papua jika krisis global tersebut semakin terasa. Rakyat akan mempersalahkan ketidakbecusan pemerintah dan sekali lagi memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia. Seperti yang terjadi di tahun 1998. Di mana krisis bangsa saat itu bukan dipergunakan oleh rakyat Papua untuk bersama-sama menyelesaikannya, tapi lebih memilih merdeka karena dianggap pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia apalagi menyelesaikan ribuan masalah yang mendera Papua. Kecenderungan rakyat asli Papua untuk memilih merdeka juga bisa disebabkan oleh naiknya pemimpin baru di tingkat legislatif. Jika saja rakyat Papua merasakan kepemimpinan yang baik tentu gejolak massa tidak akan terjadi. Namun jika pemilihan umum

April mendatang melahirkan pemimpin yang arogan dan tamak, konflik pasti akan terulang kembali.

Suasana tahun ini yang diperkirakan penuh prahara diisyaratkan juga dengan semakin banyaknya aparat militer yang diturunkan ke Papua. Bagi warga asli Papua, militer sebenarnya bukan untuk menjaga stabilitas keamanan tapi sesuatu yang menakutkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai tindakan militer pada tahun-tahun awal Papua bergabung dengan Indonesia hingga sepanjang tahun 2000-an. Di mana militer dengan kekuatannya menekan, mengintimidasi rakyat dan kerap menganiaya hingga berbekas dalam diri mereka. Ketakutan ini membawa akibat tersendiri bagi rakyat Papua. Mereka tidak lagi dapat beradaptasi dengan dunia modern saat ini, tapi juga tidak dapat berkembang dalam bidang ekonomi secara baik. Beberapa kelompok di antaranya bahkan melihat Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai musuh yang harus disingkirkan dari tanah Papua.

Tahun ini merupakan titik menentukan di mana pemilihan umum mendatang akan menjadi tolok ukur masa depan Papua. Pemilihan umum menjadi sorotan dalam banyak dialog yang tak pernah habis-habisnya. Papua memiliki corak budaya yang amat berbeda dengan budaya Jawa yang terkesan halus dan ramah. Orang Papua dengan karakternya yang keras dan kasar menjadikan dirinya begitu kurang partisipatif. Lebih dari itu, tingkat konstalasi politik di Papua dengan banyaknya calon anggota legislatif plus karakternya semakin menambah perkiraan atas terjadinya aksi-aksi massa nanti.

Di Merauke, misalnya. Jumlah calon anggota legislatif hingga 567 orang. Dalam tataran pemikiran politik secara positif tentu saja itu indikator meningkatnya partisipasi. Namun jika karakter yang kasar tadi dikaitkan dengan konstalasi politik yang semakin memanas di Papua jelang pemilihan umum, memungkinkan

munculnya gejolak masa. Itu pernah terjadi pada saat pemilihan umum tahun 2004 di mana kasus-kasus akibat salah hitung suara mengakibatkan bentrokan massa di kabupaten Mappi.

Jalan yang bisa ditempuh untuk mengembangkan organisasi gerakan dan meminimalisasi konflik serta tekanan dari pemerintah adalah dengan konsolidasi gerakan di tingkat basis sesegera mungkin. Gerakan rakyat juga harus lebih serius dalam mamaksimalikan tindakannya. Paling kurang dengan membentuk pos-pos gerakan di setiap wilayah atau desa. Mengembangkan koordinasi dan memperkuat sistem manajemen gerakan juga menjadi salah satu solusi yang harus dilakukan. Hingga kini, manajemen gerakan yang dilakukan oleh setiap gerakan basis bawah di Papua belum tertata dengan baik. Mereka cenderung fleksibel dalam bertindak. Cara itu malah menjadikan gerakan menjadi kacau balau, kurang perencanaan dan implementasi tidak jalan.

Jika tidak ada solusi cemerlang, Papua akan semakin jauh dari perkembangan. Tindakan represif tentara pun akan semakin menjadi-jadi. Agar bumi Papua dengan kekayaan alamnya yang berlimpah ruah itu tak menjadi sia-sia, sepatutnyalah semua elemen secara holistik bergerak menentang kebijakan, tindakan dan peraturan yang menyengsarakan rakyat. Tidak hanya rakyat Papua, tapi juga untuk rakyat Indonesia keseluruhan. Menentang atau tidak sama sekali!.

Blok Politik, Desa Mandiri dan Kedaulatan Rakyat Di Maluku

Simpul Maluku FBB Prakarsa Rakyat¹

Bagian Pertama

Dalam perkembangan selama ini situasi yang terjadi di Maluku dan Indonesia dapat dibagi dalam tiga hal besar yang tertulis dalam buku *Orang – Orang Kalah²* sampai saat ini masih terus terjadi yaitu :

(1) **Serbuan modal** raksasa yang mengancam dan mencaplok kawasan ulayat tradisional serta menjarah sumberdaya alam, yang sekaligus menimbulkan kerusakan parah ekosistem lingkungan hidup setempat;

(2) **Pemusatan kekuasaan** pemerintah secara berlebihan yang mengebiri lembaga-lembaga adat tradisional setempat, demi mempermudah proses-proses masuknya modal besar tersebut; dan

1 Tulisan ini di persiapkan oleh George Corputty, sekjen Jaringan Baileo Maluku dan Koordinator Blok Politik Kepulauan Maluku (Maluku – Maluku Utara)

2 INSIST, Jaringan Baileo Maluku (2004) *Orang – Orang Kalah*

(3) **Pemaksaan nilai-nilai** melalui proses-proses penakut-nakutan, pembodohan, dan penipuan, untuk mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali kemungkinan penolakan oleh masyarakat tempatan terhadap serbuan modal besar dan pemusatan kekuasaan tadi.

Dari arah kecenderungan ini kemudian dapat dijabarkan dalam 6 konteks yang memberi pengaruh sangat kuat terhadap praktek politik pembangunan yang cenderung anti rakyat yaitu terjadinya 1) Pengambil-alihan Sumber – Sumber Ekonomi Rakyat; 2) Sentralisasi Kebijakan; 3) Hilangnya basis legitimasi kultural; 4) Proses otonomisasi dan 5) Konflik Maluku dan 6) PILKADAL.

Pengambil-alihan Sumber – Sumber Ekonomi Rakyat

Pengambil alihan dilakukan lewat konsep penguasaan negara yang diimplementasikan dalam bentuk berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat dan cenderung memberikan akses kepada pemodal tanpa melibatkan masyarakat. Di tingkat masyarakat informasi pasar dan modal cenderung sulit diakses, tradisi usaha kurang dimiliki dan cenderung menjadi konsumen dari pada produsen hal ini sangat berpengaruh pada ketidaksiapan mereka dalam menghadapi pasar bebas. Selain itu masyarakat produsen cenderung tidak mengetahui manfaat potensi SDA yang dimiliki dan belum terkonsolidasi sehingga dengan kapasitas pengetahuan, keterampilan, modal dan teknologi yang terbatas kemudian mereka terpinggirkan dari wilayah tradisional karena tidak memiliki posisi tawar serta dijadikan sebagai objek kepentingan ekonomi para pemodal dan penguasa.

Partisipasi publik dalam penentuan kebijakan ekonomi sangat rendah sehingga tidak bisa secara signifikan memberikan manfaat bagi usaha masyarakat. Dalam kebijakan ekonomi

terlihat keberpihakan pemerintah terhadap para pengusaha besar dan belum memberikan perlindungan terhadap masyarakat produsen, ini terlihat pada pengutamaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat jangka pendek dan mengabaikan kepentingan ekonomis jangka panjang.

Proses pengumpulan modal atau investasi yang datangnya dari luar dilakukan untuk melakukan eksploitasi SDA dengan lebih mengutamakan pada pertumbuhan ekonomi dan permintaan pasar serta upaya peningkatan pendapatan asli daerah tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam prakteknya telah terjadi pencaplokan hak – hak masyarakat adat dan ruang usaha tradisional rakyat serta telah terjadi kerusakan lingkungan di hampir semua kawasan bekas wilayah HPH di pulau – pulau di Maluku (P. Buru, P. Seram dan P. Yamdena).

Ada kecenderungan kabupaten baru melakukan pengembangan usaha yang akan menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat seperti usaha pertambangan Nikel dan perkebunan kelapa sawit yang di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Saat ini ada program penghijauan yang dengan menanam jati mas pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya di batas antara Desa Horale dan Saleman di Seram Utara (Kabupaten Maluku Tengah); telah menyebabkan terjadinya konflik antar 2 desa tersebut. Proses pengembangan investasi oleh para investor yang tidak melibatkan masyarakat dan menggusur sumber penghidupan masyarakat baik sosial, politik dan ekonomi cenderung berpotensi terjadinya konflik antar masyarakat dalam desa, antar desa dengan desa lain, antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat dengan pihak lain di luar desa.

Sentralisasi Kebijakan

Pemerintah melakukan pemaksaan kebijakan (hegemoni kekuasaan) tanpa memaksimalkan partisipasi publik serta melakukan marginalisasi fungsi sosial dan otonomi politik lokal (lembaga adat dan sistem pemerintahan lokal) yang menghilangkan akses dan kontrol rakyat terhadap kebijakan sumberdaya alam.

Pemerintah dan DPRD dalam pembuatan regulasi, kebijakan perencanaan dan anggaran tidak berpihak pada masyarakat miskin yang cenderung menguntungkan pihak swasta serta kepentingan politik tertentu, tidak memberikan ruang partisipasi publik, belum adanya budaya tanggung gugat dan transparansi. Dengan tingkat kolusi, korupsi dan nepotisme cenderung lebih tinggi pada semua tingkatan juga ditunjang oleh pemekaran dan otonomi serta belum ada sinkronisasi kerja dan koordinasi antar institusi pemerintah sehingga pelayanan publik tidak memadai.

Berbagai penyelesaian masalah hanya bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan persoalan dasarnya. Dalam pengelolaan sistem informasi belum tertata baik sehingga publik sulit mengakses informasi kebijakan dan regulasi. Di bidang yudikatif penegakan hukum belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam kaitan dengan kedudukan perempuan adalah rendahnya otoritas dalam pengambilan keputusan pada semua tingkatan, substansi gender belum dipahami dalam berbagai tingkatan, analisa anggaran belum berbasis gender dan organisasi perempuan dalam instansi pemerintah belum mampu memperjuangkan kepentingan perempuan dan cenderung dijadikan sebagai alat politik.

Hilangnya Basis Legitimasi Kultural

Hal ini terjadi karena perkembangan berbagai budaya baru yang cenderung memaksa dan melemahkan nilai-nilai budaya

asli serta ada pandangan sebagai penghambat. Pengembangan program pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan basis sejarah, budaya dan ruang kehidupan mereka dengan sebutan suku terasing, peradaban rendah dan masyarakat diposisikan sebagai penerima pasif dari hampir semua proyek pembangunan. Beberapa upacara adat yang dilakukan cenderung tidak maksimal mengkritisi nilai – nilai adat dan filosofi sejarahnya, tetapi hanya seperti seremonial biasa. Ini akan sangat mempengaruhi pola pewarisan nilai kepada generasi berikutnya. Selain itu proses penyelesaian persoalan yang sebenarnya dapat dilakukan secara adat sudah tidak lagi memiliki legitimasi. Efek lain dari konflik Maluku adalah banyak bermunculan tokoh adat yang diragukan representasinya tetapi juga mulai mengambil posisi politik.

Selain itu lahirnya sebuah organisasi yang menamakan lembaganya Majelis Latupati Maluku yang cenderung memposisikan dirinya secara adat; dalam sejarah adat di Maluku tidak pernah ada satu lembaga adat se-Kepulauan Maluku karena faktanya berdasarkan sejarah asal usul lembaga adat hanya berada dalam satu negeri adat dan satu wilayah adat diikat oleh nilai adat yang telah mendapat pengakuan dan dihormati. Artinya dengan posisi seperti ini setiap wilayah adat di Maluku memiliki kearifan dan sistem serta kedaulatan untuk mengaturnya masing-masing tanpa bisa dicampuri oleh mereka yang tidak berhak dan tidak mendapat pengakuan. Dalam prosesnya Majelis Latupati Maluku ini ‘memaksakan’ apa yang mereka lakukan atas nama adat ini dalam bentuk pemberian gelar adat yang tidak jelas berdasarkan sejarah asal usul yang mana serta memiliki kecenderungan politisasi.

Proses Otonomisasi

Proses ini membuat masyarakat semakin dekat dengan pusat–pusat kekuasaan dan otoritas baru yang selama ini

terpusat, sebagai konsekuensi dari kecenderungan pemekaran kabupaten baru. Walaupun dalam prakteknya semua kabupaten baru di Maluku cenderung melakukan percepatan investasi yang mendukung kompetisi antar daerah dalam propinsi dan antar propinsi yang berdampak pada percepatan eksploitasi SDA secara meluas dan merata pada tiap daerah otonom, dengan orientasi pada peningkatan pendapatan daerah (PAD) tanpa membuat pertimbangan yang cukup terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan proses pemajuan masyarakat. Eksploitasi pertambangan nikel di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang tidak lagi mempertimbangkan amdal tetap dilaksanakan dan sulit dikendalikan oleh Badan Perencana Dampak Lingkungan (Bapedalda) Propinsi Maluku.

Belum tersedia cukup kebijakan dan instrumen yang menjamin terselenggaranya otonomi dan demokratisasi di tingkat daerah otonom termasuk perubahan kebijakan sektoral yang dapat memberikan jaminan hak-hak otonomi rakyat (misalnya tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA).

Selain itu dalam realitasnya wilayah hukum adat di Maluku dapat diartikan bahwa wilayah hukum masyarakat lokal di Maluku adalah desa adat. Desa adat memiliki sejarah asal usul yang memberikan penjelasan tentang batas wilayah, sejarah kepemilikan sumberdaya alam, struktur dan sistim pemerintahan adat, dan sejarah kependudukan masyarakat desa tersebut.

Dalam kaitan dengan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar baik di kota dan desa akses terhadap pelayanan kesehatan (termasuk infrastruktur pendukung seperti obat dan tenaga medis) yang standar dan murah sangat rendah. Pelayanan kesehatan untuk hak reproduksi perempuan masih rendah. Hampir sebagian besar wilayah masih mengalami kesulitan dalam penyediaan air bersih. Di banyak wilayah sarana dan prasarana

pendidikan belum memadai, kualitas pengajaran dan penyebaran guru belum merata serta biaya pendidikan yang tinggi.

Di tingkat kebijakan Pemerintah RI mulai memiliki banyak program yang berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan sosial dasar tetapi sangat sulit diakses masyarakat selain tidak didasarkan atas proses studi kelayakan dan cenderung hanya diposisikan sebagai proyek jangka pendek.

Ada kecenderungan kuat beberapa lokasi di beberapa daerah kabupaten seperti Seram Utara, Tanimbar Utara, Buru Selatan dan Maluku Barat Daya yang ingin dimekarkan menjadi kabupaten baru. Proses pemekaran yang telah terjadi selalu hanya didasarkan pada pertimbangan politis untuk mencapai kepentingan politik dan kepentingan ekonomi tertentu dan bukan strategis, ini dapat terbukti sampai saat ini masih ada kabupaten pemekaran yang memiliki ketergantungan sangat kuat ke kabupaten induk.

Konflik Maluku

Konflik terjadi pada semua Kepulauan Maluku yaitu pada tahun 1999 – 2004 yang mengakibatkan korban yang cukup besar. Ini mempengaruhi juga hubungan sosial yang kemudian harus selalu dipertimbangkan ketika akan melakukan perencanaan pembangunan di Maluku.

Efek lainnya adalah sejak tahun 1999 banyak bermunculan LSM baru (menurut catatan kami ada lebih dari 1000 LSM) yang lebih banyak mengerjakan penanganan situasi darurat dan hampir sebagian besar tidak memiliki perencanaan strategis, bahkan kemudian kerja LSM menjadi salah satu pilihan ‘pekerjaan’ yang diminati bagi banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi karena ada ‘iming-iming’ akan digaji dengan dollar sehingga sulit

dibayangkan kehadirannya akan memberikan kontribusi untuk membuat perubahan di tingkat civil society.

Kerja beberapa lembaga-lembaga internasional di Maluku juga memberikan efek ketergantungan dan cenderung menjadi ‘broker proyek’ yaitu 1) ketergantungan pengungsi terhadap bantuan karena program karitatif yang dilakukan tidak disertai strategi pemberdayaan yang memadai dan pengungsi cenderung ‘menikmati’ posisinya sebagai pengungsi karena akan terus mendapat bantuan, 2) ketergantungan pemerintah terhadap bantuan asing dan juga tidak memiliki sistem data dasar yang akurat serta strategi pemberdayaan, 3) ketergantungan LSM lokal dalam memperoleh proyek/program ke donor, tidak memiliki kemampuan membuka akses ke donor dan ketidakmampuan membuat perencanaan; dalam kaitan dengan posisi tidak didasarkan pada kemitraan, 4) para staff lokal yang bekerja di lembaga asing juga tidak memiliki kesempatan mengembangkan kapasitas karena mayoritas mereka kemudian kebingungan mau bikin apa setelah program selesai. Lahir banyak tokoh yang tidak representatif tetapi untuk memperkuat posisi tawar mereka di politik dan ekonomi.

Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadal)

Pilkadal di sepanjang tahun 2008 telah terjadi di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Seluruh proses yang terjadi cenderung tetap menggunakan kekuatan sentimen agama dan suku, tidak didasarkan pada kapasitas calon pemimpin. Beberapa calon *incumbent* bahkan mendapat simpati dari masyarakat bukan karena prestasi dan kemampuan menyelesaikan persoalan strategis tetapi karena pernah melakukan kunjungan ke wilayah terpencil yang selama ini tidak pernah dikunjungi. Masyarakat cukup mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan karena tidak memiliki peluang

untuk melakukan pilihan kritis. Selain itu memang praktek '*money politics*' sangat mempengaruhi para pemilih dalam menentukan pilihannya walaupun begitu banyak bukti yang dikumpulkan tetapi sangat sulit diselesaikan secara hukum.

Dalam proses ini telah diperlihatkan kecenderungan penguasaan politik oleh para 'penguasa ekonomi' dari Jakarta dengan aktif melakukan proses penguasaan lewat dukungan ke para kandidat yang dipandang dapat dikendalikan untuk kepentingan pengembangan usaha mereka di wilayah tersebut kalau nanti terpilih. Secara kasat mata telah dipertunjukkan penggunaan dana kampanye dalam jumlah yang besar oleh para kandidat yang sumbernya tidak jelas. Ini tidak terlihat dari hasil audit yang dilaporkan, selain itu proses audit juga tidak maksimal menghubungkan antara dana kampanye yang tersedia dengan penggunaan di lapangan.

Dalam kaitan dengan hubungan sosial masyarakat, ada lembaga keagamaan dan lembaga adat yang digunakan sebagai mesin politik. Praktek yang sebenarnya secara strategis tidak boleh dilakukan oleh para pemimpin agama yang dominan di Kabupaten Maluku Tenggara mereka ikut mendukung secara terbuka salah satu cabup. Bahkan ada yang ikut melakukan intimidasi terhadap masyarakat dengan membuat tekanan langsung ke rumah-rumah penduduk. Akhirnya yang kepala daerah yang terpilih memang tidak didasarkan atas kualitas dan *track record*.

Bagian Kedua

Saat ini juga ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh beberapa desa di Pulau Seram, Haruku dan Kei Kecil untuk pengembangan otonomi asli sebagai upaya untuk mengembalikan akses dan kontrol mereka terhadap pengelolaan sumber daya alam

(SDA). Secara strategis hal ini juga diupayakan untuk melakukan proses transformasi menghubungkan antara situasi internal desa (kearifan dan sistem lokal) dengan berbagai kecenderungan perubahan yang terjadi pada situasi eksternal.

Baileo Maluku (JBM)

Sejak tahun 1988, beberapa pemimpin masyarakat adat lokal dari Kepulauan Kei, Tanimbar, dan Seram mulai sering bertemu untuk saling bertukar pengalaman dan informasi mengenai berbagai permasalahan masyarakat mereka di tempat asal masing-masing. Sejak tahun 1990, beberapa orang muda terpelajar dari daerah-daerah tersebut juga mulai ikut dalam beberapa pertemuan mereka sampai akhirnya, pada tahun 1991, mereka bersepakat membentuk satu sekretariat di Kota Ambon dengan nama “Forum Maluku”, disingkat FORMAL. Forum ini bertugas memfasilitasi koordinasi di antara mereka, membantu mereka mulai membentuk organisasi-organisasi lokal untuk melaksanakan beberapa program kegiatan tertentu, dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dan kalangan di luar Maluku yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi.

Pada pertengahan tahun 1993, mereka membentuk satu tim khusus untuk melakukan suatu kajian mendalam dan menyeluruh terhadap masalah – masalah utama masyarakat adat di seluruh Maluku. Delapan orang muda (empat di antaranya adalah putra asli Maluku sendiri), secara terpisah tetapi pada waktu yang bersamaan, melakukan perjalanan keliling selama 8 minggu ke berbagai pelosok, mulai dari Pulau Morotai dan Halmahera di ujung utara, sampai ke Kepulauan Aru di ujung tenggara timur dan Pulau – pulau Kisar dan Wetar di ujung tenggara barat. Hasil pengamatan lapangan intensif ini, setelah dianalisis

dan dikaji-bandingkan dengan berbagai dokumen sejarah dan kebijakan yang pernah ada sejak abad-14, memperlihatkan secara gamblang proses-proses peminggiran (marginalisasi) masyarakat adat penduduk asli kepulauan Maluku melalui tiga cara: (1) pencaplokan kawasan ulayat adat masyarakat setempat untuk penanaman modal besar dan pengurusan sumberdaya alam; (2) pengebirian otonomi organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga tradisional; dan (3) pemaksaan nilai-nilai baru yang mendukung pencaplokan kawasan ulayat adat dan pengebirian otonomi lokal tersebut (Roem Topatimasang et.al., *Orang-orang Kalah*, 2004).

Hasil kajian itu kemudian digunakan untuk menyelenggarakan serangkaian pertemuan dengan para pemuka masyarakat adat dan wakil beberapa organisasi lokal dari Kepulauan Kei, Aru, Tanimbar, Lease, dan Seram. Pada tanggal 10 Desember 1993, mereka semua berkumpul di Pantai Latuhalat di Pulau Ambon dimana mereka kemudian merumuskan pokok – pokok pikiran tentang prinsip-prinsip, strategi, cara – cara pendekatan, dan bentuk – bentuk tindakan yang mereka dapat lakukan, secara sendiri – sendiri maupun bersama-sama, untuk menghadapi proses-proses penyingkiran masyarakat lokal Maluku dengan segenap permasalahannya. Untuk itu, mereka bersepakat merubah FORMAL menjadi satu jaringan kerja yang terorganisir secara lebih sistematis, dengan nama “**Baileo Maluku**”. Nama ini dipilih sesuai dengan konsep tradisional adat di Maluku dimana “*baileo*” (balai) adalah tempat umum dan terbuka (forum) bagi seluruh warga masyarakat melakukan pertemuan, perhelatan dan upacara adat, serta berbagai peristiwa penting kemasyarakatan lainnya.

Bermula hanya dengan 4 organisasi lokal dari Kei Besar, Kei Kecil, Haruku, dan Seram, sebagai anggota pertamanya, Jaringan Baileo Maluku kemudian melaksanakan perannya sebagai suatu forum komunikasi dan koordinasi program yang

terutama dipusatkan pada peningkatan kemampuan organisasi – organisasi tersebut mengorganisir masyarakat adat setempat, ketrampilan metodologis melakukan proses-proses pendidikan dan penyadaran, serta ketrampilan manajemen mengelola berbagai bentuk kegiatan pengembangan masyarakat.

Beberapa organisasi lokal baru kemudian terbentuk di Kepulauan Aru dan Tanimbar, sementara beberapa organisasi khusus untuk keperluan pengembangan ekonomi kerakyatan, kegiatan kemanusiaan, pengkajian dan advokasi kebijakan terbentuk di kota – kota Ambon dan Tual. Semua organisasi baru itu bergabung menjadi anggota Jaringan Baileo Maluku yang, sampai akhir tahun 2008, tercatat sebanyak 14 organisasi, terdiri dari 6 yayasan lokal, 2 koperasi primer, 2 perseroan terbatas, 1 lembaga kajian dan advokasi, 1 perhimpunan kemanusiaan, 1 sekolah rakyat dan 1 lembaga intermediary.

Dalam melaksanakan fungsinya, Jaringan Baileo Maluku membentuk satu kantor Sekretariat Jaringan di kota Ambon. Sekretariat inilah yang melakukan pemantauan dan konsultasi dengan semua organisasi anggota jaringan, dan menyelenggarakan rangkaian pertemuan koordinasi yang berpuncak pada Pertemuan Tahunan Jaringan sebagai forum tertinggi untuk perumusan kebijakan, strategi dan program bersama seluruh organisasi anggota.

Sampai tahun 1998, mekanisme tersebut berjalan cukup baik dan lancar, dimana Baileo Maluku sempat mengukir reputasi sebagai salah satu bentuk alternatif jaringan kerja antar organisasi non-pemerintah (ORNOP) yang sering dijadikan contoh model bagi banyak jaringan sejenis di Indonesia. Selain dinilai sebagai suatu jaringan antar organisasi lokal dengan basis konstituen yang benar-benar jelas dan kuat di tengah masyarakatnya, dengan visi dan strategi program yang khas dalam proses-proses

pengorganisasian masyarakat adat dan pengelolaan sumberdaya alam lokal berbasis masyarakat adat (sehingga memperoleh penghargaan internasional World Rainforest Alliance Award 1997), Baileo Maluku juga aktif menjadi salah satu perintis terbentuknya beberapa jaringan nasional, antara lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pesisir dan Laut (JARING PELA), dan Tim Advokasi Nasional untuk Penghentian Kekerasan di Ambon (TAPAK AMBON).

Beberapa gagasan baru muncul untuk melakukan perubahan secara menyeluruh dan mendasar, terutama karena juga telah terjadi banyak sekali perkembangan baru dan perubahan cepat di tengah masyarakat yang, mau tak mau, harus diantisipasi pula oleh Jaringan Baileo Maluku dan seluruh organisasi anggotanya. Kebijakan – kebijakan ekonomi dan politik internasional, reformasi sistem politik nasional sejak 1998, dan dampak kerusuhan 1999, semuanya melahirkan tuntutan-tuntutan perubahan yang tak bisa diabaikan. Gabungan antara masalah-masalah internal dan tuntutan eksternal inilah yang akhirnya menyatukan pendapat di antara semua orang dan organisasi anggota jaringan untuk sesegera mungkin melakukan perubahan dan perbaikan menyeluruh pada sistem manajemen, struktur organisasi dan mekanisme kelembagaan, baik pada tingkat jaringan maupun pada tingkat organisasi anggota jaringan.

Hasil refleksi juga telah merumuskan misi untuk mencapai visi di atas: (1) Memperjuangkan pemulihan dan pengakuan hak – hak adat, budaya dan sejarah masyarakat lokal di Kepulauan Maluku; (2) Menghidupkan dan menguatkan kembali otonomi organisasi dan kelembagaan adat lokal dalam mengelola dan mengatur kehidupan sehari – hari masyarakat setempat; (3) Memperkuat sistem pengetahuan, kearifan dan ketrampilan masyarakat lokal agar mampu mengorganisir diri, sehingga lebih mampu pula mengelola usaha-usaha penghidupan mereka

sendiri secara lebih sistematis; (4) Mendorong, menciptakan dan memperkuat lembaga – lembaga ekonomi yang berbasis kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan rakyat warga masyarakat setempat; (5) Melakukan kajian – kajian dan analisis kritis terhadap berbagai kebijakan pada berbagai aras dan tingkatan (lokal, nasional, internasional) dan, atas dasar tersebut, melakukan advokasi perubahannya ke arah pengakuan hak dan martabat, kemaslahatan bersama, dan kesejahteraan hidup rakyat warga masyarakat setempat; (6) Melaksanakan koordinasi dalam lingkaran jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak di luar jaringan dalam rangka menciptakan sinergi sebagai suatu gerakan sosial yang kuat; (7) Dalam menjalankan misi tersebut, sesuai dengan namanya, jaringan ini hanya akan bertindak sebagai wadah atau forum koordinasi, komunikasi dan informasi bagi semua organisasi anggotanya yang, sesuai dengan tujuan pendirian dan kemampuannya masing-masing, akan berperan sebagai fasilitator bagi setiap prakarsa dan kegiatan yang direncanakan, diputuskan, dilaksanakan dan dikendalikan sendiri sepenuhnya oleh warga dan atau organisasi masyarakat setempat.

Ke-tujuh misi kemudian diimplementasikan dalam tiga isu besar yang difokuskan untuk menjawab kebutuhan strategis Maluku yaitu :

Hak Kepemilikan SDA dan Otonomi Lokal

Banyak model pengembangan otonomi asli yang telah dikembangkan sejak tahun 1998 dengan strategi mengembalikan sejarah asal usul dengan dihubungkan arah perubahan. Model otonomi asli telah dikembangkan di 5 desa di Pulau Kei Kecil (Kabupaten Maluku Tenggara), 1 desa di Pulau Seram (Kabupaten Seram Barat), 2 dusun yang akan diresmikan menjadi desa definitif di Pulau Seram (Kabupaten Maluku Tengah) dan 1 desa di Pulau Tanimbar (Kabupaten Maluku Tenggara Barat).

Sebagai contoh Desa Debut di Kabupaten Maluku Tenggara telah menerbitkan 26 Peraturan Desa (Perdes) dan memiliki pendapatan asli desa 146 juta per tahun; Perdes Desa Debut kemudian dijadikan referensi oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam pembuatan Perda tentang Otonomi. Proses ini juga dengan memanfaatkan dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk mengorganisir rakyat serta dapat mengembangkannya dalam pemenuhan pelayanan hak sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan sanitasi) yang lebih memadai.

Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat

JBM melakukan proses peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan potensial SDA dengan memperkuat jaringan pengetahuan dan informasi tentang manfaat SDA. Untuk kemudian mengembangkannya menjadi model alternatif yang berbasis pada ketersediaan SDA dan komunitas dihubungkan dengan peningkatan kapasitas strategi usaha yang dapat meyakinkan lembaga keuangan penyedia modal. Hal ini dilakukan untuk dapat mengatasi kurang tersedianya sumber-sumber pendanaan serta menurunkan tingkat kemiskinan yang secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya konflik perebutan SDA di masa yang akan datang. Terus melakukan proses pengorganisasian agar komunitas tidak terus menerus dijadikan sebagai konsumen oleh pihak lain dan mulai membangun strategi sebagai produsen yang mampu memperoleh keuntungan yang layak. Juga melakukan advokasi agar pemerintah memberikan dukungan infrastruktur ekonomi dan perlindungan usaha serta jaminan pemasaran untuk masyarakat hal ini dapat dilakukan bersama kelompok masyarakat madani yang lain.

JBM Sebagai Aktor Transformasi Sosial

JBM memandang perlu adanya inisiasi untuk koordinasi serta penyebaran informasi antar aktor transformasi sosial dalam masyarakat madani. JBM ikut menginisiasi lahirnya jaringan kerja sama antar aktor transformasi sosial bersama pihak lain di level lokal, nasional dan internasional, memiliki kapasitas menjadi inisiator untuk ketahanan pangan sehat. JBM juga dapat memaksimalkan pengembangan potensi lintas Propinsi Maluku berdasarkan sebaran wilayah dan keanekaragaman identitas anggota JBM. Wilayah Maluku adalah wilayah rawan dalam isu 'global warming' maka perlu diperluas pengembangan program berbasis keberlanjutan lingkungan. Saat ini JBM sedang memfasilitasi terbentuknya Blok Politik di tingkat wilayah Maluku.

Koalisi Peduli Lingkungan Hidup Maluku (KPLHM)

Proses ini diawali dengan terjadinya kerusakan lingkungan pesisir dan laut pada Teluk Dalam Ambon yang juga telah mendapat pengakuan dari negara RI dalam bentuk pemberian kalpataru pada tahun 1982. Kerusakan ini terjadi sebagai akibat dari pembangunan perumahan di wilayah Lateri, Kecamatan Baguala oleh PT Modern Multi Guna (MMG) yang tidak memenuhi standar penanganan lingkungan. Proses ini juga tidak secara maksimal dikontrol oleh Pemda Propinsi Maluku dan Pemda Kota Ambon.

Akibatnya telah terjadi sedimentasi yang telah menutup akar napas pohon bakau dan terjadi pendangkalan di wilayah pesisir teluk. Dampak yang dirasakan saat ini nelayan pesisir tidak lagi memperoleh ikan dan kerusakan laboratorium alam yang biasanya dijadikan tempat penelitian (S1-S3) Fakultas

Perikanan Universitas Pattimura. Kasus ini kemudian menjadi inspirasi untuk menginisiasi sebuah kerja bersama dalam bentuk koalisi yang kemudian disebut Koalisi Peduli Lingkungan Hidup Maluku (KPLHM) yang akan menjalankan mandat utama untuk mengupayakan perlindungan terhadap ekosistem pulau. JBM menjadi salah satu inisiator pembentukannya.

Sejak Desember 2006 dibentuklah Koalisi Peduli Lingkungan Hidup Maluku (KPLHM) dengan tujuan melakukan advokasi kebijakan terutama dalam mengembangkan model perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Penanganan pencemaran Teluk Dalam Ambon di Pulau Ambon diharapkan akan dapat ditemukan model perencanaan pembangunan berbasis lingkungan kepulauan.

KPLHM sampai saat ini beranggotakan 4 Kelompok Pencinta Alam (KPA); 5 Organisasi Mahasiswa Pencinta Alam; 1 Organisasi Mahasiswa; 3 Ormas; 14 LSM dan 7 Pakar Lingkungan; serta 1 perwakilan di Jakarta. Saat ini KPLHM telah menjadi salah satu koalisi yang secara konsisten melakukan advokasi terhadap berbagai kebijakan yang dibuat agar dapat memasukkan pertimbangan lingkungan.

KPLHM juga telah menginisiasi lahirnya sebuah lembaga penelitian bernama Lembaga Studi Pembangunan Maluku (LSPM) yang terdiri dari pakar berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya lembaga ilmiah yang independen ini melakukan analisa yang dapat digunakan oleh KPLHM atau para pihak lain yang akan melakukan proses advokasi.

Bagian Ketiga

Situasi Sosial Politik di Maluku sama seperti di daerah lain mulai memanas dimana para caleg mulai memanfaatkan isu

lokal untuk melakukan propaganda politik. Konflik yang terakhir yang terjadi di Desa Letwaru Kota Masohi (P. Seram) ternyata dikoordinir seorang caleg nomor 1 dari satu partai politik.

Dengan memanfaatkan situasi paska konflik 1999 banyak caleg yang mengaku dirinya sebagai pahlawan ini kemudian dijadikan sebagai batu loncatan dalam proses pencalonan. Para kepala daerah juga membiayai caleg-caleg dari parpol pendukungnya ketika prose PILKADA dengan tujuan apabila terpilih untuk dapat mengamankan berbagai kebijakan dan secara institusional dapat memberikan ‘perlindungan’ kepada kepala daerah.

Selain itu para anggota KPUD yang terpilih juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan ini, bahkan sampai pada tingkat PPK. Dengan melihat gambaran ini caleg yang terpilih cenderung akan ‘dikuasai’ oleh parpol lama. Kompetisi akan dirasakan makin berat oleh parpol kecil atau parpol baru karena cenderung mereka tidak memiliki infrastruktur ekonomi dan politik yang kuat serta tidak terkonsolidasi baik.

Tetapi sebagai pengecualian ada partai baru yang menjadi sangat populer karena kampanye iklan yang telah didesain secara komunikatif terutama dengan isu strategis masyarakat di beberapa stasiun TV swasta nasional dan dilakukan terus menerus. Di daerah parpol ini merekrut para pengusaha lokal untuk dijadikan sebagai pengurus parpol sekaligus untuk mendanai kegiatan parpol di wilayahnya termasuk dukungan terhadap fasilitas dan operasional parpol.

Para penguasa ekonomi lokal yang selama ini ‘enggan’ ikut terlibat dalam politik praktis saat ini telah terlibat secara aktif baik sebagai caleg atau pengurus parpol. Sementara untuk Kepala Daerah yang terpilih saat ini ada 4 kabupaten di Propinsi Maluku yang dipimpin oleh mereka yang secara individu

atau keluarga yang selama ini menjadi penguasa ekonomi tingkat wilayah. Belajar dari proses sebelumnya penguasaan ekonomi wilayah dengan mendapat legitimasi secara politik akan menjadi kecenderungan yang sangat kuat.

Sesudah konflik 1999 – 2004 di Maluku telah terbentuk banyak lembaga yang memosisikan dirinya sebagai lembaga adat. Salah satunya adalah pembentukan Majelis Latupati Maluku yang kalau dihubungkan dengan sejarah asal usul maka lembaga-lembaga adat seperti ini tidak representatif dan tidak memiliki nilai adat. Karena dalam sejarah lembaga adat di Maluku tidak pernah ada lembaga adat Maluku, yang tercatat adalah lembaga adat dari desa atau wilayah adat tertentu yang masing-masing memiliki sejarah dan nilai adat serta mendapatkan pengakuan. Dalam posisi seperti itu mereka cenderung dijadikan sebagai alat politik pada PILKADA Maluku tahun 2008 oleh salah satu kandidat. Faktanya sampai saat ini tidak ada lagi yang dikerjakan oleh lembaga ini. Dalam pemilu 2009 ini kecenderungan menggunakan isu social budaya semakin kuat dengan memanfaatkan sentimen adat tertentu.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menjawab beberapa kecenderungan di atas yaitu dengan membangun Blok Politik dan Desa Mandiri.

Inisiasi Pembentukan Blok Politik

Begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil secara organisasi dan individual dengan tidak terkonsolidasi baik, sehingga banyak upaya yang dilakukan hanya memberikan perubahan di basis-basis dimana mereka melakukan kerja pengorganisasian; ternyata belum mampu memberikan efek secara meluas. Selain itu ada tantangan dari kelompok lain yang menjadi alat-alat kepentingan politik dan ekonomi tertentu.

Dalam kondisi seperti itu memang diperlukan semacam kelompok yang dapat menginisiasi terbangunnya kerangka hubungan antar kelompok – kelompok masyarakat untuk dapat melakukan peran di tingkat menengah yaitu antara berbagai isu di tingkat akar rumput dan para elit yang dalam sebutannya adalah Blok Politik. Kehadirannya sebenarnya untuk merespon secara lokal segala masalah terjadi di tingkat lokal, sehingga pilihan tema, isu, platform dan strategi adalah untuk menjawab persoalan berbasis situasi lokal. Peran strategis lain yang dapat dilakukan yaitu dapat melakukan fungsi kontrol.

Terinspirasi dari proses yang telah dikembangkan selama ini oleh JBM yang sekarang telah berubah menjadi sebuah komunitas proses pembentukan blok politik telah dilakukan dengan melibatkan berbagai *stake holder* yang memiliki komitmen sama untuk membuat perubahan.

Pada Juli 2008 telah dilakukan pertemuan di kota Ambon dengan peserta berasal dari Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua difasilitasi bersama antara Demos Jakarta dan Himpunan Maluku untuk Kemanusiaan (HUMANUM) anggota Jaringan Baileo Maluku. Pertemuan telah menyepakati terbentuknya Blok Politik untuk wilayah Maluku – Maluku Utara dan Irian Jaya Barat dan Papua dan telah dirumuskan langkah-langkah strategisnya.

Inisiasi secara fungsi telah dijalankan di wilayah kerja masing-masing anggotanya. Saat ini yang dibuat adalah melakukan kampanye “melihat *track record*” dari para caleg. Hal ini menjadi strategis karena jumlah caleg yang sangat banyak sehingga diperlukan semacam indikator penilaian yang dimiliki oleh para pemilih. Akan sulit membuat penilaian terhadap apa yang menjadi rencana para caleg yang akan dibuat setelah mereka terpilih.

Dengan melihat *track record* para caleg para pemilih akan lebih mudah membuat penilaian. Sebagai contoh ada kandidat dari Partai Demokrat bernama Sony Waplau pemilik PT Modern Multi Guna yang secara hukum telah dinyatakan bersalah lewat putusan Mahkamah Agung RI atas pencemaran yang terjadi di Teluk Dalam Ambon (di Pulau Ambon) tetapi saat ini dia berkampanye dengan simpatik seolah-olah dia menjadi orang yang akan menjawab persoalan Maluku. Ini kontradiktif dengan apa yang harus dipertanggung-jawabkan sebagai pemilik perusahaan, kalau persoalan ini tidak diungkap maka masyarakat cenderung akan bingung.

Isu lain yaitu kampanye politik representasi/keterwakilan. Para caleg yang akan ikut pemilu harus juga dinilai keterwakilan bukan hanya berbasis wilayah tetapi juga berbasis kebutuhan strategis dan berbagai persoalan yang dihadapi para konstituennya. Hal ini dikarenakan banyak caleg yang berdomisili di luar daerah pemilihannya (dapil) sehingga sulit diukur komitmen mereka terhadap dapilnya. Sehingga yang kemudian harus dipilih adalah caleg yang dapat mewakili seluruh kebutuhan strategis dan menjadi solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi.

Paska berlangsungnya Pemilu, blok politik ini kemudian akan melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja Lembaga Legislatif dan Eksekutif dengan menitik-beratkan proses partisipatif/pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pembuatan kebijakan, pembuatan peraturan di tingkat daerah dan anggaran pembangunan.

Membangun Desa Mandiri

Untuk menjawab persoalan kemiskinan di Maluku berdasarkan hasil evaluasi proses yang selama ini dilakukan dalam mengatasi masalah kemiskinan sulit mengalami keberhasilan

karena dilakukan secara karitatif. Sebagai solusinya yaitu mengupayakan kemandirian desa di bidang otonomi dan ekonomi. Kemandirian di bidang otonomi yaitu adanya kemampuan desa untuk membuat aturan, kebijakan, pemerintahan yang baik, berfungsinya lembaga pengontrol tingkat desa, perencanaan pembangunan yang berbasis pada kapasitas dan potensi sumber daya lokal. Kemandirian di bidang ekonomi yaitu dengan strategi pengembangan ekonomi desa berbasis kapasitas dan potensi sumber daya ekonomi lokal.

Membangun desa mandiri secara partisipatif dilakukan oleh masyarakat desa dimulai dengan melakukan analisa kecenderungan arah perubahan secara internal dan eksternal. Berdasarkan data factual ini kemudian dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam mengembangkan strategi kemandirian otonomi dan ekonomi desa. Proses ini telah dimulai di beberapa desa di P. Seram dan P. Kei Kecil. Dengan terbangunnya kemandirian desa maka untuk ini secara langsung maupun tidak langsung akan menjawab persoalan kemiskinan.

Walaupun begitu besar tantangannya tetapi masih ada beberapa inisiatif lokal yang kemudian secara strategis harus dibesarkan menjadi inisiatif yang sifatnya wilayah.

Perlawanan Rakyat Berbasis Tradisi

Simpul Kalimantan Timur FBB Prakarsa Rakyat¹

”Sahabatku, banyak hal lain yang lebih positif di dunia ini. Banyak hal lain yang amat menarik untuk dibicarakan, misalnya tentang... mengapa kita, orang Melayu, yang hidup di atas tanah timah kaya raya tapi kita semakin miskin hari demi hari, atau tentang... bupati kita yang baru itu, apakah ia seorang laki-laki sejati atau tak lebih dari seorang maling seperti yang sudah-sudah...”

(Andrea Hirata, Sang Pemimpi, 137)

“Sebelum dhuhur tadi, ada seorang kontraktor datang. Ia minta agar di lokasi penambangan pasirnya diadakan ritual persembahan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas penambangan. Karena seringkali terjadi truck dan alat berat proyek tiba-tiba macet dan terguling tanpa sebab.”

(Kumala, pemimpin spiritual Bebalai, kampung Nyerakat Bontang, Maret 2007)

1 Paper ini dipersiapkan oleh Asman Azis

Cuplikan singkat kutipan pertama di atas diambil dari novel kedua, Sang Pemimpi dari karya Andrea Hirata, tetralogi Laskar Pelangi. Andrea menasehati sahabatnya, Jimbron yang sangat terobsesi dengan kuda. Andrea menggambarkan betapa eksploitasi sumber daya alam yang semestinya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, ternyata malah menghasilkan tingkat kemiskinan dan kemelaratan yang tiada terkira.

Hal ini agak lebih detil ia gambarkan dalam seri pertama dari tetraloginya, Laskar Pelangi, khususnya pada bab 5: *The Tower of Babel* dan bab 6: Gedong. Andrea melukiskan betapa tingkat kesenjangan demikian nyata, antara para pekerja PN Timah yang hidup mewah berkelimpahan dalam “Gedong” dengan komunitas “asli” Melayu Belitong yang hidup melarat di pinggiran-pinggiran pulau Belitong. Dibatasi tembok tinggi yang memanjang dengan papan peringatan “Dilarang masuk bagi yang tidak memiliki hak” yang mencolok tergantung di banyak tempat, sebuah *power statement* tipikal khas kolonial. Sebuah tembok yang melengkapi dan mempertegas seluruh dominasi dan perbedaan status sosial.

Kalimantan Timur adalah salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di sektor tambang dan migas. Hal ini sejatinya berbarengan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun ironis, kesejahteraan itu hanya jadi “azimat” pemanis bibir para pejabat dan pemilik modal ketika hendak melakukan eksploitasi sumber daya alam. Realitasnya, kesejahteraan itu tetap menggantung di angkasa, nun jauh dari jangkauan masyarakat.

Buktinya, dari data resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur tahun 2008, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2008 lebih dari 286.000 orang atau sekira 9,51 % dari total penduduk Kalimantan Timur 2.957.465².

Kecenderungan angka kemiskinan ini terus meningkat berbarengan dengan laju eksploitasi sumber daya alamnya. Di Kutai Timur misalnya, di mana bercokol perusahaan tambang raksasa PT. Kaltim Prima Coal, pada tahun 2004 seperti dicatat oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, jumlah penduduk miskin kurang lebih 27.838 jiwa (8,73 %) dan melonjak drastis di tahun 2005 menjadi 55.602 jiwa (31,86 %).

Bencana juga mengancam penduduk akibat keberadaan perusahaan-perusahaan itu. Pencemaran air, kehancuran hutan dan biota perairan, banjir, kebisingan dan getaran akibat kegiatan peledakan (*blasting*), hancurnya sistem hidrologi, penurunan kualitas udara, bahkan sampai penggusuran adalah dampak yang pasti akan diterima oleh masyarakat sekitar. RwuB (Rembuk Warga untuk Banjir), sebuah kelompok masyarakat yang menghimpun warga dan berbagai kelompok organisasi non pemerintah dan lembaga kemahasiswaan mengkaji, khusus di Samarinda bencana banjir yang setiap saat melanda kota tepian disebabkan oleh hancurnya lingkungan akibat eksploitasi pertambangan.

“Bayangkan saja, 66,03 % wilayah kota Samarinda telah dikuasai oleh konsesi kuasa pertambangan, baik yang skala besar, seperti PKP2B (Perjanjian Karya Perusahaan Batu Bara), dan selebihnya beberapa Kuasa Pertambangan,” ujar Kahar Al-Bahri yang akrab disapa Ocha, dinamisator JATAM (Jaringan Tambang) Kalimantan Timur, yang juga juru bicara RWuB, 18 November 2008 lalu.

“Terhitung sejak 2001 hingga 2008 telah diterbitkan 40 Kuasa Pertambangan, serta 3 PKP2B. Namun ironisnya, dalam laporan tahunannya, walikota tidak mencantumkan kejelasan dana *royalty* (dana bagi hasil) dan dana reklamasi perusahaan-perusahaan tambang tersebut,” kata Ocha.

Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam juga selalu saja berimplikasi pada tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada komunitas Tunjung-Benuaq di Kalimantan Timur misalnya, saat ini mereka selalu kesulitan saat upacara adat, entah itu *ngugu taun* (bersih desa) atau *kewangkay* (upacara buang bangkai), atau upacara adat lainnya. Karena setiap upacara ini memerlukan patung *blontang* yang harus diukir dari kayu ulin bundar. Sementara dengan tingkat eksploitasi perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang sangat massif, menjadikan kayu ulin saat ini sebagai barang langka yang sangat sulit ditemukan. Sehingga wajar, komunitas Tunjung-Benuaq Jahab, Kutai Kartanegara misalnya akan masuk ke hutan berhari-hari untuk menemukan kayu ulin tersebut ketika mereka mau melakukan upacara adat.

Lain lagi cerita komunitas Kenyah. Ketika saat ini pemerintah gencar mengkampanyekan pariwisata budaya, komunitas Kenyah giat melakukan proses-proses komodifikasi kebudayaan. Upacara-upacara dan tari-tarian kembali dihadirkan untuk kepentingan wisata budaya. Salah satu proverty tari Kenyah yang penting adalah bulu burung enggang yang disematkan di jari tangan bagai sayap. Tetapi seiring dengan habisnya hutan, burung enggang pun lenyap, mereka kehilangan tempat hidup dan berkembang biak. Sekarang, untuk mendapatkan satu lembar bulu burung enggang harus ditukar dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Maka jangan heran kalau melihat penari Dayak menggunakan bulu burung enggang palsu yang biasanya terbuat dari plastik.

Last but not least, ketika menemui Supinah, seorang pawang Belian perempuan di desa Kuntab, Kutai Kartanegara, kami harus menunggunya sekitar 5 jam, dari siang hingga menjelang maghrib. Menurut anaknya, Supinah sedang mencari ramuan untuk anaknya yang sedang sakit di Samarinda. Ketika Supinah datang, ia bercerita betapa susahnyanya sekarang mendapatkan

ramuan-ramuan untuk pengobatan tradisional, sampai ia harus masuk jauh ke dalam hutan yang dulu melimpah ruah sebelum ada perusahaan HPH, bahkan bisa ditemui di pinggir-pinggir kampung sekalipun.

Cerita Tentang Penjarahan Alam di Kalimantan Timur

Kalimantan Timur tersohor dengan kekayaan sumber daya alamnya. Hampir semua bahan baku energi ada di daerah ini. Mulai dari minyak, emas hijau (hutan), emas hitam (batu bara), sampai emas “betulan” ada di wilayah ini. Sejarah pun mencatat, bahwa sejak zaman *babeula*, migrasi berbagai macam bangsa ke negeri ini dalam rangka memperebutkan sumber daya alam.

Dalam lembaran sejarah kerajaan-kerajaan nusantara, kerajaan pertama di nusantara adalah kerajaan Kutai yang didirikan oleh Kudungga sejak abad IV M. Kerajaan itu terletak di wilayah pedalaman Muara Kaman, Kalimantan Timur, sekitar 150 Km dari Samarinda ke arah hulu sungai Mahakam. Orang-orang India yang disinyalir sebagai pendiri awal kerajaan ini, sejatinya adalah para “*adventurer*” pencari sumber daya alam untuk kepentingan dagang. Mereka berburu emas yang kemudian diperjual-belikan di negerinya.

Belakangan sejarah juga mencatat hadirnya beragam kelompok suku bangsa, mulai dari Cina, Jawa, Bugis, bahkan VOC Belanda, juga untuk kepentingan yang sama; dagang yang berarti juga eksploitasi sumber daya alam.

Namun, eksploitasi yang sistematis, berlebihan, dan sangat tidak memperhitungkan keseimbangan alam dan lingkungan justru terjadi di era Orde Baru sampai saat ini. Penjarahan sumber daya alam di Kalimantan Timur ini bermula di akhir tahun 1960-an. Peristiwa ini terkenal dengan istilah *banjirkap*. Dengan dalih untuk

meningkatkan devisa negara, eksploitasi hutan yang melibatkan perusahaan-perusahaan berbendera asing (seperti Jepang) dimulai. Proyek *banjirkap* ini pulalah yang mengundang para pendatang turut menambang "emas hijau" di rimba Kalimantan.

Dalam kaitannya dengan konsepsi kosmologis dan politisasi identitas Dayak sebagai komunitas lokal, cerita penjarahan sumber daya alam ini bermula sejak peristiwa Ganyang Malaysia di tahun 1963.

Dalam penuturan Mama Pirin dan beberapa orang warga Lung Anai, kabupaten Kutai Kartanegara, ketika peristiwa Ganyang Malaysia itu terjadi, daerah mereka (Apo Kayan) menjadi basis pertahanan tentara republik dalam menghadapi pasukan Gurka Malaysia. Ketika itu tentara Indonesia menggunakan strategi membentuk milisi-milisi sipil Dayak dan memaksa mereka untuk melawan tentara Malaysia. Di sisi yang lain, tentara Malaysia juga menggunakan taktik yang sama. Maka terjadilah "perang saudara" di perbatasan Indonesia-Malaysia antara sesama komunitas Dayak.

Belum usai peristiwa Ganyang Malaysia, meletus Gerakan 30 September (G 30 S) di Jakarta. Celakanya, tentara-tentara yang ada di perbatasan diidentifikasi sebagai bagian dari pasukan Chakrabirawa yang disinyalir sebagai dalang dari peristiwa itu. Maka, setelah terjadi pembersihan orang-orang yang dituding bagian dari Partai Komunis Indonesia di Jakarta, dikirimlah pasukan kedua ke perbatasan Malaysia-Indonesia. Namun, tugas utama mereka bukan lagi untuk menghadapi pasukan Malaysia, tapi untuk menghabiskan sisa-sisa pasukan Chakrabirawa yang ada di perbatasan. Terjadilah perang babak dua antara sesama pasukan republik yang ada di perbatasan. Dampaknya, komunitas Dayak Kenyah di wilayah perbatasan Apo Kayan, kecamatan Long Nawang menjadi sangat traumatik sejak wilayah mereka menjadi medan perang selama bertahun-tahun.

Setelah pembersihan sisa-sisa pasukan Chakrabirawa di perbatasan, dikirimlah pasukan ketiga dari Jakarta untuk melanjutkan tugas pasukan kedua, dengan tugas tambahan; mengharuskan komunitas-komunitas Dayak untuk memeluk agama. Dengan dalih gerakan anti komunisme, terjadilah pemaksaan untuk memeluk agama secara massif terhadap komunitas-komunitas Dayak di perbatasan.

Seorang bernama Peliq Lahang (almarhum) dalam sebuah bincang-bincang ringan dengan saya di pertengahan 2003 silam di rumahnya di Kampung Datah Bilang, Kutai Barat, dengan bangga sambil menepuk dada, “Sayalah ini generasi terakhir orang Dayak Kenyah yang dibaptis jadi Protestan. Saya menjadi pengikut Yesus pada akhir tahun 1967,” kenangnya.

Dalam ingatan kolektif masyarakat Dayak tersimpan sebuah memori bagaimana kejam-nya pemaksaan beragama yang dilakukan oleh tentara atas nama gerakan anti komunisme di tahun 1965 sampai awal tahun 70-an. Seluruh alat-alat produksi kultural –(l)amin, *belawing*, *blontanq*—, mereka dihancurkan dan dibuang ke sungai Mahakam. Bahkan ada di antara mereka yang dicelup ke sungai Mahakam, dengan dua pilihan problematis: baptis atau mati?. Tak terkecuali, kesenian mereka pun dilarang untuk dipentaskan. Apalagi seni yang terkait dengan ritual semisal *hudoq* dan tari *ngayau* (tarian memperingati kepahlawanan). Banyak di antara mereka dibunuh dan ditenggelamkan ke sungai Mahakam, bagi yang tetap bersikukuh dengan agama dan keyakinan nenek moyangnya.

Belum sembuh trauma itu, komunitas Dayak kembali dipaksa untuk menerima sebuah proyek pemerintah yang disebut “*resettlement* penduduk” atau *respen*. Proyek ambisius keluarga Cendana ini dimulai pada tahun 1974. Semua komunitas lokal yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur tak terhindarkan dari

megaprojek ini. Presiden Soeharto datang ke Datah Bilang untuk membuka proyek ini. Kedatangan Soeharto ke Datah Bilang ini direkam dengan sangat baik dalam sebuah relief panjang yang diukir di dinding (*l)amin* adat kampung Datah Bilang Ulu. Ini diikuti dengan peresmian beberapa proyek percontohan respen seperti di Long Segar (sekarang masuk wilayah kabupaten Kutai Timur) yang dihadiri oleh 4 orang menteri dengan para petinggi sipil dan militer di Kalimantan Timur.

Proyek respen inilah sesungguhnya yang memulai babak baru sejarah penghancuran sumber daya alam di Kalimantan Timur. Target awalnya memisahkan masyarakat adat Dayak dengan tanahnya. Perlu diketahui bahwa klaim yang selama ini disebut sebagai agama "*ardhi*," selalu saja menyandarkan basis kosmologi dan keyakinannya pada alam dan lingkungan di sekitarnya. Sehingga tidak heran kalau ada tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar atau kawasan hutan tertentu yang tidak bisa dijamah. Sebab, itu merupakan tempat ibadah yang sering dikeramatkan. Tetapi ketika proyek respen ini hadir, konsep dan kosmologi agama bumi ini menjadi tak relevan.

Hal ini seakan menjawab kegelisahan saya ketika pertama kali menginjakkan kaki di Datah Bilang pada pertengahan 2003 lalu. Dalam sebuah rapat koordinasi terkait dengan peraturan daerah tentang Kehutanan antara pemerintah daerah Kutai Barat, Dinas Kehutanan, para aparatus kecamatan, para kepala desa/kampung, dan kepala adat se-Kutai Barat, salah satu pernyataan yang mengemuka adalah "Daripada orang lain yang menghabisi hutan kita, lebih baik kita juga ikut menikmatinya." Statemen ini semakin mempertegas eksploitasi sumber daya alam yang sama sekali tak menghiraukan prinsip kelestarian lingkungan. Ironisnya, itu dikemukakan oleh komunitas-komunitas lokal yang sejatinya mempertahankan lingkungan alamnya.

Lalu diikuti dengan menghabisi struktur-struktur tatanan sosial yang selama ini berlaku dalam komunitas Dayak, semisal tradisi rumah panjang. Dengan basis argumentasi modern, kehidupan di (l)amin distigmatisasi sebagai tidak layak huni, tidak sehat, dan saling mengganggu. Maka dibangunlah rumah-rumah individu sebagai pengganti rumah panjang. Komunitas lokal pun disibukkan dengan proyek-proyek di kampung mereka, dan dilarang untuk melakukan aktivitas berladang. Bagi yang melanggar dikenakan denda adat.

Dalam penuturan Philef Dungau, seorang Kenyah yang saat ini menjadi pegawai pemerintah daerah Kutai Kartanegara, yang saat proyek respen dilaksanakan tinggal di Long Segar, "Saat proyek ini berjalan, masyarakat dilarang berladang. Kami semua dipaksa untuk bergotong-royong di kampung membangun rumah-rumah individu, fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan, juga fasilitas ibadah. Lokasi ladang juga dipersempit tidak boleh keluar lebih dari 10 Km empat penjuru mata angin. Sementara di luar itu hutan-hutan kami telah digarap oleh Bob Hasan dan teman-temannya," kenang Philef. Proyek itu diawasi langsung oleh tentara bersenjata lengkap yang tak segan menghajar siapa saja yang melanggar aturan proyek respen.

Selanjutnya, setelah hutan di Kalimantan ini gundul, dilanjutkan dengan eksploitasi minyak dan batu bara. Dalam catatan Jaringan Tambang Kalimantan Timur, luas wilayah Kalimantan Timur adalah 10% dari luas wilayah Indonesia dengan peruntukan 73 % untuk eksploitasi sumber daya alam (44, 85 % untuk konsesi sektor pertambangan, dan 2.869.950 hektar untuk migas).

Pengalaman trauma yang panjang itulah saya kira menjadi salah satu penyebab yang mampu menjelaskan kenapa di Kalimantan Timur hampir-hampir tidak ada satu pun gerakan

rakyat yang sangat kuat dan juga konsisten melakukan proses-proses perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya alam

Advokasi Sumber Daya Alam Berbasis Tradisi

Kutipan kedua di awal tulisan ini yang dinyatakan oleh Kumala, pemimpin spiritual Bebalai di kampung Nyerakat, mengindikasikan bahwa sesungguhnya di internal masyarakat dan komunitas-komunitas lokal itu tersimpan benih-benih perlawanan yang memiliki basis historis yang jelas. Dalam kasus Kumala ini, di sore itu dengan kekuatan ghaibnya, Kumala melakukan upacara persembahan dengan disaksikan oleh kontraktor, sopir, dan para buruh tambang pasir. Kumala seolah mampu "menyetarakan" diri dan komunitasnya, bahkan lebih dominan dari kekuatan modal dengan menghadirkan "mitos tandingan" tentang kekuatan supranatural yang bisa mengganggu proses eksploitasi tambang pasir (Hebdige, 2004).

Mitos tandingan ini memaksa kultur dominan untuk ikut melibatkan diri dan berkompromi dengan komunitas lokal atau subkultur, yang disebut oleh Hebdige sebagai *demistifikasi*. Demikianlah salah satu siasat dan negosiasi komunitas lokal atau subkultur bertahan dari serangan modernitas dan segala turunannya.

"*Success story*" tentang perlawanan berbasis tradisi dan kebajikan lokal ini dalam mempertahankan kelestarian lingkungan dan alamnya banyak kita temukan di berbagai komunitas di seluruh nusantara. Di Kajang, Sulawesi Selatan misalnya, mereka masih memiliki hutan perawan yang disebut *borong karama* (hutan keramat) sampai saat ini yang luasnya sekitar 331,70 hektar atau hampir separuh dari luas desa Tanah Toa Kajang (sekitar 784,35 hektar). Terpeliharanya hutan dan binatang di dalamnya ini berangkat dari satu kesepakatan sosial bahwa siapa saja yang

menebang pohon satu batang, maka kompensasinya ia harus menanam minimal 3 pohon yang sama. Dan ini terlembagakan dalam satu hukum adat, yang melanggarnya didenda secara adat sebesar *tallu lasa'* (kira-kira Rp 1.200.000,-).

Di samping itu, masyarakat Kajang juga takut terkena kutukan karena melanggar "kitab suci" mereka yang disebut *Pasanga ri Kajang* (yang diyakini melengkapi kitab suci umat Islam –Al-Qur'an— menjadi 40 juz). Kutukan itu bisa berupa penyakit bagi yang menebang pohon dan berburu binatang di dalam hutan. Atau bisa juga berakibat berhentinya sumber mata air yang mengalir di lingkungan Tanah Toa Kajang. Dalam *Pasanga*, memang sangat banyak dibicarakan persoalan lingkungan dan hutan. Berikut saya kutipkan salah satu baitnya:

Naparanakkang juku

Napaloliko raung kaju

Nahambangiko allo

Nabatuiko ere bosu

Napalolo'rang ere tua

Nakajariangko tinanang

Ikan bersibak

Pohon-pohon bersemi

Matahari bersinar

Hujan turun

Air tuak menetes

Segala tanaman menjadi.

Hutan ini juga terjaga karena seluruh keyakinan kosmologis dan spiritual masyarakat Kajang terpusat di sini. Sebagai misal, ketika akan terjadi pergantian *Ammatoa*, pemimpin spiritual Kajang, tidak dilakukan dengan mekanisme pemilihan lainnya pemilihan kepala daerah di era demokrasi ini. Tetapi salah satu caranya adalah dengan melepas beberapa binatang ternak seperti kerbau atau ayam ke dalam hutan tersebut. Setelah beberapa hari ketika ayam atau kerbau itu kembali ke kampung, dan masuk pada salah satu kolong rumah, maka sang empunya rumah itulah yang akan menerima wangsit sebagai *Ammatoa*.

Di dalam hutan ini juga diyakini ada semacam *batu ta'gentung* (batu menggantung) yang suci, yang dipercaya sama suci dan sakralnya dengan *hajar al-aswad* di tanah suci Mekkah. Yang pasti mitologi dan konstruksi adanya tempat-tempat sakral seperti ini ikut memberikan andil yang besar dalam menjaga dan melindungi kelestarian hutan mereka.

Saya juga pernah terlibat diskusi dengan seorang kawan yang memfokuskan studinya tentang agama-agama lokal di seluruh dunia. Dia sedang menyelesaikan Ph.D (*Doctor of Philosophy*) di Arizona University. Konon di Amerika, ketika badai *catherina* mengamuk, muncul (dan menjadi perdebatan yang ramai) diskursus tentang bagaimana konsep agama-agama besar dunia dengan kitab sucinya masing-masing dalam mengatasi bencana alam, semisal badai *catherina*. Kesimpulan akhir dari penelusuran tersebut bahwa, satu-satunya tradisi yang mengapresiasi dan mampu mengadaptasi badai tersebut adalah tradisi *Voodoo*, salah satu tradisi lokal di Amerika yang pernah dipopulerkan oleh Ki Gendeng Pamungkas saat menyantet Bush ketika ia berkunjung ke Indonesia.

Bagi Anda yang pernah menonton film dokumenter bertitle, "*An Evergreen Island*" yang mengisahkan perlawanan masyarakat Bougainville, Papua Nugini terhadap perusahaan

tambang tembaga CRA (Conzinc Rio Tinto Australia) dan BCL (Bougainville Copper Limited), terlihat perlawanan mereka itu juga salah satunya dikuatkan oleh keyakinan akan tanah mereka sebagai tanah suci yang tak sepatutnya dijarah oleh pihak-pihak luar. Setiap produksi yang mereka buat semisal senjata dilabeli "*Made in Meekamui*," tanah yang mereka anggap suci. Dan yang menarik bahwa proses-proses perlawanan itu kebanyakan diorganisasi oleh perempuan sebagai pewaris sah tanah ulayat Bougainville.

Catatan Akhir

Dari catatan-catatan singkat yang sangat tidak sistematis ini, mestinya bisa dijadikan bahan refleksi bagi kita semua, khususnya bagi kawan-kawan yang sudah bertekad mengabdikan hidupnya pada kerja-kerja advokasi masyarakat *subaltern*, untuk tidak latah memposisikan masyarakat dan komunitas lokal sebagai orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki kesadaran dan spirit perlawanan. Lebih celaka lagi, jika datang ke komunitas sebagai pahlawan dan manusia super yang mampu menyelesaikan semua persoalan dengan membawa alat advokasi dari luar untuk diterapkan pada sebuah komunitas, tanpa memperhitungkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat dan komunitas itu sendiri.

Bahan Bacaan

- Al-Bahri, Kahar, “Potret sebuah Pasar bernama Indonesia,”. Bahan presentasi yang disampaikan pada Temu Kader dan Konsolidasi PMII Poros Kalimantan Timur, 15 November 2008, di Wisma Atlit Tenggara Seberang, Kab. Kutai Kartanegara.
- Adhan, Syamsurijal, *Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang: Pergulatan Tiada Akhir*, dalam Hikmat Budiman (Ed.), *Hak Minoritas, Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, 2005.
- Azis, Asman, *Banjir, Akibat Hilangnya Kearifan Tradisi Lokal*, yang dimuat di Harian Kaltim Post, 17 Juni 2007.
- Erman, Erwiza, *Membaranya Batubara, Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto-Sumatera Barat (1892-1996)*, 2005.
- Hebdige, Dick, *>From Culture to Hegemony*, 2004.
- Hirata, Andrea, *Laskar Pelangi*, 2008. _____, *Sang Pemimpi*, 2008.
- Ismail, Abdullah Naim dan Merah Johansyah, *Komunitas Nyerakat: Geliat di Tengah Gempuran Arus Modernitas*, hasil *Live In* bersama komunitas. Kerjasama Naladwipa *Institute* Samarinda dengan Yayasan Desantara Jakarta, Juni 2007, tidak diterbitkan.
- Kirom, Aminuddin, dkk., *Tambang dan Kemiskinan, Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003*, 2005.
- _____, *Tambang dan Pelanggaran HAM, Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005*, 2007.
- _____, *Tambang dan Penghancuran Lingkungan, Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004*, 2006.
- Maunati, Yekti, *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, 2004.
- Naim, Asman Azis dan Abdullah, *Sejarah Masyarakat Dayak Kenyah Lepoq Jalan Lung Anai Kutai Kartanegara*, hasil *Live In* bersama komunitas. Kerjasama Naladwipa *Institute* Samarinda dengan Yayasan Desantara Jakarta, Agustus 2007, tidak diterbitkan.
- Tsing, Anna Lowenhaupt, *Di Bawah Bayang-bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi pada Masyarakat Terasing*, 1998.

Kalimantan Barat dan Pemilu 2009

Simpul Kalimantan Barat FBB Prakarsa Rakyat¹

Tahun 2004 telah digelar pemilu untuk menjawab tantangan reformasi. Namun hasil pemilu jauh dari harapan rakyat. Tahun 2009 pemilu kembali digelar dan antusias masyarakat dan para caleg mulai menggeliat kembali. Konsentrasi masyarakat di Kalimantan Barat di tahun 2008-2009 terarah kepada politik elektoral.

Gerakan reformasi lahir sejak jatuhnya rezim Soeharto sebagai hasil dari gerakan rakyat dan krisis multidimensional. Kejatuhan Soeharto melahirkan reformasi yang dipelopori oleh gerakan mahasiswa. Namun yang diuntungkan dari reformasi adalah partai-partai politik seperti partai Golkar, PAN, PKB, PDI-P, PBB. Hampir seluruh anggota legislatif yang dihasilkan dari gerakan reformasi tersebut berselubungkan harta dan kekayaan dengan seribu satu macam trik dan intrik untuk mempertahankan status quonya di parlemen.

1 Paper Untuk Lokakarya Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat, Bali, 9-12 Februari 2009. Tim Penulis : Simpul Kalimantan Barat

Kursi DPR dan DPD memang empuk apalagi kursi Presiden sehingga semua orang berusaha mempertahankan posisinya untuk tetap menempel di kursi dewan. Hal itu dapat dilihat dari masih bercokolnya wajah-wajah politikus lama yang terang-terangan dalam lima tahun atau sepuluh tahun lalu tidak berbuat untuk rakyat. Faktanya dapat dilihat dari harga barang-barang yang melambung, bertambahnya rakyat miskin dan hilangnya lapangan kerja.

Anggota DPR-RI lebih sering membuat undang-undang yang menguntungkan kepentingan golongan atau dirinya sendiri. Hal yang sama tampaknya juga terjadi di Kalimantan Barat dimana para politikus daerah selalu membuat perda-perda jebakan yang merugikan rakyat.

Jika memang sudah mempunyai komitmen dalam diri setiap anggota legislatif, membangun daerah dan rakyat tidaklah sesukar apa yang dikisahkan para legislatif di gedung dewan terhormat itu. Sesungguhnya para legislative tersebut bukanlah orang bodoh dalam segi pendidikan namun bodoh dalam arti hilangnya rasa kebangsaan dan jiwa kenegarawan yang semestinya dimiliki. Tampaknya para anggota legislatif dan eksekutif tidak mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangsa.

Pemilu 2009 sebentar lagi akan dihelat. Terdapat ratusan caleg bertebaran memenuhi berbagai partai di Kalbar, termasuk caleg perempuan yang juga ikut berjuang didalam partai-partai tersebut.

Pada pemilu 2009 ini ternyata telah mendapat berbagai tantangan sejak awalnya seperti berubahnya sistem pemilihan bagi anggota DPR dari sistem nomor urut menjadi suara terbanyak. Sebagian besar caleg yang tidak mendapatkan nomor jitu boleh bangga sebab mereka dapat bermimpi untuk menjadi anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak namun sebagian

besar kalangan di nomor urut jitu merasa dirugikan karena nomor wangsit itu sudah dibeli sebelumnya dengan harga mahal dan kini menjadi sia-sia.

Para pimpinan partai tampaknya mencoba mengakali keputusan Mahkamah Konstitusi ini dengan cara merengking suara partai terlebih dahulu baru kemudian dilihat suara siapa yang terbanyak dan memenuhi kuota kursi. Dengan cara ini suara terbanyak ternyata tidak menjamin untuk dapat duduk di legislatif. Dengan sistem prengkingan tersebut, jika ada partai yang tidak masuk rangking, sekalipun suara caleg pada partai tersebut banyak maka dipastikan caleg bersangkutan tidak dapat duduk menjadi anggota legislatif. Sistem perengkingan ini menguntungkan partai besar dengan jumlah caleg yang puluhan orang untuk menjamin partainya lolos sebagai rangking partai yang masuk nominasi kuota kursi dan akan menjamin penentuan caleg dengan suara terbanyak. Hal seperti ini akan memicu konflik antara para caleg, antara caleg dengan KPU dan sebaliknya.

Lemahnya sosialisasi KPU kepada para caleg dan masyarakat di daerah menjadikan cara ini bagaikan bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak. Dengan sistem ini maka yang akan duduk menjadi legislatif adalah mereka yang punya banyak uang dan politisi muka lama. Jadi pemilu 2009 dengan sistem suara terbanyak pun masih merupakan produk setengah hati dan akal-akalan partai besar saja. KPU sebagai penyelenggara pemilu ternyata tidak mampu berbuat banyak.

Sementara itu banyak rakyat di pedalaman tidak mengerti cara memilih yang benar dengan sistem baru ini. Hal itu diakibatkan lemahnya sosialisasi yang dilakukan KPU dan KPUD ke daerah-daerah di pedalaman Indonesia.

Di Kalimantan Barat sosialisasi pemilu belum banyak diketahui masyarakat baik di daerah perkotaan maupun

pedalaman. Hal itu jelas mengindikasikan ketidakmampuan kerja KPU dan KPUD sebagai penyelenggara pemilu pada tanggal 09 April 2009 mendatang. Masing-masing ketua KPUD justeru berharap para caleg ikut mensosialisasikan sistem pemilu tersebut kepada masyarakat padahal hal itu bukan tugas para caleg.

Selain itu, beberapa KPUD kabupaten di Kalbar baru dilantik saat mendekati pemilu, sehingga tak dapat memahami kerja KPU. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh pilkada di beberapa kabupaten. Namun, pelantikan KPUD di kabupaten Sanggau tertunda akibat ketidakpuasan salah satu calon bupati yang kalah sehingga harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. KPUD Sanggau baru dilantik pada tanggal 31 Januari 2009 paling lambat dari semua kabupaten yang ada di Kalbar.

Di Ketapang Masyarakat di sembilan desa di Kecamatan Singkup mengancam tidak akan menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2009. Ancaman tersebut akan mereka berlakukan, jika pemerintah tidak segera mampu mencari solusi yang dialami antara mereka dan PT Antar Mustika Sagara (AMS).

”Kami belum siap ikut pesta demokrasi Pemilu 2009,” tandas Hendra Samosir serta Singor, dua warga Kecamatan Singkup kepada sejumlah wartawan secara berbarengan. Kekesalan mereka karena hasil tandan buah segar (TBS) mereka belum dibayar sejak September lalu. Selama ini mereka bergantung dari penjualan TBS ke perusahaan. Sedangkan sejak September lalu, perusahaan praktis tidak pernah membayar TBS yang mereka serahkan. Padahal salah satu anak perusahaan milik PT Benua Indah tersebut dikatakan Samosir, terus mengirimkan CPO mereka ke Pontianak.

Para petani kelapa sawit dari Kecamatan Singkup bahkan sempat mengadakan PT AMS ke kepolisian pada Oktober 2008 lalu. Mereka gerah karena perusahaan terkesan memaksa masyarakat menyetujui pembayaran dana TBS sebesar 50 persen, dari TBS

yang belum terbayarkan sejak Agustus. Karena ketidaksetujuan tersebut, masyarakat bersikukuh agar dibayar secara penuh dan melaporkan perusahaan ke kepolisian. "Kami sudah cukup banyak merugi, kami tidak mau, kami tidak bersedia," tandas Samosir ketika itu mewakili masyarakat. Persoalan keterlambatan pembayaran ini timbul akibat anjloknya harga CPO di pasaran dunia. Namun masyarakat bersikukuh bahwa hal tersebut tidak lantas menjadi alasan penundaan pembayaran.

Menurut beberapa pengamat politik, surat suara pada Pemilu nanti dipastikan banyak yang rusak jika Komisi Pemilihan Umum atau KPUD tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi mengenai tata cara memilih "KPU mesti ikut bertanggungjawab selaku penyelenggara yang diberi amanah oleh undang-undang," kata Rustam Halim, pemerhati pemilu kepada pers di Pontianak kemarin (26/1). Menurutnya, dengan hitungan sekitar tiga bulan lagi pelaksanaan pemilu legislatif, salah satu persoalan krusial adalah soal tata cara memilih wakil rakyat (DPR/DPD/DPRD).

Dalam aturan baru pemilih melakukan pemilihan dengan cara mencentang/mencontreng atau ceklist atau istilah lain yang intinya memberikan tanda dengan alat tulis ballpoint, bukan mencoblos menggunakan paku. "Saya menilai sosialisasi yang dilakukan KPU kepada masyarakat masih minim, padahal sebagai penyelenggara mesti memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat selaku calon pemilih," ujar Rustam Halim. Ia memberikan contoh bahwa sejumlah masyarakat yang ditemuinya masih bingung cara memilih pada pemilu 2009 nanti. "KPU harus menjelaskan secara rinci kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara," katanya.

Bila ternyata dalam pelaksanaan pemilu, misalnya pemilu legislatif banyak kesalahan dalam tata cara pemberian suara, maka

KPU tetap punya andil dan harus ikut bertanggungjawab. ”Tolak ukur bahwa sebuah kegiatan sosialisasi itu sudah dilaksanakan harus jelas, kepada siapa saja sasaran sosialisasi dilakukan,” tegasnya.

Dengan diberlakukannya sistem suara terbanyak ternyata dapat merangsang para caleg berkompetisi merebut kursi DPR dan DPRD. Barangkali ini wujud perlawanan rakyat terhadap sistem politik yang ada sebelumnya. Hal yang membuat prihatin adalah ternyata para caleg tersebut banyak yang berasal dari kalangan tidak mampu atau kondisi keuangan yang minim namun bertaruh dalam politik.

Di Kalbar terdapat 38 partai yang ikut pemilu yang banyak diikuti oleh para caleg muka baru dan pemula. Para caleg ini tidak punya cukup uang untuk membuat berbagai atribut kampanye, sehingga tidak heran banyak caleg miskin yang hanya jadi penonton saja ketika melihat baliho dan atribut kampanye partai besar dan caleg yang beruang terpampang didepan halaman rumahnya. Tidak sedikit para caleg tersebut berjuang untuk mendapatkan harapan kursi di DPRD dengan pengorbanan dan harta.

Sementara itu pihak pihak Panwaslu dan KPUD juga kurang melakukan sosialisasi tentang larangan pemasangan atribut kampanye ditempat-tempat tertentu. Banyak para caleg yang memasangnya disembarang tempat termasuk jalan-jalan protokol. Perkataan “jalan protokol” pun tampaknya masih belum dipahami oleh para caleg sehingga pemasangan atribut tersebut tetap saja dipasang dilokasi jalan protokol. Pelanggaran ini mengakibatkan panwaslu dan KPUD mencopot berbagai atribut kampanye yang melanggar aturan tersebut. menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat AR Muzammil, penertiban itu dilakukan dengan mengedepankan fungsi panitia

pengawas pemilu. “Kami minta panwaslu segera menertibkan atribut kampanye yang melanggar aturan. Karena Pemerintah Kota Pontianak telah mengeluarkan peraturan tentang itu,” katanya.

Semakin dekatnya pemilu tahun 2009 telah menghangatnya situasi politik di Kabupaten Ketapang. Mesin politik untuk menarik simpati pemilih sudah mulai digerakkan. Umar Mansur, koordinator Ketapang Corruption Wacht (KCW) melihat dari 700-an calon legislatif (caleg) yang memperebutkan 40 kursi DPRD Ketapang, sebagian terdiri dari pengusaha jasa konstruksi. “Jika kita lihat caleg-caleg di DPRD Ketapang ini banyak yang dari kalangan kontraktor apa sih yang dikejar oleh mereka,” kata Umar Mansur.

Dalam percepatan pembangunan Ketapang, menurutnya idealnya seorang calon legislatif minimal menguasai hukum tata negara, politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Sebab, dalam merumuskan kebijakan yang diimplementasikan dalam anggaran, membuat perda dan melakukan pengawasan, tentunya yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat. Dengan mengedepankan kualitas dan kemampuan, ia berharap, para legislatif kedepan bisa mengimbangi kemampuan eksekutif dimana didalamnya ada yang sudah mengenyam pendidikan strata S-2. “Kita tak menginginkan ada pepatah tikus memperbaiki labu”, katanya

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penggantian sistem penetapan calon legislatif (Caleg), dari nomor urut menjadi suara terbanyak, sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, merupakan sebuah terobosan baru dalam perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui pergeseran sistem ini, setidaknya kerja politik yang dilakukan para Caleg lebih dihargai oleh partai. Pendapat ini disampaikan pakar kebijakan publik dari Universitas Tanjungpura, DR Zulkarnaen.

Wujud nyata dari penghargaan tersebut terlihat dari adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Caleg dan partai. Di satu sisi, Caleg mendapat kebebasan dalam memperkenalkan diri kepada konstituennya. Sementara di sisi lain, partai diuntungkan lewat usaha pencitraan yang dilakukan para Caleg. “Pasca Pemilu 2004, saya melihat pencitraan parpol di mata masyarakat mengalami penurunan. Untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap partai, sepertinya putusan MK merupakan sebuah jawaban yang tepat. Rakyat dapat menentukan wakil-wakil mereka, tanpa ada campur tangan partai,” ujar dosen Fisip Untan ini.

Melalui penerapan “sistem pemilihan langsung”, Zulkarnaen melihat ada semacam sosial kontrol dari masyarakat terhadap partai. Suara rakyat yang diwujudkan dalam angka-angka tentunya tidak dapat dengan mudah dimanipulasi oleh pihak partai. Bisa dibayangkan hal ini merupakan bentuk dari kawalan rakyat terhadap aspirasi yang dititipkan kepada caleg pilihannya.

Ditilik dari segi kepentingannya, putusan MK jelas menimbulkan untung-rugi, baik bagi partai maupun Caleg. Dilihat dari sisi keuntungannya, sistem suara terbanyak jelas mampu mengeliminir dugaan konspirasi politik yang dilakukan partai terhadap para Caleg bernomor urut kecil. Ini jelas merupakan peluang besar bagi terpilihnya caleg bernomor urut buncit.

Bagi partai, pemberlakuan sistem suara terbanyak, sedikit banyak telah meringankan beban kerja. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Caleg, nama partai tentu akan di sebut-sebut. Logo, nomor urut, serta nama partai tentu akan semakin sering dikumandangkan di depan massa konstituen. Tak hanya itu saja, tampilnya caleg-caleg muda sedikit banyak akan mempengaruhi besaran jumlah perolehan suara. Di sinilah letak terciptanya hubungan keseimbangan antara Caleg dan partai. Keduanya sama-sama diuntungkan.

Dilihat dari sisi kerugiannya, putusan MK jelas-jelas mengandung potensi konflik yang tinggi, terutama di dalam lingkungan partai. Selisih paham antara sesama Caleg besar kemungkinan akan terjadi. Bila potensi konflik ini tidak dapat dikelola dengan baik oleh partai, maka hal itu akan berimplikasi buruk terhadap pencapaian target partai di Pemilu 2009. “Untuk bisa menangkal terjadinya kemungkinan buruk tersebut, satu-satunya jalan adalah dengan melakukan konsolidasi politik, baik antara pengurus partai, maupun para caleg,” ujarnya menawarkan solusi.

Dengan hadirnya para caleg muka baru dan pemula semoga menambah suasana baru dalam perpolitikan bangsa ini. Banyaknya para caleg yang bertarung pada pemilu 2009 ini menandakan bahwa proses demokrasi terus bergulir. Mungkin ini salah satu gejala gerakan politik rakyat dimana rakyat sudah mulai kritis dan berani menentukan nasibnya sendiri untuk berperan serta dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini kedepan. Negara ini milik rakyat, bukan milik sebagian orang saja. Semoga perjuangan rakyat di 2009 menjadi bukti keseriusan dalam bernegara.

Demokrasi dan Perdamaian di Aceh

Simpul Aceh FBB Prakarsa Rakyat¹

Aceh, provinsi terujung di pulau Sumatera hampir tak pernah lepas dari berita tragis dan memilukan. Mulai dari eksploitasi sumber daya alam, peperangan dan konflik yang panjang hingga bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami. Berita Aceh tidak hanya menjadi isu nasional, namun sudah menjadi konsumsi masyarakat internasional, terlebih ketika bencana gempa bumi dan tsunami yang juga melanda beberapa negara lain itu mengakibatkan kematian ratusan ribu jiwa.

Tulisan ini menyajikan sekelumit tentang kondisi sosial dan politik masyarakat Aceh pada tahun 2008 yang merupakan masa-masa transisi dari masa konflik panjang dan bencana alam menuju suasana baru. Sebab, jika tidak mampu mengelola persoalan yang dihadapi sekarang, mungkin saja konflik yang lebih dahsyat bisa terjadi di Aceh.

1 Paper Untuk Lokakarya Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat, Bali, 9-12 Februari 2009. Penulis : Kurdinar

Ada beberapa hal yang selama ini menjadi trend sekaligus persoalan yang masih dihadapi di Aceh. *Pertama*, persoalan rekonstruksi dan rehabilitasi setelah empat tahun bencana gempa bumi dan tsunami yang belum tuntas, terutama bagi masyarakat korban.

Kedua, persoalan reintegrasi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang masih menyisakan persoalan serius dan bisa memudahkan integrasi setelah tiga tahun berjalan.

Ketiga, kondisi sosial masyarakat Aceh menjelang pemilihan umum 2009. Aceh sedikit berbeda dengan wilayah lain di Indonesia dengan keberadaan 5 partai lokal yang akan bertarung di pemilihan umum nanti.

Dari rumitnya persoalan di tengah-tengah masyarakat Aceh, tiga persoalan itu yang akan diangkat dan disajikan yang bisa jadi berbeda dengan cara pandang lain jika dilihat dari konteks yang berbeda.

Perlawanan Rakyat Korban Tsunami dalam Menuntut Hak

Bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh yang telah menghancurkan sebagian besar pesisir Aceh dan Sumatera Utara pada 26 Desember 2004 lalu masih menyisakan banyak persoalan pelik. Saat itu ada 127.080 jiwa yang tewas dan 116.344 jiwa hilang. Meski sudah empat tahun berlalu, namun upaya pemerintah untuk melakukan rehabilitasi dan rekontruksi terhadap masyarakat korban tsunami melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias belum usai. Sementara tenggat waktu yang diberikan kepada BRR akan habis pada Mei 2009.

BRR dibentuk pada 15 April 2005 oleh presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005. Keputusan itu

menetapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias-Sumatera Utara. Lalu diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2005.

Sebagai penguatan dari Perpu itu, terbitlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005. Sedangkan untuk organisasional dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 yang menetapkan keanggotaan Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. Peraturan perundangan tersebut menjelaskan bahwa Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini terdiri atas tiga instrumen yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. BRR diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto yang dikenal sebagai seorang mantan menteri yang profesional dan cakap untuk menggalang dukungan internasional.

Aliran dana dari berbagai dunia ternyata tidak menuntaskan persoalan yang dihadapi para korban tsunami. Malah timbul persoalan baru berupa kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Besarnya uang yang beredar di Aceh pada saat rekonstruksi telah mengubah paradigma masyarakat Aceh selama ini. Budaya gotong royong dan swadaya yang telah ada sejak dulu, tiba-tiba berubah menjadi budaya ketergantungan dan balas jasa.

Adanya program *cash for work* atau pemberian uang kepada masyarakat Aceh setelah tsunami untuk membersihkan lingkungan dan rumah di wilayahnya masing-masing telah berdampak kepada kebiasaan masyarakatnya. Secara ekonomi, dana itu memang diberikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun, masyarakat menjadi ketergantungan,

mereka menjadi enggan melakukan kerja gotong royong jika tak ada bayaran.

Jatah makanan dan kebutuhan pokok yang diberikan gratis oleh lembaga donor kepada masyarakat saat di pengungsian atau barak-barak dalam jangka waktu lama, juga mengakibatkan ketergantungan, sehingga tidak sedikit warga yang menjadi malas bekerja.

Sejatinya, pihak-pihak pemberi bantuan tidak saja memberikan bantuan dalam bentuk materi, perlu juga memberikan keterampilan dan keahlian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah. Paradigma masyarakat menjadi berubah seiring dengan adanya "bantuan" dari pihak-pihak lain yang keberadaanya hanya sementara.

Tak kalah penting soal urusan ratusan warga korban tsunami yang belum mendapatkan hak-haknya berupa bantuan rumah yang telah dijanjikan BRR. Padahal dukungan dana dari berbagai negara untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias terbilang sangat besar. Maraknya demonstrasi dan tuntutan yang dilakukan masyarakat korban tsunami tidak membuat kebijakan BRR menjadi lebih baik.

Menjelang akhir tugas BRR, masyarakat korban tsunami semakin gencar berdemonstrasi menuntut hak-haknya untuk mendapatkan bantuan rumah. Pada tahun 2008 saja, sedikitnya 20 kali warga korban tsunami berunjuk rasa ke kantor BRR pusat di Banda Aceh. Mereka bukan hanya warga yang tinggal di sekitaran Banda Aceh, tapi juga datang dari Aceh Besar, Aceh Barat dan daerah-daerah lain. Selain BRR, gedung parlemen dan kantor gubernur menjadi sasaran mereka dalam menyampaikanuntutannya. Sayangnya, pihak BRR secara tegas menyatakan tidak akan lagi membangun rumah dengan alasan tugas mereka akan segera berakhir.

Hingga Desember 2008, BRR mengklaim telah membangun dan merehabilitasi 124.454 unit rumah, 3.005 kilometer jalan, 266 unit jembatan, 954 unit puskesmas, rumah sakit dan poliklinik. Sisa anggaran BRR sebesar Rp 4 triliun telah disiapkan untuk menjamin keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. Dana tersebut akan diserahkan kepada pemerintah provinsi Nanggro Aceh Darusalam dan lembaga-lembaga kementerian terkait pada saat masa kerja BRR berakhir. Selain itu, BRR juga membangun 1.450 unit sekolah, 979 unit kantor pemerintah, 12 unit bandar udara, 20 unit pelabuhan laut, serta 103.273 hektar lahan pertanian.

Menjelang masa berakhirnya, BRR masih menyisakan pekerjaan lebih dari 5.000 rumah bantuan yang belum dibangun. Tugas-tugas BRR yang belum tuntas selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pemerintahan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Ini tentu menjadi beban baru bagi pemerintah Aceh selain penanganan korban konflik setelah perdamaian serta pemilihan umum pertama di Aceh setelah proses perdamaian antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang akan dibahas secara terpisah dalam tulisan di bawah ini.

Perlawanan Korban Konflik terhadap Kebijakan Negara

Penandatanganan kesepakatan damai (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia merupakan impian seluruh lapisan masyarakat Aceh, khususnya korban konflik. Karena bagaimanapun, konflik bersenjata telah berdampak buruk bagi kehidupan diri dan keluarganya. Sudah sepatutnya jika negara memberikan kompensasi atas kesengsaraan yang mereka terima akibat konflik berkepanjangan itu.

Dalam kesepakatan damai itu tercantum beberapa tanggung jawab yang wajib dilakukan negara terhadap korban konflik, di antaranya: pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan memberikan kompensasi dalam proses reintegrasi.

Pelaksanaan ketiga poin itu penting, sebab merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses perdamaian yang permanen. Khusus dalam konteks reintegrasi, pemerintah Aceh telah membentuk Badan Reintegrasi Aceh atau BRA pada 1 Maret 2006 melalui keputusan gubernur. Tugas utama BRA adalah mendukung dan mengkoordinasikan pemulihan setelah konflik dan kegiatan-kegiatan untuk mengisi perdamaian.

Nota kesepahaman juga mengatur proses reintegrasi mantan kombatan GAM dan tahanan politik ke desa-desa dan masyarakat Aceh. Secara keseluruhan, perpecahan di antara kombatan dan masyarakat umum tidaklah baku atau mutlak. Selama konflik, para kombatan yang menyempatkan diri berkunjung ke desanya saat masa cuti atau waktu-waktu khusus, meskipun banyak di antara mereka yang hanya menghabiskan beberapa jam saja. Batas antara kombatan (di hutan) dan simpatisan (di desa) sulit dibedakan. Oleh karena itu di dalam proses penyusunan konsep dan pembuatan kesepakatan, pemerintah dan GAM menyadari tantangan yang berkaitan dengan kembalinya mantan kombatan dan tahanan politik ke tengah masyarakat.

Namun pengalaman internasional menunjukkan, peralihan dari kehidupan militer ke kehidupan masyarakat sipil dapat menimbulkan masalah bagi banyak kelompok termasuk perempuan yang biasanya tersisih dalam proses ini.

Di masa peralihan ini, setiap orang membutuhkan pekerjaan baru dan modal untuk kemandirian finansial. Pada beberapa kasus, mereka memerlukan pelatihan keterampilan

baru, perumahan, tanah dan akses terhadap kesehatan. Mereka juga memerlukan penyesuaian psikologis terhadap cara baru dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian pula dengan alat pendorong – dalam bentuk hasil dan kompensasi damai untuk menyambut kembalinya GAM dan mendukung proses perdamaian.

Dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk proses reintegrasi di Aceh cukup besar. Pada anggaran 2007, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) mendapat anggaran sebesar Rp 700 miliar. Dapat dicairkan secara berangsur: tahap pertama sudah diserahkan kepada BRA Rp 250 milyar, sisanya Rp 450 miliar lagi tidak disalurkan karena resapan dana BRA tidak memuaskan hingga masa tahun anggaran 31 Desember 2007 sudah berakhir.

Pada tahun 2008, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk BRA sebesar Rp 600 milyar ditambah dengan dana anggaran tahun 2007 yang tak terpakai sebesar Rp 450 milyar, sehingga total anggaran pada 2008 menjadi Rp 1,05 triliun. Pemerintah Aceh dalam anggaran pendapatan dan Belanjanya menganggarkan tambahan dana reintegrasi sebesar Rp 230 miliar yang disalurkan melalui BRA dan Rp 200 miliar lagi melalui berbagai program pada dinas terkait.

Besarnya dana reintegrasi ini tidak serta merta memberikan manfaat bagi korban konflik. Hingga saat ini, masih banyak korban konflik yang tidak menerima dana itu. Bagi sebagian korban konflik, sekecil apapun dana yang mereka terima, akan sangat bermanfaat karena kondisi mereka sangat miskin akibat konflik bersenjata. Apalagi di tengah krisis ekonomi global dan inflasi yang cukup tinggi di Aceh mengakibatkan kondisi ekonomi mereka semakin terpuruk.

Di dalam MoU Helsinki, proses reintegrasi ditujukan kepada tiga kelompok di Aceh, yakni: mantan kombatan GAM,

mantan GAM yang bukan kombatan, dan masyarakat yang terkena dampak langsung dari konflik bersenjata.

Bagi mantan kombatan GAM dan mantan GAM yang bukan kombatan sangat mudah untuk mengakses dana itu. Pada tahun 2005, 1.000 orang mantan kombatan menerima bantuan ekonomi di luar mata pencahariannya sebesar US\$ 2.000 per orang. Tahun 2006 sekitar 3.000 orang mantan kombatan mendapat Rp 25 juta (US\$ 2,660) per orang. Pada tahun yang sama, sekitar 6.200 orang mantan GAM non kombatan mendapat dana sebesar Rp 10 juta per orang, sementara bagi 4.204 orang mantan GAM yang menyerahkan diri sebelum MoU Helsinki hanya mendapat dana 1 juta rupiah per orang.

Tidak semua mantan kombatan GAM menerima dana itu, sebab ada perbedaan jumlah antara kenyataan di lapangan dengan yang diakui dalam MoU Helsinki. Kendati demikian, dana itu telah mengubah sebagian besar mantan kombatan GAM dalam segi ekonomi. Kehidupan mereka mulai makmur dan berpenghasilan tinggi. Akses mereka bukan hanya pada dana reintegrasi ini semata, tetapi juga pada proyek-proyek pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten dan kota yang jumlahnya milyaran rupiah. Kemudahan itu juga tak lepas dari kepentingan politik. Banyak kepala daerah kabupaten dan kota yang berasal dari kelompok GAM pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2006. Perlu diingat gubernur yang saat ini menjabat juga berasal dari kelompok GAM. Sehingga, saat ini mayoritas mantan kombatan GAM itu telah menjadi kelompok “kelas menengah baru” di Aceh.

Begitu juga halnya dengan mantan GAM yang telah menyerah sebelum MoU Helsinki. Dukungan militer masih cukup kental terhadap kelompok ini. Disinyalir, militer juga turut membina kelompok GAM pada saat pemberlakuan darurat militer dan darurat sipil di Aceh. Lihat saja, seringkali petinggi

militer di Aceh memberikan pernyataan di media massa lokal yang mengkritik BRA dalam penyaluran dana reintegrasi.

Lebih aneh, adanya saluran dana reintegrasi kepada kelompok milisi yang bernama Pembela Tanah Air (PETA). Padahal dalam MoU Helsinki tidak tercantum alokasi dana bagi kelompok itu.

Laporan BRA tahun 2007 mencantumkan 6.500 orang milisi mendapat dana jaminan sosial sebesar Rp 10 juta. Masuknya kelompok ini dalam daftar penerima dana reintegrasi dipengaruhi oleh pemerintah pusat yang memasukkan kelompok ini dalam nomenklatur anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Besar juga pengaruh dari militer yang memberikan pernyataan di media massa lokal untuk memasukkan PETA sebagai penerima dana reintegrasi.

Hak Korban Konflik

Dalam proses reintegrasi ini, BRA merancang 4 program untuk korban konflik. *Pertama*, memberikan dana diyat untuk keluarga korban konflik yang meninggal atau hilang akibat konflik; *Kedua*, pembangunan rumah yang terbakar atau dirusak akibat konflik; *Ketiga*, santunan kesehatan bagi orang cacat atau terganggu psikisnya akibat konflik; dan *keempat*, pemberdayaan ekonomi bagi korban konflik.

Dari data yang dikeluarkan BRA tahun 2007, badan ini telah menyalurkan dana Rp 3 juta per-orang kepada 21.596 orang korban konflik dari 33.424 orang korban konflik yang terdaftar. Sekitar 1.550 orang korban konflik telah menerima dana pemberdayaan ekonomi. Jadi, BRA telah mengeluarkan dana sebesar Rp 10 milyar selama tahun 2006 dan 2007 untuk perawatan medical para korban konflik. Laporan ini bisa dikatakan berhasil

jika memang terlaksana dengan baik. Tetapi kenyataannya hampir seluruh program itu bermasalah di lapangan.

Dari hasil monitoring Koalisi Non Government Organization (NGO) Hak Asasi Manusia di Aceh atas pelaksanaan program reintegrasi di 13 kabupaten di Aceh, banyak ditemukan persoalan terkait dengan proses itu, di antaranya: dana yang diberikan tidak tepat sasaran, pemotongan atas dana yang seharusnya diterima korban, rumah yang tidak layak huni, informasi yang tidak jelas, dan lain lain. Salah satu faktor penyebab kegagalan itu akibat rendahnya keterlibatan korban dalam penyusunan program reintegrasi.

Pada awalnya organisasi korban konflik itu menolak pemberian kompensasi dalam proses reintegrasi. Menurut mereka, kompensasi itu seharusnya diserahkan negara setelah ada proses pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh lembaga yang diperuntukkan untuk itu, KKR misalnya. Tetapi kemudian, setelah adanya diskusi panjang di internal lembaga, akhirnya organisasi itu dapat menerima program reintegrasi. Ada beberapa alasan yang kuat, di antaranya: *pertama*, mereka sadar bahwa mayoritas korban konflik sangat membutuhkan dana itu akibat kemiskinan. *Kedua*, realitas politik tidak memungkinkan penolakan itu karena sesungguhnya proses reintegrasi itu tercantum dalam MoU Helsinki. Oleh karena itu, selain mendorong terbentuknya KKR dan pengadilan HAM di Aceh, organisasi itu juga melakukan advokasi terhadap proses reintegrasi.

Bentuk advokasinya dengan cara mengorganisasi anggotanya untuk melakukan aksi massa ke BRA. Sebelum aksi dilakukan, organisasi itu melakukan diskusi di komunitas untuk membahas kondisi real korban, hak-hak korban dan strategi advokasi. Itu dilakukan hampir di setiap kabupaten di mana kepengurusan organisasi telah terbentuk.

Hingga saat ini, belum ada perubahan yang signifikan atas pelaksanaan pemberian kompensasi dalam proses reintegrasi bagi korban konflik. Rendahnya kualitas data yang dimiliki BRA seringkali memberikan dana itu kepada orang yang tidak tepat sasaran, selain rendahnya kinerja dan sumber daya manusia di internal BRA.

Selain itu, upaya menekan BRA melalui aksi-aksi massa juga harus dibarengi dengan upaya lobi melalui pendekatan personal dengan pengurus BRA. Karena bagaimanapun, di antara pengurus BRA itu masih ada pribadi-pribadi yang baik dan dapat diajak bekerjasama dalam pelaksanaan proses reintegrasi itu. Kadangkala personil yang baik ini membutuhkan dukungan organisasi korban dalam merumuskan strategi pelaksanaan program.

Kebangkitan Kembali Masyarakat Korban

Munculnya gerakan masyarakat korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh sebenarnya sudah mulai pada tahun 2000 pada saat kongres korban pelanggaran hak asasi manusia. Kongres yang dilaksanakan pada 4 hingga 6 November 2000 menghasilkan rekomendasi untuk membentuk sebuah komunitas korban yakni Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SPKP HAM) Aceh. Sejak didirikan, sejumlah aktivis korban yang terlibat dalam SPKP HAM mulai melaksanakan aktivitas seperti investigasi dan pendataan korban, pendampingan korban di rumah sakit, kampanye dan beasiswa untuk anak korban.

Namun, seiring dengan meningkatnya konflik dan status darurat militer, eksistensi SPKP HAM kembali surut. Banyak tantangan yang dihadapi saat itu. Mulai intimidasi, penculikan dan penangkapan terhadap pengurus dan aktivisnya. Bahkan

beberapa orang di antaranya meninggal dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, hampir seluruh pengurus dan aktivisnya terpaksa "bersembunyi" dari ancaman, intimidasi dan teror yang semakin sering. Praktis organisasi ini mengalami *status quo* dan tak menjalankan aktivitas apapun.

Organisasi ini kembali muncul ketika kondisi politik di Aceh membaik. Sejumlah aktivis korban pelanggaran HAM berhasil menggelar kembali kongres kedua pada tanggal 20 hingga 23 Juli 2007 di Saree, Aceh Besar. Organisasi ini berhasil membentuk cabang di 13 kabupaten dan kota. Dalam kongres tersebut, para peserta korban merekomendasikan beberapa hal, di antaranya: tuntutan pengadilan HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Fokus isu ini disuarakan agar ada pertanggungjawaban negara dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.

Berdasarkan hasil rekomendasi itu, KKR menjadi kebutuhan mendesak bagi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan dan pemenuhan hak masyarakat korban untuk memperoleh rehabilitasi, restitusi dan kompensasi.

Namun, keseriusan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh untuk membuat regulasi masih menjadi persoalan, karena secara politik negara merupakan salah satu pihak yang berada pada posisi sebagai pelaku, sehingga perlu ada dorongan dari pihak luar untuk merealisasikannya. Upaya tersebut menjadi semakin terasa berat bahkan nyaris menemui jalan buntu, ketika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Sampai hari ini belum jelas bagaimana mekanisme KKR yang ideal untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, karena sejauh ini Indonesia belum pernah melaksanakan mekanisme tersebut.

Kebimbangan soal pijakan hukum mana yang akan digunakan dalam membentuk KKR terus menjadi perdebatan di kalangan aktivis, pakar hukum dan pemerintahan. Tanpa terasa hal ini telah menyebabkan kejenuhan masyarakat korban konflik terhadap kepastian hukum.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh merupakan satu-satunya langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang selama ini kurang.

Belum maksimalnya hasil advokasi yang dilakukan organisasi korban itu bukan akibat dari tidak maksimalnya kerja keras yang mereka lakukan. Tapi lebih disebabkan lemahnya strategi advokasi yang mereka bangun. Selama ini, ada kecenderungan, organisasi korban konflik ini mengabaikan dukungan publik khususnya hubungan dengan berbagai pihak yang terkait seperti jurnalis, aktivis mahasiswa, tokoh agama dan lain lain.

Menciptakan perdamaian yang permanen setelah konflik selama 30 tahun bukanlah pekerjaan mudah. Saling percaya dan membangun kerjasama antara pihak-pihak yang bertikai di masa lalu merupakan kunci utama dalam membangun dan menjaga perdamaian.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh sebagai bagian dari kesepakatan politik setelah perdamaian merupakan langkah awal menuju Aceh baru yang berbeda dengan masa lalu. Sejumlah persoalan keadilan yang selama ini disuarakan banyak kalangan, terutama kelompok masyarakat sipil dan korban adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan pengadilan HAM.

Mekanisme KKR bukan difungsikan sebagai pengganti proses pengadilan. Tetapi, ditempuh karena adanya keterbatasan pengadilan dan masa transisi yang menyulitkan proses penuntutan. KKR bukan hanya sekadar upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku, tetapi harus diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan keadilan bagi korban. Sedangkan pengadilan HAM bisa ditempuh melalui aturan hukum yang berlaku atau bisa juga dilakukan jika KKR tidak bisa dilaksanakan.

Bagi masyarakat Aceh, terutama korban konflik, persoalan keadilan bukan sebatas keadilan ekonomi semata. Namun kedua agenda tersebut merupakan harapan dan kunci keberhasilan dari pemerintahan baru yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Aceh yang sebagian di antaranya adalah korban konflik.

Adanya keinginan pemerintah Aceh membentuk KKR terlihat dengan dibentuknya tim penyusunan draft Qanun (sejenis peraturan daerah) yang telah dibentuk beberapa waktu lalu. Tim ini bertujuan merancang draft Qanun tentang KKR di Aceh. Keseriusan bukan hanya dilakukan pemerintah Aceh. Pemerintah pusat melalui direktorat jendral HAM departemen luar negeri juga telah mempersiapkan rancangan undang-undang tentang KKR.

Momentum pemilihan umum pada April 2009 ini dapat digunakan untuk membuat komitmen antara partai-partai peserta pemilihan umum. Komitmen itu berupa dukungan partai politik atau calon anggota legislatif terhadap advokasi yang sedang dibangun oleh organisasi korban. Karena dukungan parlemen dalam mendorong perubahan kebijakan pemerintah sangat penting, Artinya, komitmen itu dapat dituangkan dalam bentuk kontrak politik antara organisasi korban dengan partai politik atau calon anggota legislatif yang selama ini punya *track record* yang bersih.

Upaya membangun komitmen ini juga disebabkan akan ada perubahan yang signifikan dalam formasi keanggotaan parlemen di Aceh. Kehadiran partai lokal dalam pemilihan umum nanti memungkinkan munculnya wajah-wajah baru di parlemen. Apalagi, mereka itu merupakan figur-figur yang selama ini aktif membela kepentingan rakyat yang tertindas. Ini menjadi harapan masyarakat korban untuk menggantikan para elit politik lama dengan generasi baru yang diharapkan akan mampu mengubah kebijakan ke arah yang lebih baik.

Akankah Demokrasi Berbuah Solusi?

Pemilihan umum yang sering disebut pesta demokrasi pada April 2009 nanti telah dipersiapkan jauh hari oleh para elite politik dan para kandidat yang akan bertarung meraih simpati masyarakat dengan berbagai cara. Suhu politik di Aceh yang masih berada pada masa transisi konflik dari perang terbuka menjadi konflik politik, belum mampu sepenuhnya menghilangkan kekerasan yang selama ini terjadi di Aceh dalam bentuk fisik maupun mental. Belum lagi dengan masalah sosial akibat ketidakadilan pemerintah selama ini serta bencana gempa bumi dan tsunami.

Kondisi peta politik di Aceh berbeda dengan daerah lain. Aceh hampir tidak pernah reda dari persoalan-persoalan konflik sejak 33 tahun lalu. Proses perdamaian yang digulirkan sejak tiga tahun lalu belum mampu menghentikan sisa-sisa konflik. Paradigma ini telah berdampak terhadap proses-proses politik menjelang pesta demokrasi.

Hasil pemilihan kepala daerah di Aceh April 2006 lalu mengisyaratkan besarnya dukungan masyarakat terhadap calon yang bukan berasal dari partai politik alias calon independen. Dari 22 kabupaten dan kota yang telah melaksanakan pemilihan

kepala daerah secara langsung, 11 kepala daerah di antaranya berasal dari calon independen yang didukung oleh mantan GAM. Ini tidak terlepas dari dukungan kelompok mantan kombatan yang bergerak di tengah masyarakat. Ini berarti, ada asumsi dalam masyarakat yang kurang percaya terhadap partai nasional yang sejauh ini dianggap tidak mampu mengubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik. Ini juga melatarbelakangi kemunculan sejumlah partai lokal di Aceh.

Dalam pemilihan umum mendatang, selain diikuti oleh 38 partai nasional, ada 6 partai politik Lokal. Di Indonesia, keberadaan partai lokal hanya di Aceh. Partai-partai lokal itu mengusung para calon anggota legislatif yang 90% kaum muda. Keenam partai lokal itu adalah Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Partai SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA), Partai Bersatu Aceh (PBA).

Dua di antara partai-partai lokal itu lahir dari rahim organisasi yang pernah dimusuhi oleh pemerintah Indonesia. Partai Aceh (PA) didirikan oleh mantan-mantan kombatan GAM yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan kekuatan senjata untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sedangkan Partai SIRA lahir dari kelompok muda Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). Kelompok ini melakukan perlawanan dengan cara yang lebih lunak, dengan mengusulkan referendum bagi Aceh.

Harus dipahami, keberadaan partai politik lokal merupakan satu terobosan yang berarti bagi upaya penguatan partisipasi dan demokrasi. Keberadaan partai lokal menjadi jembatan politik antara masyarakat dengan elit politik yang selama ini senjang.

Partai lokal bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Pada pemilihan umum tahun 1955 tercatat sedikitnya ada 6 partai politik lokal yang berpartisipasi, yakni: Partai Rakyat Desa

(PRD), Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Partai Tani Indonesia, Gerakan Banteng, dan Partai Persatuan Daya. Saat itu, Partai Persatuan Daya berhasil meraih kursi di parlemen. Ini bisa berarti, langkah untuk mendorong perkembangan partai politik lokal di banyak daerah merupakan langkah strategis bagi penguatan eksistensi daerah terhadap pusat, yang ujungnya akan menumbuhkan kaitan politik yang berkesinambungan antara kepentingan politik pusat dan daerah. Aceh bisa menjadi contoh bagaimana keberhasilan partai lokal dalam membangun kekuatan partisipasi dan penguatan demokrasi lokal.

Menjelang pemilihan umum 2009, dinamika politik di Aceh sudah terlihat memanas sejak kampanye tertutup pertengahan tahun lalu. Dalam catatan Koalisi NGO HAM Aceh, tahun lalu tercatat 75 kasus kekerasan terkait pelaksanaan pra pemilu 2009 dalam bentuk: (1) Intimidasi antar pengurus partai politik, simpatisan partai politik dan masyarakat biasa. (2) Pengrusakan atribut partai. (3) Pemboman dan pembakaran kantor atau sekretariat partai politik. (4) Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan tahapan pemilu 2009.

Upaya pemerintah untuk memenuhi, menghormati dan melindungi hak para korban pelanggaran HAM demi kehidupan yang lebih bermartabat belum ada titik terang, meski perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan GAM sudah berusia 4 tahun. Ini hanya salah satu bagian kepentingan rakyat yang masih diabaikan oleh pemerintah, di samping pemenuhan hak-hak korban tsunami.

Banyak keterangan yang mensinyalir adanya praktek korupsi bantuan korban konflik dan tsunami dengan menjadikan dana itu sebagai logistik kampanye partai politik tertentu. Salah satu lembaga anti korupsi telah melakukan verifikasi terhadap

yayasan penerima dana bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). 2/3 dari yayasan penerima bantuan itu diduga bekerja untuk pemenangan partai politik tertentu.

Ironisnya lagi, di tengah kesengsaraan dan kemiskinan rakyat, elite politik semakin mengumbar janji politik yang menambah luka, melemparkan teror, bahkan meminta pasukan TNI untuk turun ke desa-desa dengan alasan pengamanan menjelang pemilihan kepala daerah. Padahal tugas pengamanan pemilihan umum diserahkan kepada kepolisian.

Sejatinya, pihak aparat keamanan harus diberikan ukuran dan metode kerja tersendiri dalam menjalankan fungsinya, sehingga gesekan antara masyarakat dengan aparat keamanan dapat di tekan serendah mungkin. Relokasi TNI ke desa-desa rasanya bukan langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk menjamin keamanan pemilihan umum, sebab ada 8.000 lebih polisi yang akan bertugas di tempat-tempat pemungutan suara di Aceh. Penempatan aparat keamanan yang terlalu banyak di pemukiman sipil akan berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok yang anti demokrasi.

Semoga pemilihan umum di Aceh bukan awal kehancuran Aceh yang lebih dasyat, melainkan sebuah dinamika sosial kerukunan yang berbuah perdamaian sejati bagi masyarakat Aceh.

Hegemoni Elit Lokal Dan Partai Politik Serta Strategi Perlawanannya

Simpul Jambi FBB Prakarsa Rakyat¹

Proses transisi demokrasi di Indonesia telah berjalan selama satu dasawarsa. Ruang dan kontrol kehidupan demokrasi yang mestinya sudah dikuasi oleh rakyat ternyata masih jauh dari harapan. Dalam banyak aspek, rakyat semakin terpinggirkan dari proses pembangunan. Kebijakan yang mestinya berpihak kepada rakyat, ternyata dalam prakteknya lebih memihak kepentingan elite lokal, kapitalis dan pengurus partai politik. Di banyak tempat, rakyat semakin kehilangan sumber-sumber kehidupannya yang telah diambil alih oleh pemerintah setempat, lalu pengelolaannya diserahkan kepada pemilik modal dengan dalih investasi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

1 Paper dipersiapkan oleh Hambali Penggiat Komunitas Mitra Aksi Jambi

Di sisi lain, hak-hak rakyat atas kebutuhan sosial dasar (kesehatan dan pendidikan) yang mestinya menjadi kewajiban penyelenggara negara juga semakin terabaikan. Privatisasi institusi kesehatan dan pendidikan yang terus menerus dilakukan pemerintah dengan dukungan legislatif dan modal kapitalis membuat rakyat dari kelompok miskin dan kaum marginal semakin sulit meningkatkan derajat kehidupannya.

Kehidupan rakyat yang sebagian besar berada dalam garis kemiskinan semakin diperburuk dengan terjadinya krisis finansial global. Dalam berbagai analisis, krisis finansial menyebabkan stagflasi ekonomi, kualitas hidup buruk dan melemahkan kehidupan berbangsa. Hilangnya kemampuan daya beli rakyat terhadap kebutuhan primer (pangan, kesehatan) menyebabkan kekurangan asupan nutrisi yang menimbulkan kerentanan daya tahan tubuh.

Di tengah-tengah kehidupan rakyat yang semakin sulit, para elite politik di semua level hanya menyibukkan diri menggalang kekuatan politik memperebutkan kekuasaan. Hampir setiap hari milyaran rupiah dibelanjakan hanya untuk membangun politik pencitraan. Proses ini berlangsung dalam skala pemilihan kepala daerah dan menjelang pemilihan umum 2009.

Padahal di bawah warna-warni atribut partai politik, di sana tersebar rumah-rumah rakyat yang penghuninya sedang kebingungan memikirkan masa depan keluarganya. Ada yang kehilangan pekerjaan, gagal panen, korban banjir, nilai jual hasil perkebunan dan pertanian yang terus menurun tidak lagi sebanding dengan harga pupuk dan harga pestisida yang semakin tinggi. Sementara biaya kesehatan dan pendidikan terus meroket. Jeritan rakyat hampir tak pernah didengar sungguh-sungguh oleh penguasa dan elite politik lokal.

Penguasa dan elite politik, termasuk partai-partai dominan di Jambi seperti; Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan tahu bahwa kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar rakyat telah mulai memberikan dampak serius terhadap derajat kesehatan mereka.

Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2007, angka kematian bayi usia satu bulan (neonatum) sebesar 19 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi kurang dari satu tahun sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian anak balita sebesar 44 per 1000 kelahiran hidup¹.

Angka kematian ibu di Indonesia sebesar 307 per 100.000 kelahiran, sedangkan di propinsi Jambi 214 per 100.000 kelahiran. Artinya, 9.170 ibu meninggal tiap tahun karena melahirkan, atau 764 ibu meninggal setiap bulan.

Dari berbagai hasil penelitian, penyebab utama kematian ibu (46,7%) karena komplikasi yang terjadi selama atau segera setelah persalinan. Semua itu akibat sebagian besar ibu hamil hanya dirawat oleh dukun beranak dan anggota keluarga yang tidak terlatih serta tidak mendapatkan pelayanan kebidanan memadai yang dibutuhkan. Akibat keterlambatan pertolongan, 34% ibu harus meninggal karena mengalami pendarahan pada masa nifas, disusul oleh eklampsia atau darah tinggi akibat kehamilan (26,6%), infeksi (20,2%) dan selebihnya karena penyebab lain.

Tingginya angka kematian ibu secara langsung berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yaitu 108 dari 177 negara, tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti: Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand dan Vietnam².

Dari 220 juta penduduk Indonesia sekitar 62 juta atau 30% penduduk usia muda berusia 12 hingga 24 tahun. Kondisi mereka dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan. Dari

segi kesehatan reproduksi dan seksual remaja dapat dilihat dari meningkatnya berbagai kasus perkawinan usia muda karena kehamilan yang tidak direncanakan, aborsi, infeksi menular seksual, HIV/AIDS, pengguna narkotika serta prostitusi remaja.

Selain persoalan kesehatan perempuan, bayi dan anak balita, penyakit lain yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat pada usia produktif adalah *tuberkulosis* atau TBC. Pada survey kesehatan rumah tangga tahun 2004, penyakit TBC masih menduduki peringkat kedua penyebab kematian pada penduduk kelompok usia 15-34 tahun. Peringkat yang sama juga terjadi pada kelompok umur 35-44 tahun dan terutama pada perempuan.

Penyakit epidemik lainnya yang menunjukkan kecenderungan meningkatkan kematian di wilayah-wilayah pedesaan pada tiga tahun terakhir adalah malaria dan deman berdarah. Ironinya, banyak kasus TBC, malaria dan deman berdarah yang tidak terdeteksi lebih dini karena kurangnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Fakta jelas menggambar terabaikannya hak-hak sosial dasar rakyat secara sistematis. Ini karena kebijakan pemerintah dari rezim Orde Baru sampai periode transisi demokrasi masih memprioritaskan indikator-indikator ekonomi makro dan mengutamakan kepentingan kapitalis daripada memberdayakan rakyat.

Otonomi daerah yang seharusnya makin mensejahterakan rakyat malah sebaliknya. Pengelolaan keuangan rakyat bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi lebih banyak untuk memakmurkan pejabat birokrasi di daerah, anggota legislatif di semua level serta memperkaya partai politik dan pengusaha. Karena yang terjadi kemudian adalah :

1. Sumberdaya lokal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan dibagi-bagi untuk

kepentingan individu dan sekelompok orang yang dekat dengan bupati dan wakil bupati, seperti; tim sukses, pengusaha lokal dan nasional yang berkontribusi dalam pembiayaan kampanye selama kampanye dan partai politik pendukung.

2. 70% dana APBD teralokasi untuk biaya penyelenggaraan birokrasi (gaji pegawai, penambahan dan perbaikan infrastruktur, operasional rumah tangga bupati dan wakil bupati, pengadaan mobil dinas, biaya studi banding, termasuk untuk biaya operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sisanya (30%) untuk biaya pembangunan yang harus dibagi kesemua dinas yang ada di daerah.
3. Dinamika politik di daerah yang terjadi setelah reformasi dan otonomi daerah terutama dari perubahan pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung sering kali berimplikasi terjadinya benturan kepentingan di tingkat daerah. Konflik-konflik setelah pemilihan kepala daerah membuat proses-proses pembangunan di daerah mengalami stagnasi.
4. Keberadaan dinas/intansi yang sepenuhnya di bawah otoritas bupati sarat dengan kepentingan politik daripada menjalankan perannya sebagai implementasi berbagai kebijakan sektoral. Dalam banyak kasus jabatan kepala dinas di daerah bukan lagi sebagai jabatan fungsional tetapi telah menjadi jabatan politis. Penempatan jabatan di intansi bukan berdasarkan keahlian atau pengalaman kerja tetapi sangat bergantung pada selera kepala daerah yang terpilih.
5. Dalam banyak kasus, kepala daerah tidak memiliki pengalaman dan *science of crisis* terhadap berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, tetapi lebih berorientasi pada “kekuasaan” dan berpihak pada kepentingan investasi yang merugikan hak-hak rakyat atas sumberdaya yang dimilikinya.
6. Ketidaksiaran pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan desentralisasi. Masih banyak program-program pembangunan yang langsung disusun dan direncanakan oleh

pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus dan dana-dana dekonsentrasi. Dampaknya, selain sering tidak tepat sasaran juga menimbulkan persoalan baru baik di tingkat pemerintah daerah maupun di masyarakat.

Menjelang pemilihan umum 2009, pemenuhan hak-hak sosial dasar rakyat masih jauh dari harapan. Karena kekuatan-kekuatan politik dominan hanya berorientasi merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kondisi ini juga dapat dilihat dari elite pengusungnya yang masih kelompok-kelompok lama meski berganti partai. Pemain baru yang umumnya dari kalangan perempuan dan orang muda yang miskin pengalaman politik juga ikut mengusung jargon yang sama, tanpa bisa memberikan analisis kritis terhadap retorika politiknya.

Membangun Gerakan Perlawanan Lokal

Keberadaan organisasi rakyat dalam berbagai bentuk manifestasinya secara sosial-politik telah mampu mewarnai proses jalannya transisi demokrasi di Indonesia. Walau dari perlawanan yang dilakukan belum mampu mengalahkan berbagai kekuatan politik dominan (partai politik, pemilik modal), tetapi paling tidak telah mendidik rakyat untuk berani menggunakan hak-hak politiknya sebagai warga negara untuk melakukan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Komunitas Mitra Aksi Jambi bersama organisasi masyarakat sipil di Indonesia meyakini bahwa ketidakadilan merupakan inti atau akar dari semua permasalahan kemasyarakatan yang terjadi kapan dan di mana pun sepanjang sejarah peradaban manusia, terutama di kalangan rakyat yang berada di lapisan ekonomi, politik dan sosial-budaya terbawah dan tersisihkan.

Tatanan yang terbangun sejak masa setelah kolonial hingga sekarang merupakan tatanan tidak adil yang melahirkan berbagai ketimpangan ekonomi, politik dan sosial budaya termasuk ketimpangan gender. Akibatnya, ada segelintir orang yang semakin kaya, memiliki akses yang besar terhadap berbagai sumberdaya; punya kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengekspresikan diri, dan dapat menentukan proses pengambilan keputusan yang berpengaruh bagi masyarakat luas. Sementara sebagian besar rakyat semakin tidak berdaya, tersisih dan hanya menjadi obyek bahkan menjadi korban kebijakan penguasa yang korup yang didukung oleh pemilik modal.

Cita-cita dan usaha untuk menghapuskan semua jenis dan bentuk ketidakadilan tersebut salah satunya dengan menjadikan kelompok-kelompok masyarakat terbawah dan tersisihkan, terutama perempuan dan remaja sebagai pelaku aktif dan kritis dalam seluruh proses pembangunan. Sehingga kelompok-kelompok marginal, perempuan dan remaja akan lebih mampu mengembangkan identitas dirinya serta memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang ada bagi peningkatan kesejahteraannya.

Komunitas Mitra Aksi Jambi melakukan inisiatif-inisitif strategis untuk membangun gerakan rakyat, terutama terhadap organisasi perempuan dan remaja di tingkat basis, di antaranya:

Memperkuat posisi organisasi-organisasi perempuan di tingkat basis melalui penguatan ekonomi, sosial-budaya dan politik.

Membangun kesadaran kritis remaja akan hak-hak sebagai warga negara, serta meningkatkan kesiapan remaja dalam menghadapi berbagai tekanan politik, ekonomi dan sosial budaya.

Menyediakan dukungan teknis (peningkatan kapasitas, asistensi dan pendanaan) bagi organisasi masyarakat sipil di

berbagai wilayah di Sumatera dalam mengembangkan konsep, strategi dan langkah-langkah pengelolaan sumberdaya lokal. Melakukan penelitian, kajian-kajian dan analisis kritis terhadap berbagai kebijakan lokal, nasional dan internasional untuk mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada kelompok marginal, perempuan, dan remaja.

Melalui berbagai inisiatif strategis yang dilakukan Komunitas Mitra Aksi, organisasi-organisasi perempuan dan remaja tumbuh tidak saja sebagai organisasi gerakan, tetapi juga mampu memainkan peran dan posisi strategis secara politik, ekonomi dan sosial di masyarakat terhadap pengambil kebijakan di daerah.

Gerakan-gerakan terorganisasi yang dilakukan perempuan desa yang dikenal dengan Aliansi Perempuan Merangin (APM) misalnya, mampu menjadi kekuatan baru sebagai organisasi perempuan alternatif di luar organisasi perempuan yang terbentuk secara struktural. Eksistensi mereka menjadi lebih kritis dalam melakukan perlawanan-perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan perempuan.

Organisasi perempuan berbasis gerakan rakyat lainnya adalah Aliansi Perempuan Muaro Jambi (APMJ) yang beranggotakan aktif sebanyak 9.500 orang, Aliansi Perempuan Taman Nasional Berbak (ATPNB) dengan jumlah anggota aktif 10.000 di lebih dari 14 desa di kawasan Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Walaupun secara politis belum sekuat APM, namun keberadaan mereka mulai diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan politik lain termasuk pengambil kebijakan di daerahnya.

Selain mengorganisasi gerakan perempuan pedesaan, tahun 2002 Komunitas Mitra Aksi mulai masuk ke kelompok-kelompok orang muda (remaja) sebagai target gerakan perubahan sosial.

Inisiatif pengorganisasian orang muda dimulai dengan isu pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. Sementara kerja-kerja pengorganisasian dilakukan melalui pendekatan luar sekolah dan pendidikan formal.

Pendekatan pendidikan formal dilakukan sejak tahun 2006 di tiga Sekolah Menengah Atas kota Jambi, kemudian tahun 2008 berkembang di seluruh SMA dan sekolah kejuruan yang setingkat yang ada di Kota Jambi yang saat ini berjumlah 36 sekolah.

Berbeda dengan pendekatan luar sekolah yang lebih mudah dalam membangun ideologi gerakan dan kesadaran kritis, pendekatan melalui institusi pendidikan formal membutuhkan strategi pendekatan yang sangat hati-hati tetapi dengan tidak melupakan ideologi pendidikan kritis.

Dengan menggunakan model pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi remaja di sekolah, Komunitas Mitra Aksi Jambi mengenalkan paradigma baru proses pendidikan partisipatif berbasis hak anak di dunia pendidikan formal. Inisiatif ini tidak saja menarik minat siswa tetapi juga para guru dan kepala sekolah untuk mulai mengembangkannya sesuai dengan tuntutan sistem pendidikan saat ini. Pada tahun 2008, Dinas Pendidikan Kota Jambi mendukung secara penuh agar metode ini dikembangkan di seluruh SMA dan sekolah yang setingkat yang ada di Kota Jambi.

Komunitas Mitra Aksi Jambi sebagai salah satu organisasi pengembang sumberdaya untuk transformasi sosial di lingkungan INSIST mengambil inisiatif untuk mendorong proses-proses penguatan organisasi masyarakat sipil di berbagai wilayah di Sumatera. Di samping itu dengan pengalaman dan kredibilitas yang dimiliki menjadi modal untuk dapat masuk dalam tataran strategis kebijakan di semua aras dan level kebijakan (lokal, nasional dan internasional).

Kemandirian sumber dana yang mulai berhasil dijalankan Mitra Aksi sejak tahun 2005 semakin meningkatkan independensi dalam mempengaruhi proses-proses penyusunan kebijakan yang pro rakyat di daerah. Wilayah kerja yang juga semakin luas (Lampung, Bengkulu, Riau, Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darusalam) serta jaringan kerja dengan *Civil Society Organization* di Asia Tenggara; Vietnam, Kamboja, Malaysia, Philipina dan Thailand, menjadikan posisi Komunitas Mitra Aksi Jambi menjadi strategis untuk membangun gerakan politik alternatif yang berbasis pada pengorganisasian dan kepentingan rakyat dalam mengontrol kekuasaan institusi negara dari hegemoni kapitalis.

Agenda Selanjutnya

Belajar dari pengalaman gerakan rakyat di berbagai wilayah di Indonesia tahun lalu dan pengalaman internal Komunitas Mitra Aksi bersama gerakan-gerakan rakyat yang menjadi mitra strategisnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Pertama, keberadaan gerakan rakyat masih berjalan sendiri-sendiri, terutama dalam menghadapi perlawanan terhadap penguasa yang didukung hegemoni kapitalis. Akibatnya, posisi perlawanan rakyat menjadi sangat lemah, mudah dipatahkan dan dibelokkan oleh kepentingan lain yang menyusup dalam diri gerakan rakyat. Dalam banyak peristiwa, terjadi pembusukan di dalam gerakan rakyat sebelum rakyat sampai pada agenda aksinya. Bahkan gerakan-gerakan rakyat menjadi sangat mudah dibungkam dengan hanya selembar uang kertas Rp 50.000 atau karena satu paket sembako murah dan propaganda penurunan harga bahan bakar minyak yang diberikan oleh penguasa dan agen kapitalis.

Kedua, para penggerak organisasi rakyat sendiri banyak yang harus dibenahi. Selain persoalan keterbatasan kapasitas dalam

menyusun konsep, strategi dan langkah-langkah pengorganisasian gerakan rakyat, juga kapasitas dalam memobilisasi sumberdaya. Oleh karena itu dalam banyak peristiwa, organisasi penggerak atau pendukung gerakan rakyat menjadi kehilangan arah dan tujuan, lesu dan mati suri di tengah perjalanan perang melawan ketidakadilan. Dalam banyak kasus, tidak sedikit organisasi pendukung gerakan rakyat menggadaikan ideologinya hanya untuk mendapatkan logistik dan amunisi dengan alasan menyelamatkan “dapur” personal dan organisasinya.

Ketiga, mengkritisi keberadaan aktivis gerakan yang masuk dalam sistem politik formal (legislatif) dan partai politik. Mereka belum mampu membawa perubahan di lembaga-lembaga perwakilan dan di internal partai politik. Kondisi ini bisa dimengerti karena dominasi elite politik oportunistis dan pendukung status quo masih sangat mendominasi di semua sistem politik formal. Sementara beberapa aktivis pro rakyat yang mencoba masuk dalam persaingan pemilihan kepala daerah nasibnya tak jauh berbeda.

Dari beberapa pengalaman yang terjadi, hanya sedikit para aktivis pro rakyat yang berhasil merebut kekuasaan eksekutif. Namun, lagi-lagi karena mereka dikendalikan oleh kekuatan politik dominan yang didukung oleh kekuatan kapitalis, sehingga gagasan-gagasan pro rakyat belum dapat dijalankan sepenuhnya. Di lain pihak, banyak aktivis pro rakyat yang gagal mendulang dukungan rakyat karena dikalahkan oleh permainan politik uang yang masih mendominasi dalam proses politik elektoral saat ini.

Keempat, refleksi yang sangat penting selama masa transisi demokrasi di tingkat organisasi pendukung dan organisasi gerakan rakyat adalah tidak tuntasnya penyusunan *platform* gerakan perubahan sosial pada tataran dimensi politik-ekonomi-sosial budaya dan management crisis. Organisasi-organisasi itu

banyak yang terjebak pada isu-isu taktis, terlebih saat Indonesia mengalami berbagai krisis ekonomi dan bencana alam di sepanjang tahun 1998 sampai dengan 2007 yang lalu.

Perubahan peta politik yang terjadi di Indonesia dan internasional menjadi momentum penting bagi gerakan politik alternatif. *Pertama*, bagi gerakan perempuan, Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan setiap partai politik menempatkan 30% calon legislatif perempuan menjadi momen penting bagi gerakan perempuan untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam politik elektoral. *Kedua*, dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon independen untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden 2009 memberikan peluang bagi aktivis gerakan pro rakyat untuk merebut posisi kekuasaan eksekutif. *Ketiga*, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan calon legislator terpilih didasarkan pada suara terbanyak.

Di tengah-tengah perubahan peta politik lokal dan nasional, terjadi pula krisis kapitalisme global yang berimbas pada perekonomian nasional. Hancurnya kekuatan finansial para kapitalis ini diprediksi akan semakin buruk dan dalam waktu yang panjang.

Perubahan politik elektoral dan krisis finansial yang dihadapi para kapitalis menjadikan kekuatan-kekuatan status quo yang awalnya penuh semangat untuk berkuasa lagi melalui partai politik dominan atau melalui pendirian partai politik baru dengan dukungan modal kapitalis, mulai kehilangan keyakinan. Situasi ini tentunya menjadi sebuah peluang besar bagi organisasi rakyat untuk menggagalkan kekuatan menggesar peran kekuatan kapitalis. Kerenanya agenda mendesak yang harus segera dilakukan adalah menguatkan *platform* gerakan perubahan sosial pada tataran dimensi politik-ekonomi-sosial budaya dan manajemen krisis.

Kejelasan dan kesiapan platform gerakan perubahan sosial akan menjadi modal utama yang dapat ditawarkan melalui para aktivitis pro rakyat yang telah memilih jalur perjuangan menggunakan politik elektoral dalam penggalangan suara di tingkat basis. Sedangkan bagi organisasi-organisasi gerakan akan menjadi landasan bagi penyusunan konsep, strategi dan langkah-langkah pendekatan pengorganisasian masyarakat. Dengan demikian pengalaman masa lalu yang merugikan dan menghancurkan gerakan rakyat itu sendiri tidak akan terulang lagi.

Perumusan *platform* gerakan perubahan sosial tentunya harus diikuti dengan program-program alternatif yang memberikan dampak positif bagi rakyat, baik yang bersifat pragmatis maupun strategis (ideologis) di luar yang telah ditawarkan partai dan elite politik status quo lainnya.

- i Data dari Badan Pusat Statistik, Departemen Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Demographic and Health Surveys, 2008
- ii BKKBN, 2008

Politik dan Fragmentasi Gerakan Rakyat di Nusa Tenggara Barat

Simpul Nusa Tenggara Barat FBB Prakarsa Rakyat¹

Tahun 2008 merupakan masa kejayaan bagi organisasi keagamaan Nahdatul Wathan Pancor yang berafiliasi dengan Partai Bulan Bintang di kancah politik. Dalam 3 kali pemilihan kepala daerah, organisasi itu telah berhasil memenangkan kadernya untuk menduduki kursi kepala daerah. Tuan Guru Bajang alias Zainul Majdi, ketua umum Nahdatul Wathan Pancor terpilih menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat. Di kabupaten Lombok Timur, Syamsul Lutfi, ketua IV Nahdatul Wathan Pancor juga terpilih sebagai wakil bupati. Ada juga Zaini Arony, ketua I organisasi itu menduduki kursi bupati di Lombok Barat.

Ketiga kandidat tersebut berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah melalui Partai Bulan Bintang (PBB) yang berkoalisi dengan partai Islam lainnya, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

1 Paper dipersiapkan oleh Sulistiyono Direktur Koslata Mataram

PBB bukanlah partai dominan pada pemilihan umum tahun 1999, partai ini hanya mendapatkan 1 kursi, terpaut jauh dari Partai Golkar (Golongan Karya) yang meraih 21 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat. Begitu pula pada pemilihan umum tahun 2004, meski meningkat menjadi 6 kursi, namun PBB masih kalah unggul dari Golkar yang mendapatkan jumlah kursi terbanyak, 15 kursi. PBB memperoleh suara yang cukup menonjol di kabupaten Lombok Timur, sebanyak 8 kursi.

Hasil pemilihan itu menunjukkan bahwa partai yang dominan menguasai kursi legislatif tidak menjamin kandidatnya menang dalam pemilihan kepala daerah langsung. Dalam pemilihan kepala daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten Lotim, calon kepala daerah yang diusung oleh gabungan partai besar seperti Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) justru dikalahkan oleh calon kepala daerah yang diusung oleh koalisi PKS dan PBB. Kekuatan dukungan partai dalam mengkampanyekan calonnya kurang berarti manakala ketokohan dari calon kepala daerah yang diusung tidak layak jual. Artinya, dasar pertimbangan para pemilih dalam menjatuhkan pilihan lebih menitikberatkan pada figur ketokohan dari calon yang diusung ketimbang kebesaran partai pengusungnya.

Hasil pemilihan kepala daerah langsung di provinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten Lombok Timur tahun 2008 yang memenangkan calon pemimpin baru dan mengalahkan kekuatan lama, memperlihatkan ekspresi keinginan rakyat untuk perubahan dan kebosanan rakyat terhadap kepemimpinan yang ada selama ini.

Kekecewaan Rakyat Terhadap Kegagalan Pembangunan

Di bawah kepemimpinan HL Serinata, gubernur Nusa Tenggara Barat dari tahun 2003 hingga 2008, kondisi perekonomian

di daerah itu tidak mengalami kemajuan berarti. Pada masa awal ia menjabat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nusa Tenggara Barat berada pada posisi ke 29 dari 30 provinsi di Indonesia. Pada masa akhir jabatannya pun, tetap berada pada nomor dua dari bawah atau peringkat 32 dari 33 provinsi di Indonesia.

Tidak ada terobosan pembangunan baru, sehingga arah kebijakan yang dimunculkan terkesan latah. Saat isu krisis energi dunia mencuat yang ditandai dengan melambunginya harga bahan bakar minyak, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menganjurkan penanaman jarak pagar. Pemerintah pusat saat itu mendorong penghematan energi serta penggunaan biji jarak sebagai bahan bakar alternatif. Upaya ini mengendor seiring dengan melemahnya dukungan pemerintah pusat dan tidak ada paket kebijakan yang memadai berupa insentif maupun jaminan pemasaran.

Pada waktu itu para nelayan sudah mengeluhkan harga bahan bakar minyak, petani tembakau omprongan di Lombok Timur kelabakan dengan kelangkaan minyak tanah, namun pemerintah daerah kurang hirau. Tidak ada upayaantisipasi dari dampak penghapusan subsidi bahan bakar minyak bagi warga. Kemarahan petani tembakau memuncak dengan membakar tembakaunya manakala hasil panen yang melimpah dihargai murah oleh perusahaan rokok, sementara pemerintah daerah masih tetap membisu.

Arah kebijakan pembangunan Nusa Tenggara Barat di bawah kepemimpinan Serinata mengandalkan pola lama dengan penarikan investasi. Asumsinya, percepatan pembangunan dapat terjadi kalau masuk investasi dari luar. Tidak heran bila kebanyakan pejabat kemudian menyibukkan diri untuk menggaet investor tanpa menyadari bahwa kondisi iklim pemerintahan yang kurang baik membuat pemilik modal enggan masuk. Akibatnya, posisi tawar daerah menjadi rendah manakala berhadapan dengan investor.

PT EMAAR, misalnya, mengajukan beberapa persyaratan kepada pemerintah daerah untuk menanamkan investasinya di kawasan pengembangan pariwisata *Lombok Tourism Development Corporation*. Syarat yang dia ajukan di antaranya, pembersihan kawasan yang akan dijadikan proyek dari penduduk setempat yang melakukan *reclaiming* dan jaminan pembangunan bandara internasional di Lombok.

Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dan Lombok Tengah kemudian meminta kepada Angkasa Pura untuk segera merealisasikan pembangunan bandara tersebut di atas lahan yang telah dibebaskan pada masa rezim Suharto. Sebagaimana dengan PT EMAAR, Angkasa Pura juga mengajukan syarat agar pemerintah daerah membersihkan lokasi pembangunan bandara dari penduduk yang telah kembali menduduki kawasan itu. Permintaan pemerintah ditolak oleh warga karena biaya ganti rugi lahan terlalu rendah. Warga meninggalkan lokasi itu karena dipaksa oleh pemerintah pada masa rezim Suharto.

Upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah tidak membuahkan hasil, demikian pula upaya Angkasa Pura. Saat dia mulai meratakan lahan, warga menghadangnya. Pada akhir 2005 kelompok yang berkepentingan mengerahkan kelompok Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) di Lombok Tengah untuk mengusir warga. Dengan alasan menghindari konflik horizontal antar warga, aparat keamanan kemudian melakukan penggusuran. Terjadi bentrok, sejumlah warga terluka dan ditahan.

Kekecewaan rakyat semakin bertumpuk dengan ditemukannya beberapa kasus korupsi di Nusa Tenggara Barat, salah satunya di tubuh DPRD (1999 – 2004) saat diketuai oleh Serinata, sebelum ia menjabat gubernur. Kasus *pertama*, pembengkakan pendapatan anggota dewan yang selisihnya

mencapai Rp 1,28 milyar. *Kedua*, penyimpangan dana asuransi anggota dewan yang disiasati untuk dana purna bakti anggota dewan sebesar Rp 1,7 milyar. *Ketiga*, pengucuran dana sejumlah Rp 3,75 milyar dari anggaran pos biaya penunjang kegiatan dewan, yang perincian penggunaannya tidak jelas.

Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi), Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak), Sobat, Suaka, dan lain-lain turut mengungkap dan mendorong proses penegakan hukum atas kasus itu, meski belum mampu menekan kejaksaan untuk mengajukan Serinata ke meja hijau. Sepertinya petinggi Golkar berupaya melindungi kadernya yang masih menjabat sebagai gubernur itu, sehingga penandatanganan persetujuan presiden untuk pemeriksaan Serinata diulur-ulur.

Pada saat proses pemilihan kepala daerah berlangsung, kasus korupsi ini menjadi bahan kampanye untuk menyerang Serinata yang saat itu tengah berkuasa. Pengurus Golkar Nusa Tenggara Barat pernah melapor ke Panitia Pengawas Pemilu tentang ditemukannya selebaran dan stiker yang menyerang kadernya dengan membeberkan kasus korupsi yang diduga dilakukannya. Menurut pengurus Golkar, itu adalah *black campaign* terhadap pasangan calon Serinata dan Husni Jibril (PDIP). Namun langkah ini tidak menolong keadaan, rakyat telah menentukan pilihannya kepada pasangan Tuan Guru Bajang dan Badrul Munir.

Demikian halnya di kabupaten Lotim, kekalahan pasangan lama disebabkan oleh kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Ali B. Dahlan, yang menjabat sebagai bupati dari tahun 2003 hingga 2008. Masyarakat Lombok Timur kerap menghadapi pemadaman listrik, pelayanan koperasi listrik pedesaan tak optimal. Protes warga tak dihiraukan oleh pemerintah setempat. Ketidakpuasan kalangan pegawai negeri sipil berbeda lagi. Mereka

kecewa dengan pemberlakuan peraturan daerah mengenai zakat profesi bagi pegawai negeri sipil. Bupati saat itu berasumsi bahwa peraturan daerah itu adalah produk hukum dari pemerintah daerah sehingga menjadi tugas bupati untuk implementasinya.

Para guru berdemonstrasi menuntut Ali B Dahlan diberhentikan dari jabatannya sebagai bupati. Tuntutan itu disambut oleh pimpinan DPRD kabupaten Lotim yang tidak harmonis dengan bupati ketika itu. DPRD kemudian memutuskan jabatan bupati non aktif. Secara yuridis, DPRD tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberhentikan kepala daerah, sehingga keputusan tersebut tidak mempunyai implikasi secara hukum. Terakhir, sejalan dengan meluasnya penolakan terhadap pemberlakuan peraturan daerah mengenai zakat profesi itu, akhirnya penerapannya dihentikan.

Ketidaksukaan kalangan pegawai negeri juga muncul karena pengurangan jatah konsumsi, meniadakan honor kepanitiaan dan proyek di kalangan pegawai negeri sipil untuk alasan pemberantasan korupsi. Langkah positif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan itu tidak melalui proses partisipatif sehingga terkesan otoriter. Pengalaman bupati sebagai pengelola Yayasan Swadaya Membangun selama 10 tahun, ternyata tidak membantunya memutuskan kebijakan publik yang lebih akomodatif. Rasa kepercayaan dirinya terlalu tinggi sehingga dalam melakukan pembaruan kebijakan, ia tidak bekerjasama dengan kelompok kritis. Resistensi berbagai kalangan terhadap pembaruan kebijakan Ali B Dahlan dijadikan bahan kampanye bagi lawan politiknya dalam pemilihan kepala daerah Lombok Timur.

Walaupun pencalonannya dalam pemilihan kepala daerah 2008 sudah didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bintang Reformasi dan Partai Persatuan Pembangunan, namun ia masih ngotot ikut konvensi Golkar. Penolakan dari pengurus

daerah, cabang dan ranting tidak dapat membendung dirinya untuk memenangi konvensi karena ia mendapat restu dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Fatal baginya, pengurus internal di daerah yang tidak setuju Ali B Dahlan diusung oleh Golkar justru melakukan penggemosan pada saat kampanye. Secara diam-diam mereka mendukung pasangan Sukiman Azmy dan Syamsul Lutfi yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang. Di samping itu pula, pencalonannya melalui Golkar bagi kelompok pro demokrasi merupakan blunder politik. Dukungan partai Golkar yang identik dengan kelompok status quo kontradiktif dengan pencitraan dirinya selama memimpin menjadi bupati Lotim, sebagai “sang pendobrak”, pembaharu.

Konsolidasi Masyarakat Sipil Lemah

Berbeda dengan provinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten Lotim, pemilihan kepala daerah di Lombok Barat tidak menampilkan calon *incumbent*. Bupati Lombok Barat sebelumnya, Iskandar, tidak memungkinkan untuk mencalonkan diri, di samping sudah dua kali menjabat, dia juga sedang ditahan dan menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi bersama dengan direktur PT Varindo, Izzat Husein.

Sedangkan wakil bupati sebelumnya, Izzul Islam juga tidak mencalonkan diri. Ia sadar diri karena baru lolos dari tuduhan pemalsuan ijazah. Selama menjabat sebagai wakil bupati, waktunya habis untuk berkonflik dengan bupati.

Menariknya, di Lombok Barat ada satu pasangan calon independen berlatarbelakang birokrat. Pasangan itu adalah L Sajim dan TGH Munadjib. Mereka berhasil lolos pada putaran kedua namun dikalahkan oleh Zainy Arony dan Mahrip yang diusung oleh PAN dan PBB.

Kamardi, seorang penggiat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) urung untuk maju sebagai bakal wakil calon bupati. Sempat beredar kabar di media massa lokal bahwa Kamardi akan diusung oleh Golkar. Partai ini meminati dirinya dengan harapan dapat mendongkrak perolehan suaranya di Lombok Barat bagian utara (sekarang merupakan wilayah pemekaran kabupaten Lombok Utara). Belakangan, L Takdir calon bupati dari Golkar menjatuhkan pilihannya kepada Asrul Sani (anak dari Ali B Dahlan, mantan bupati Lotim) untuk berpasangan dengan dirinya. Konon, pilihan tersebut lebih banyak didasari oleh pertimbangan kemampuan ekonomi dari bakal calon wakil bupati.

Fenomena dalam pemilihan kepala daerah Lombok Barat tahun 2008 merefleksikan lemahnya konsolidasi masyarakat sipil. Indikatornya: *Pertama*, menyangkut kurangnya kesiapan dan kesigapan masyarakat sipil dalam memanfaatkan peluang yang memungkinkan calon independen. *Kedua*, pencalonan Kamardi terkesan mendadak. *Ketiga*, kekalahan calon independen dari calon yang diusung oleh partai politik.

Kelemahan ini mengulang kembali kegagalan dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nusa Tenggara Barat tahun 2003. Waktu itu terdapat beberapa calon dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni; Ayip Rosidi dari Yayasan Swadaya Membangun, Beauty Erawati dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Mataram, Burhanuddin dari Pusat Studi Pembangunan, Hindun dari Yayasan Panca Karsa dan Zubaidah dari Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia. Secara matematis, kalau seluruh perolehan suara mereka dijumlahkan akan mendapatkan dua kursi DPD. Jika saja sebelum mencalonkan diri mereka berkonsolidasi untuk menyepakati satu atau dua calon yang didukung secara bersama, dapat dipastikan ada anggota DPD dari kalangan LSM Nusa Tenggara Barat.

Demikian halnya dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 ini, pengajuan dari kalangan LSM yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif tidak melalui proses konsolidasi terlebih dahulu. Mereka tersebar di berbagai partai. Di Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra ada Kamardi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Budianto dari Yayasan Lembaga Kemanusiaan Masyarakat Pedesaan (YLKMP), Hasan Massat dari Lembaga Studi-Advokasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Lesa Demarkasi). Di Golkar ada Armyoto dari Yayasan Pembina Masyarakat Pedesaan (YPMP), Abidin Tuarita dari Pusat Pemberdayaan Gawah Rinjani (PUGAR). Di Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura ada Mudahan Hazdie dan Burhanuddin dari Pusat Studi Pembangunan (PSP), Kasmiasi dari Koperasi Sumber Daya Usaha Annisa (KSU Anissa). Di Partai Amanat Nasional ada Kongso Sukoco. Di Partai Indonesia Sejahtera ada Budi Karyawan dari Gumpar dan Fifi dari Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi). Di Partai Bulan Bintang ada Hindun (YPK) dan Asiah (Konsepsi) dan di Partai Demokrat ada Putrawadi.

Tidak ada kriteria tertentu yang menjadi dasar bagi para penggiat LSM itu untuk memilih partai, mereka hanya memanfaatkan peluang yang ditawarkan dari pihak partai. Hal ini terlihat dari peluang-peluang yang diberikan kepada para penggiat LSM itu, lebih banyak diberikan oleh partai baru, terkecuali Armyoto dan Abidin Tuarita yang dikenal sejak lama sebagai pengurus Golkar.

Hampir tidak ada tanda-tanda adanya konsolidasi di kalangan penggiat LSM itu, tak jauh beda dengan calon-calon lainnya. Bahkan di lapangan terjadi perebutan dukungan kelompok masyarakat basis (sektor maupun lokal) di antara para calon anggota legislatif yang berasal dari kalangan LSM. Kalaupun ada sinergi dalam proses kampanye hanyalah bagi calon yang bernaung dalam satu partai.

Walaupun masing-masing tokoh LSM tersebut selama ini melakukan proses pemberdayaan masyarakat, namun proses pencalonan dirinya tidak mendasarkan pada mandat dari kelompok basis (sektoral maupun lokal). Sehingga walaupun terpilih sebagai anggota parlemen nantinya, tidak ada jaminan ia akan konsisten memperjuangkan cita-cita dari gerakan kelompok basis yang selama ini didampingi. Apalagi dalam iklim perpolitikan sekarang ini yang masih didominasi oleh kekuasaan partai politik yang punya mekanisme *recall*, dapat dipastikan loyalitas anggota dewan lebih lekat kepada partai ketimbang kepada konstituennya.

Merajut Masa Depan

Tidak semua aktivis LSM yang memiliki inisiatif membangun gerakan rakyat larut dalam hiruk pikuk pencalonan pemilihan umum legislatif 2009. Ada kelompok yang tetap kukuh pada basis gerakan sosial, ada juga aktivis LSM yang memandang pentingnya melibatkan diri dalam gerakan politik. Kelompok ini justru memikirkan bagaimana modal sosial gerakan yang selama ini dibangun dapat dimaterialkan menjadi kekuatan politik dalam menghadapi berbagai momentum politik di masa depan. Sebab momentum politik jangka pendek sekarang ini tidak memungkinkan untuk rekonsolidasi mengingat fragmentasi di antara aktivis LSM yang telah mencalonkan diri. begitu besar.

Hasil refleksi paling akhir, kami memandang perlunya aliansi strategis di antara kalangan gerakan rakyat dengan struktur kepemimpinan yang lebih jelas dan kaderisasi yang massif. Struktur kepemimpinan tidak mesti formal, tidak perlu terlihat, namun memiliki kejelasan arah, serta harus ada ketegasan dan kepatuhan. Struktur kepemimpinan dalam aliansi strategis ini harus mampu memobilisasi berbagai sumber daya yang outputnya jelas, yakni kader gerakan.

Kader gerakan ini harus mampu berperan di tingkat masyarakat basis. Pengertian masyarakat basis bisa sektoral bisa pula lokal. Secara sektoral akan difokuskan pada masyarakat petani (tenurial dan petani hutan), asosiasi konsumen dan nelayan. Sedangkan secara lokal, kader gerakan harus memfokuskan diri untuk berperan dalam konteks daerah pemilihan tertentu. Sehingga manakala terdapat kader gerakan yang memungkinkan dan siap untuk maju dalam momentum politik di daerah, ia harus membangun tali mandat dengan konstituennya, baik sektoral maupun lokal.

Rencana tindak lanjut kongkritnya akan disepakati dalam pertemuan yang akan dilakukan satu bulan setelah pemilu legislatif 2009.

Politik Lokal dan Gerakan Rakyat Wilayah Matraman-Plus

*Simpul Jombang FBB Prakarsa Rakyat¹
Kontek Ekonomi dan Politik di Matraman-Plus Jawa Timur*

Secara umum, masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kediri, dan Caruban-Madiun bekerja sebagai petani. Disamping itu ada bidang profesi lain misalnya buruh, pedagang, usaha jasa dan lain-lain, namun bidang-bidang tersebut hanyalah sebagai penopang dari bidang pertanian. Meskipun bidang pertanian menjadi penopang utama dalam menutup kebutuhan hidup, tetapi petani tidak lagi menguasai alat produksi pertanian: pupuk, benih, irigasi bahkan tanah.

Akses terbesar dalam pertanian, justru dikuasai para pemilik modal dan orang-orang yang mempunyai kekuatan politik besar saja. Semisal di Jombang, distribusi pupuk dan benih dikuasai oleh tidak lebih dari tiga pengusaha besar. Salah satunya adalah CV yang dimiliki kerabat Bupati Jombang. Di Caruban-

1 Paper dipersiapkan oleh Muslimin Abdilla, Direktur alha-RAKA, Jombang

Madiun, Kediri, Mojokerto dan Nganjuk, perdagangan pupuk dan saprodi pertanian juga banyak dipegang oleh pengusaha-pengusaha besar dengan menguasai DO pupuk dari pabrik pupuk. Sementara itu, kelompok-kelompok kecil sangat sulit persyaratannya dalam mengajukan untuk membuka kios pupuk. Penentuan, siapa kelompok yang mendapatkan pupuk, juga didominasi oleh pemilik modal bahkan penguasa politik yang seharusnya menjadi pengawas, malah turut serta menentukan wilayah mana yang mendapatkan pupuk. Disamping pupuk, mereka juga menguasai benih pertanian, baik padi, jagung atau palawija. Penguasaan pupuk dan benih oleh pemilik modal besar, yang rata-rata berkolaborasi dengan penguasa politik setempat. Kondisi ini sangat rentan terutama ketika ada momentum politik di daerah tersebut, misalnya pemilihan kepala daerah.

Situasi petani yang tidak lagi menguasai pupuk dan benih, mengharuskan mereka untuk merubah pola bertani. Saat ini, kebanyakan petani bertahan dengan pola pertanian kontrak dengan pabrik. Lebih 5 tahun belakangan ini pola pertanian yang menjadi "primadona" petani adalah dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan benih seperti BISI, DUPON, Pioneer, SyGENTA, dll. Mereka disediakan benih dan pupuk ketika masa penggarapan, dan setelah masa panen pabrik yang akan membeli hasil pertaniannya.

Pola semacam ini, untuk komoditas jagung, sudah hampir semua petani menjalankan pola ini, namun untuk tanaman padi dan palawija yang lain, kebanyakan masih menggunakan pola lama, yaitu dalam proses penggarapan dibiayai sendiri. Memang secara matematika, kerjasama ini menguntungkan di mata petani jika dibandingkan dengan pertanian ala mereka sebelumnya.

Namun tidak ada jaminan kerjasama ini menguntungkan petani meskipun sudah ada kontraknya, misalnya kasus

pembenihan seluas 40 hektar yang melibatkan petani di 3 desa kecamatan Patianrowo Nganjuk yang justru hasilnya jauh dari harapan. Karena hasil dari proyek pembenihan jagung ini hanya menghasilkan separoh saja. Dalam jangka panjangpun, pola pertanian seperti ini akan menambah ketidakberdayaan petani. Karena petani lama kelamaan akan tergantung sepenuhnya kepada pabrik.

Disamping persoalan pupuk dan benih di wilayah ini masih banyak terjadi konflik tanah, baik antara petani dengan Perhutani, maupun antara petani dengan perusahaan perkebunan. Hal ini terjadi terutama di wilayah-wilayah yang memiliki kontur tanah yang subur, misalnya di Kediri Timur, Mojokerto Selatan dan Jombang Timur. Program PHBM yang di jalankan oleh Perhutani, tidak mampu meningkatkan taraf kesejahteraan petani di kawasan hutan. Program Pembaharuan Agraria Nasioanl (PPAN) yang dicanangkan oleh Presiden dan dilaksanakan oleh BPN, sampai saat ini masih belum berjalan dengan baik, sehingga petani dikawasan hutan ini masih bergelut dengan persoalan tanah.

Sementara itu, pengurangan lahan pertanian sedang dan akan terjadi di Mojokerto, Jombang, Nganjuk dan Madiun karena proyek pembangunan tol lintas Jawa. Lahan yang dikonversi menjadi jalan tol sebagian besar adalah lahan pertanian. Dampak dari pembangunan jalan tol ini adalah akan terjadinya pergerakan modal ke wilayah pedesaan, yang selanjutnya akan merubah pola kehidupan yang ada di desa-desa.

Persoalan lain yang dirasakan oleh warga wilayah Matraman-plus ini adalah hampir tidak adanya lembaga ekonomi yang betul-betul berbasis komunitas dan bisa membantu kepada kelompok-kelompok marginal. Saat ini yang ada adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam) yang berbasis pemilik modal besar. Sehingga KSP ini tidak ada bedanya dengan bank konvensional,

atau bahkan menjadi rentenir yang memiliki izin resmi dari pemerintah dalam menjalankan usahanya. Karena lembaga keuangan konvensional belum bisa menyentuh rakyat kecil yang tidak memiliki agunan, maka KSP-KSP yang ada, tidak dianggap sebagai musuh.

Sedangkan program pembangunan yang berupa PNPM dirasakan kurang bisa membantu masyarakat, terutama dalam menyelesaikan problem ekonomi riil terutama yang jangka panjang. Seperti dalam program PNPM yang berupa program simpan pinjam perempuan. Dalam program simpan pinjam ini bunga pinjaman yang ditawarkan tidak lebih baik dari yang ditawarkan bank konvensional atau KSP-KSP. Sehingga banyak kelompok-kelompok tidak mengambil dana bergulir, karena terbentur oleh besarnya bunga pinjaman.

Momentum Politik, dari Pilkades sampai Pilkada

Suhu politik di Jombang, Mojokerto, dan Kediri mulai menghangat sejak tahun 2007. Dimulai pemilihan kepala desa yang serentak di 268 pada tanggal 22 Juli 2007 dan 23 desa di Jombang di tahun 2007. Di Kabupaten Kediri terdapat 344 desa (1 Kelurahan) di 24 kecamatan. Di Mojokerto, gelombang I di bulan April dan gelombang II di bulan Agustus 2007 di 304 desa. Kemudian menghadapi pemilihan kepala daerah di Jombang, Nganjuk, Kota Kediri Oktober 2008, Madiun dan pemilihan Gubernur Jawa Timur di bulan Juli 2008.

Gelombang politik dimulai perebutan kepala desa yang ada di Jombang dan Kediri. Di dalam Pilkades, pertarungan politik diwarnai dengan pertarungan antar kelompok-kelompok tertentu untuk berebut pengaruh melalui para calon kepala desa. Di Jombang ada dua kelompok besar yang mempengaruhi

pemilihan kepala desa. Pertama, kelompok Nyono Suherli, calon Bupati Jombang dari partai Golkar, dan Kedua kelompok Suyanto, *incumbent* yang diusung partai PDIP. Selain dari dua kelompok ini, ada bayang-bayang dari calon gubernur Soekarwo dan Soenaryo yang masuk ke desa-desa melalui program-program pembangunan pemerintah, baik pemerintah provinsi atau pusat.

Di kabupaten Kediri, kelompok kuat yang banyak mempengaruhi pilkades adalah bupati Sutrisno. Hal ini dilakukan, karena bupati yang sudah dua kali menjabat ini, akan mengajukan istri pertamanya untuk mencalonkan dalam pemilihan bupati mendatang. Pola yang sangat umum dalam Pilkades di kabupaten-kabupaten yang rata-rata dilakukan sebelum Pilkada tersebut adalah calon bupati selalu ingin ‘menguasai’ desa dengan membiayai atau memegang calon kepala desa yang kuat. Pola ini rupanya sangat manjur, karena bupati terpilih adalah yang banyak ‘memegang’ kepala desa terpilih.

Kondisi politik riil di lima wilayah Matraman-plus (Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kediri, dan Madiun) selama 2007 dan 2008 masih didominasi partai politik besar dan kekuatan lama yakni PKB, PDIP dan Partai Golkar yang merepresentasi kelompok santri dan nasionalis sekuler.

Sedangkan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kabupaten/kota, baik di Kediri (kota), Jombang, Nganjuk dan Madiun dapat digambarkan sebagai berikut: di Kediri dimenangkan oleh orang yang mengangkat isu populis yaitu kesehatan dan telah melakukan kampanye yang cukup panjang (sekitar 2 tahun). Meskipun pemenang Pilkada yang dilangsungkan di tiga kecamatan ini diuntungkan oleh pertarungan uang antara dua kontestan dominan lainnya, tetapi patut diakui bahwa isu yang dibawa dan masa kampanye yang cukup panjang dari calon jadi adalah faktor yang dominan.

Di Jombang Pilkada dimenangkan oleh calon *incumbent* yang telah menguasai hampir seluruh akses di kabupaten Jombang. Melalui akses ekonomi dan politik, dengan menguasai proyek-proyek daerah, calon bupati *incumbent* ini ‘menguasai’ kepala-kepala desa melalui camat yang sebagian besar dikendalikan oleh calon bupati *incumbent*. Disamping itu, keluarga calon bupati *incumbent* ini juga menguasai jaringan ekonomi terutama dalam bidang pertanian, yang menjadi bidang dominan yang menggerakkan ekonomi di Jombang. Penguasaan jaringan ekonomi oleh keluarga bupati ini memang tidak bisa disangkal ada keterkaitan dengan kekuasaan politik, misalnya dalam hal pupuk dan benih.

Di Nganjuk Pilkada dimenangkan oleh seorang kontraktor yang berpasangan dengan pengurus NU Nganjuk dan diusung PDIP. Calon bupati yang berasal dan bertempat tinggal di luar Nganjuk ini (di Jombang), mampu mengalahkan keputusan cabang PDIP Nganjuk yang mencalonkan ketua cabang PDIP Nganjuk. Keputusan cabang PDIP Nganjuk ini dianulir oleh DPP PDIP yang mencalonkan seorang kontraktor dari Jombang dan berpasangan dengan ketua NU Nganjuk. Keputusan DPP PDIP ini disinyalir ada keterkaitan dengan bupati Jombang, dimana adik bupati Jombang yang menjadi pengurus DPD PDIP Jatim berada dibelakang keputusan DPP PDIP. Hal ini terbukti saat ini komoditi pupuk dan benih hampir didominasi oleh kroni bupati Jombang.

Di Madiun Pilkada dimenangkan oleh calon *incumbent*, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati. Pasangan yang diusung PKB yang berpasangan dengan ketua DPC Partai Demokrat. Kemenangan ini juga mendapat dukungan dari jaringan kelompok abangan yang menyempal dari PDIP.

Di Mojokerto masih belum terjadi pemilihan kepala daerah. Namun karena Achmady, bupati Mojokerto, mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur, maka ada kekosongan jabatan

bupati. Padahal masa berakhirnya jabatan bupati di Mojokerto masih dua tahun lagi. Otomatis jabatan bupati yang lowong diisi oleh wakil bupati. Sementara itu, jabatan wakil bupati diperebutkan secara ketat antara PDIP dan Golkar, keduanya sama-sama mengusung ketua cabangnya. PKB yang menjadi partai besar di Mojokerto tidak mengusung kandidat, sehingga tidak menambah hangat kondisi politik elit di Mojokerto.

Dari seluruh Pilkada yang sudah terjadi, dominasi elit sangat terasa. Dominasi elit yang dimaksud adalah cara-cara berpolitik dan isu-isu yang diangkat dalam Pilkada masih sangat elitis. Kalaupun dikemas dengan bahasa-bahasa yang populis (kerakyatan), namun tetap saja belum bisa menutupi sifat elitismenya. Karena memang calon yang ada dan tim suksesnya rata-rata adalah orang-orang yang selalu berfikiran elit. Misalnya slogan APBD untuk rakyat. Bahasa APBD untuk rakyat sekilas bagi kalangan elit adalah merakyat. Namun rakyat luas sendiri masih terasing dengan kata-kata tersebut, karena sampai saat ini belum ada APBD yang benar-benar untuk rakyat. Kecuali di Kediri, isu yang diangkat secara konsisten selama masa kampanye lumayan populis yaitu isu kesehatan. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa yang sehari-hari menjadi bahasa rakyat pemilih.

Dari seluruh Pilkada yang telah dilakukan, pola umum yang terjadi adalah: calon-calon yang memenangkan Pilkada menguasai birokrasi aparat pemerintahan sampai tingkat desa, dan ini kebanyakan di miliki oleh calon *incumbent*; calon yang menang memanfaatkan kekuatan struktural dan kultural NU dengan menggunakan Badan Otonom NU yang ada sampai ditingkat desa untuk memobilisasi suara dan; yang terakhir adalah kekuatan modal yang mampu membiayai konsolidasi instan.

Sementara pemilihan Gubernur Jawa Timur yang dilakukan akhir 2008, memiliki pola yang sama dengan Pilkada yang terjadi

di 5 kabupaten/kota. Tetapi tidak ada keterkaitan partai antara Pilkada dan Pilgub, dimana gubernur yang diusung oleh partai yang sama dengan calon bupati yang menang justru kalah, seperti di Jombang, Nganjuk dan Madiun. Hal ini menggambarkan bahwa partai besar tidak serta merta bisa memenangkan calon yang belum dikenal secara luas.

Proses Politik Menghancurkan Solidaritas Rakyat Kecil

Kelompok-kelompok masyarakat yang saat ini terus bergerak melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan riil terjadi di lima kabupaten di wilayah Matraman-plus. Mereka menjalankan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Misalnya satu kelompok di Garu Baron Nganjuk. Mereka berkumpul rutin setiap bulan dengan membawa uang 1000 rupiah sebagai iuran wajib yang dikelola koperasinya. Dalam pertemuan itu, beragam tema dibicarakan, tetapi tidak jauh dari bagaimana cara membangun desanya.

Kelompok yang lain di Desa Warugunung Pacet Mojokerto, secara rutin mereka juga berkumpul untuk merencanakan atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan. Lainnya terjadi di Desa Betet Kediri, kelompok yang dimotori kalangan muda menggerakkan kegiatan-kegiatan kongkrit untuk menjawab persoalan, mulai persoalan pekerjaan sampai persoalan ekspresi seni. Sementara di Mojowarno Jombang, kelompok-kelompok yang dimotori oleh kepala desa terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan riil, mulai persoalan ekonomi sampai persoalan-persoalan sosial budaya.

Kegiatan-kegiatan semacam itu juga terjadi dan digerakkan oleh para penggerak kelompok secara terus menerus di sedikitnya 100 kelompok di 5 kabupaten. Selama kurun waktu 2008,

kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan untuk menggerakkan orang dan menjalin solidaritas antar anggota kelompok agak terganggu dengan rentetan proses politik formal yang terjadi baik ditingkat desa atau ditingkat kabupaten dan provinsi.

Konflik akibat dari Pilkades belum selesai, mereka terpaksa harus masuk dalam pertarungan politik baru yakni Pemilihan Bupati. Beragam program dan kampanye juga sampai di desa mereka. Bahkan kader-kader penggerak lokal juga sempat menjadi tim sukses. Mau tidak mau, mereka saling membicarakan dan yang lebih fatal adalah saling mencurigai. Ada juga yang menjaga jarak untuk tidak berkomunikasi walaupun bertetangga. Alasannya, konflik dari pilkades saja masih terasa sakitnya, apalagi sekarang berseberangan calon bupati yang didukung. Pilkada usai bukan berarti konflik selesai. Justru semakin parah karena ada Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Maka, dapat dipastikan setiap ada proses politik, tatanan sosial di desa goyah. Orang mulai berkompetisi, saling mencurigai, bahkan saling bermusuhan. Jika ada tetangga yang menolak membantu tetangganya yang lain, maka proses permusuhan mulai terjadi. Bahkan, orang tua melarang anaknya bermain dengan tetangganya yang beda aspirasi politik. Mereka saling menutup diri dengan para tetangga. Rasa curiga kemudian muncul, rasa solidaritas pelan-pelan hilang dari lingkungan mereka.

Namun, perpecahan ini sedikit terminimalisir dalam organisasi-organisasi yang ada di komunitas dan jaringan forum aliansi yang ada di lima kabuapten tersebut. Mereka lebih sadar, bahwa proses politik saat ini memang masih dikuasi oleh politisi busuk sehingga di kelompok-kelompok memposisikan diri sebagai penerima manfaat dari proses politik untuk memperkuat organisasi mereka. Dalam proses politik, uang pasti bertebaran dalam rangka kemenangan. Sumber daya dari luar inilah yang dimanfaatkan.

Uang dari manapun diterima untuk memperkuat kelompok bukan lagi memecah belah. Strategi yang digunakan uang harus diberikan ke kelompok, jangan diterimakan ke individu-individu anggota. Uang tersebut kemudian dimusyawarahkan kegunaan dan manfaatnya untuk kelompok.

Inisiatif Perlawanan Rakyat Matraman-Plus

Untuk memperkuat upaya perjuangan rakyat di lima wilayah Matraman-plus, dari berbagai kelompok yang selama ini berjejaring antar kelompok, bersepakat untuk mendirikan organisasi aliansi. Organisasi yang dibangun beranggotakan kelompok yang berasal dari desa-desa dan kelompok marginal kota. Di Jombang ada KRJB (Konsorsium Rakyat Jombang Berdaulat), Mojokerto ada SPRM (Serikat Perjuangan Rakyat Mojokerto), Kediri ada SRKB (Serikat Rakyat Kediri Berdaulat), Caruban dengan FBMC (Forum Bersama Membangun Caruban), serta di Nganjuk akan dideklarasikan pada akhir tahun ini.

Persoalan-persoalan yang menimpa kelompok-kelompok rakyat di Matraman-plus dijawab dengan melakukan berbagai kegiatan. Untuk menjawab persoalan ketiadaan pupuk, beberapa kelompok pinggiran yang tidak menjadi kelompok tani yang seharusnya mendapat subsidi adalah melakukan desakan kepada aparat desa untuk membantu penyediaan pupuk serta melakukan loby ke KUD, agar bisa mendapatkan pupuk.

Di kelompok yang lain menjawab masalah ini dengan melakukan pembelian pupuk secara bersama-sama, serta yang terakhir, yang bisa menjawab persoalan dalam jangka panjang adalah melakukan pola pertanian organik atau pertanian berkelanjutan. Sedangkan dalam hal penyediaan benih, terutama dalam melakukan perlawanan terhadap pabrik benih, beberapa

petani melakukan modus yang sangat berani, sehingga secara tidak langsung merupakan upaya perlawanan petani yang saat tidak memiliki kekuatan apapun.

Saat ini perjuangan beberapa kelompok untuk membuka akses terhadap tanah terus dilakukan, salah satunya adalah kelompok FPR. Hal yang dilakukan adalah melakukan aksi massa dan menggalang dukungan melalui aliansi dengan KPA, LAKUMHAM-PKB dan PDIP Mojokerto lainnya. Kelompok lainnya adalah PPAM dan Al Barokah di Kediri yang sampai saat ini terus memperjuangkan bagaimana akses terhadap tanah bisa mereka miliki.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan akses kepada tanah adalah tentang PHBM Perhutani, yang sampai saat ini masih membingungkan bagi petani. Karena kebijakan Perhutani dengan pelaksana lapangan seringkali tidak sama. Begitu juga kebijakan antara satu kawasan dengan kawasan lain berbeda-beda. PHBM ini sampai saat ini masih diikuti oleh petani, karena bagi petani tidak ada jalan lain, sambil terus melakukan konsolidasi organisasi dan terus memperjuangkan penguasaan lahan. Terakhir, dengan Konsorsium Pembaharuan Agraria yang melakukan advokasi Program Pembaharuan Agraria Nasional.

Proyek pembangunan jalan tol lintas Jawa, khusus di wilayah Jombang mendapat perhatian dari KRJB. Kasus ini bermula dari suara kelompok di Banjardowo beberapa bulan lalu yang mempertanyakan tentang penggusuran sebagian besar lahan pertanian dan kebun warga. Sebagai langkah awal KRJB membentuk tim untuk mengumpulkan bukti-bukti. Seperti persoalan harga tanah yang akan dibeli oleh investor. Ada ketentuan bahwa harga sudah dipatok oleh investor, jika ada kelebihan maka kelebihan harga ditanggung oleh pemerintah. Disini sebenarnya terjadi dominasi uang sehingga pemilik lahan

tidak berhak menentukan harga. Selain itu kekhawatiran dari warga setempat, apabila jalan tol sudah dioperasionalkan, pasti ada perubahan secara ekonomi ketika lahan pertanian sudah tidak ada lagi. Aliran modal akan bertambah sehingga berdampak pada pola kehidupan yang ada di wilayah ini.

Untuk menyelesaikan persoalan permodalan, awalnya kelompok-kelompok mengadakan kegiatan arisan yang berkembang menjadi koperasi simpan-pinjam. Jika dihitung kasar di wilayah Matraman-plus (Mojokerto Jombang, Kediri, Nganjuk, Madiun) sudah terbentuk lebih dari 50 koperasi maupun prakoperasi yang saling berhubungan. Anggota koperasi adalah para orang tua baik laki-laki maupun perempuan, yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani dan PKL. Usahnya selain penyediaan modal, koperasi juga melakukan kegiatan lain.

Untuk mempelajari bagaimana cara mengelola koperasi, mereka saling belajar melalui pertemuan antar kelompok yang difasilitasi oleh (KRJB) Koperasi Mandiri dan Bina Swadaya. Pendidikan-pendidikan koperasi yang dilakukan untuk membentuk kader-kader koperasi dengan mengenalkan pembukuan dan manajemen koperasi. Selain itu muncul tantangan dari kalangan agamawan yang menyatakan bahwa, koperasi hukumnya haram. Hal ini kemudian dijawab dengan berkumpulnya beberapa koperasi yang menemukan bahwa koperasi sah secara hukum agama, karena bunga disepekati bersama (*'an taradliin*) dan semua hal untuk kepentingan bersama anggota dan tidak merugikan orang lain.

Terbentuknya koperasi-koperasi di Jombang, Mojokerto, Nganjuk, Kediri, dan Caruban-Madiun menjadi sebuah gerakan melawan kekuasaan dominan para pemilik modal besar. Gerakan koperasi ini mampu menjawab kebutuhan kongkrit anggota koperasi yang mayoritas berasal dari kalangan bawah

dan kelompok marginal sehingga koperasi benar-benar menjadi jawaban kongkrit bagi persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Disamping itu gerakan koperasi ini mampu juga mampu memperkuat kekompakan anggota di masing-masing kelompok, dan mampu mendorong inisiatif-inisiatif baru untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi baru di masing-masing kelompok, seperti pengelolaan hasil bumi lokal yang selama ini di kuasai tengkulak, tidak lagi dijual ke tengkulak tapi di kelola sendiri/di produksi sendiri menjadi aneka makanan atau kripik yang bisa dijual dan menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Selama ini kelompok-kelompok yang tergabung di forum aliansi, menolak program pemerintah, terutama program pinjaman melalui PNPM, karena bunga yang terlalu tinggi dan keuntungan dari bunga yang dibayarkan tidak kembali ke anggota melainkan harus diseter ke kecamatan dan menjadi keuntungan kecamatan, tetapi di beberapa kelompok ada yang menerima, namun dengan negosiasi bunga terlebih dahulu.

Di lima wilayah Matraman-plus, kelompok telah terlibat dalam penyusunan program pembangunan desa. Bukan hanya menyusun tapi juga mengusulkan agar pembangunan tersebut bisa menyelesaikan persoalan kelompok. Salah satunya adalah pemanfaatan ADD yang diterima oleh setiap desa. Seperti di Mojokerto, Caruban-Madiun, Nganjuk dan Kediri yang mendapat suntikan modal untuk koperasi. Atau di Jombang dan Kediri dimana kelompok-kelompok tersebut mendapatkan dana untuk setiap kegiatan yang diadakan.

Perlawanan Terhadap Dominasi Politik

Setelah perebutan kekuatan politik di tingkat desa dan penguasaan di beberapa struktur organisasi di desa, kelompok

menjadi semakin kuat. Di Kediri, Jombang, Caruban-Madiun berbagai macam kegiatan yang dijalankan secara tidak langsung mampu mendorong eksistensi dan kesadaran kelompok. Sehingga memunculkan keberanian kelompok untuk merebut ruang-ruang strategis di beberapa lembaga pemerintahan mulai dari Kepala desa, Kepala Dusun, RW, RT dan beberapa kelembagaan yang ada di desa, dengan semangat perubahan yang lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Kuat dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan kelompok untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan desa dan, terkonsolidasinya kelompok untuk mengadvokasi persoalan yang dihadapi.

Menjelang Pemilu 2009 ini, banyak partai politik mulai bergerilya masuk ke kelompok-kelompok di desa atau perkotaan. Para pengurus partai berusaha mendekati kelompok-kelompok anggota KRJB, serta di Caruban-Madiun dengan mendatangi berbagai kegiatan FBMC, atau di Kediri yang terus mendekati SRKB serta kelompok-kelompok anggotanya.

Di Caruban, FBMC merumuskan sebuah acuan kepada para kelompok untuk lebih sadar dalam proses pencalegkan nanti. Yang dilakukan adalah sosialisasi di masing-masing kelompok tentang kontrak politik yang berisi mandat kelompok terhadap kinerja Caleg bila berhasil menjadi dewan nantinya dalam satu periode 2009 – 2014. Ini merupakan proses bergaining dari setiap kelompok terhadap calon legeslatif karena kelompok-kelompok itu bisa menjadi bagian dari kekuatan penentu dalam kemenangan calon legeslatif di Pemilu 2009.

Untuk menunjukkan kekuatan dan sebagai ajang konsolidasi, kelompok-kelompok rakyat yang tergabung dalam KRJB, SRKB, SPRM dan FBMC melakukan rapat umum. Terbukti rapat umum ini bisa menjadi forum yang memiliki kekuatan penyeimbang bagi kekuatan politik elitis yang ada di setiap

kabupaten. Rapat umum dengan pengerahan ribuan anggota dan simpatisan merupakan alat yang paling efektif, disaat partai politik atau Caleg sulit mengumpulkan orang tanpa uang.

Dalam proses politik dari Pilkades, Pilkada dan Pilgub, kelompok-kelompok melakukan pengorganisasian dengan cara memobilisasi uang yang datang dari calon kepala desa, calon bupati, calon gubernur, dan calon legislatif berbasis kelompok, tidak diserahkan ke individu-individu. Hal ini dikarenakan, tidak mungkin menghadang proses politik yang ada, sehingga mau tidak mau harus mengikuti proses politik ini. Prinsipnya, jangan sampai proses politik yang berujung uang ini merusak kekompakan dan kesolidan kelompok. Sehingga, politik uang harus dikelola dan dimasuk ke kelompok. Alasan uang tidak akan menghancurkan kesolidan anggota. Dan uang yang ada tidak akan hilang, tetapi bisa diputar dalam kegiatan simpan pinjam maupun dalam bentuk konkrit lainnya.

Terakhir untuk menjawab apatisme politik yang saat ini merebak di masyarakat, karena perilaku elite politik yang buruk, serta untuk menyemangati rakyat terutama kelompok-kelompok dalam forum aliansi bahwa, turut dalam pertarungan politik dengan cara-cara yang baik itu penting untuk memperbaiki kondisi politik di Indonesia. Maka dalam Pilkada kota Kediri, Pemilu Legislatif. Jaringan aliansi yang ada di Kediri, Jombang dan Nganjuk mengusung calon untuk turut bertarung. Untuk calon wakil walikota Kediri, mengajukan Munasir Huda. Namun kelompok dalam salah satu partai yang menggandeng kalah dalam pertarungan internal partai, sehingga proses pencalonan tidak berlanjut, karena untuk maju dari independen waktunya sudah tidak memungkinkan. Sementara itu, untuk Calon Legislatif, di Jombang dan Nganjuk ada salah satu partai yang meminta kader kelompok untuk bertarung dalam Pemilu tahun 2009.

Analisis Gerakan Rakyat Matraman-Plus Kedepan

Membangun Gerakan dari Kelompok Kecil

Gerakan yang dibangun selama ini berangkat dari kelompok-kelompok kecil yang digerakkan oleh seorang atau beberapa penggerak. Kelompok kecil ini mula-mula adalah kumpulan dari beberapa orang yang melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan bersama. Ada kelompok yang bergerak dari dua orang, tiga orang dan seterusnya. Namun ada juga kelompok yang berangkat dari lima puluh orang.

Kelompok-kelompok kecil ini secara rutin dan berkelanjutan melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjawab kebutuhan yang tidak pernah habis. Fungsi penggerak dalam kelompok sangat penting, karena penggerak inilah yang terus memberikan motivasi dan dorongan kepada kelompok untuk membuat rencana dan menjalankan kegiatan-kegiatan. Misalnya di Kelompok Mamkari Ngrandu Jombang. Ada seorang penggerak, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, yang secara rutin memberikan motivasi dan dorongan kepada kelompoknya untuk melakukan kegiatan rutin pertemuan koperasi. Dalam pertemuan koperasi ini, tidak hanya persoalan simpan pinjam atau jual beli komoditas yang dibicarakan, tetapi juga persoalan-persoalan sosial yang ada dilingkungan dimana kelompok itu berdomisili. Hal ini dilakukan karena kelompok ini juga bertanggungjawab terhadap kondisi lingkungan sekitarnya (komunitas) disamping masalah yang ada di kelompoknya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di satu desa (komunitas), tetapi juga terjadi desa-desa lain yang selama ini terus melakukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya.

Forum Aliansi sebagai Kapal Gerakan

Dalam perjalanan tahun 2008 dan 2009 ini, di masing-masing kota telah melakukan konsolidasi kelompok-kelompok dengan melakukan Kongres Forum Aliansi. Forum aliansi ini bukan forum kosong yang sering kali terjadi. Berangkat dari satu kelompok, dua kelompok dan seterusnya. Akhirnya, banyak kelompok yang tumbuh dan kuat. Setelah banyak kelompok muncul di pedesaan, maka baru forum aliansi dibentuk dan dideklarasikan. Jadi, forum aliansi ini memberi gambaran konkrit tentang pengorganisasian yang berbasis massa dengan kegiatan yang tidak keluar dari kebutuhan atau persoalan kongkrit yang dihadapi masing-masing kelompok.

Upaya ini dilakukan diseluruh kelompok-kelompok, baik di Jombang, Kediri, Mojokerto, Caruban, dan Nganjuk. Dari satu kelompok dan karena memang dirasakan betul manfaatnya sehingga mempengaruhi berdirinya kelompok-kelompok baru. Untuk mensolidkan dan hubungan ini akhirnya dipertegas dengan berdirinya organisasi aliansi. Di Jombang ada KRJB, di Kediri ada SRKB, Caruban ada FBMC, Mojokerto ada SPRM. Saat ini, sudah ada forum aliansi sebanyak 4 organisasi di kawasan Matraman-plus, dan untuk tahun 2009 ini, di Nganjuk, kelompok-kelompok yang selama ini melakukan komunikasi, antara satu dengan lainnya akan mendeklarasikan sebuah forum aliansi baru.

Di Jombang, KRJB (Konsorsium Rakyat Jombang) pada tahun 2009 ini akan terus menjalankan kegiatan utama untuk mendorong kelompok-kelompok anggota memperkuat koperasi yang dimiliki atau mendorong untuk pendirian koperasi baru. Lembaga pra-koperasi selanjutnya akan diupayakan menjadi koperasi. Karena pada tahun 2009, KRJB akan mempersiapkan pendirian koperasi sekunder bagi koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya. Disamping itu, KRJB juga dijadikan sebagai

kendaraan dalam melakukan desakan politik kepada pembuatan kebijakan terkait dengan isu umum (generik) anggota.

Berkaitan dengan momentum politik 2009 ini, jaringan anggota KRJB akan turut mendukung calon DPD dari Dapil Jawa Timur Ir. Supartono. Dukungan diberikan secara realistis. Pemberian dukungan ini juga dijadikan sebagai alat untuk melakukan konsolidasi kekuatan KRJB. Jadi pemberian dukungan tidak semata-mata memilih, tetapi manfaat lain juga didapatkan yaitu semakin solidnya ikatan solidaritas di KRJB.

Di Kediri, untuk tahun 2009 ini SRKB (Serikat Rakyat Kediri Berdaulat) memiliki empat agenda yang dirumuskan dalam kongres yang telah dilakukan diawal tahun ini. Empat agenda itu adalah: pengembangan teknik pertanian, ekonomi dalam bentuk inisiasi dan pengembangan koperasi, konsolidasi untuk pengurangan resiko bencana dan, kesehatan bagi rakyat. Pengembangan koperasi dan advokasi kesehatan bagi rakyat merupakan isu yang dialami oleh hampir semua kelompok yang tergabung dalam SRKB, sehingga dua isu ini akan selalu dikoordinasikan oleh SRKB untuk diselesaikan secara bersama-sama.

Di Mojokerto, SPRM (Serikat Perjuangan Rakyat Mojokerto) akan terus melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu sebagai wadah bersama saling belajar. Pada tahun 2009 ini SPRM akan terus melakukan konsolidasi-konsolidasi untuk memperkuat kelompok-kelompok anggota, akan mulai mendorong pola pertanian berkelanjutan, dan menginisiasi lumbung keluarga. SPRM juga digunakan sebagai alat untuk melakukan bargain politik dengan penguasa politik di tingkat kabuapten, terutama persoalan-persoalan yang dirasakan oleh seluruh kelompok.

Di Madiun, FBMC (Forum Bersama Masyarakat Caruban), pada tahun 2009 ini melakukan konsolidasi dengan kelompok-

kelompok lain di Madiun, dan merencanakan pada tahun 2009 untuk mendeklarasikan forum aliansi yang lebih besar. Jika FBMC adalah forum setingkat kawedanan, maka untuk tahun 2009 ini akan dideklarasikan forum aliansi tingkat kabupaten Madiun. Pada tahun 2009, forum aliansi ini akan terus digunakan sebagai alat untuk melakukan advokasi berbagai kebijakan yang kurang mendukung kepada kelompok-kelompok anggota. Misalnya jika ada kelompok yang membutuhkan tambahan modal dalam menjalankan usaha ekonomi, maka forum aliansi ini digunakan sebagai alat penekan terhadap pembuat kebijakan untuk menyediakan tambahan modal kepada kelompok tersebut.

Di Nganjuk, awal tahun 2009 ini, akan membentuk forum aliansi yang melibatkan 10 kelompok dengan mengundang perwakilan dari KRJB dan SRKB sebagai pembicara untuk memberi pengetahuan dan pengalaman tentang forum aliansi. Kelompok-kelompok ini sebelumnya telah melakukan kegiatan bersama dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, yakni perkoperasian. 5 kelompok dari 10 kelompok tersebut telah melakukan hearing kepada Dinas Industri, Koperasi Perdagangan, Pertambangan dan Energi. Selain itu, kader-kader yang duduk sebagai pengurus di masing-masing koperasi di desanya, sering melakukan pertemuan rutin dalam satu bulan sekali di dalam organisasi Koperasi Kumandang.

Forum aliansi yang sudah berdiri dan yang akan didirikan oleh para penggerak di Nganjuk, pada tahun 2009 ini di upayakan untuk bisa saling bertemu. Usaha untuk membuat pertemuan antar forum aliansi di 5 kabupaten ini bertujuan untuk melakukan pendidikan perkoperasian dan membangun jaringan koperasi yang sudah terbentuk di masing-masing kabupaten. Selain itu, pendidikan kader yang selama ini dilakukan hanya dalam wilayah lokal/per kabupaten, dapat diperluas menjadi pendidikan kader wilayah Matraman-plus dimana masalah

yang dihadapi baik secara politik, ekonomi maupun sosial yang hampir sama. Sehingga, dengan pendidikan kader kawasan ini diharapkan memiliki perspektif solidaritas kader yang tidak hanya di kabupatennya masing-masing, melainkan solidaritas antar kabupaten.

Pertemuan antar forum aliansi ini juga akan menjadi forum bersama untuk saling belajar dan tukar pengalaman serta informasi, sehingga bisa menjadi jaringan koperasi antar komunitas di kawasan Matraman-plus. Pertemuan-pertemuan ini bisa mendorong terjadinya forum aliansi yang benar-benar kuat dan terstruktur. Sehingga, bisa menjadi alat untuk melakukan advokasi kebijakan ditingkat Provinsi Jawa Timur yang selama ini tidak bisa dilawan.

Adanya dominasi informasi yang hanya dikuasi oleh Media cetak dari Jawa Pos Group berupa Radar Kediri, Radar Blitar, Radar Mojokerto dan Radar Madiun, telah dilawan dengan adanya media alternatif yang bernama Soerat (Soera Rakjat Matraman) yang didirikan oleh Ngo di Matraman (plus di kota Tulungagung). Selama ini Radar tidak pernah mengungkap sisi penting inisiatif rakyat, Radar tidak pernah menulis tentang pentingnya rakyat bersolidaritas. Dan inilah yang akan dimuat dalam Soerat, media cetak alternatif yang akan mengupas solidaritas Matraman dengan merebut akses-akses ekonomi dan politik yang selama ini tidak pernah dimilikinya. Muncul kesepakatan untuk membuat media bersama antar NGO sebagai jawaban memperkuat organisasi rakyat dalam kawasan Matraman ini. Media bersama yang diterbitkan oleh NGO di wilayah matraman menjadi penanda untuk membangun sebuah informasi yang bisa saling menghubungkan antara komunitas dan antar kabupaten.

Memperluas Ruang Kedaulatan Rakyat

Simpul Jawa Tengah FBB Prakarsa Rakyat¹

Gambaran Umum

Tahun 2008 merupakan momentum terselesainya “konsolidasi” ekonomi dan politik di tingkat lokal. Pasca Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang dimenangkan pasangan Bibit Waluyo dan Rustriningsih, berbagai problematika menyangkut keputusan beberapa proyek besar menyangkut proyek infrastruktur, energi dan pertambangan telah terselesaikan dan berjalan tanpa “hambatan” berarti.

Semua proses politik ternyata tidak mampu menahan gempuran arus liberalisasi ekonomi yang berjalan masif. Ketika liberalisasi menemui titik kulminasi yang berujung pada krisis global, maka kelompok-kelompok lemah pun menjadi korban

1 Paper Dipersiapkan oleh Fatah Muria, pengurus Yayasan Perdikan

tanpa mendapatkan perlindungan layak dari perangkat negara yang diatur melalui proses elektoral.

Keputusan Kenaikan UMK tahun 2009 sebesar 12 % justru dijadikan dalih bagi pemilik modal untuk melanggengkan proses *fleksibilitiy market labour* melalui PHK dan informalisasi hubungan kerja. Kenaikan ini di kalangan buruh justru merupakan bentuk kemunduran dari penetapan UMK atas KHL di tahun 2009. Kalangan buruh menilai pemerintah dan pengusaha tidak konsisten dalam menjalankan kesepakatan capaian KHL 100 persen di tahun 2012.² Laporan yayasan Wahyu Sosial juga menyatakan sekitar 8.365 karyawan yang terpaksa di rumahkan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jawa Tengah, tidak semata karena krisis. Tetapi disebabkan adanya keinginan untuk mengganti status buruhnya menjadi buruh kontrak.

Kenaikan harga komoditi pokok yang diliberalisasi semakin menekan daya beli dan daya tahan kelompok masyarakat kelas bawah terhadap tekanan ekonomi. Keterkaitan harga gas sebagai bahan baku pupuk dengan pasar internasional merupakan akar keterbatasan stok pupuk telah membebani petani bukan saja pada biaya produksi namun juga semakin menunjukkan akutnya ketergantungan petani terhadap kapitalisasi pertanian.

Kelompok-kelompok marginal di perkotaan juga tidak lepas dari tekanan ekonomi meski dengan pola berbeda. Pedagang pasar tradisional bukan saja harus berhadapan langsung dengan para pemodal jaringan besar ritel yang merambah sampai ke tingkat kelurahan, namun juga beban biaya yang harus dibayar oleh kebijakan pemerintah kota. Pedagang-pedagang kecil dengan perlawanan secara sporadis menolak kenaikan beban-beban yang harus mereka tanggung akibat kebijakan pemerintah kota dengan dalih sudah terlalu banyak menunda kenaikan retribusi dan biaya

2 Laporan Situasi Perburuhan Yayasan Wahyu Sosial Januari 2009

listrik. Akibat kebijakan ini, banyak los di 47 pasar tradisional di Semarang kosong karena ditinggal pedagang. Sebagian besar memilih untuk "menginformalkan" diri untuk mengurangi tekanan biaya atau beralih pada aktivitas lain.

Di sisi lain, peningkatan kebutuhan hidup rakyat sendiri semakin terhimpit akibat peristiwa bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Tercatat ada sekitar 12 Kabupaten/kota Banjarnegara, Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, Kabupaten Kudus, Jepara, Pati dan Kota Semarang, Surakarta dan Grobogan tidak mengalami banjir dan tanah longsor. Degradasi lingkungan serta penataan guna lahan untuk penyediaan kepentingan kapital menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat bencana.³

Berbagai tekanan ini hanya mendapat respon secukupnya dari berbagai aparat negara yang memang selama ini menganggap urusan bencana sebagai proses *carity* dan ajang politik bukan sebagai bagian dari proses perlindungan hak masyarakat atas keselamatan dari bencana. Akibatnya pendekatan atas respon bencana pun tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang setiap tahun muncul, termasuk saat bencana berlangsung lebih parah dari tahun kemarin.

Kebijakan-kebijakan pro rakyat sebenarnya juga sudah dihasilkan melalui serangkaian dorongan dari masyarakat sipil, seperti Perda kekerasan berbasis gender dan kekerasan anak serta UMP 12 %. Kebijakan lain menyangkut pengawasan atas distribusi pupuk melalui serangkaian statement dan upaya politis untuk memotong tingkat distribusi yang dituduh biang keladi kekisruhan pupuk. Namun semua itu merupakan kompensasi dan konsesi bagi berbagai aktivitas kapital yang sangat eksploitatif, yakni rencana

3 monitoring media perdikan januari 2009

pembangunan pabrik semen di Pati dan pembangunan PLTA di Rembang yang telah berjalan. Kebijakan populis ini sangat tidak memadai untuk menandingi berbagai kebijakan pro modal yang bermunculan.

Pada tahun 2009, diperkirakan respon kelompok marginal semakin melemah dalam menghadapi krisis ekonomi. Namun sensitivitas terhadap kebijakan anti rakyat juga akan semakin meningkat dan apabila tidak terkonsolidasi dengan baik berpotensi menciptakan gerakan destruktif bila tidak ada support dari kelompok-kelompok gerakan.

Sementara, paska keputusan MK yang menetapkan suara terbanyak, praktis pertarungan antar caleg semakin ketat. Dalam konteks ini, maka upaya-upaya membangun kepekaan para kandidat atas isu-isu kerakyatan di satu sisi menjadi agak *set back*, namun di sisi lain telah mempengaruhi konstelasi pertarungan politik elektoral di semua level.

Partai-partai dominan seperti PDI-P, Golkar, PKB, PPP, PAN dan PKS praktis kehilangan daya untuk merespon isu-isu tersebut. Pada sisi lain, tingginya tingkat golput pada pilgub (45,7 %) dan berbagai pilkada di Jawa Tengah (di atas 40 %) belum bisa dijadikan tolok ukur untuk menentukan tingkat penolakan terhadap proses elektoral. Dalam berbagai hal, penolakan atas politik elektoral ini sangat kontradiksi dengan sikap yang secara ekplisit muncul ketika dihadapkan dengan kebutuhan riil yang dihadapi di level paling basis.

Pada sisi tertentu, informasi dan apatisisme yang tinggi terhadap pemilu belum cukup untuk menghadapi pola-pola yang berkembang dalam proses elektoral, termasuk misalnya politik uang dan mobilisasi buta. Belum lagi situasi dan kondisi pada pemilihan pilgub akan berbeda dengan pemilihan legislatif mengingat ada beberapa variabel yang berbeda khususnya daya dukung mobilisasi person.

Respon-Respon Gerakan Rakyat

Gerakan rakyat sendiri memiliki berbagai respon atas situasi yang ada. Namun gambaran akan situasi ekonomi sosial dan momentum politik akan menimbulkan varian-varian perlawanan yang jamak dan perlu cermati lebih mendetail sebagai bagian untuk menempatkan secara utuh respon gerakan rakyat atas krisis ekonomi dan politik elektoral.

Respon-Respon Sporadis

Respon sporadis merupakan bentuk berlawanan atas kebijakan yang anti kedaulatan rakyat yang muncul secara spontan dari korban langsung. Respon ini bersifat jangka pendek, reaksioner dan belum terorganisir baik maupun sistematis. Perlawanan seperti ini biasanya belum mendapatkan dukungan secara riil dari kelompok gerakan.

Respon-Respon Perlawanan Terorganisir

Perlawanan terorganisir ini juga untuk merespon kebijakan anti kedaulatan rakyat, khususnya rencana pembangunan pabrik semen di Pati. Berbagai upaya perlawanan ini sangat terorganisir dan meluas dan jangka panjang. Berbagai elemen gerakan rakyat masuk untuk membangun perlawanan baik melalui pengorganisasian, legal dan opini. Perlawanan ini mengambil posisi tegas dengan modal dan negara. Namun masih harus diuji lebih lanjut sejauh mana proses perlawanan ini terus berlangsung dengan telah terkonsolidasinya kekuatan pro pembangunan pabrik semen dari berbagai arah, termasuk aras kelompok masyarakat sipil.

Respon Perlawanan Budaya

Kemajuan teknologi dan perkembangan situasi media telah mengakselerasi berbagai corak "gegar budaya" yang membutuhkan respon khusus karena menyangkut pola relasi antar manusia yang berubah. Perubahan pola dan relasi komunikasi ini dimanfaatkan betul untuk membangun wacana baik yang mendukung proses liberalisasi pasar maupun yang pro kedaulatan rakyat. Perlawanan melalui dunia maya menjadi salah satu alternatif melawan kebuntuan pada media dominan.

Respon Perlawanan Pada Struktur Dominan

Struktur dominan harus didefinisikan bukan saja pada aras bangunan yang tampak itu sendiri (birokrasi, modal dan legislatif) namun juga turunan dari struktur dominan itu sendiri pada organisasi sipil yang mengadopsi cara dan kerja struktur dominan. Pasca 98, birokrasi dan state aparatus negara juga meliberalisasi diri dengan membangun bangunan-bangunan di level masyarakat sipil melalui program-program "pemberdayaan" yang mensyaratkan partisipasi masyarakat. Bangunan ini berlangsung masif karena menggunakan infrastruktur dari state aparatus. Hampir sebagian besar aktivitas ini steril dari "aktivitas gerakan sosial" sehingga ketika membesar justru menjadi kontra produktif bagi pembangunan gerakan rakyat itu sendiri.

Gerakan pro kedaulatan rakyat perlu merespon untuk "memanfaatkan" infrastruktur turunan sistem dominan ini dengan masuk dan mengambil alih sebagian besar kerja-kerja dari sistem dominan bukan untuk melanggengkan namun membangun nilai dan tatanan dalam struktur tersebut.

Beberapa aktor gerakan di Semarang telah mencoba masuk dalam kerja-kerja pembuatan institusi penanganan banjir yang

masif dilakukan pemerintah dengan melibatkan komunitas di 10 kelurahan yang menjangkau 100 ribu penduduk di Semarang. Nilai-nilai demokrasi, transparansi dan pro rakyat menjadi hidden agenda dengan memanfaatkan infrastruktur maupun logistik dari sistem dominan. Tantangan dari aktor gerakan rakyat untuk masuk dalam wilayah ini adalah memahami dengan benar idiom-idiom sistem dominan untuk kemudian diterjemahkan dalam bentuk perlawanan yang lebih halus namun menyentuh substantif dari nilai-nilai kedaulatan rakyat.

Pertimbangan lain dari strategi ini juga mempertimbangkan refleksi paska 98 ketika upaya membongkar total bangunan lama justru berujung pada semakin terfragmentasinya masyarakat sipil sehingga menyedot perhatian dan sumber daya aktor gerakan sosial sendiri. Refleksi ini kemudian dikuatkan dengan pengalaman gerakan buruh yang juga terfragmentasi dengan menjamurnya serikat-serikat buruh baru paska perpecahan di serikat buruh dominan. Ketimbang energi habis untuk menghadapi fragmentasi antar kelompok sipil, salah satu langkah cukup radikal justru diambil aktor gerakan sosial dengan "mendemokratis"kan beberapa serikat buruh yang masih cukup kuat infrastruktur dan jaringan basis untuk secara bertahap diperkuat institusi dan manajemen gerakan.

Upaya lain adalah memasuki ruang-ruang institusi yang dibangun oleh negara akibat tekanan dari aktor gerakan rakyat, misalnya pada institusi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun bencana.

Respon-Respon Intervensi Pada Ruang Politik

Pemilu tahun 2009 perlu direspon oleh aktor gerakan melalui berbagai strategi untuk mendesak agenda gerakan

rakyat secara lebih tersistem. Langkah strategis ini bukan saja mencakup intervensi luar, namun juga terlibat dalam memperkuat dukungan kepada aktor-aktor politik yang mampu bekerja untuk pro kedaulatan rakyat. Dukungan ini mencakup peningkatan kapasitas yang mengelaborasi kerja-kerja gerakan dengan logika politik yang berkembang. Ketidakmampuan aktor gerakan rakyat dalam memahami logika politik selama ini menyebabkan rendahnya tingkat akomodatif aktor gerakan politik terhadap isu-isu pro kedaulatan rakyat.

Dalam kaitan ini, gerakan rakyat perlu merespon berbagai aspek sebagai bentuk perlawanan yang mungkin, antara lain : Multi strategi sebagai respon atas mono-strategi yang selama ini dikembangkan pada perspektif advokasi; Multi sektor dan wilayah ; Multi stakeholder, artinya area atau medan pertarungan bukan saja ditarik pada ruang rakyat sebagai imbas pada penanganan kasus namun juga masuk dan melihat lebih jauh proses yang terjadi di Eksekutif dan Legislatif dan kaum intelektual, termasuk memanfaatkan infrastruktur dan program birokrasi untuk membangun basis-basis gerakan rakyat secara lebih massif. Terakhir, mencari alternatif resource gerakan di luar resource konvensional

Senjakala Gerakan Rakyat

Simpul Bandung FBB Prakarsa Rakyat¹

Gerakan rakyat semakin hari semakin terbenam, sementara cengkraman kapitalisme dan kekuasaan penyelenggara negara yang menindas terus berganti rupa dan semakin mendapat bentuknya yang matang. Siapa dan di manakah sebenarnya rakyat itu berada? Ketika tumpukan kertas dan kwitansi menjualnya di laci-laci para korporasi dan lembaga donor yang konon berniat mulia membantu keberlangsungan demokrasi.

Sebuah ketabuan pada masa Soeharto; elit politik dan birokrasi terjun ke kampus-kampus, apalagi sampai memberi dukungan moral dan uang kepada para mahasiswa yang akan membawa petaka bagi keberlangsungan kekuasaan. Lihat sekarang. Mereka begitu piawai memainkan isu, seolah-olah merangkul para aktivis kampus. Ini persis seperti cara neoliberalisme bersekutu dengan kekuatan lokal untuk merampas hak-hak warga negara.

Di Bandung misalnya, masyarakat miskin semakin tak punya pilihan dan tak berkuasa atas hidupnya. Si orang gunung

1 Paper dipersiapkan oleh Mulyani Hasan

yang jauh di utara kota, kini tak tentram lagi. Dia terdesak oleh keinginan para saudagar kaya yang bermimpi hidup di gunung dengan kemewahan. Dibangunlah hotel dan villa-villa atau perumahan elit lengkap dengan restoran mahal dan pusat perbelanjaan. Si miskin tak punya pilihan, sebab negosiasi dilakukan oleh para penguasa lokal. Dia pergi ke kota dengan secuil uang ganti rugi yang tak bisa mengganti hidupnya saat di desa. Di bagian selatan kota, di mana sawah-sawah berada sudah diduduki oleh pabrik-pabrik yang tidak tahu etika pembangunan dan meremehkan keselamatan lingkungan. Banjir melanda kawasan penduduk miskin, air tanah disedot habis. Warga kehilangan sumber hidupnya. Di manakah peran penyelenggara negara, kalau untuk air saja rakyat harus beli?

Lembaga-lembaga demokratis juga tak bisa diharapkan lagi. Mereka sudah dijejali oleh kepentingan neoliberalisme; produk undang-undang turunan sudah semakin vulgar menampilkan penghianatannya pada konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945, seperti Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Perkebunan dan lain-lain.

Di sinilah peran gerakan alternatif itu seharusnya, ketika lembaga-lembaga publik sudah menjadi predator, rakyat sudah terhempas dari politik legal.

Bagaimana gerakan alternatif itu menggeliat?

Sepuluh tahun setelah kegagalan reformasi, embrio-embrio gerakan yang sudah tumbuh nampaknya lahir prematur. Kondisi itu bisa jadi akibat prustasi. Gerakan kehilangan arah akibat mentahnya ideologi. Rahmat Jabaril seorang aktivis asal Bandung menemui kegelisahan dan kesepian tiada tara. Dia beranjak dari satu komunitas ke organisasi-organisasi kerakyatan. Banyak

kawan. Banyak lawan. Namun dia menemukan sebuah kenyataan bahwa sebenarnya rakyat sudah jauh ditinggalkan. *Deal* politik dan negosiasi menjadi barang murahan yang menyempal kesadaran. Pada masa pemburuan aktivis oleh rezim kejam Soeharto, dia juga target. Kenyataan-kenyataan itu telah membuat dia mampu membaca situasi ketika itu—sudah tak kaget melihat gelagat tak beres di kalangan aktivis, konspirasi dan penghianatan terbukti dalam waktu singkat, tak perlu menunggu waktu berpuluh-puluh tahun. Tapi sayangnya, itu semua ditutupi hingga berlumut. “Itu seperti korupsi gerakan,” ujar Jabaril. Dia kini turun ke desa-desa, mengadvokasi warga yang terancam digusur oleh pembangunan hotel-hotel, “Kita harus mencari rakyat,” katanya. Belakangan, Jabaril membentuk sebuah forum; Koalisi Masyarakat Bandung Bermartabat atau KMB yang berisi 36 organisasi yang sepakat menolak pembangunan di Babakan Siliwangi. Tapi forum itu meleleh begitu saja. Justru organisasi-organisasi di dalamnya lebih sibuk menjalankan program lain yang didapat justru setelah mereka populer di mata Lembaga Swadaya Masyarakat pendonor setelah bergabung dalam forum itu.

Setelah sepuluh tahun reformasi suara-suara kritis seperti tidak mendapat panggung. Dia hanya menggema di kavling-kavling gerakan itu sendiri. Meminjam istilah Nurhady Sirimorok, seorang peneliti asal Makassar; aktivis dan gerakan seperti binaragawan—melatih otot untuk dipamerkan bukan digunakan untuk kepentingan yang fungsional. Nurhady menyarankan para aktivis turun ke desa. Melakukan penyadaran dan bergaul dengan masyarakat desa. Sementara menurut Jabaril, ideologi akhirnya menjadi simbolis bukan perilaku. Reformasi bukan hanya gagal, kata Jabaril. Tapi dia juga telah menjatuhkan labirin gerakan ke titik minus. Tak ada perubahan samasekali. Malah memberi kesempatan bagi Orde Baru untuk mengubah muka.

Aksi demonstrasi belakangan ini menunjukkan kentalnya sektarianisme di tubuh organ-organ gerakan. Mereka semakin

mengeklusifkan diri dengan bendera-bendera—di luar dirinya, yang lain tak boleh ikut. Memang, aksi unjuk rasa mengindikasikan adanya perlawanan terhadap sebuah kebijakan yang menindas. Tapi jika itu bersifat pragmatis justru akan rentan dimainkan oleh kepentingan yang bertujuan memecah belah. “Kita semua mendukung aksi, tetapi aksi haruslah direncanakan dengan matang, dengan tujuan yang nyata dan objektif bila ingin berhasil. Jika tidak, kita akan berakhir dengan aksi tanpa arah,” kata Phil Mitchinson dalam artikelnya berjudul *Marxisme dan Aksi* (lihat www.marxist.com).

Hari buruh sedunia, 1 Mei 2008 dibarengi dengan kenaikan bahan bakar minyak untuk kesekian kalinya oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya menjadi momentum penting dalam gerakan massa. Tapi apa yang terjadi, aksi massa hanya selesai pada tingkatan seremonial atau ritual tahunan. Ini indikasi bahwa belum ada kesadaran massif dan perencanaan yang matang dan terarah. Wawancara saya dengan beberapa buruh yang ikut aksi memperlihatkan betapa mereka hanya selesai pada keinginan perbaikan upah. Kita akan cukup senang jika upah naik tanpa melihat bahaya dari eksploitasi tenaga kerja. Pengorganisasian buruh disiapkan sebatas memprotes dan turun ke jalan. Tentu kita senang dengan perubahan-perubahan kecil itu dan itu penting, karena itulah yang akan membawa kepada perubahan yang lebih besar. Namun dengan perencanaan dan kematangan dalam setiap tindakan.

Tidak bisa terelakkan bahwa perlawanan-perlawanan lokal terus berkecambah di tingkatan-tingkatan kecil, meski kekuasaan dan sistem terus membasminya. Lihat saja, menjelang pemilihan umum 2009 ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik makin tampak. Wacana golput (golongan putih) ramai di mana-mana. Para elit partai tentu saja tidak senang, mereka merangkul lembaga-lembaga politik untuk memerangi golput,

hingga lembaga agama ikut-ikutan mengecam golput dengan argumen-argumen dogmatis.

Forum Aktivistis Bandung atau FAB mendeklarasikan diri di penghujung 2008. Ini adalah sebuah respon para aktivis menyikapi pemilihan umum. Melihat banyaknya para aktivis yang masuk ke partai-partai politik, forum ini berkehendak membuat tim sukses bagi mereka para aktivis yang akan naik panggung politik. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan tertentu, misal verifikasi dan tahapan-tahapan ujian bagai para calon. Mari kita lihat sejauh mana forum itu dapat mempengaruhi dan mengontrol calon legislator yang diusungnya? Sejauh mana pengaruhnya terhadap keputusan partai politik tempat para aktivis itu bertarung? Bagi Jabaril, itu adalah keputusan yang terburu-buru dan reaksioner yang kita sendiri tidak tahu apa keputusan itu.

Pemilihan umum 2009 ini memang panggung bagi para aktivis selain para artis. Partai-partai politik yang mempunyai sejarah kelam dalam penindasan, ramai-ramai merangkul para aktivis, mulai dari aktivis gerakan kiri, aktivis lingkungan hingga aktivis perempuan yang dulu dimusuhi dan ditangkap. Ini tentu saja peluang bagus untuk melakukan perubahan dengan merebut kekuasaan. Tapi bagaimana dengan keputusan-keputusan partai politik yang korup? Bukankah keputusan partai lebih determinan daripada keputusan personal. Kita memang tidak bisa menilainya dalam waktu singkat.

“Pemilu ini adalah media pengelabuan demokrasi,” kata Jabaril. Rakyat tidak sebenar-benarnya dilibatkan dalam politik. Rakyat diberi janji janji dan sedikit rupiah, disuruh memilih lalu selesai. Soal partai itu berpihak pada rakyat atau tidak, itu urusan lain, urusan nanti. Kita tidak diberi kesempatan bahkan kesempatan untuk tidak memilih (golput).

Bagaimana dengan Gerakan Perempuan?

Tamparan keras terhadap gerakan perlawanan perempuan terjadi saat pengesahan undang-undang pornografi tahun lalu. Di Bandung, gelombang aksi perlawanan menentang undang-undang itu terjadi secara besar-besaran. Bahkan jauh sebelum pengesahan, organisasi-organisasi perempuan melakukan kampanye dan diskusi menentang dan berusaha menggagalkan undang-undang itu. Mereka di antaranya; Institut Perempuan, Jaringan Mitra Perempuan dan Jaringan Pekerja Kemanusiaan. Meski seiring dengan gelombang perlawanan itu, arus gerakan pendukung juga deras. Mereka yang menolak menilai pengesahan tersebut sebagai bentuk legitimasi atas pemerjaraan dan pengucilan terhadap perempuan. Sementara yang mendukung meyakini bahwa aturan itulah jawaban atas persoalan moral yang melanda bangsa Indonesia.

Panggung politik juga membuka arena akbar bagi perempuan. Quota 30 persen perempuan jadi dagangan politik— yang penting ada perempuan. Tapi persoalan-persoalan mendasar yang banyak dialami oleh perempuan jarang disentuh; soal kemiskinan, soal perdagangan dan perbudakan perempuan.

Di Amerika Latin, yang mengalami dekade perubahan sosial yang mirip dengan Indonesia, kondisi ini juga terjadi. Tapi gerakan perempuan di beberapa negara di Amerika Latin mampu memobilisasi dirinya sendiri dan menyumbang perubahan yang berarti bagi kehidupan sosialnya.

Seorang ahli ilmu politik Uruguay, *Corina Pereli* mengkritik gerakan perempuan pasca jatuhnya rezim militer di negara itu. Pereli melihat betapa kekuatan perempuan hanya bisa berbagi dengan kaumnya sendiri.

“Tidak ada yang berbau politis, setidaknya menurut istilah yang digunakan partai politik, mereka dipersiapkan untuk

mengubah keadaan mereka sendiri, bukan untuk mengubah dunia atau menggulingkan rezim.” (lihat dalam buku *Gerakan Perempuan di Amerika Latin*)

Faktanya, gerakan perempuan hanya memperpanjang pencitraan ortodoks, bahwa kaum kita ini hanya bisa bicara sendiri, dan dapat melihat persoalan secara keseluruhan, individualistik seperti peran pribadinya di lingkungan rumah tangga.

Dalam konteks gerakan perempuan saat ini, kita tidak lagi bicara seberapa banyak perempuan yang bisa merebut sektor kerja yang dikuasai laki-laki atau bicara soal hak bicara dan bereskrpresi, tapi sudah saatnya kaum perempuan melakukan gerakan perubahan sistemik. Perempuan mengambil langkah politik yang bisa menentukan kebijakan, bukan hanya sub-ordinat dari organisasi-organisasi yang bersifat umum. Gerakan perempuan yang bukan hanya mementingkan eksistensi dirinya, tapi juga sebuah gerakan perlawanan terhadap penindasan manusia.

Ranu Klakah dan Krisis Global

Simpul Tapalkuda Jawa Timur FBB Prakarsa Rakyat¹

Ranu Klakah merupakan objek wisata danau vulkanik di desa Tegalrandu, kecamatan Klakah, kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Berada pada ketinggian ± 196 Meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 25°C. Sebagai objek pariwisata, Ranu Klakah memiliki segudang pesona estetika alam yang layak dijual. Selain karena keindahannya, letaknya pun cukup strategis. Di sana bermukim 4493 penduduk etnis Madura yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, pembudidaya ikan, petani dan buruh. Namun demikian, sektor pariwisata tak memberikan banyak keuntungan secara ekonomi bagi penduduk sekitar.

Krisis ekonomi global yang melanda saat ini, ibarat kanker yang menggerogoti persendian sumber-sumber penghidupan rakyat, tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di Ranu Klakah. Harga sembako (sembilan bahan pokok) terus naik, pupuk langka dan mahal demikian halnya bahan bakar minyak, para petani

1 Paper dipersiapkan oleh A'ak Abdullah Al-Kudus, Direktur Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

gagal panen, lingkungan rusak dan terjadi ketimpangan akses terhadap sumber daya alam. Semua itu secara pelan namun pasti menyeret masyarakat ke jurang kemiskinan yang dalam.

Di Ranu Klakah banyak angkatan usia kerja yang masih atau terpaksa menganggur karena tidak ada peluang kerja yang memadai, anak usia sekolah banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, pencurian hewan ternak meningkat, masyarakat berbondong-bondong menjadi buruh migran. Itulah fakta ambruknya potensi kesejahteraan, ketahanan dan keberlanjutan kehidupan rakyat di Ranu Klakah.

Menjadi petani di Ranu Klakah saat ini nyaris menjadi pilihan terpaksa. Harga benih mahal, pupuk langka, sementara harga jual panen merosot tajam. Kondisi itu diperparah dengan keterbatasan air irigasi yang berasal dari danau Ranu Klakah. Danau yang selama ini mengairi sekitar 400 Hektar sawah, kini debit airnya kian hari kian menurun disebabkan lumpuhnya sejumlah titik penting sumber mata air. Dari 32 mata air yang ada di pinggiran Ranu Klakah, saat ini yang masih mengalirkan air tinggal sekitar 4 sumber mata air saja. Matinya sumber mata air tersebut imbas dari insiden penggundulan hutan di lereng Gunung Lemongan kurun waktu 1998 sampai 2002. Sekitar 10.000 Hektar hutan lindung dan hutan produksi milik perhutani dibabat habis oleh pihak yang tidak diketahui identitasnya. Akibatnya, lahan persawahan seluas 2.500 m² di Ranu Klakah saat ini hanya bisa menghasilkan sekitar Rp1.500.000 saja pertahunnya.

Hasil dari menanam padi dan palawija yang rendah itu menyebabkan banyak petani di Ranu Klakah mengganti tanamannya dengan kayu Sengon (*Albasia*). Memang sementara ini kayu sengon menjadi salah satu primadona tanaman kayu. Harga jualnya relatif stabil dibanding dengan tanaman padi dan palawija. Sayangnya, tanaman ini membutuhkan waktu

enam tahun untuk bisa dipanen. Artinya sepanjang enam tahun itu, para petani harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di sinilah kemudian muncul persoalan baru. Banyak di antara mereka menjadi tukang ojek, beca atau buruh di pabrik-pabrik. Jika terdesak, mereka meminjam uang ke bank atau rentenir. Tidak sedikit pula dari mereka yang kemudian memilih untuk menggadaikan atau menjual kebun sengonnya yang masih usia 1-3 tahun ke pihak pemodal atau pengusaha kayu. Berakhirlah harapan memanen kayu primadona itu.

Menjadi nelayan di Ranu Klakah tidak lebih baik. Sebagai nelayan, mereka sangat bergantung pada alam. Jika sedang banyak ikan, mereka bisa mendapatkan 2-3 kg ikan perhari. Tapi jika ikan sedang sedikit, mereka sering kali hanya mendapatkan 1 kg ikan saja. Sedangkan harga jual ikan hasil tangkapan liar perkilonya hanya berkisar Rp 8.000. Di sisi lain, para pembudidaya ikan di kolam-kolam terapung (karamba) juga sering mengeluhkan tingginya harga pakan (*pokhpan*) dan sulitnya mencari bibit ikan. Untuk mendapatkan bibit ikan, selama ini para pembudidaya masih mengandalkan dari luar daerah Lumajang, seperti dari Kediri, Mojokerto dan Pasuruan.

Meskipun harga jual ikan hasil budidaya di karamba lebih mahal Rp 6.000 /kg dibandingkan dengan harga jual ikan hasil tangkapan liar, tetap ada kesamaan persoalan antara nelayan tradisional dan pembudidaya ikan di Ranu Klakah—setiap Juli hingga Agustus Ranu Klakah mengeluarkan belerang yang menyebabkan sebagian besar ikan-ikan yang ada di danau tersebut mati keracunan. Peristiwa ini oleh masyarakat di sana disebut ”musim koyok”.

Dari mata rantai persoalan sosial ekonomi dan lingkungan ini menyebabkan sebagian masyarakat yang tidak memiliki daya tahan yang cukup kuat di Ranu Klakah memilih menjadi buruh di

luar negeri atau di kota-kota besar di Indonesia. Kasus-kasus yang menimpa mereka pun marak, seperti eksploitasi tenaga, penipuan, tidak diupah.

Inisiatif Kecil untuk Mimpi Besar

Industri pariwisata di Indonesia ibarat pohon yang baru tumbuh. Berbeda halnya dengan industri pariwisata di Eropa, Amerika Latin dan negara-negara di kawasan Pasifik, di mana industri kepariwisataan merupakan salah satu mesin ekonomi yang penghasilannya melampaui industri pertanian seperti gula, kopra atau kopi sebagai sumber pendapatan nasional nomor satu. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa industri kepariwisataan tidak mengambil alih industri lainnya, bahkan ia merupakan suatu industri yang boleh dibilang berdiri sendiri yang pada hakikatnya membantu serta melengkapinya dan juga mempercepat pertumbuhan industri-industri lainnya. Idealnya, ia tidak akan mengeksplorasi apalagi mengeksploitasi sumber daya alam suatu negeri. Bahkan sebaliknya, ia dapat memberi atau menambah lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, seperti usaha akomodasi (hotel, losmen, *cottage*), warung atau restoran, jasa transportasi, penerjemah, seniman, pengrajin, travel dan biro perjalanan serta berpuluh-puluh bidang kerja dan jasa lainnya. Di luar itu, industri ini juga dapat menambah penghasilan negara melalui pajak.

Saat ini kecenderungan pasar global lebih mengutamakan pariwisata alami (*Natural Tourism*) dan Pariwisata Budaya (*Cultural Tourism*) sebagai tujuan wisata. Daerah yang memiliki sumber daya itu berpeluang besar untuk mengembangkan industri pariwisatanya. Ranu Klakah merupakan sumber daya wisata alami sekaligus budaya yang paling besar yang dimiliki oleh kabupaten Lumajang. Namun demikian tidak secara otomatis sumber daya

ini dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata unggulan, karena adanya beberapa masalah mendasar, seperti kelemahan infrastruktur, sumber daya manusia dan sebagainya.

Seorang kawan yang pernah datang ke Ranu Klakah berujar "Sungguh, ini adalah kepingan surga yang tersembunyi di Klakah." Pernyataan sederhana ini kemudian mengusik pikiran teman-teman di Ranu Klakah. Selama ini mereka menganggap Ranu Klakah biasa-biasa saja, dan tidak pernah menyadari ternyata Ranu Klakah bisa membuat orang lain terkagum-kagum dan terpesona. Untuk membuktikan pujian dari kawan tersebut, pada tahun 2004 sejumlah tokoh masyarakat di Ranu Klakah melakukan semacam studi banding ke tempat-tempat wisata danau yang ada di Jawa Timur, seperti ke Selorejo di Malang, Ranu Grati di Pasuruan, Telaga Sarangan di Magetan. Mereka baru sadar bahwa Ranu Klakah luar biasa dibandingkan dengan danau di daerah lainnya. Untuk sekadar diketahui, di sekitar Gunung Lemongan ini terdapat sedikitnya 30 danau/ranu. Namun yang paling mudah untuk dijangkau ada tiga ranu, salah satunya Ranu Klakah.

Beranjak dari kesadaran itu, masyarakat sekitar kemudian menggali berbagai inisiatif-inisiatif untuk mengoptimalkan Ranu Klakah sebagai tempat tujuan wisata. Agar proses penggalan inisiatif itu terkoordinasi dengan baik, dibentuklah Paguyuban Masyarakat Tegalrandu pada 30 Juli 2005, ketuanya Matruki, mantan kepala desa Tegalrandu.

Agenda awal dari lembaga itu memperkenalkan Ranu Klakah kepada masyarakat luas hingga ke mancanegara. Pada April 2006 diselenggarakan sebuah perhelatan bertema "Maulid Hijau". Acara itu gabungan dari kegiatan pelestarian lingkungan dengan beragam kegiatan seni budaya yang selama ini telah ada di masyarakat Tegalrandu, seperti penghijauan di sekitar Ranu

Klakah, kesenian tradisional lokal, upacara "Selamatan Desa" yang berlangsung turun temurun setiap tahun. Karena kegiatan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad, maka seluruh kegiatan tersebut dirangkai dan dilaksanakan secara berurutan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Perhelatan itu memang dirancang khusus untuk menjadi kegiatan tahunan, seperti Upacara *Kasodo* di Gunung Bromo atau Upacara *Sekaten* di Yogja. Sampai saat ini, perhelatan itu sudah berlangsung tiga kali.

Rencana-rencana itu ternyata berjalan tak semulus seperti saat menggagasnya. Persoalan dana menghambat kegiatan, sulit mendapatkan sponsor, juga keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola sebuah kegiatan. Persoalan lain muncul dari lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada 2 Januari 2008 melarang penyelenggaraan "Maulid Hijau" karena dianggap sesat oleh MUI. Kampanye penuduhan sesat terhadap "Maulid Hijau" oleh MUI ini tidak hanya melalui surat fatwa, melainkan juga melalui ceramah-ceramah di kelompok-kelompok pengajian dan di khutbah-khutbah Jum'at di beberapa masjid.

MUI beralasan, nama "Maulid Hijau" dan kegiatan Larung Sesaji dalam Selamatan Desa memenuhi 10 kriteria aliran sesat yang dikeluarkan oleh MUI pusat, yakni: (1) Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-qur'an dan Sunnah; (2) Mengingkari otentisitas dan kebenaran isi Al-qur'an; (3) Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.

Fatwa itu terbukti cukup efektif untuk menimbulkan pro dan kontra di masyarakat tentang keabsahan kegiatan "Maulid Hijau" dalam konteks agama. Dampaknya, banyak masyarakat yang ragu terlibat dalam kegiatan itu, di samping juga karena adanya teror dan ancaman dari sekelompok masyarakat yang

mengatas namakan dirinya Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang di dalamnya berisi beberapa preman dan fungsionaris dari beberapa partai seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kasus itu sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan media massa.

Untuk melawan opini miring itu, panitia penyelenggara “Maulid Hijau” akhirnya menerbitkan dokumen tandangan berupa tanggapan tertulis yang diedarkan ke seluruh kelompok masyarakat di kecamatan Klakah dan sekitarnya. Dokumen tersebut diberi judul “Melawan Fitnah untuk Menjaga Persatuan Umat”. Tak cukup dengan itu, Panitia juga mengirimkan somasi kepada MUI, menuntut MUI untuk mencabut fatwa tersebut dan meminta maaf kepada warga masyarakat di Ranu Klakah karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Namun karena somasi tersebut sama sekali tidak ditanggapi, bahkan dijawab dengan ejekan dan cibiran, maka panitia penyelenggara “Maulid Hijau” pada 29 Januari 2008 mempidanakan kasus fatwa ini ke polisi dengan enam tuduhan sekaligus [1] Penghinaan Pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP; [2] Fitnah Pasal 311 ayat 1 KUHP; [3] Penghasutan Pasal 161 ayat 1 KUHP; [4] Menebar kebencian Pasal 157 ayat 1 KUHP; [5] Pemalsuan Surat Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP; [6] Terorisme UU nomor 15 / 2003.

Sayangnya, sampai satu tahun berlalu, kasus ini tidak pernah ada kelanjutannya. Entah ada apa dibalik ini semua?

Namun demikian, panitia penyelenggara dan sebagian masyarakat yang masih memiliki keberanian dengan segala kemungkinan dan resiko, pada 23 - 25 Mei 2008, “Maulid Hijau 2008” tetap diselenggarakan sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan sebelumnya.

Kembali kepada persoalan pariwisata, bahwa pada tahun 2003 *World Travel and Tourism Council* (WTTC) menerbitkan

sebuah dokumen yang menggambarkan arah perubahan hubungan antara pelaku kepariwisataan. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan:

1. Kemitraan yang koheren antara para pelaku kepariwisataan, masyarakat, pengusaha dan pemerintah
2. Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat.
3. Berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat.

Di samping itu, sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional tahun 2005 – 2009, maka kebijakan dalam pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan untuk:

1. Peningkatkan daya saing destinasi, produk dan usaha pariwisata nasional.
2. Peningkatan pangsa pasar pariwisata melalui pemasaran terpadu di dalam maupun di luar negeri.
3. Peningkatan kualitas, pelayanan dan informasi wisata.
4. Pengembangan *incentive system* usaha dan investasi di bidang pariwisata.
5. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata.
6. Pengembangan sumber daya manusia (standarisasi, akreditasi dan sertifikasi kompetensi).
7. Sinergi *multi-stakeholders* dalam desain program kepariwisataan.

Berpijak pada dokumen *World Travel and Tourism Council* (WTTC) serta Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan

Kepariwisata Nasional tahun 2005-2009 tersebut maka dalam rangka meningkatkan daya saing serta daya tarik Ranu Klakah, keberadaan Paguyuban Masyarakat Tegalarandu dengan sekian inisiatif dan program-programnya seperti yang tersebut di atas menjadi penting keberadaannya.

Melestarikan Lingkungan dan Mensejahterakan Masyarakat

Kerusakan lingkungan kini mengarah pada krisis ekologi yang ditandai dengan perubahan ekosistem alam menjadi ekosistem artifisial. Kondisi itu telah menghancurkan fungsi-fungsi ekologi dan keseimbangan alam. Akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber-sumber penghidupan seperti agraria dan sumber daya alam semakin jauh dan mengakibatkan bencana seperti banjir bandang yang terjadi di awal tahun 2006, kebakaran hutan dan lahan, juga krisis air minum seperti yang kini terjadi di kecamatan Klakah.

Melalui kegiatan “Maulid Hijau”, masyarakat mulai menggalakkan kembali penanaman pohon di sekitar Ranu Klakah dengan harapan menghidupkan kembali mata air yang mati di pinggiran Ranu Klakah. Sejak pelaksanaan “Maulid Hijau” tahun 2006 sampai 2008 telah ditanam puluhan ribu pohon “pelestari air” dan pohon buah-buahan. Target penghijauan untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang adalah Gunung Lemongan yang berjarak sekitar 5 km dari Ranu Klakah. Gunung Lemongan ini adalah jantung bagi sekitar 30 danau yang ada di sekitarnya termasuk juga Ranu Klakah. Di Gunung Lemongan yang memiliki ketinggian 1676 dpl ini terdapat 2.000 hektar hutan lindung yang gundul akibat penebangan liar. Sementara 8.000 hektar sisanya adalah hutan produksi yang dikelola oleh perhutani sebagian besarnya sudah direboisasi.

Dalam rangka pembukaan “Maulid Hijau” tahun 2009 panitia menandai dengan kegiatan penghijauan pada 28

Desember 2008 di Gunung Lemongan. Dalam sesi diskusi pada awal kegiatan lahirlah Deklarasi Gunung Lemongan. Salah satu rekomendasi dari deklarasi tersebut adalah membentuk organisasi relawan untuk pelestarian lingkungan dengan nama “Laskar Hijau”. Organisasi ini beranggotakan beragam individu dari beragam kelompok masyarakat yang hadir pada saat itu, seperti kelompok pecinta alam kabupaten Lumajang, anggota Serikat Petani Lumajang, kelompok penggemar motor *scooter* SSC’06 dari Lumajang dan PROVEC Probolinggo, mahasiswa dari STKIP Lumajang, Universitas Widyagama Lumajang dan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang, Green Care SMA 1 Tempeh dan SMA 1 Klakah, Perguruan Rakyat Merdeka, Sekolah Rakyat Merdeka, dan dari berbagai elemen masyarakat lainnya.

Sejak dibentuknya, Laskar Hijau secara ajeg melakukan penghijauan di Gunung Lemongan pada setiap hari minggu sampai dengan April 2009. Hingga saat ini, Laskar Hijau telah berhasil menanam 100 Hektar lahan gundul di area hutan lindung Gunung Lemongan dengan jumlah pohon tertanam 120.000 pohon. Dari jumlah tersebut komposisi jenis pohon terbanyak adalah pohon buah-buahan, yakni sekitar 70%. Kenapa pohon buah? agar masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang besar tanpa harus menebang pohon lagi di hutan, seperti sebelumnya. Jenis pohon buah yang banyak ditanam di Gunung Lemongan adalah duren, nangka, mangga, manicu, petai, asem, jambu, salak, sukun dan sirsak.

Sedangkan tanaman pelestari air yang ditanam seperti beringin, nyamplung, bambu, aren, trembesi, salam, saga merah, gayam dan johar. Selain melakukan penghijauan, Laskar Hijau juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar hutan Gunung Lemongan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di Gunung Lemongan. Sosialisasi ini dilakukan terutama kepada kelompok-kelompok kegiatan masyarakat yang ada di desa-

desa penyangga hutan seperti desa Papringan, desa Sumber Petung, desa Sumber Wringin dan desa Salak.

Bentuk sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan serta dampak rusaknya lingkungan terhadap kelanjutan hidup manusia. Rencananya. Sosialisasi ini juga akan dilakukan melalui media-media macam film dokumenter dengan model *layar tancap*. Buah hasil panen dari pohon-pohon itu diperuntukkan untuk masyarakat sekitar dengan syarat, masyarakat harus ikut merawat poho-pohon itu termasuk tidak boleh menebangnya.

Bibit pohon didapat dari hasil pembibitan yang mereka lakukan sendiri bekerja sama dengan Sekolah Rakyat Merdeka, Sekolah Dasar Negeri 03 Ranuyoso, Sekolah Dasar Negeri Tigasan Wetan 04 dan dengan beberapa kelompok masyarakat dan individu yang memiliki kepedulian terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh “Maulid Hijau”. Selain mereka juga mendapat bantuan bibit dari pemerintah kabupaten Lumajang sebanyak 2000 bibit pohon dan dari Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Klakah sebanyak 3000 bibit pohon. Ada juga jadwal memburu biji-bijian buah di kebun-kebun milik warga, di pasar-pasar bahkan di tempat pembuangan akhir sampah setiap minggu. Biji-bijian tersebut nantinya akan dikembangkan di lahan pembibitan Laskar Hijau untuk dijadikan stok penghijauan tahun-tahun berikutnya.

Meretas Pasar Melalui Koperasi

Di Ranu Klakah jumlah masyarakat pembudidaya ikan air tawar jenis nila dan mujaer, terhitung cukup besar. Saat ini ada sebanyak 300 petak tambak terapung (*karamba*) di Ranu Klakah dengan omzet keseluruhan sekitar Rp 1.2 milyar pertahun. Namun

demikian, ketergantungan para pembudidaya ikan tersebut terhadap pakan olahan pabrik (*pokhpan*) dan bibit ikan dari luar daerah kabupaten Lumajang masih tinggi. Untuk menjawab persoalan itu, pada November 2008 para pembudidaya ikan berkumpul dan bersepakat untuk membentuk sebuah koperasi dengan nama Koperasi Pembudidaya Ikan Ranu Klakah.

Koperasi ini memiliki empat unit kegiatan [1] Unit Pembibitan; [2] Unit Pengolahan Pakan; [3] Unit Pengembangan dan [4] Unit Simpan Pinjam. Unit Pembibitan telah memiliki lahan uji coba pembibitan seluas 3500 m². Dari lahan kecil ini diharapkan dapat menjadi *pilot project* bagi penyediaan bibit ikan di tingkat lokal agar tidak lagi tergantung dengan bibit ikan dari luar daerah. Indukan yang rencananya akan ditangkarkan di sini adalah nila jenis *jatimbulan* dari Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang. Sedangkan untuk Unit Pengolahan Pakan, saat ini sedang diujicobakan beberapa formula pakan yang mengandalkan bahan baku dasar dari sekitar Ranu Klakah seperti singkong, ketela rambat, talas, dan katul. Proses ini diharapkan akan menghasilkan formula pakan yang kualitasnya setara dengan buatan pabrik namun bisa dijangkau dengan harga lebih murah.

Unit pengembangan koperasi ini menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang dan kelompok mahasiswa perikanan “Baracuda” yang ada di Malang. Salah satu bentuk pengembangan yang dilakukan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang adalah rencana pembangunan fasilitas pasar ikan air tawar sebanyak 10 kios menggunakan dana hibah dari Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk pengembangan sumberdaya, telah beberapa kali dilakukan pelatihan tentang teknik budidaya ikan air tawar dengan para aktivis dari Baracuda. Sementara Unit Simpan Pinjam belum diaktifkan karena belum ada dana koperasi yang dapat dikelola.

Penutup

Krisis ekonomi global, krisis ekologi, krisis politik dan krisis sosial budaya, tidak bisa tidak harus diakui sebagai virus penyakit mematikan yang bisa mengakibatkan ambruknya kedaulatan rakyat secara menyeluruh. Rakyat kehilangan hak untuk menentukan nasibnya sendiri, sumber-sumber penghidupan dirampas melalui kebijakan deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi. Rakyat tak lagi berkuasa atas negaranya karena kekuatan modal telah merampasnya.

Masyarakat di Ranu Klakah sudah tak lagi berharap pada pemilu tahun 2009 untuk mengubah nasibnya. Bagi mereka, pemilu maupun pilkada tak lebih dari sebuah industri yang berdiri sendiri yang pada ujungnya hanya menyisakan omong kosong yang sama tentang rakyat yang berdaulat dan sejahtera. Pemilu hanyalah “pasar malam” untuk mencari duit recehan dari partai-partai yang butuh suara. Selebihnya, tak perlu dipikirkan lagi karena hanya akan bikin sakit hati.

Inisiatif-inisiatif kecil yang terus dikembangkan oleh masyarakat di Ranu Klakah baik di sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan pelestarian lingkungan, lambat laun akan menemukan bentuk pastinya. Tentu hal ini tidak bisa lepas dari ketekunan, kerja keras serta keteguhan untuk merebut kembali daulat rakyat yang telah dirampas oleh para kapitalis dan sistem yang tidak berpihak pada rakyat.

“Kalau kita harapkan tabib dari luar, kita menunggu orang yang tidak akan datang, Yang sanggup mengobatinya banyak atau sedikit ialah rakyat kita sendiri. Dan pokok segala usaha ialah kemauan yang tetap. Kemauan itulah yang harus kita bangkitkan. Itulah dasarnya self help yang senantiasa menjadi buah bibir kita. Rakyat kita sebagian besar adalah rakyat yang kena sugesti (pukau) ketidakmampuan. Pukul dan bunuh sugesti itu dengan propaganda dan contoh” (Hatta, 1933).

